WALIKOTA BANDA ACEH
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2012 - 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh kurun waktu 5 (lima) tahun;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi 3 (tiga) tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh 2012-2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 37 Tahun 2012 terdapat beberapa indikator kinerja daerah yang tidak sesuai lagi dan untuk itu perlu disesuaikan termasuk menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh 2012-2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia No. 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang.../

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan ..

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);
24. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1).

Dengan ..

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2012 – 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah kota selaku pengguna anggaran.
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRA dan kabupaten/kota, TNI POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan.
8. Pembangunan kota adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2012 2017.
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana ..

12. Rencana Kerja Pembangunan Kota, yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Rencana Kerja Pembangunan Kota Banda Aceh yang disusun setiap tahun.
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II
KEDUDUKAN RPJMK
Pasal 2

RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017 merupakan :

a. dokumen perencanaan pembangunan Kota sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dalam mewujudkan pembangunan Kota yang berkesinambungan dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPK; dan
b. penjabaran visi, misi dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan Kota, kebijakan umum, program prioritas Walikota dan arah kebijakan keuangan daerah dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Banda Aceh Tahun 2007-2027.

BAB III
TUJUAN
Pasal 3

Tujuan penetapan RPJMK adalah untuk :

a. pedoman penyusunan Renstra-SKPD, RKPK, Renja-SKPD dan perencanaan penganggaran;
b. mewujudkan perencanaan pembangunan Kota yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota;

c. pencapaian visi dan misi Kota melalui serangkaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah jangka menengah;
d. menyediakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif, memuat kerangka makro dan pilihan program prioritas Kota; dan
e. menjadi pedoman sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan SKPD;

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

Sistematika RPJMK sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan
- 3.4.

BAB IV ANALISIS ISU STRATEGIS
- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu Strategis

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KOTA

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB XI PENUTUP

BAB..

BAB V
ISI DAN URAIAN RPJMK
Pasal 5

Isi dan uraian RPJMK beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

(1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMK.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 13 Februari **2017 M**
16 Jumadil Awal **1438 H**

WALIKOTA BANDA ACEH

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 13 Februari **2017 M**
16 Jumadil Awal **1438 H**

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH

BAHAGIA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 13

NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (7/154/2016)

PENJELASAN ATAS

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2012-2017

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada Qanun Nomor 16 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 - 2027.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK), yang merupakan rencana pembangunan tahunan kota, serta memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasidan pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJM Tahun 2012-2017 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam :

1. Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Tahun 2013
2. Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Tahun 2014
3. Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Tahun 2015
4. Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Tahun 2016
5. Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Tahun 2017

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Meuengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2017, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di Kota Banda Aceh. Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan

kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) pada tahun pertama periode Pemerintahan Walikota berikutnya yaitu pada tahun 2018. Namun demikian, Walikota terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) melalui mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK), maka jangka waktu keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) adalah 2012 - 2017.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran pembangunan Kota Banda Aceh yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK). Dalam penjabaran visi, misi dan program walikota yang dituangkan dalam strategi pembangunan kota, kebijakan umum, program prioritas walikota dan arah kebijakan keuangan kota turut mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Banda Aceh Tahun 2007-2027.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR .....

LAMPIRAN – QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 13 TAHUN 2016
TANGGAL : 16 Februari 2017 M
19 Jumadil Awal 1438 H

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

SINGKATAN DAN AKRONIM		
ADG	:	Alokasi Dana Gampong
AHH	:	Angka Harapan Hidup
AHH	:	Angka Harapan Hidup
AKAP	:	Antar Kota dan Antar Provinsi
AKB	:	Angka Kematian Bayi
AKDP	:	Angkutan Kota Dalam Propinsi
Akseptor KB	:	Partisipasi KB
AMH	:	Anti - Mullerian Hormon
APBD	:	Anggaran Pencapatan dan Belanja Daerah
APBK	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
APBK-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota perubahan
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
APM	:	Angka Partisipasi Murni
APS	:	Angka Partisipasi Sekolah
APT	:	Angka Pendidikan yang ditamatkan
BAPERJAKAT	:	Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
BASAJAN	:	Banda Aceh, Sabang dan Jantho
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BGR	:	Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe
BLK	:	Balai Latihan Kerja
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BMEC	:	Banda Aceh Madani Education Center
BOD	:	Biochemical oxygen Demand
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	:	Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan
BPR	:	Bank Perkreditan Rakyat
BPR	:	Bank Perkreditan Rakyat
BRR	:	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BTS	:	Base Transceiver Station
CBR	:	Angka Kelahiran Kasar
CDR	:	Angka Kematian Kasar
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DBD	:	Demam Berdarah Dengue
DBK	:	Daerah Bermasalah Kesehatan
DGTL	:	Direktorat Geologi Tata Lingkungan
DO	:	Dissolved oxygen
DPRA	:	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPRK	:	Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh
EC	:	Electrical Conductivity

SINGKATAN DAN AKRONIM

Ekstensifikasi	:	Mengupayakan Sumber Pendapatan Baru
Fertilitas	:	Angka Kelahiran
GK	:	Garis Kemiskinan
GKM	:	Garis Kemiskinan Makanan
GKNM	:	Garis Kemiskinan Non Makanan
HGB		Hak Guna Bangunan
HLP	:	High Level Panel
HPL	:	Hak Pengelolaan Lahan
IKM	:	Industri Kecil Menengah
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
IMR	:	Angka Kematian Bayi
Intensifikasi	:	Penerimaannya ditingkatkan
IPG	:	Indek Pembangunan Gender
IPLT	:	Intalasi Pengolahan Lumpur Tinja
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
ISO	:	International Organization for Standardization
IT	:	Information Technologi
ITF	:	Intermediate Treatment Facility
JCI	:	Joint Comunity Internasional
JFP2UPD	:	Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
JICA	:	Japan International Cooperation Agency
K3	:	Ketertiban,ketentraman dan keindahan
KAPET	:	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
KB	:	Keluarga Berencana
KDRT	:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KIE	:	Komunikasi, Informasi dan Edukasi
KK	:	Kutu Keluarga
KPPTSP	:	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
KS	:	Keluarga Sejahtera
KSP	:	Koperasi Simpan pinjam
KTG	:	Kelompok Informasi Gampong
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
KTP-el	:	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
KTR	:	Kawasan Tanpa Rokok
KUKM	:	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Labor Force	:	Angkatan Kerja
Lakalantas	:	Kecelakaan Lalu Lintas
LAKIP	:	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LINMAS	:	Perlindungan Masyarakat
LKM	:	Lembaga Keuangan Mikro
LKM	:	Lembaga Keuangan Masyarakat
LPM	:	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MDG's	:	Millenium Development Goals
Mortalitas	:	Angka Kematian

SINGKATAN DAN AKRONIM

OKP	:	Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
ORMAS	:	Organisasi Masyarakat
OTSUS	:	Otonomi Khusus
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAG	:	Pendapatan Asli Gampong
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
Pilchiksung	:	Pemilihan Keuchik Langsung
PJU	:	Penerangan Jalan Umum
PKL	:	Pedangan Kaki Lima
PKN	:	Pusat Kegiatan Nasional
PKN	:	Pusat Kegiatan Nasional
PKPT	:	Program Kerja Pengawasan Tahunan
PKW	:	Pusat Kegiatan Wilayah
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMKS	:	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PMKS	:	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Polindes	:	Pondok Bersalin Desa
Poskesdes	:	Pos Kesehatan Desa
Posyandu	:	Pos Pelayanan Terpadu (kesehatan).
Povider	:	Jasa Telekomunikasi
PRB	:	Pengurangan Risiko Bencana
PUG	:	Pengarus Utamaan Gender
PUS	:	Pasangan Usia Subur
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	:	Puskesmas Pembantu
RAD PPK	:	Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantas Korupsi
RAPBK	:	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Renja	:	Rencana Kerja
RENSTRA	:	Rencana Strategis
Riskesdas	:	Riset Kesehatan Dasar
RKPD	:	Rencana Kerja Pembangunan Daerah
RKPK	:	Rencana Kerja Pembangunan Kota
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMK	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPK	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota
RPPJ	:	Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan
RTH	:	Ruang Terbuka Hijau
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRWN	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Negara
RUPM	:	Rencana Umum Penanaman Modal
SDM	:	Sumber Daya Manusia

SINGKATAN DAN AKRONIM

SIAK	:	Sistem Informatika Administrasi Kependudukan
SIKIB	:	Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu
SILPA	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPK	:	Satuan Kerja Perangkat Kota
SNP	:	Standar Nasional Pendidikan
SOP	:	Standar Operasional Prosedur
SPIP	:	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPIPISE	:	Sistem Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
TDMRC	:	Tsunami Disaster Mitigation Research Center
TDS	:	Total Dissolved Solids
TIK	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TIK	:	Teknologi Informatika dan Komunikasi
TLHP	:	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
TPA	:	Tempat Penampungan Akhir
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPPKK	:	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
TPS	:	Tempat Pembuangan Sampah
TPT	:	Tempat Pelayanan Terpadu
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
Translasi	:	Koleksi Buku Perpustakaan
Transliterasi	:	Ahli Aksara
UKM	:	Usaha Kecil dan Menengah
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil Menengah
UPM	:	Upah Minimum Propinsi
USP	:	Unit Simpan Pinjam.
UUPA	:	Undang Undang Pokok Agraria
UUPA	:	Undang Undang Pemerintahan Aceh
WBK	:	Wilayah Bebas Korupsi
WMK	:	Wilayah Manajemen Kebakaran
WP	:	Wilayah Pengembangan
WTP	:	Wajar Tanpa Pengacualian
ZIS	:	Zakat Infaq dan Sodekah

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan dan Akronim i
Daftar Isi v
Daftar Tabel xii
Daftar Grafik xviii
Daftar Gambar xx

BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1
1.1 Latar Belakang ..... I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... I - 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... I - 7
1.3.1 RPJMN ..... I - 8
1.3.2 RPJM Provinsi ..... I - 9
1.3.3 RTRW Kota Banda Aceh ..... I - 10
1.3.4 RPJPD Kota Banda Aceh ..... I - 11
1.4 Sistematika Penulisan ..... I - 12
1.5 Maksud dan Tujuan ..... I - 14
1.5.1 Maksud ..... I - 14
1.5.2 Tujuan ..... I - 14

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II - 1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II - 1
2.1.1 Karakteristik dan Lokasi Wilayah ..... II - 1
2.1.1.1 Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah ..... II - 1
2.1.1.2 Kondisi Topografi ..... II - 3
2.1.1.3 Kondisi Geomorfologi ..... II - 5
2.1.1.4 Kondisi Geologi ..... II - 6
2.1.1.5 Kondisi Hidrologi ..... II - 7
2.1.1.6 Kondisi Klimatologi ..... II - 12
2.1.1.7 Penggunaan Lahan ..... II - 13
2.1.2 Potensi Pengembangan Daerah ..... II - 16
2.1.2.1 RTRW Kota Banda Aceh ..... II - 16
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana ..... II - 23
2.1.4 Demografi ..... II - 29
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II - 32
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... II - 32
2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi ..... II - 32
2.2.1.2 Laju Inflasi Kota Banda Aceh ..... II - 34
2.2.1.3 PDRB Perkapita ..... II - 36
2.2.1.4 Kemiskinan ..... II - 38
2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ..... II - 40
2.2.1.6 Pengeluaran Perkapita Rupiah ..... II - 41
2.2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka ..... II - 42
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat ..... II - 44
2.2.2.1 Pendidikan ..... II - 44
2.2.2.1.1 Angka Melek Huruf ..... II - 44

2.2.2.1.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah ..... II - 46
2.2.2.1.3 Angka Partisipasi Murni ..... II - 47
2.2.2.1.4 Angka Partisipasi Kasar ..... II - 50
2.2.2.1.5 Angka Pendidikan yang Ditamatkan .... II - 53
2.2.2.2 Kesehatan ..... II - 55
2.2.2.2.1 Angka Kematian Bayi ..... II - 55
2.2.2.2.2 Persentase Balita Gizi Buruk ..... II - 58
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga ..... II - 58
2.2.3.1 Kebudayaan dan Olahraga ..... II - 58
2.3 Aspek Pelayanan Umum ..... II - 63
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ..... II - 63
2.3.1.1 Pendidikan ..... II - 63
2.3.1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah ..... II - 63
2.3.1.1.2 Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah ..... II - 64
2.3.1.1.3 Rasio Guru per Murid ..... II - 65
2.3.1.1.4 Jumlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang Tercapai ..... II - 66
2.3.1.1.5 Peringkat Kelulusan Tingkat Nasional . II - 67
2.3.1.2 Kesehatan ..... II - 67
2.3.1.2.1 Rasio Pelayanan Terpadu (Posyandu) per satuan balita ..... II - 68
2.3.1.2.2 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu ..... II - 70
2.3.1.2.3 Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk ..... II - 71
2.3.1.2.4 Rasio Dokter per satuan Penduduk ..... II - 72
2.3.1.2.5 Puskesmas yang sudah menerapkan e-health dan bersertifikasi ISO/akreditasi ..... II - 73
2.3.1.2.6 Model Gampong Sehat ..... II - 74
2.3.1.3 Pekerjaan Umum ..... II - 74
2.3.1.3.1 Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%) ..... II - 74
2.3.1.3.2 Rasio Jaringan Drainase ..... II - 77
2.3.1.3.3 Persentase Penduduk Berakses Air Minum ..... II - 80
2.3.1.3.4 Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ..... II - 82
2.3.1.4 Perumahan ..... II - 83
2.3.1.4.1 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih .... II - 83
2.3.1.4.2 Rasio Rumah Tinggal berakses Sanitasi II - 83
2.3.1.5 Penataan Ruang ..... II -
2.3.1.5.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah ..... II - 85
2.3.1.5.2 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Umum ..... II - 86
2.3.1.5.3 Persentase Luas Permukiman yang tertata ..... II - 88
2.3.1.6 Perencanaan Pembangunan ..... II - 90
2.3.1.6.1 Tersedianya dokumen Perencanaan RPJP, RPJM, dan RKPK Kota Banda Aceh ..... II - 90

	2.3.1.6.2	Persentase Program KPJM yang tertuang dalam RKPK	II - 91
2.3.1.7	Perhubungan		II - 91
	2.3.1.7.1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (PJU)	II - 91
	2.3.1.7.2	Rasio Izin Trayek	II - 93
	2.3.1.7.3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	II - 96
	2.3.1.7.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus	II - 98
	2.3.1.7.5	Tersedianya pelabuhan penyebrangan yang memiliki Pelayanan Angkutan Penyebrangan yang Beroperasi pada Lintas Penyebrangan dalam Kota pada Wilayah yang memiliki Alur Pelayaran	II - 99
	2.3.1.7.6	Tersedianya terminal angkutan penumpang/barang di Kota Banda Aceh yang telah dilayani Angkutan Umum dalam Trayek	II - 99
	2.3.1.7.7	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota	II - 100
2.3.1.8	Lingkungan Hidup		II - 101
	2.3.1.8.1	Persentase Penanganan Sampah	II - 101
	2.3.1.8.2	Pencemaran Status Mutu Air	II - 110
	2.3.1.8.3	Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	II - 114
	2.3.1.8.4	Rasio Tempat Pembuangan Sampah per Satuan Penduduk	II - 115
	2.3.1.8.5	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	II - 119
	2.3.1.8.6	Pencemaran Tingkat Kebisingan	II - 120
	2.3.1.8.7	Meraih Adipura	II - 120
	2.3.1.8.8	Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk	II - 121
	2.3.1.8.9	Persentase Penerangan Jalan Umum ...	II - 122
2.3.1.9	Pertanahan		II - 123
	2.3.1.9.1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	II - 123
2.3.1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil		II - 124
	2.3.1.10.1	Rasio Cakupan Kepemilikan KTP (%) ...	II - 124
	2.3.1.10.2	Rasio Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (%)	II - 126
2.3.1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		II - 135
	2.3.1.11.1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)	II - 135
	2.3.1.11.2	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	II - 137
	2.3.1.11.3	Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	II - 138
	2.3.1.11.4	Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur	II - 138
	2.3.1.11.5	Kota Layak Anak	II - 139
2.3.1.12	Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)		II - 139

	2.3.1.12.1	Rata rata Jumlah Anak per Keluarga ...	II - 139
	2.3.1.12.2	Rasio Akseptor KB	II - 140
2.3.1.13	Sosial		II - 142
	2.3.1.13.1	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	II - 142
	2.3.1.13.2	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	II - 143
	2.3.1.13.3	Waktu Tanggap Darurat (*Response Time*) layanana	II - 144
2.3.1.14	Ketenagakerjaan		II - 145
	2.3.1.14.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II - 145
2.3.1.15	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		II - 149
	2.3.1.15.1	Persentase Koperasi Aktif	II - 149
	2.3.1.15.2	Jumlah BPR/LKM	II - 151
2.3.1.16	Penanaman Modal		II - 152
	2.3.1.16.1	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	II - 152
	2.3.1.15.2	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	II - 153
2.3.1.17	Kepemudaan dan Olahraga		II
	2.3.1.17.1	Jumlah Organisasi pemuda	II - 154
	2.3.1.17.2	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	II - 154
	2.3.1.17.3	Jumlah Kegiatan Olahraga	II - 155
	2.3.1.17.4	Peningkatan potensi Pemuda melalui Pembinaan dan Pelatihan Pembangunan Kota Banda Aceh	II - 156
	2.3.1.17.5	Pembinaan Kepemudaan sebagai Modal Utama dalam Pencapaian Peningkatan Pembangunan	II - 157
2.3.1.18	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		II - 158
	2.3.1.18.1	LSM, Ormas, dan OKP Terdaftar	II - 159
	2.3.1.18.2	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk	II - 159
	2.3.1.18.3	Rasio Pos Siskamling per Jumlah Gampong	II - 160
2.3.1.19	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		II - 162
	2.3.1.19.1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	II - 162
	2.3.1.19.2	Ketahanan Pangan	II - 163
2.3.1.20	Pemberdayaan Masyrakat dan Desa		II - 164
	2.3.1.20.1	Pemerintahan Gampong	II - 164
	2.3.1.20.2	Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kota	II - 165
	2.3.1.20.3	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga	II - 165
	2.3.1.20.4	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	II - 168
	2.3.1.20.5	Jumlah PKK Aktif	II - 170
	2.3.1.20.6	Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintahan Gampong	II - 171
2.3.1.21	Komunikasi dan Informasi		II - 173
	2.3.1.21.1	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional	II - 176

2.3.1.21.2 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Tingkat Kecamatan ..... II - 177
2.3.1.22 Perpustakaan ..... II - 177
2.3.1.22.1 Jumlah Perpustakaan ..... II - 177
2.3.1.22.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun ..... II - 178
2.3.1.22.3 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah ..... II - 179
2.3.1.23 Pertanian ..... II - 179
2.3.1.23.1 Cakupan Bina Kelompok Petani/Ternak ..... II - 179
2.3.1.24 Pariwisata ..... II - 180
2.3.1.24.1 Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara ..... II - 180
2.3.1.25 Kelautan dan Perikanan ..... II - 182
2.3.1.25.1 Produksi Perikanan ..... II - 182
2.3.1.25.2 Cakupan Bina Kelompok Perikanan .... II - 183
2.3.1.26 Perdagangan ..... II - 186
2.3.1.26.1 Jumlah Pasar yang Sudah Berfungsi Secara Optimal ..... II - 186
2.3.1.27 Perindustrian ..... II - 189
2.3.1.27.1 Jumlah UKM yang mendapatkan bantuan Perbankan ..... II - 189
2.3.1.27.2 Jumlah IKM yang mampu Melakukan Pemasaran Komoditi ..... II - 191
2.3.1.27.3 Jumlah Produk yang Menunjang Program *One Village One Product* ..... II - 192
2.3.1.28 Syari'at Islam ..... II - 194
2.3.1.28.1 Jumlah Kelompok Aliran Sesat dan Sempalan ..... II - 194
2.3.1.28.2 Jumlah Pelanggaran Qanun Syari'at Islam ..... II - 196
2.3.1.28.3 Kemampuan Baca Al-Qur'an Siswa Tingkat Sekolah Menengah ..... II - 197
2.3.1.28.4 Kemampuan baca Tulis Arab Jawi Siswa Sekolah ..... II - 198
2.3.1.28.5 Frekwensi Kegiatan Syiar dan Dakwah di Masyarakat ..... II - 199
2.3.1.28.6 Jumlah Mesjid yang memenuhi Standar Kebersihan dan Ketertiban ..... II - 200
2.3.1.28.7 Penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) (Milyar) dan Jumlah Muzzakki (org) ..... II - 201
2.4 Aspek Daya Saing Daerah ..... II - 204
2.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ..... II - 204
2.4.1.1 Perhubungan ..... II - 204
2.4.1.1.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan ..... II - 204
2.4.1.1.2 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum ..... II - 205
2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi ..... II - 205
2.4.2.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ..... II - 205

2.4.2.1.1	Perizinan	II - 205
2.4.2.1.2	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha	II - 207
2.4.2.1.3	Jumlah APIP yang bersertifikasi	II - 209
2.4.2.1.4	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Internal dan External	II - 210
2.4.2.1.5	Jumlah PNS yang Indisipliner	II - 212
2.4.2.1.6	Jumlah Pembangunan Aplikasi Berbasis e-government	II - 214
2.4.2.1.7	Perolehan opini dari BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	II - 216
2.4.2.1.8	Persentase Target PAD	II - 217
2.4.2.1.9	Pemberitaan Positif mengenai Program Pembangunan Kota Banda Aceh di Media Lokal dan Nasional	II - 218
2.4.2.1.10	Persentase Penyelesaian Pilar Tanda Tapal Batas	II - 219
2.4.2.1.11	Jumlah Regulasi yang Ditetapkan	II - 220
2.4.2.1.12	Jumlah Rancangan Qanun yang Disahkan menjadi Qanun (%)	II - 220
2.4.2.1.13	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)	II - 224

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN III - 1

3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III - 4
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	III - 5
3.1.2	Neraca Daerah	III - 10
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III - 12
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III - 14
3.2.2	Analisis Pembiayaan	III - 15
3.3	Kerangka Pendanaan	III - 19
3.3.1	Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	III - 19
3.3.2	Penghitungan Kerangka Pendanaan	III - 23

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS IV - 1

4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	IV - 1
4.2	Isu-isu Strategis	IV - 8
4.2.1	Penelaahan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Internasional	IV - 9
4.2.2	Penetapan Isu Strategis	IV - 18

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V - 1

5.1	Visi	V - 1
5.2	Misi	V - 1

BAB VI STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN VI - 1

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ..... VII - 1
7.1 Kebijakan Umum Kota Banda Aceh ..... VII - 1
7.2 Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh 2012-2017 ..... VII - 5

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN ..... VIII - 1

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ..... IX - 1

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ..... X - 1
10.1 Pedoman Transisi ..... X - 1
10.2 Kaidah Pelaksanaan ..... X - 2

BAB XI PENUTUP ..... XI - 1

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh	II-2
Tabel	2.2	Luas Daerah Aliran Sungai yang Melalui Kota Banda Aceh	II-8
Tabel	2.3	Acuan Penentuan Kisaran Kadar Garam Air Berdasarkan EC dan TDS	II-10
Tabel	2.4	Rata-Rata Tekanan Udara, Suhu Udara, Kelembaban Nisbi, Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013	II-12
Tabel	2.5	Penggunaan Lahan Untuk Kawasan Lindung Kota Banda Aceh	II-14
Tabel	2.6	Penggunaan Lahan Untuk Kawasan Budidaya Kota Banda Aceh ..	II-14
Tabel	2.7	Potensi Ancaman Bencana di Kota Banda Aceh	II-26
Tabel	2.8	Armada Pemadam Kebakaran	II-28
Tabel	2.9	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kota Banda Aceh Tahun 2013	II-29
Tabel	2.10	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2010 – 2013	II-30
Tabel	2.11	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013	II-32
Tabel	2.12	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banda Aceh menurut Lapangan Usaha Tahun 2007 – 2013	II-33
Tabel	2.13	Inflasi Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan Indonesia (persen) Tahun 2008 – 2013	II-36
Tabel	2.14	PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhannya di Kota Banda Aceh, 2010 – 2013	II-37
Tabel	2.15	Garis Kemiskinan Dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-38
Tabel	2.16	Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-42
Tabel	2.17	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2007 s.d 2013 Kota Banda Aceh	II-46
Tabel	2.18	Perkembangan Jumlah Siswa dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Banda Aceh Tahun 2007 -2013	II-48
Tabel	2.19	Jumlah Siswa dan Angka Partisipasi Murni menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2013/2014	II-49
Tabel	2.20	Perkembangan Jumlah Siswa dan Angka Partispasi Kasar (APK) Kota Banda Aceh Tahun 2007 -2013	II-50
Tabel	2.21	Jumlah Siswa dan Angka Partisipasi Kasar menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2013/2014	II-52
Tabel	2.22	Perkembangan Jumlah Siswa dan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Kota Banda AcehTahun 2007-2013	II-53
Tabel	2.23	Perkembangan Jumlah Siswa dan Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2013/2014	II-54
Tabel	2.24	Jumlah Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2013	II-56
Tabel	2.25	Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013	II-57
Tabel	2.26	Status Gizi Buruk Balita Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013	II-58
Tabel	2.27	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013	II-59

Tabel 2.28 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2013 ..... II-60
Tabel 2.29 Jumlah Penghargaan Budaya Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013 ..... II 60
Tabel 2.30 Jumlah Karya Budaya Yang Diaktualisasikan Kembali Pada Masyarakat Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013 ..... II-61
Tabel 2.31 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013 ..... II-61
Tabel 2.32 Jumlah Benda, Situs dan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013 ..... II-61
Tabel 2.33 Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja Bidang Jasa Pariwisata Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013 ..... II 62
Tabel 2.34 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013 ..... II-63
Tabel 2.35 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Banda Aceh menurut Kecamatan Tahun 2013/2014 ..... II-64
Tabel 2.36 Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013 ..... II-64
Tabel 2.37 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2013 ..... II-65
Tabel 2.38 Jumlah Guru dan Murid menurut Jenjang Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013 ..... II-65
Tabel 2.39 Jumlah Posyandu dan Balita Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013 ..... II-69
Tabel 2.40 Jumlah Posyandu dan Balita menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2013 ..... II-69
Tabel 2.41 Jumlah Puskesmas , Pustu dan Polindes/Poskesdes Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013 ..... II-70
Tabel 2.42 Jumlah Puskesmas, Pustu, Polindes/Poskesdes menurut Kecamatan dalam Kota Banda Aceh Tahun 2013 ..... II 70
Tabel 2.43 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013 ..... II-71
Tabel 2.44 Jumlah Dokter di Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013 ..... II-72
Tabel 2.45 Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2011 ..... II-72
Tabel 2.46 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kota Banda Aceh Tahun 2007 2014 ..... II 75
Tabel 2.47 Perkembangan Kondisi Main Drain Kota Banda Aceh II-79
Tabel 2.48 Kondisi Rumah Pompa Kota Banda Aceh II-80
Tabel 2.49 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih dan Jumlah Penduduk Kota Banda AcehTahun 2007-2014 ..... II-81
Tabel 2.50 Proporsi Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduc yang mendapatkan Akses Air Minum menurut Kecamatan dalam Kota Banda Aceh Tahun 2014 ..... II 81
Tabel 2.51 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2014 ..... II-82
Tabel 2.52 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih di Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2014 ..... II-83
Tabel 2.53 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Banda Aceh Tahun 2007-2014 ..... II-84
Tabel 2.54 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2007 2014 ..... II-86
Tabel 2.55 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah menurut Kecamatan Kota Banda AcehTahun 2014 ..... II-86
Tabel 2.56 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2014 ..... II-87

Tabel	2.57	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Banda Aceh menurut Kecamatan Tahun 2014	II-87
Tabel	2.58	Persentase Luas Permukiman yang Terlata Kota Banda Aceh Tahun 2007-2014	II-88
Tabel	2.59	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kota Banda Aceh tahun 2007 – 2014	II-91
Tabel	2.60	Rasio Izin Trayek Kota Banda AcehTahun 2007 2014	II-93
Tabel	2.61	Jumlah Halte Yang Di Layani Angkutan Umum Dalam Trayek Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2014	II-94
Tabel	2.62	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2014	II-95
Tabel	2.63	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Banda Aceh tahun 2007 – 2014	II-97
Tabel	2.64	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kota Banda Aceh Tahun 2007 2014	II-99
Tabel	2.65	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kota Banda Aceh Tahun 2007 -2013	II-105
Tabel	2.66	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2014	II-105
Tabel	2.67	Komposisi Sampah di Kota Banda Aceh	II-107
Tabel	2.68	Kendaraan dan Peralatan Untuk Mendukung Kegiatan Pengelolaan Sampah	II-108
Tabel	2.69	Pencemaran Status Mutu Air	II-112
Tabel	2.70	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL	II-114
Tabel	2.71	Kasus Lingkungan	II-114
Tabel	2.72	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2014	II-118
Tabel	2.73	Tingkat Kebisingan	II-120
Tabel	2.74	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per-Satuan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2012	II-121
Tabel	2.75	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2012	II-121
Tabel	2.76	Tempat Pemakaman Umum Kota Banda Aceh	II-121
Tabel	2.77	Luas Lahan Bersertifikat di Kota Banda Aceh tahun 2009-2014	II-123
Tabel	2.78	Jumlah Cakupan Kepemilikan KTP Di Wilayah Kota Banda Aceh Menurut Kecamatan Tahun 2009-2013	II-124
Tabel	2.79	Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Nikah Tahun 2013	II-125
Tabel	2.80	Jumlah Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013	II-126
Tabel	2.81	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-128
Tabel	2.82	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Angka Kelahiran Kasar (CBR), dan Angka Kematian Bayi (IMR) di Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013	II-129
Tabel	2.83	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Dalam Kota Banda Aceh Tahun 2013	II-130
Tabel	2.84	Jumlah Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur Di Kota Banda Aceh Tahun 2009-2013	II-130
Tabel	2.85	Proyeksi Penduduk Laki Laki Berdasarkan Umur di Kota Banda Aceh dari Tahun 2014-2018	II-131
Tabel	2.86	Jumlah Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur Kota Banda Aceh Tahun 2009-2013	II-132

Tabel	2.87	Proyeksi Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur di Kota Banda Aceh Tahun 2014-2018	II-133
Tabel	2.88	Sebaran Penduduk Kota Banda Aceh Menurut Luas Wilayah dan KepadatanTahun 2013	II-134
Tabel	2.89	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-135
Tabel	2.90	Jumlah Pekerja Perempuan di lembaga Kesehatan dan Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-136
Tabel	2.91	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif Tahun 2007-2013	II-137
Tabel	2.92	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-137
Tabel	2.93	Rasio KDRT yang Didampingi Kota Banda Aceh Tahun 2009-2013	II-138
Tabel	2.94	Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur Kota Banda Aceh Tahun 2009-2013	II-138
Tabel	2.95	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-140
Tabel	2.96	Rasio Akseptor KB Di Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-140
Tabel	2.97	Jumlah Penyuluh KB Di Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-141
Tabel	2.98	Jumlah Penduduk Peserta KB di Kota Banda Aceh menurut Kecamatan Tahun 2013	II-141
Tabel	2.99	Cakupan Pelayanan Bencana KebakaranKota Banda Aceh	II-144
Tabel	2.100	Waktu Tanggap Darurat (*Response Time*) Layanan	II-144
Tabel	2.101	Jumlah Kasus Kebakaran Tahun 2007 – 2014	II-144
Tabel	2.102	Perkembangan Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-145
Tabel	2.103	Pelatihan dan Bimbingan yang Telah diberikan kepada Masyarakat Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-147
Tabel	2.104	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kota Banda Aceh Tahun 2008-2012	II-148
Tabel	2.105	Persentase Koperasi Aktif Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-150
Tabel	2.106	Persentase Koperasi Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-150
Tabel	2.107	Jumlah BPR/LKM Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-151
Tabel	2.108	Perkembangan Industri dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-152
Tabel	2.109	Jumlah UKM Non BPR/LKM Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-152
Tabel	2.110	Jumlah Investor PMDN/PMA dan Nilai Investasi Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-153
Tabel	2.111	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-153
Tabel	2.112	Jumlah Organisasi Pemuda Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-154
Tabel	2.113	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-154
Tabel	2.114	Jumlah Organisasi Olahraga Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-155
Tabel	2.115	Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-156
Tabel	2.116	Jumlah LSM Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-159
Tabel	2.117	Jumlah Ormas, OKP Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-159

Tabel	2.118	Rasio Jumlah Linmas Kota Banda Aceh Per 10.000 Penduduk Tahun 2007-2013	II-160
Tabel	2.119	Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-161
Tabel	2.120	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh Tahun 2007-2014	II-162
Tabel	2.121	Rekapitulasi Regulasi Pemerintahan Mukim dan Gampong Tahun 2007-2014	II-164
Tabel	2.122	Kelompok Binaan LPM Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-167
Tabel	2.123	Kelompok Binaan PKK Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-169
Tabel	2.124	PKK Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-170
Tabel	2.125	Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintahan Gampong Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-171
Tabel	2.126	Jaringan Komunikasi Kota Banda Aceh Tahun 2007-2014	II-173
Tabel	2.127	Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Tahun 2007-2014	II-174
Tabel	2.128	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Banda Aceh Tahun 2007-2014	II-175
Tabel	2.129	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal di Kota Banda Aceh Tahun 2007-2014	II-176
Tabel	2.130	Pelaksanaan Diseminasi Inf. &Pendistribusian Inf Nasional	II-176
Tabel	2.131	Pengembangan & Pemberdayaan KIG (Kelompok Informasi Gampong) Rasio Jumlah KIG di Tingkat Kecamatan	II-177
Tabel	2.132	Jumlah Perpustakaan Tahun 2007-2013 Kota Banda Aceh	II-177
Tabel	2.133	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-178
Tabel	2.134	Data Arus Kunjungan Wisatawan	II-180
Tabel	2.135	Jumlah dan Kondisi Pasar Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013	II-187
Tabel	2.136	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2014	II-204
Tabel	2.137	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2007-2014	II-205
Tabel	2.138	Realisasi Izin dan Pendapatan Tahun 2007 2013	II 206
Tabel	2.139	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Anggaran dan Jumlah Objek Pemeriksaan Serta Ratio Pembinaan/Obrik dari Tahun 2007-2014	II-211
Tabel	2.140	Jumlah Pegawai dan Tingkat Kompetensi Aparatur Pengawasan dari Tahun 2007 2014	II 211
Tabel	2.141	Jumlah Temuan BPK, BPKP, Inspektorat Aceh dan Inspektorat Kota Banda Aceh Serta Penyelesaian TLHP Tahun 2007-2014	II-212
Tabel	2.142	Jumlah Pengaduan, Perusahaan Terverifikasi, dan Jumlah Personil MIMS	II-215
Tabel	2.143	Rasio Jumlah Tapal Batas Gampong Dalam Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013	II-219
Tabel	2.144	Daftar Qanun Kota Banda Aceh yang Ditetapkan Pada Periode 2007-2013	II-222
Tabel	3.3	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 –2014	III-8
Tabel	3.4	Rata rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2014	III-11
Tabel	3.5	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Banda Aceh	III-15

Tabel	3.6	Defisit Riil Anggaran Kota Banda Aceh	III 16
Tabel	3.7	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Banda Aceh (persen)	III-17
Tabel	3.8	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Banda Aceh	III 18
Tabel	3.9	Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Banda Aceh 2009-2014	III 21
Tabel	3.10	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh	III-24
Tabel	3.11	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh	III-25
Tabel	3.12	Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Banda Aceh	III-28
Tabel	4.1	Identifikasi Isu Strategis Kabupaten/Kota lainnya	IV-15
Tabel	5.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Banda Aceh	V-1
Tabel	6.1	Strategi dan Arah Kebijakan Kota Banda Aceh	VI-1
Tabel	7.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Banda Aceh ..	VII-6
Tabel	8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Banda Aceh	VIII-2
Tabel	9.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Banda Aceh	IX 2

DAFTAR GRAFIK

Grafik	2.1	Piramida Penduduk Kota Banda Aceh 2013	II-31
Grafik	2.2	Kepadatan Penduduk di Kota Banda Aceh, 2013	II-32
Grafik	2.3	Perbandingan PDRB Regional (trilyun rupiah), 2013	II-34
Grafik	2.4	Laju Inflasi Kota Banda Aceh 2005-2013	II-35
Grafik	2.5	Tingkat Inflasi/Deflasi Kota Banda Aceh, 2013	II-35
Grafik	2.6	Perbandingan Inflasi di Pulau Sumatera, Tahun 2013	II-36
Grafik	2.7	Perbandingan PDRB Perkapita antara Kota Banda Aceh dan ke-33 ibukota provinsi lainnya di Indonesia Tahun 2012	II-37
Grafik	2.8	Persentase Penduduk Miskin Kota Banda Aceh tahun 2006 – 2013	II-38
Grafik	2.9	Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2013	II-39
Grafik	2.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh 2009-2013	II-41
Grafik	2.11	Perbandingan IPM antara Kota Banda Aceh dan kab/kota di Indonesia Tahun 2013	II-41
Grafik	2.12	Pengeluaran Perkapita per bulan di Kota Banda Aceh pada Tahun 2011 – 2014	II-42
Grafik	2.13	Perbandingan Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2012	II-44
Grafik	2.14	Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Banda Aceh Tahun 2011-2013	II-45
Grafik	2.15	Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Banda Aceh Tahun 2011 – 2013	II-47
Grafik	2.16	Persentase Jumlah SNP yang tercapai di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014	II-67
Grafik	2.17	Jumlah Puskesmas yang sudah menerapkan e-health dan bersertifikasi ISO/akreditasi Tahun 2012-2014	II-74
Grafik	2.18	Persentase Program RPJMD yang tertuang dalam RKPK	II-91
Grafik	2.19	Persentase Pemanfaatan RTH terhadap lahan yang tersedia	II-119
Grafik	2.20	Persentase Penerangan Jalan Umum Kota Banda Aceh	II-122
Grafik	2.21	Persentase Capaian Indikator Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh	II-139
Grafik	2.22	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014	II-142
Grafik	2.23	Peningkatan potensi pemuda melalui Pembinaan dan pelatihan pembangunan Kota Banda Aceh	II-157
Grafik	2.24	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina sebagai Modal Utama dalam Pencapaian Peningkatan Pembangunan	II-158
Grafik	2.25	Ketersediaan Pangan Utama (kg) di Kota Banda Aceh tahun 2012-2014	II-163
Grafik	2.26	Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Perpustakaan keliling Per tahun (org) di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014	II-179
Grafik	2.27	Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014	II-179
Grafik	2.28	Persentase Cakupan Bina Kelompok Petani/Ternak	II-180
Grafik	2.29	Kunjungan Wisatawan berdasarkan hunian hotel Tahun 2007 – 2013	II-181
Grafik	2.30	Produksi Perikanan di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 (%)	II-183
Grafik	2.31	Cakupan Bina Kelompok Perikanan di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 (%)	II-184

Grafik	2.32	Persentase Pasar yang sudah berfungsi secara optimal di Kota Banda Aceh (%)	II 188
Grafik	2.33	Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh Tahun 2009-2013	II-190
Grafik	2.34	Jumlah UKM Yang Mendapatkan Bantuan Perbankan 2012-2013	II 190
Grafik	2.35	Jumlah IKM yang Mampu Melakukan Pemasaran Komoditi	II-192
Grafik	2.36	Jumlah Produk yang menunjang Program *One Village One Product* di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014	II-193
Grafik	2.37	Jumlah Kelompok Aliran Sesat dan Sempalan di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014	II-195
Grafik	2.38	Jumlah Pelanggaran Qanun Syariat Islam di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014	II-196
Grafik	2.39	Kemampuan Baca Al-Qur'an Siswa Tingkat Sekolah Menengah Tahun 2012-2014	II-198
Grafik	2.40	Kemampuan Baca Tulis Arab Jawi Siswa Sekolah di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014	II 199
Grafik	2.41	Frekwensi Kegiatan Syiar dan Dakwah di Masyarakat Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014	II-200
Grafik	2.42	Jumlah Mesjid yang Memenuhi Standar Kebersihan dan Ketertiban di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014	II-201
Grafik	2.43	Penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) (Milyar) dan Jumlah Muzzakki (org) di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014	II 202
Grafik	2.44	Persentase Penempatan Pejabat yang sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan dan Diklat Penjenjangan (*The Right Man on The Right Place*) di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014	II-208
Grafik	2.45	Jumlah APIP yang bersertifikasi di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 (org)	II-209
Grafik	2.46	Jumlah temuan hasil Pemeriksaan dan Pengawasan internal dan external di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014	II-210
Grafik	2.47	Jumlah PNS yang indispliner di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 (org)	II-213
Grafik	2.48	Jumlah Pembangunan Aplikasi Berbasis e-government di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014	II-215
Grafik	2.49	PAD di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014	II-217
Grafik	2.50	Pemberitaan Positif mengenai Program Pembangunan Kota Banda Aceh di Media Lokal dan Nasional Tahun 2012-2014	II-218
Grafik	2.51	Jumlah Regulasi yang Ditetapkan di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014	II-220
Grafik	2.52	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014	II-223

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Hubungan Antar Dokumen RPJMD Kota Banda Aceh dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	
Gambar	2.1	Peta Wlayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh	II-3
Gambar	2.2	Peta Kontur, ketinggian (m) di Kota Banda Aceh	II-4
Gambar	2.3	Peta Kontur dan Patahan Geologi Provinsi Aceh	II-7
Gambar	2.4	Peta Hidrogeologi Kota Banda Aceh	II-9
Gambar	2.5	Peta Resistivity Pada Kedalaman 5 Meter Dibawah Muka Tanah	II-10
Gambar	2.6	Peta Hidrologi Kota Banda Aceh	II-11
Gambar	2.7	Peta RTRW Kota Banda Aceh 2009 – 2029	II-15
Gambar	2.8	Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh Tahun 2029	II-21
Gambar	2.9	Peta Pola Ruang Kota Banda Aceh Tahun 2029	II-22
Gambar	2.10	Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Banda Aceh	II-23
Gambar	2.11	Peta Wilayah Rawan Bencana Angin Kota Banda Aceh	II-24
Gambar	2.12	Peta Wilayah Rawan Bencana Banjir Kota Banda Aceh	II-25
Gambar	2.13	Peta Wilayah Rawan Bencana Gempa Kota Banda Aceh ..	II-25
Gambar	2.14	Peta Wilayah Rawan Bencana Tsunami Kota Banda Aceh	II-26
Gambar	2.15	Peta Pembagian Zona Drainase Kota Banda Aceh	II-78
Gambar	3.1	Kerangka Hubungan Antara Kebijakan Keuangan Daerah/APBD dengan RKPD dan Visi, Misi, Strategi RPJMD	III-2
Gambar	3.2	Kerangka Hubungan Antara Strategi dan Komponen APBD	III-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan tuntutan dalam Pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai dengan aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Penyusunan RPJM Daerah ini, menggunakan pendekatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu pendekatan politik dan aspiratif. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan dan penawaran rencana pembangunan, dan rakyat memilih serta menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan aspiratif dimaksudkan bahwa RPJM Daerah disusundengan memperhatikan kepada RPJM Nasional dan mengacu kepada RPJP Daerah yang telah menyerap aspirasi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan serta merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD Kota Banda Aceh 2012 - 2017. Sesuai dengan Pasal 76 dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan

bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 -2017 merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, RPJM Daerah KotaBanda Aceh juga memperhatikan hasil evaluasi RPJM Kota Banda Aceh tahun 2007 -2012, dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 –2027 serta memperhatikan RPJM Aceh 2012 – 2017.

RPJM Kota Banda Aceh juga menjadi pedoman bagi SKPD di dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), serta Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK), yang selanjutnya, keduanya akan mengacu untuk menyusun Rencana Kinerja SKPD.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peraturan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan. Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana *(sense of ownership)* menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholders dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.Perencanaan pembangunan

daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terpadu *(integrated)*, terukur *(measurable)*, dapat dilaksanakan *(aplicable)* dan berkelanjutan *(sustainable)*.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2017 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (LD RI Tahun 1956 Nomor 59 (TLN RI No. 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815),
20. Peraturan Pemerintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi;
24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025,
26. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri KeuanganNomor : 28 Tahun 2010, Nomor : 0199/M PPN/04/2010 dan Nomor : PMK 95/PMK 07/2010tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
29. Qanun Aceh No. 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Aceh 2013-2033;

30. Qanun Aceh No. 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh 2012-2032;
31. Qanun Aceh No. 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017;
32. Qanun Aceh No. 2 Tahun 2013 tentang pengalokasian TDBH Migas dan Otsus
33. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1);
34. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027(Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);
35. Keputusan Walikota Nomor 252 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJM Kota Banda Aceh merupakan satu kesatuan bagian dari perencanaan secara menyeluruh, yaitu sistem perencanaan nasional. Oleh karenanya, sebagai bagian yang terintegrasi, RPJM Kota Banda Aceh tahun 2012 – 2017 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan dan bagian dari perencanaan jangka panjang Kota Banda Aceh (2009 – 2029) harus berpedoman pada RPJP Kota Banda Aceh 2007 – 2027 dan RTRW Tahun 2009 – 2029. Artinya, di dalam penyusunan RPJMD, setiap program yang disusun harus mempedomani visi, misi dan program yang telah disusun di dalam RPJP Kota Banda Aceh. Selain itu, agar tidak terjadinya tumpang tindih perencanaan dan kesemrawutan di dalam pencapaian tujuan RPJM, juga perlu mempedomani RTRW Kota Banda Aceh dengan melihat semua aspek kebijakan di dalam penggunaan ruang, serta arah pengembangan wilayah. Di samping itu, sebagai bagian integrasi nasional, RPJM Kota

juga harus memperhatikan RPJMN 2015 – 2019, karena terkait dengan agenda-agenda pembangunan nasional secara kesseluruhan untuk mencapai visi dan misi secara menyuluruh, disamping juga harus memperhatikan RPJM Aceh 2012 – 2017untukmencapai visi dan misi provinsi serta program-program yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen RPJMD Kota Banda Aceh dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

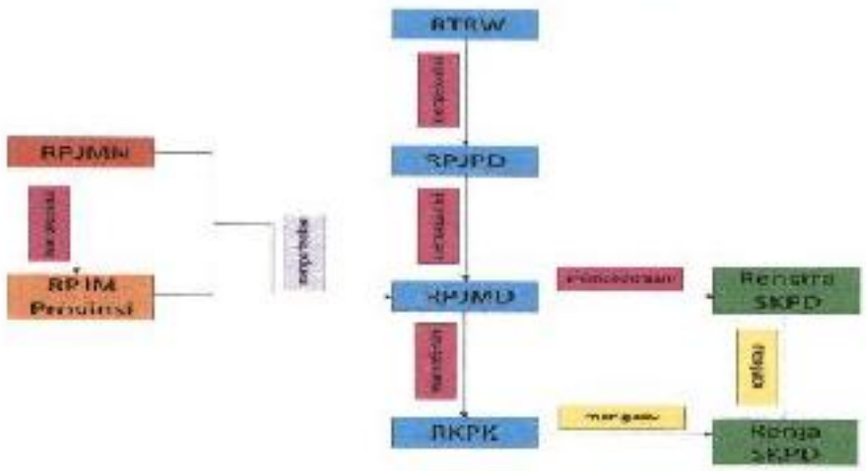

Dalam RPJMD Kota Banda Aceh dijabarkan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD yang selanjutnya dijabarkan kedalam RKPK.

1.3.1 RPJMN

RPJMN 2015-2019 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan

mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

1.3.2 RPJM Provinsi

Pemerintahan Aceh dalam RPJMD 2012 – 2017 menetapkan VISI "ACEH YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MOU HELSINKI".

Visi yang ditetapkan tersebut bermakna :

Bermartabat, adalah terciptanya kondisi masyarakat Aceh yang memiliki peradaban tinggi, akhlak mulia, cerdas, berwawasan luas, taat hukum, sehat sesuai dengan standar kehidupan serta terwujudnya Pemerintahan Aceh yang mampu melaksanakan kewenangan khusus dan istimewa yang dimilikinya.

Sejahtera, adalah terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat yang layak baik materil maupun spirituil yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat.

Berkeadilan, adalah terwujudnya pembangunan yang adil, merata, partisipatif dan proporsional sesuai dengan potensi dan keunggulan wilayah berlandaskan azas manfaat bagi kehidupan masyarakat.
Mandiri, adalah terwujudnya masyarakat dan pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui lima misi pembangunan Aceh, yaitu :

1. Memperbaiki tata kelola pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana UUPAdalam rangka mewujudkan Aceh yang bermartabat.
2. Memperkuat hubungan antara Pemerintahan Aceh dengan semua stakeholder dalam rangka konsolidasi perdamaian.
3. Menerapkan Dinul Islam dan peradaban Aceh dalam segala segi kehidupan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
5. Mewujudkan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan.
6. Membangun ekonomi Aceh yang kuat, adil dan maju dengan meningkatkan nilai tambah produk dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.

1.3.3 RTRW Kota Banda Aceh

RTRW Kota Banda Aceh memiliki tujuan penataan ruang kota untuk mewujudkan ruang kota sebagai kota jasa yang Islami, tamaddun, modern, dan berbasis mitigasi bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut ditempuh kebijakan dan strategi penataan ruang kota meliputi :

a. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang kota
b. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang kota, dan
c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis kota

Dalam RTRW Kota Banda Aceh sampai pada tahun 2029 pengembangan wilayah fungsional kota diarahkan menjadi empat WilayahPengembangan,meliputi :

1. Wilayah Pengembangan PK Lama yang meliputi wilayah Kecamatan Baiturrahman, Kuta Alam dan Kuta Raja, berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan regional dan pemerintahan;
2. Wilayah Pengembangan PK Baru meliputi wilayah Kecamatan Banda Raya dan Lueng Bata berfungsi sebagai pusat kegiatan olah raga (sport centre), terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), perdagangan dan jasa serta pergudangan;
3. Wilayah Pengembangan Keutapang meliputi wilayah Kecamatan Meuraxa, Jaya Baru dan sebagian Banda Raya berfungsi sebagai pusat kegiatan pelabuhan dan wisata;
4. Wilayah Pengembangan Ulee Kareng meliputi wilayah Kecamatan Syiah Kuala dan Ulee Kareng, berfungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan, kesehatan dan kegiatan lain yang komplementer dengan kedua kegiatan tersebut.

1.3.4 RPJPD Kota Banda Aceh

Dalam RPJPD ditetapkan Visi Pembangunan Kota Banda Aceh "TERWUJUDNYA BANDA ACEH SEBAGAI KOTA TAMADDUN, MODERN DAN ISLAMI"

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Banda Aceh tersebut ditempuh melalui 7 (Tujuh) misi pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah disertai dengan penegakan hukum.
3. Mewujudkan pembangunan Kota Banda Aceh yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota pendidikan yang berkualitas.

5. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, industri dan perikanan.
6. Mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang sehat, cerdas dan berkualitas.
7. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota wisata berbasis masyarakat dan budaya Islami.

RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017 merupakan RPJMD periode kedua dalam RPJD Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2027.Dalam jangka waktu 20 tahun ke depan Kota Banda Aceh diharapkan menjadi kota yang penduduknya mempunyai peradaban yang tinggi, menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat yang dilandasi oleh kearifan lokal dan nilai-nilai Islam.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Di dalam bab Pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum yang terkait, hubungan antar dokumen, sistematika, serta maksud dan tujuan dari pentingnya penyusunan dukumen RPJM ini.

Di dalam Bab II yang menjelaskan tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, menguraikan tentang berbagai aspek-aspek daerah yang terkait dengan geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing yang dimilikin oleh Kota Banda Aceh.

Di dalam Bab III dijelaskan tentang Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dengan menjelaskan bagaimana kinerja keuangan di masa lalu serta kebijakan-kebijakan pengelolaannya, serta kerangka pencanaan.

Di dalam Bab IV dijelaskan Analisis Isu-isu Strategis, yaitu isu-isu yang menjadi trend serta berkembang dengan pesat di dalam waktu waktu terakhir, serta isu-isu yang berkembang secara nasional dan internasional, atau juga merupakan isu menjadi perhatian Wali Kota atau Wakil Wali Kota. Di sini dijelaskan juga apa permasalah yang dihadapai dengan isu-isu tersebut.

Di dalam Bab V diuraikan dan disajikan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan.

Di dalam Bab VI diuraikan strategi-strategi yang ditempuh untuk pencapaian tujuan program dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap prgram yang telah disusun.

Di dalam Bab VII, diuraikan tentang kebijakan-kebijakan umum yang ditempuh untuk setiap program yang telah disusun, serta program-program pembangunan Kota Banda Aceh.

Di dalam Bab VIII dijelaskan tentang indikasi anggaran menurut SKPD penanggung jawab setiap tahunnya.

Di dalam Bab IX dijelaskan tentang penetapan indikator kinerja daerah dari setiap program pembangunan yang telah disusun.

Didalam Bab X dijelaskan tentang pedoman transisi dan kaedah pelaksanaan yang menjelaskan bahwa RPJM Kota ini penting untuk menjadi pedoman di dalam penyusunan RKPD dan APBD, serta pedoman untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan di tahun pertama. Di samping itu juga ditegaskan tentang pentingnya menjadikan RPJM ini sebagai pedoman dasar di dalam pelaksanaan pembangunan yang konsisten.

1.5 Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Penyusunan dokumen RPJMD Kota Banda Aceh 2012 – 2017 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan selama limatahun ke depan. RPJMD ini menjadi dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang sejalan dengan visi dan misi Walikota Banda Aceh untuk menyelenggarakan setiap tahap pembangunan secara periodik tahunan selama lima tahun baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pengawasan.

1.5.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD adalah menciptakan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program pembangunan guna menjamin penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan serta mencapai tujuan akhir pembangunan menciptakan masyarakat kota yang sejahtera.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah

Secara geografis Kota Banda Aceh memiliki posisi sangat strategis yang berhadapan dengan negara-negara di Selatan Benua Asia dan merupakan pintu gerbang Republik Indonesia di bagian Barat. Kondisi ini merupakan potensi yang besar, ditinjau dari sudut ekonomi dan geografis, apalagi didukung oleh adanya kebijakan pengembangan KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) dan dibukanya kembali Pelabuhan Bebas Sabang, serta era globalisasi.

Potensi tersebut secara tidak langsung akan menjadi peluang bagi Kota Banda Aceh khususnya dan Provinsi Aceh secara umum untuk lebih membuka diri terhadap pengaruh daerah sekitarnya maupun dunia luar atau lebih mengenalkan dan menumbuhkan citra serta jati diri dalam ajang nasional maupun internasional.

Letak geografis Kota Banda Aceh berada antara 05°30' – 05°35' LU dan 95°30' – 99°16' BT, yang terdiri dari sembilan kecamatan, 70 desa dan 20 Gampong dengan luas wilayah keseluruhan ± 61,36 km² (lihat **Tabel 2.1.** dan **Gambar 2.1.**).

Tabel 2.1
Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan
di Kota Banda Aceh

No.	KECAMATAN	LUAS	
		(Km^2)	Persentase
1.	Kec. Meuraxa	7,26	11,83
2.	Kec. Baiturrahman	4,54	7,40
3.	Kec. KutaAlam	10,05	16,38
4.	Kec. Syiah Kuala	14,24	23,21
5.	Kec. UleeKareng	6,15	10,02
6.	Kec. Banda Raya	4,79	7,81
7.	Kec. Kuta Raja	5,21	8,49
8.	Kec. Lueng Bata	5,34	8,70
9.	Kec. Jaya Baru	3,78	6,16
JUMLAH		**61,36**	**100,00**

Sumber :Statistik Banda Aceh 2014, BPS Kota Banda Aceh

Adapun batas batas administrasi wilayah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Baronа Jaya dan Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh



Sumber : http://bappeda.bandaacehkota.go.id/webgis

2.1.1.2 Kondisi Topografi

Kondisi topografi (ketinggian) Kota Banda Aceh berkisar antara -0,45 m sampai dengan +1,00 m di atas permukaan laut (dpl), dengan rata-rata ketinggian 0,80 m dpl. Bentuk permukaan lahannya (fisiografi) relatif datar dengan kemiringan (lereng) antara 2 – 8 persen. Bentuk permukaan ini menandakan bahwa tingkat erosi relatif rendah, namun sangat rentan terhadap genangan khususnya pada saat terjadinya pasang dan gelombang air laut terutama pada wilayah bagian utara atau pesisir pantai.

aDalam lingkup makro, Kota Banda Aceh dan sekitarnya secara topografi merupakan dataran banjir Krueng Aceh dan 70 persen wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 5 meter dpl. Ke arah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang dengan ketinggian hingga 50 meter dpl. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah

barat dan timur dengan keringgian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut.

Kondisi topograf dan fisiografi lahan sangat berpengaruh terhadap sistem drainase. Kondisi drainase di Kota Banda Aceh cukup bervariasi, yaitu jarang tergenang seperti pada wilayah timur dan selatan kota, kadang-kadang tergenang dan tergenang terus-menerus seperti pada kawasan rawa-rawa/genangan air asin, tambak dan atau pada lahan dengan ketinggian di bawah permukaan laut baik pada saat pasang maupun surut air laut.

Lebih jelasnya gambaran kondisi topografi Kota Banda Aceh dapat dilihat pada **Gambar 2.3.**

Gambar 2.2.
Peta Kontur, ketinggian (m) di Kota Banda Aceh

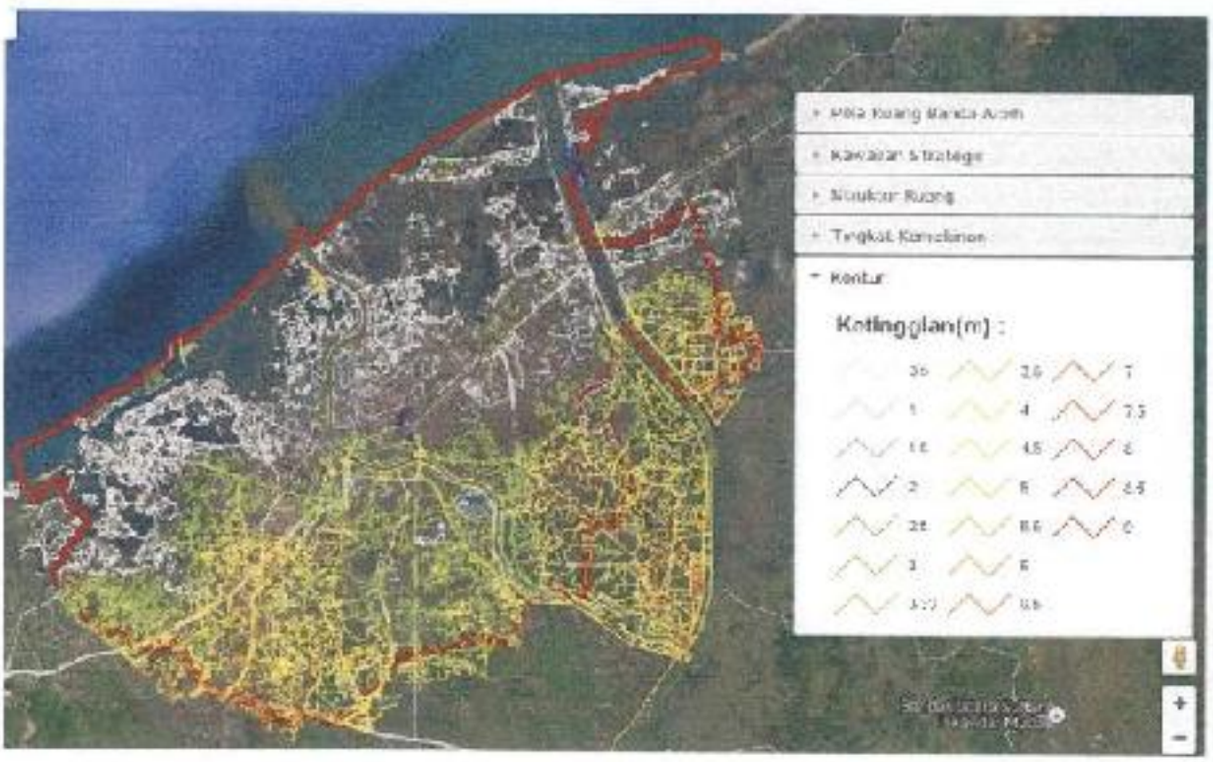

Sumber : http://bappeda.bandaacehkota.go.id/webgis

2.1.1.3 Kondisi Geomorfologi

Secara umum geomorfologi wilayah Kota Banda Aceh terletak di atas formasi batuan vulkanis tertier (sekitar Gunung Seulawah dan Pulau Breueh), formasi batuan sedimen, formasi endapan batu (di sepanjang Kr. Aceh), formasi batuan kapur (di bagian timur), formasi batuan vulkanis tua terlipat (dibagian selatan), formasi batuan sedimen terlipat dan formasi batuan dalam.

Geomorfologi daerah pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar dibagi menjadi pedataran yang terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian Kecamatan Kuta Raja, dan pesisir pantai yang terletak di wilayah barat atau sebagian Kecamatan Meuraxa.

Daerah pedataran di pesisir Kota Banda Aceh secara umum terbentuk dari endapan sistim marin yang merupakan satuan unit yang berasal dari bahan endapan (aluvial) marin yang terdiri dari pasir, lumpur dan kerikil. Kelompok ini dijumpai di dataran pantai yang memanjang sejajar dengan garis pantai dan berupa jalur-jalur beting pasir resen dan subresen. Beting pasir resen berada paling dekat dengan laut dan selalu mendapat tambahan baru yang berupa endapan pasir, sedangkan beting pasir subresen dibentuk oleh bahan-bahan yang berupa endapan pasir tua, endapan sungai, dan bahan-bahan aluvial/koluvial dari daerah sekitarnya.

2.1.1.4 Koncisi Geologi

Secara geologis, Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif yang memanjang dari Banda Aceh di utara hingga Lampung di selatan, yang dikenal sebagai Sesar Semangko (Semangko Fault). Oleh karenanya daerah yang terlintasi patahan ini rentan terhadap gempa dan longsor.

Kota Banda Aceh terletak diantara dua patahan (sebelah timur – utara dan sebelah barat – selatan kota). Berada pada pertemuan Plate Euroasia dan Australia berjarak + 130 km dari garis pantai barat sehingga daerah ini rawan terhadap tsunami. Litologi Kota Banda Aceh merupakan susunan batuan yang kompleks, terdiri dari batuan sedimen, meta sedimen, batu gamping, batuan hasil letusan gunung api, endapan alluvium, dan intrusi batuan beku, berumur Holosen hingga Pra-Tersier, dan secara umum dibagi atas 4 (empat) kelompok, yaitu :Alluvium: Batuan Kuarter (sedimen dan volkanik); Batuan Tersier (sedimen dan volkanik); serta Batuan metasedimen, malihan, dan terobosan Pra-Tersier.

Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif Sesar Semangko yang memanjang dari Banda Aceh hingga Lampung. Patahan ini bergeser sekitar 11 cm/tahun dan merupakan daerah rawan gempa dan longsor. Ruas-ruas patahan Semangko di Pulau Sumatera dan juga kedudukannya terhadap Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh diapit oleh dua patahan di Barat dan Timur kota, yaitu patahan Darul Imarah dan Darussalam, dan kedua patahan yang merupakan sesar aktif tersebut diperkirakan bertemu pada pegunungan di Tenggara Kota. Sehingga sesungguhnya Banda Aceh adalah suatu dataran hasil ambalasan sejak Pilosen, membentuk suatu Graben, sehingga dataran Banda Aceh ini merupakan batuan sedimen yang berpengaruh kuat apabila terjadi gempa di sekitarnya. Lebih jelasnya kondisi geologi ini dapat dilihat pada **Gambar 2.4.**

Gambar 2.3.
Peta Kontur dan Patahan Geologi Provinsi Aceh



Sumber : http://bappeda.bandaacehkota.go.id/webgis

2.1.1.5 Kondisi Hidrologi

Terdapat 7 (tujuh) sungai yang melalui Kota Banda Aceh yang berfungsi sebagai daerah aliran sungai dan sumber air baku, kegiatan perikanan, dan sebagainya. Wilayah Kota Banda Aceh memiliki air tanah yang bersifat asin, payau dan tawar. Daerah dengan air tanah asin terdapat pada bagian utara dan timur kota sampai ke tengah kota. Air payau berada di bagian tengah kota membujur dari timur ke barat. Sedangkan wilayah yang memiliki air tanah tawar berada di bagian selatan kota membentang dari Kecamatan Baiturrahman sampai Kecamatan Jaya Baru, yang juga mencakup Kecamatan Lueng Bata, Ulee Kareng, Banda Raya. Tabel 2.2 dan Gambar 2.4 menjelaskan nama-nama sungai dan luas daerah alirannya.

Tabel 2.2
Luas Daerah Aliran Sungai yang Melalui Kota Banda Aceh

No.	Nama Sungai	Luas DaerahAliran (Km^2)
1	Krueng Aceh	1.712,00
2	Krueng Daroy	14,10
3	Krueng Doy	13,17
4	Krueng Neng	6,55
5	Krueng Lhueng Paga	18,25
6	Krueng Tanjung	30,42
7	Krueng Titi Panjang	7,80

Sumber: URRP Banda Aceh City, JICA, 2005

Mengacu pada Peta Hidrogeologi Lembar 0421 Banda Aceh (Sumatera) Skala 1:250.000 yang disusun oleh Soetrisno S. Tahun 1993 diterbitkan oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan (DGTL) Bandung **Gambar 2.4**, menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh mempunyai keeenderungan tersusun oleh akifer air tanah berlapis banyak dengan keterusan rendah hingga sedang, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah umumnya dekat muka tanah, debit sumur umumnya kurang dari 5 liter/detik. Komposisi litologi dan kelulusannya terdiri dari kerikil, pasir, sebagian setengah padu, serta lumpur. Kelulusan litologi-litologi itu bervariasi dari sedang hingga tinggi.Arah aliran air tanah mempunyai keeenderungan tegak lurus ke arah pantai. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengontrol sebagian besar wilayah Kota Banda Aceh yaitu DAS Krueng Aceh.

Gambar 2.4
Peta Hidrogeologi Kota Banda Aceh

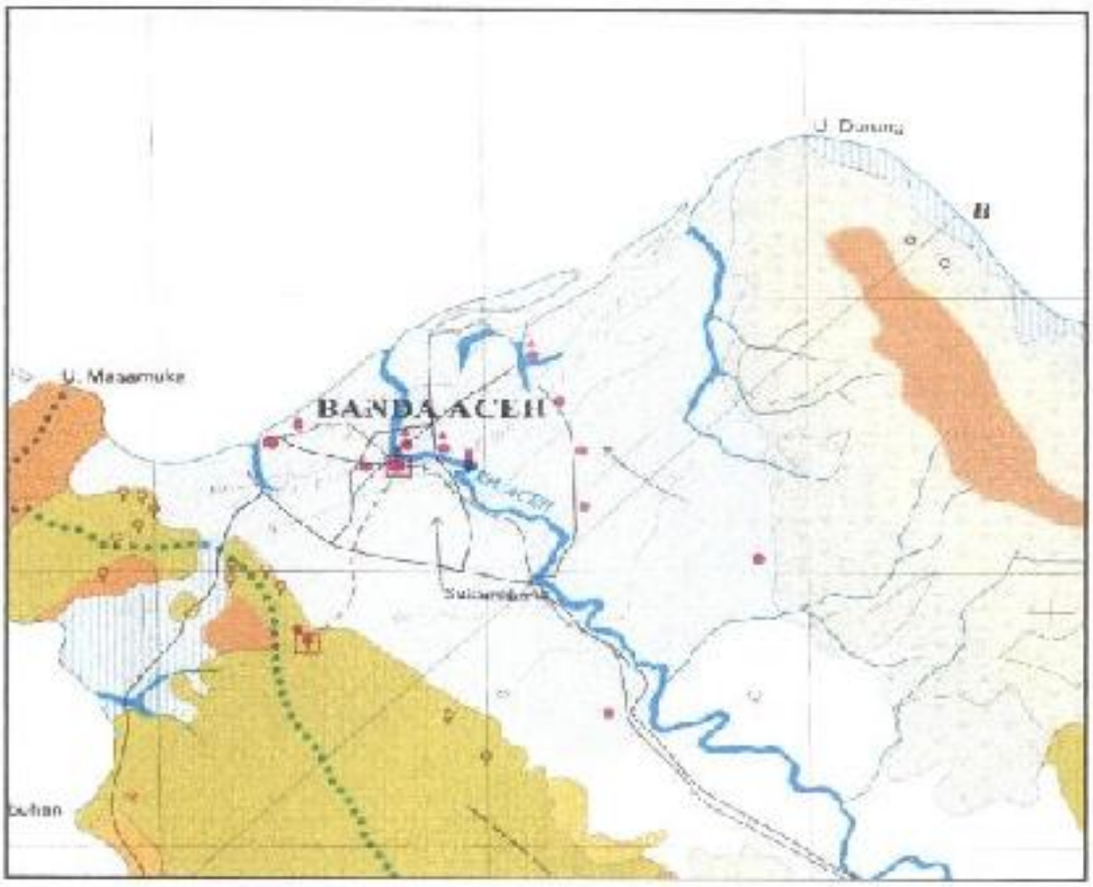

Sumber: Direktorat Geologi Tata Lingkungan (DGTL) Bandung, 2005

Kondisi air tanah tersebut mengalami perubahan yang sangat mendasar akibat bencana 26 Desember 2004. Kajian air tanah Kota Banda Aceh setelah bencana telah dilakukan oleh BGR (*Bundesanstalt für Gemüsserschaften und Rohstoffe / Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Hannover*) yang menitikberatkan pada kadar garam air tanah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian BGR tersebut disajikan dalam **Gambar 2.5.**

Gambar 2.5
Peta Resistivity Pada Kedalaman 5 Meter Dibawah Muka Tanah

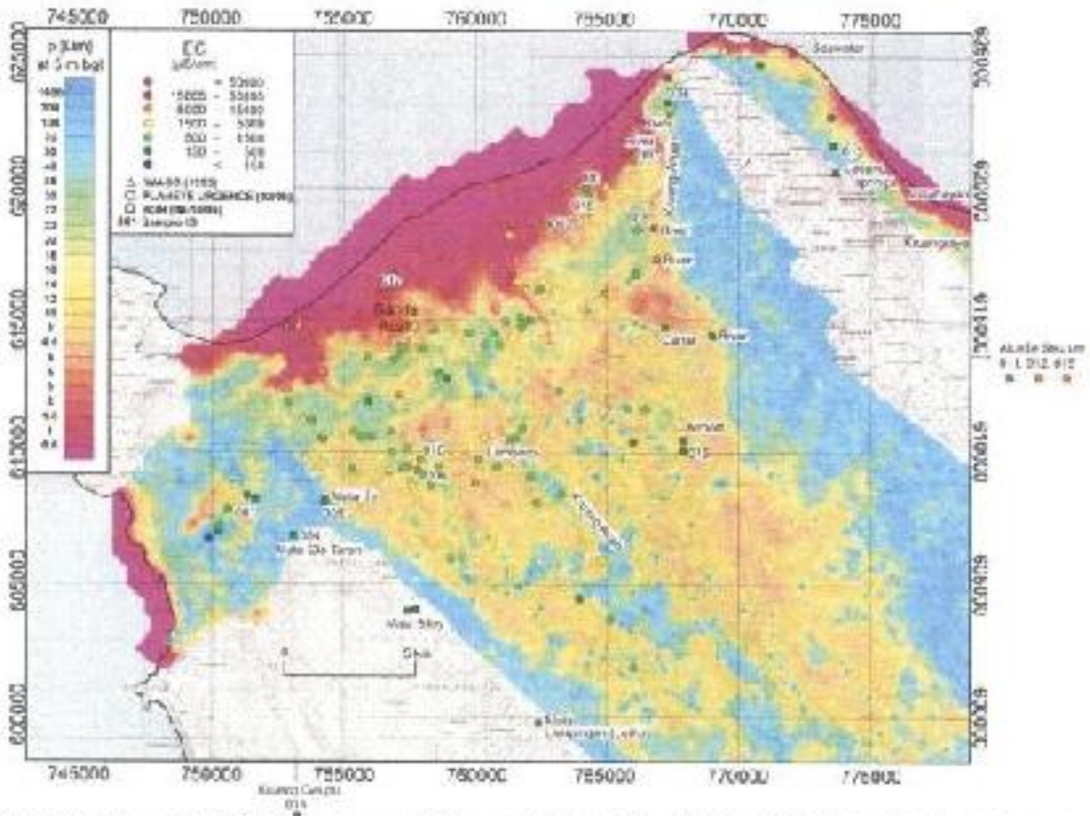

Sumber: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe / Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Hannover (BGR), 2006

Penentuan *salinity range* (kisaran kadar garam air) didasarkan pada *Specific Electrical Conductivity (EC)* dan *Total Dissolved Solids (TDS)* yang diturunkan dari analisis kation dan anion pada sampel air. Secara umum, kadar garam kisaran EC and TDS yang digunakan pada laporan BGR itu dapat dilihat pada **Tabel 2.3**

Tabel 2.3
Acuan Penentuan Kisaran Kadar Garam Air
Berdasarkan EC dan TDS

KADAR GARAM KISARAN	EC [µS/CM]	TDS [MG/L]
Air Tawar	Up to 1500	Up to 1000
Air Payau	> 1500 – 15,000	>1000 – 10,000
Air Asin	> 15.000	> 10,000

Sumber : (BGR/ Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, 2006)

Kondisi tatanan air tanah Kota Banda Aceh pasca bencana yang memperlihatkan penyebaran air asin, air payau dan air tawar dapat dilihat pada **Gambar 2.7.**

Gambar 2.6
Peta HidrologiKota Banda Aceh

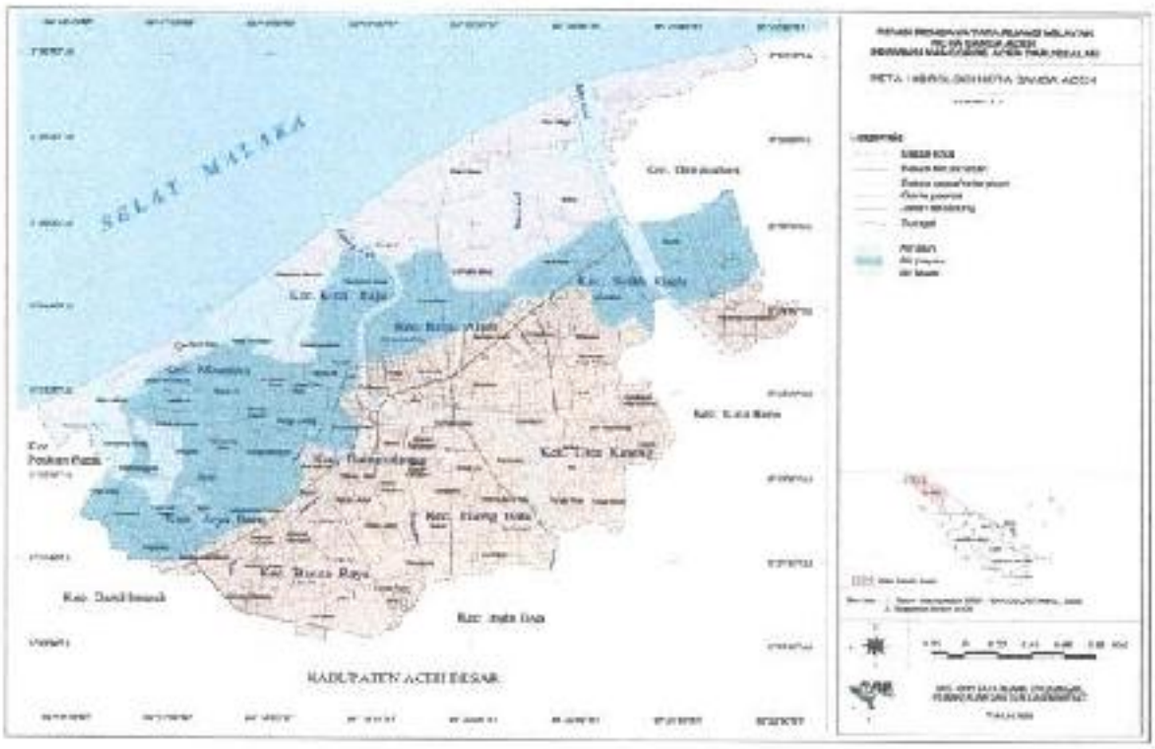

Sumber: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe / Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Hannover (BGR), 2006

Air asin dan air payau termasuk kategori air yang tidak layak untuk dikonsumsi, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan PERMENKES REPUBLIK INDONESIA NO. 492/MENKES/PER/IV/20102010tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dimana salah satu parameternya yakni Klorida maksimum yang diperbolehkan 250 mg/l dan Total Zat Padat Terlarut (*Total Dissolved Solids*) maksimum yang diperbolehkan adalah 500 mg/l.

2.1.1.6 Kondisi Klimatologi

Berdasarkan data klimatologi untuk wilayah Kota Banda Aceh yang diperoleh dari Stasiun Meteorologi Blang Bintang tahun 2013, menunjukkar bahwa suhu udara rata-rata bulanan berkisar antara 25,5°C hingga 27°C, dengan tekanan antara 1009,7 milibar.

Curah hujan Kota Banda Aceh berkisar 135,3 mm, kelembaban udara 80,7 persen, dan jumlah hari hujan 12,6 hh. Data tekanan udara, suhu, kelembaban nisbi, curah hujan dan jumlah hari hujan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Rata-Rata Tekanan Udara, Suhu Udara, Kelembaban Nisbi, Curah Hujan DanJumlah Hari Hujan Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2013

Tahun	Tekanan Udara Rata-Rata (mb)	Suhu Udara Rata-Rata (C0)	Kelembaban Nisbi Rata-Rata	Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan
2013	1009,7	27,0	80,7	135,3	12,6
2012	1009,5	27,2	78,0	91,5	10.0
2011	1009.4	26.9	79.2	105.6	13
2010	1009.5	27.3	81.4	-	-
2009	1009.6	26.9	78.7	-	-
2008	1010.9	26.8	84	-	-
2007	1010.9	26.8	84		

Sumber : Stasiun Banda Aceh 2014

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Data dan informasi penggunaan lahan dalam suatu wilayah akan memberikan gambaran mengenai tingkat penggunaan lahan, yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan pembangunan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan, mengatur, menertibkan, dan mengendalikan kegiatan pembangunan. Pengaruh bencana Tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu telah mengakibatkan kerusakan parah pada wilayah Kota Banda Aceh khususnya pada kawasan pesisir. Kondisi tersebut telah mempengaruhi pola penggunaan lahan di Kota Banda Aceh di masa yang akan datang, yang cenderung berkembang ke arah bagian Timur dan Selatan wilayah kota.



Kawasan Pinggir Sungai Krueng Aceh di Kota Banda Aceh

Berdasarkan kondisi Kota Banda Aceh pasca tsunami tersebut hingga saat ini secara umum dapat dilihat pola penggunaan lahannya yang terdiri dari kawasan terbangun seluas ± 2.600 Ha atau 42,37 persen dan kawasan non terbangun atau berupa ruang terbuka seluas ± 3.221 Ha atau 52,49persen. Kawasan terbangun meliputi permukiman, perkantoran baik pemerintah maupun swasta, pelayanan umum, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribadatan, pelabuhan, rekreasi dan wisata, sedangkan ruang terbuka

meliputi taman, hutan kota, kawasan lindung, pemakaman, rawa-rawa, dan tambak atau areal genangan. Adapun lebih jelasnya pola penggunaan lahan ini secara rinci dapat pada Tabel 2.5, Tabel 2.6 dan Gambar 2.7.

Kawasan terbangun ini merupakan faktor yang menimbulkan bangkitan lalu lintas, baik dari permukiman menuju perdagangan dan jasa, perkantoran, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kegiatannya lainnya, begitu juga sebaliknya dari kawasan aktivitas kegiatan menuju ke kawasan permukiman.

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan Untuk Kawasan Lindung Kota Banda Aceh

Tahun	Pemanfaatan	Kawasan lindung						Total luas kawasan lindung
		Sempadan pantai	Hutan bakau	Ruang terbuka	Hutan kota	Taman kota	Cagar budaya	
2014	JUMLAH	49,27	2,28	1994,77	8,18	16,29	15,67	2086,46
	PERSENTASE	2%	0%	96%	0%	1%	1%	100%
2013	JUMLAH	49,27	2,28	2006,77	8,18	16,29	15,67	2098,46
	PERSENTASE	2%	0%	96%	0%	1%	1%	100%
2012	JUMLAH	49,27	2,28	2018,77	8,18	16,29	15,67	2110,46
	PERSENTASE	2%	0%	96%	0%	1%	1%	100%
2011	JUMLAH	49,27	2,28	2030,77	6,18	16,29	15,67	2122,46
	PERSENTASE	2%	0%	96%	0%	1%	1%	100%
2010	JUMLAH	49,27	8,28	2044,77	0,18	16,29	15,67	2134,46
	PERSENTASE	2%	0%	96%	0%	1%	1%	100%
2009	JUMLAH	49,27	8,28	2056,77	0,18	16,29	15,67	2146,46
	PERSENTASE	2%	0%	96%	0%	1%	1%	100%
2008	JUMLAH	49,27	8,28	2068,77	0,18	16,29	15,67	2158,46
	PERSENTASE	2%	0%	96%	0%	1%	1%	100%

Sumber : Dinas PU 2014

Tabel 2.6
Penggunaan Lahan Untuk Kawasan Budidaya Kota Banda Aceh

TAHUN	PEMANFAATAN	KAWASAN BUDIDAYA									
		Permukiman	Perdagangan & Jasa	Perkantoran	Pariwisata	Pertanian	Pelayanan Umum	Pertahanan & Keamanan	Perkebunan	Air	TOTAL KAWASAN BUDIDAYA
2014	JUMLAH	2350,58	146,57	140,2	35,31	3,63	588,8	61,5	24,44	903	4019,54
	PERSENTASE	58%	4%	3%	1%	0%	10%	2%	1%	22%	100%
2013	JUMLAH	2357,00	140,07	138,7	35,31	3,63	588,80	61,5	24,44	903	4057,54
	PERSENTASE	58%	3%	3%	1%	0%	10%	2%	1%	22%	100%
2012	JUMLAH	2363,58	133,63	137,2	35,31	3,63	587,89	61,5	24,44	903	4025,54
	PERSENTASE	58%	3%	3%	1%	0%	10%	2%	1%	22%	100%
2011	JUMLAH	2316,09	181,07	166,7	35,31	3,63	587,80	61,5	24,44	903	4013,54

	PERSENTASE	58%	3%	3%	1%	0%	10%	2%	1%	23%	100%
2010	JUMLAH	2340,58	126,57	134,2	20,31	3,63	386,89	61,6	24,44	903	4061,54
	PERSENTASE	58%	3%	3%	1%	0%	10%	2%	1%	23%	100%
2009	JUMLAH	2305,04	122,05	132,7	20,31	3,63	386,39	61,6	24,44	903	3969,54
	PERSENTASE	59%	3%	3%	1%	0%	10%	2%	1%	23%	100%
2008	JUMLAH	2329,59	117,55	131,2	20,31	3,63	385,9	61,6	24,44	903	3977,54
	PERSENTASE	59%	3%	3%	1%	0%	10%	2%	1%	23%	100%

Sumber : Dinas PU 2014

Gambar 2.7.
Peta RTRW Kota Banda Aceh 2009 - 2029

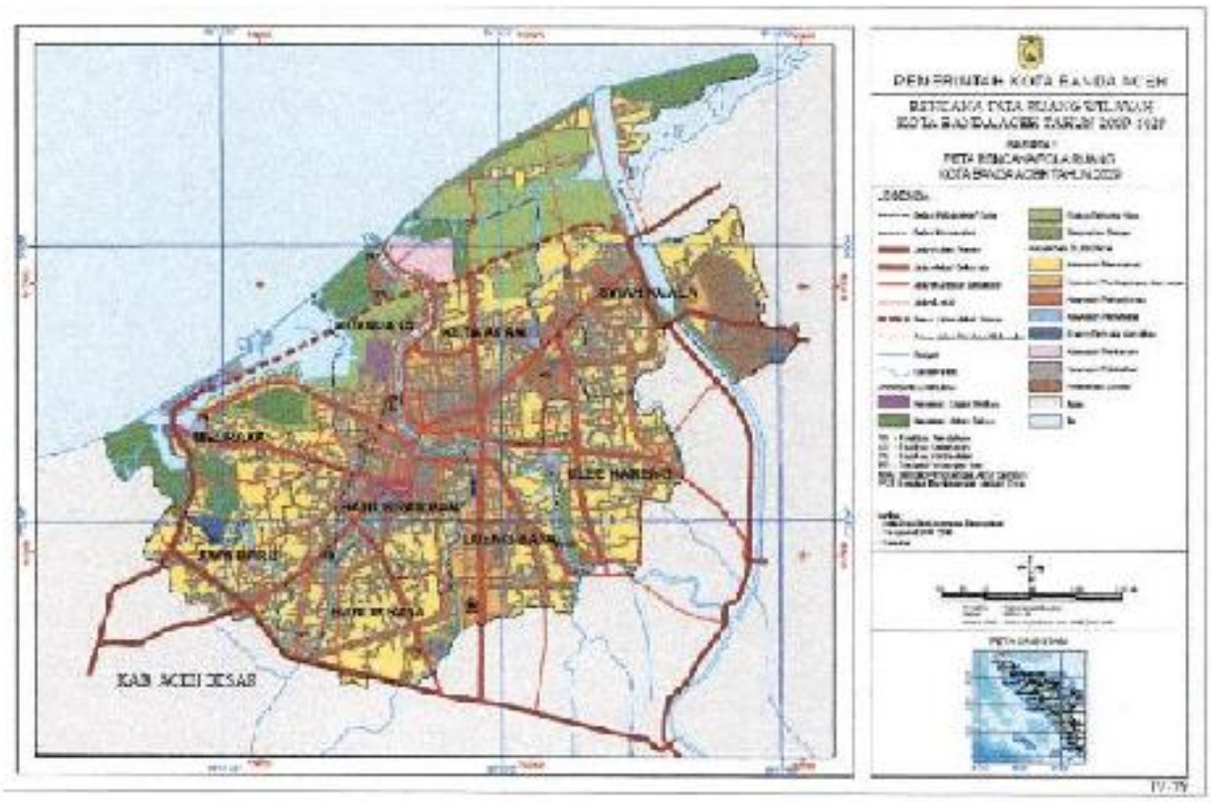

Sumber : Qanun RTRW Kota Banda Aceh No.4 Tahun 2009

Dari hasil pengamatan di lapangan, pembangunan perumahan baru kondisi sesudah bencana gempa dan tsunami di kawasan prioritas umumnya adalah rumah kavling sedang (antara 200-500 m²), kavling besar (di atas 500 m²) dan bahkan ada pembangunan rumah dengan ukuran kavling sangat besar (di atas 1.000 m²) yakni di Gampong Batoh (sekitar Jl. Fajar Harapan).

Pembangunan rumah umumnya dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat pada lahan kosong di antara kelompok rumah-rumah yang ada atau pada kawasan baru dengan cara mengurug lahan pertanian (lahan basah atau sawah) karena sebagian lahan di kawasan prioritas

(Kecamatan Baiturrahman) masuk dalam klasifikasi *"Inland Depression Zone"*, yakni ketinggian permukaan tanahnya lebih rendah dari kawasan sekitarnya dan sebagian tergenang air. Cara pembangunan kavling per kavling tersebut menyebabkan tidak terintegrasinya pola aliran drainase yang dapat mengakibatkan terjadinya genangan/banjir.

Selain itu, pembangunan rumah-rumah baru tersebut juga berdampak pada terbentuknya ketidakberaturan jaringan jalan lingkungan permukiman setempat karena masing-masing rumah/kelompok rumah membuat jalan akses masing-masing (jalan ke rumah/kelompok rumah ini dinamai "Lorong"). Pembangunan jalan/lorong tersebut sebagian besar tidak dilengkapi dengan saluran drainase. Dengan demikian langkah-langkah penting dalam upaya penataan perlu ditetapkan ruas-ruas jalan kolektor dan jalan lingkungan sehingga terbentuk pola hirarki jaringan jalan yang dilengkapi dengan saluran drainase.

2.1.2 Potensi Pengembangan Daerah

2.1.2.1 RTRW Kota Banda Aceh

Sebelum terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu, Banda Aceh sudah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disahkan melalui Qanun (Perda) Nomor 3 Tahun 2003 tentang RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2002-2010.

Pengaruh gelombang tsunami telah menyebabkan sebagian besar (60 persen) wilayah kota mengalami kehancuran terutama pada kawasan-kawasan yang berada pada radius 5 km dari garis pantai. Pasca tsunami, aktivitas pembangunan berjalan dengan pesat, baik yang dilakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR-Aceh Nias), Pemerintah Daerah, lembaga donor, pihak swasta maupun perorangan. Dalam hal ini kegiatan pembangunan tersebut cenderung berjalan tanpa mengikuti ketentuan penataan ruang yang telah ditetapkan, atau telah terjadinya

pergeseran fungsi ruang sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2003.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, sebagai pedoman dalam mengarahkan kegiatan pembangunan di Kota Banda Aceh, Pemerintah telah menyiapkan Blue Print Tata Ruang yang disahkan melalui Perpres Nomor 30 Tahun 2005. Mengingat muatan teknis yang terkandung dalam Blue Print tersebut lebih bersifat makro lingkup wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, dan agar produk rencana tata ruang tersebut lebih dapat menjadi pedoman operasional kegiatan pembangunan di lapangan, maka Pemerintah Kota Banda Aceh melalui dukungan dan kerjasama dengan BRR, JICA, GTZ dan Departemen PU telah menyelesaikan draft RTRW Kota Banda Aceh pasca tsunami.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai pengganti UU No. 24 Tahun 1992, maka setiap daerah harus melakukan revisi terhadap RTRW yang telah dimiliki, agar direncanakan untuk jangka waktu 20 tahun dan menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam RTRWN (PP No. 26 tahun 2008). Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 26 tahun 2007 tersebut bahwa sebelum dilakukannya pengesahan atau penerbitan perda (qanun) RTRW harus terlebih dahulu mendapat **"persetujuan substansi"** dari Menteri Pekerjaan Umum.

Untuk memenuhi maksud tersebut, Kota Banda Aceh telah menyelesaikan Qanun (perda) Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029. Proses pengesahan qanun RTRW Kota Banda Aceh tersebut sudah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi persetujuan substansi dari **Gubernur Aceh sesuai dengan surat Nomor : 032/55564 tanggal 28 Juli 2009** dan rekomendasi dari **Departemen PU Nomor : HK.01.03-Dr/496 tanggal 3 September 2009**.

Pengembangan Banda Aceh menurut RTRWN Tahun 2008-2027, meliputi :

- Berdasarkan rencana struktur ruang pada RTRWN Tahun 2008-2027, bahwa Kota Banda Aceh ditetapkan sebagai **PKW** (Pusat Kegiatan Wilayah).
- Sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban oleh Kota Banda Aceh yang salah satunya adalah sebagai ibukota Provinsi Aceh, maka pada RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 diusulkan menjadi **PKN** (Pusat Kegiatan Nasional) yaitu berupa **PKNP.** Penetapan ini juga sejalan dengan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Tahun 2013-2033, Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 12.
- Berdasarkan RTRW Aceh Tahun 2013-2033, bahwa Banda Aceh termasuk dalam **Wilayah Pengembangan (WP) Busajan,** yang meliputi Banda Aceh Sabang Jantho.

Muatan materi yang terkandung dalam RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029, terdiri dari:

1. Isu Strategis yang Berkaitan dengan Penataan Ruang Kota Banda Aceh

Faktor *historis* (sejarah), bahwa Kota Banda Aceh merupakan pusat kerajaan Aceh yang ditandai dengan peninggalan sejarah (*heritage*), seperti kawasan Gampong Pande sebagai pusat kerajaan, makam-makam raja, taman Putroe Phang, Gunongan, Pinto Khop, Kerkhof, Taman Sari, Kawasan Blang Padang (monumen pesawat pertama RI dan bekas stadion Kutaraja), Krueng Aceh sebagai tempat sarana transportasi, dan sebagainya. Kota Banda Aceh merupakan kota hirarki Pertama di Provinsi Aceh, dengan wilayah pelayanan Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya.

Secara geografis Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan & jasa, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan wisata islami, serta keagamaan.

Pertumbuhan ekonomi kota selama ini telah merangsang tumbuhnya aktivitas pembangunan pada kawasan baru yang sebelumnya diperuntukkan sebagai kawasan non komersial dan jasa.Untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kedepan perlu dilakukan konsep penataan Kota Banda Aceh berbasis pada program *"Water Front City"* terutama pada kawasan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS).

Banda Aceh merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana alam, untuk mengatasi resiko dari dampak tersebut perlu dilakukan mitigasi bencana, dengan pengembangan ruang ke depan agar dapat menjamin keamanan dan kenyamanan dengan menyediakan ruang sebagai jalur, kawasan maupun bangunan penyelamatan penduduk ke tempat yang lebih aman.

2. Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang Kota Banda Aceh sebelumnya menunjukkan "pola radial simetris", hal ini terlihat dari pemusatan kegiatan dengan konsentrasi kepadatan di pusat kota, dimana kegiatan tersebut memanjang hampir linier mengikuti pola jaringan jalan utama dan relatif radial dengan Masjid Raya Baiturrahman dan sekitarnya sebagai pusat utama yang diperkuat oleh keberadaan Pasar Aceh dan Pasar Peunayong.

Pusat utama ini didukung oleh beberapa sub pusat pelayanan seperti Ulee Kareng, Kawasan Kampus Darussalam, Lampulo, Beurawe, Lueng Bata, Peuniti, Neusu, Seutui, dan Keutapang, serta Ulee Lheu dengan kegiatan pelabuhan dan wisatanya.

Pusat utama dan sub pusat pelayanan ini menjadi daya tarik bagi sistem pergerakan dan pengangkutan di Kota Banda Aceh. Interaksi pusat dan sub pusat memberikan dampak yang cukup besar terhadap bangkitan lalu lintas kota, karena pada pusat dan sub pusat tersebut didukung oleh kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, restoran dan aktivitas lainnya dengan karakteristik yang berbeda. Keberadaan sub pusat pelayanan menjadi perangsang tumbuh dan berkembangnya

kawasan permukiman di sekitarnya, sehingga hal ini menjadi faktor tumbuhnya hangkitan lalu lintas.

Kota Banda Aceh direncanakan dikembangkan dalam 4 Wilayah Pengembangan (WP), yaitu :

a. Wilayah Pengembangan Pusat Kota Lama

Wilayah Pengembangan ini terdiri dari wilayah Kecamatan Baiturrahman, Kuta Alam dan Kuta Raja, dengan pusat di Kawasan Pasar Aceh dan Peunayong, berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan regional dan pemerintahan.

b. Wilayah Pengembangan Pusat Kota Baru

Wilayah Pengembangan ini terdiri dari wilayah Kecamatan Banda Raya dan Lueng Bata, dengan pusat di Batoh dan Lamdom, berfungsi sebagai pusat kegiatan olah raga (sport centre), terminal AKAP dan AKDP, perdagangan dan jasa serta pergudangan.

c. Wilayah Pengembangan Keutapang

Wilayah Pengembangan ini terdiri dari wilayah Kecamatan Meuraxa dan Jaya Baru, dengan pusat di Keutapang, berfungsi sebagai pusat kegiatan pelabuhan dan wisata.

d. Wilayah Pengembangan Ulee Kareng

Wilayah Pengembangan ini terdiri dari wilayah Kecamatan Syiah Kuala dan Ulee Kareng, dengan pusat di Ulee Kareng, berfungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan, kesehatan dan kegiatan lain yang komplementer dengan kedua kegiatan tersebut

Gambar 2.8.
Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan
Kota Banda Aceh Tahun 2029

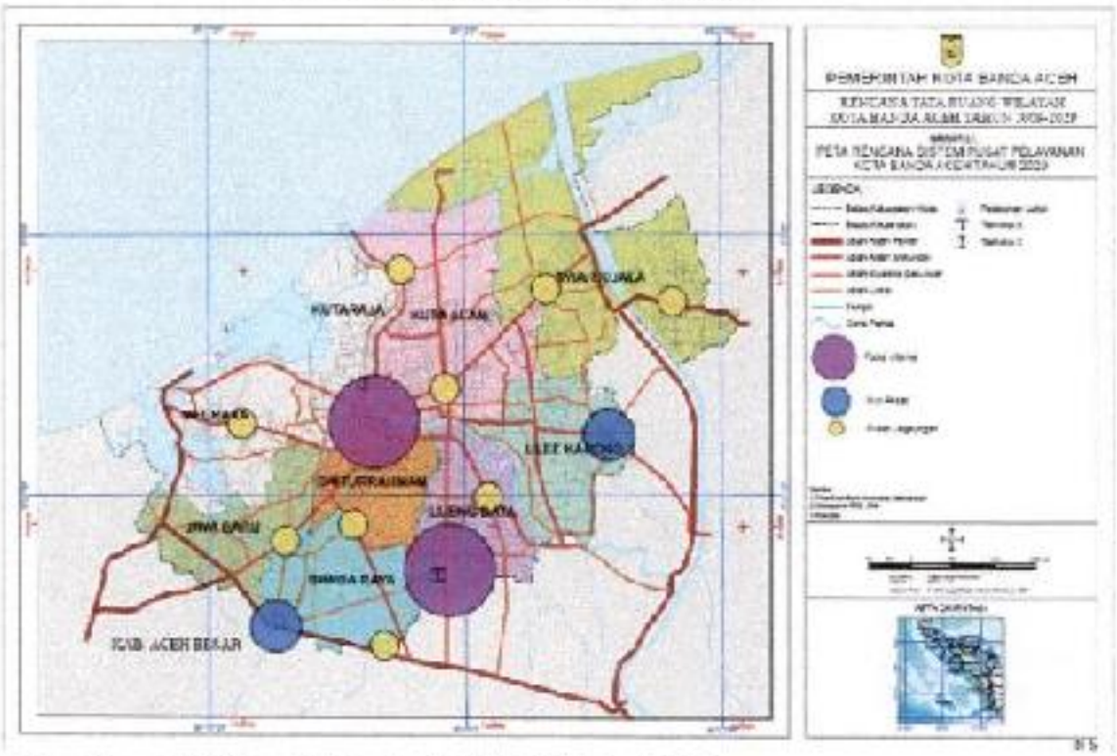

Sumber : Qanun RTRW Kota Banda Aceh No.4 Tahun 2009

3. Rencana Pola Ruang

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang direncanakan di Kota Banda Aceh terdiri dari Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Suaka Alam, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Rawan Bencana, dan Ruang Terbuka Hijau.

Gambar 2.9.
Peta Pola Ruang Kota Banda Aceh Tahun 2029

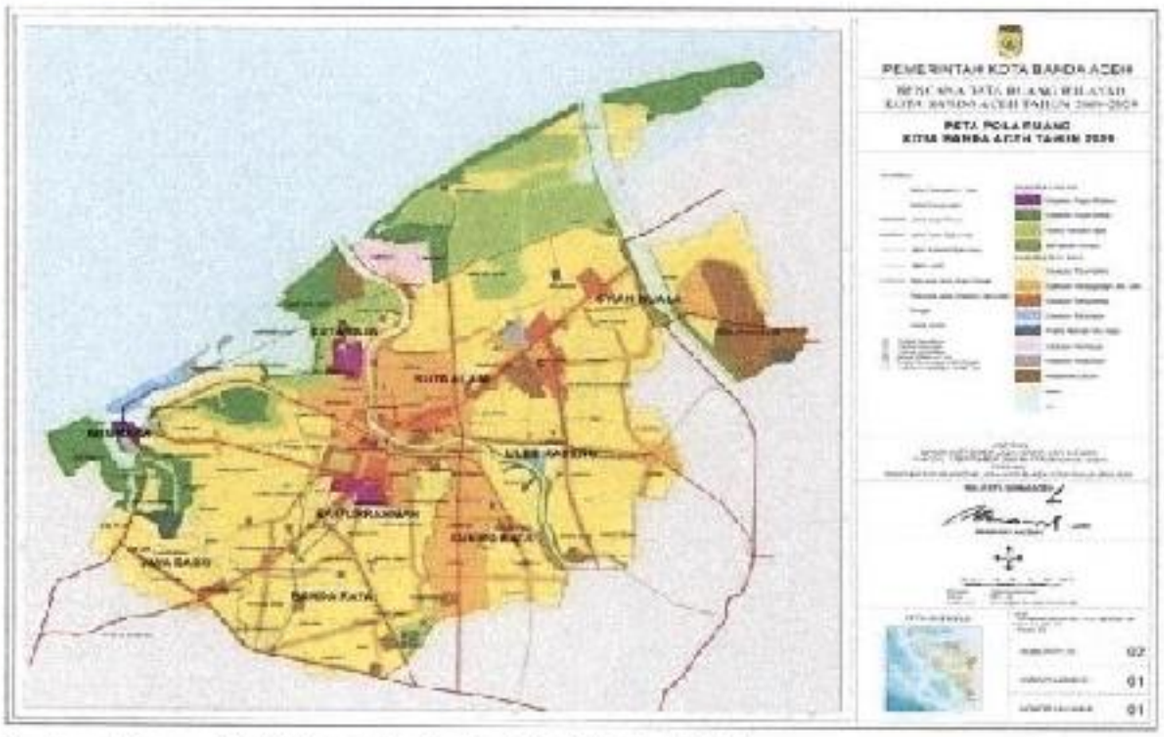

Sumber : Qanun RTRW Kota Banda Aceh No.4 Tahun 2009

b. Kawasan Budidaya

Klasifikasi peruntukan kawasan budidaya di Kota Banda Aceh meliputi Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa Komersial, Kawasan Perkantoran, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perikanan Tambak dan Perikanan Tangkap, Kawasan Pusat Olahraga, Kawasan Pelayanan Umum, Kawasan Pelabuhan, Kawasan Industri, dan Ruang Terbuka Non Hijau.

4. Rencana Kawasan Strategis, meliputi :

- Kawasan Pusat Kota Lama (Pasar Aceh, Peunayong dan sekitarnya).
- Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman dan sekitarnya.
- Kawasan Pusat Kota Baru dan sekitarnya.
- Kawasan *Water Front City*
- Kawasan Perikanan Samudera
- Kawasan Heritage Gampong Pande, Peunayong dan Neusu

- Kawasan Wisata Tsunami (Museum Tsunami, PLTD Apung, kuburan massal korban tsunami dan Mesjid Baitul Rahim di Ulee Lheue)
- Kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng

Gambar 2.10.
Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Banda Aceh



Sumber : Qanun RTRW Kota Banda Aceh No.4 Tahun 2009

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kondisi topografis Kota Banda Aceh yang bersifat dataran rendah memiliki bentang yang sangat luas berpotensi rawan bencana gempa dan tsunami, banjir genangan, gelombang pasang, angin puting beliung, kekeringan dan abrasi.

Kota Banda Aceh sesuai dengan data indeks rawan bencana Indonesia termasuk rangking 15 (lima belas) dengan kelas rawan bencana tinggi. Bencana alam gempa bumi yang berkekuatan 8,5 SR terakhir terjadi pada tanggal 11 April 2012 dengan korban 1 orang meninggal dunia

serta menimbulkan kepanikan dengan adanya isu tsunami. Untuk lebih jelasnya wilayah rawan bencana dapat dilihat pada Peta di bawah ini:

Gambar 2.11
Peta Wilayah Rawan Bencana Angin Kota Banda Aceh

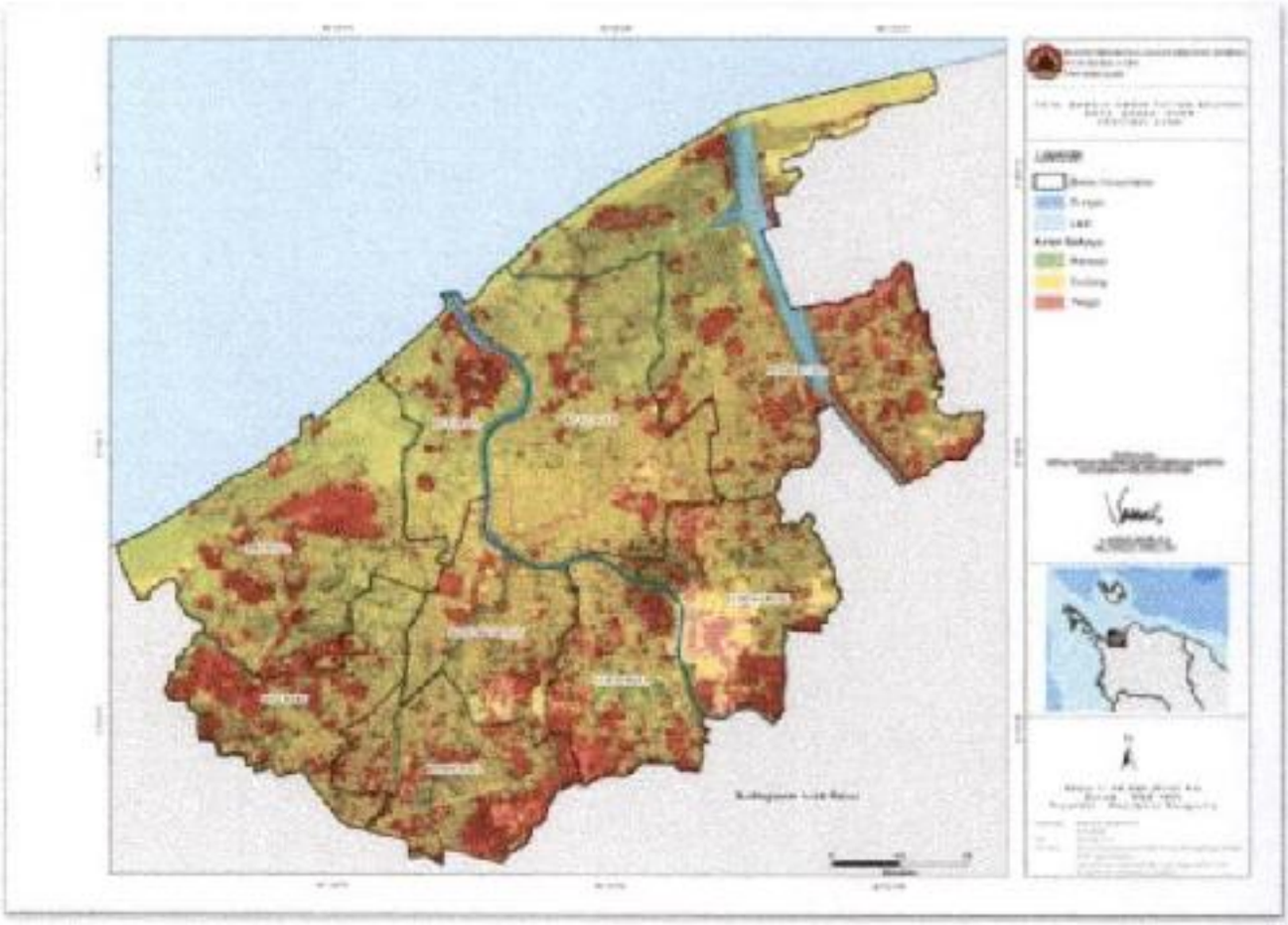

Sumber : BPBD Kota Banda Aceh

Gambar 2.12.
Peta Wilayah Rawan Bencana Banjir Kota Banda Aceh

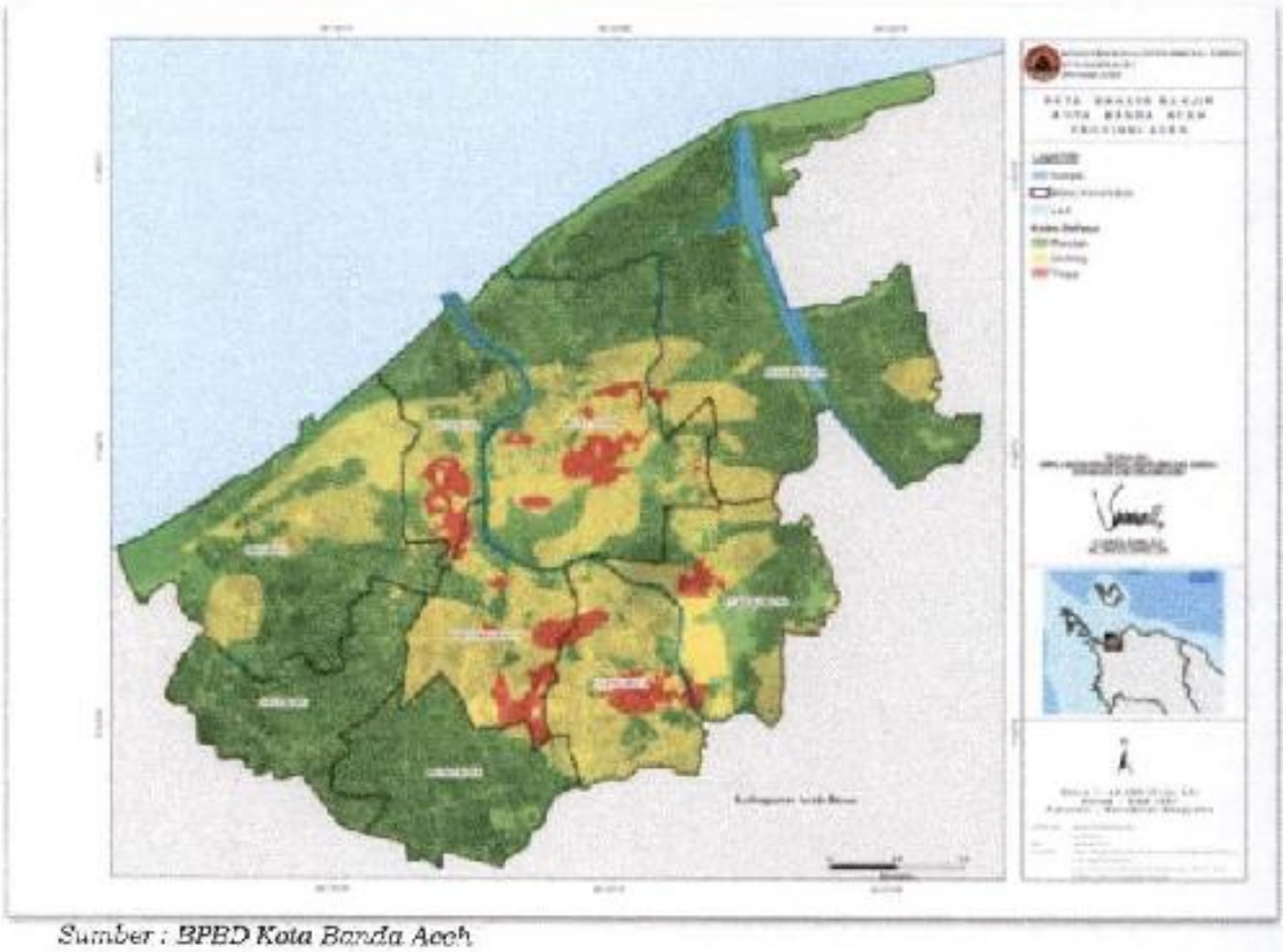

Sumber : BPBD Kota Banda Aceh

Gambar 2.13.
Peta Wilayah Rawan Bencana Gempa Kota Banda Aceh

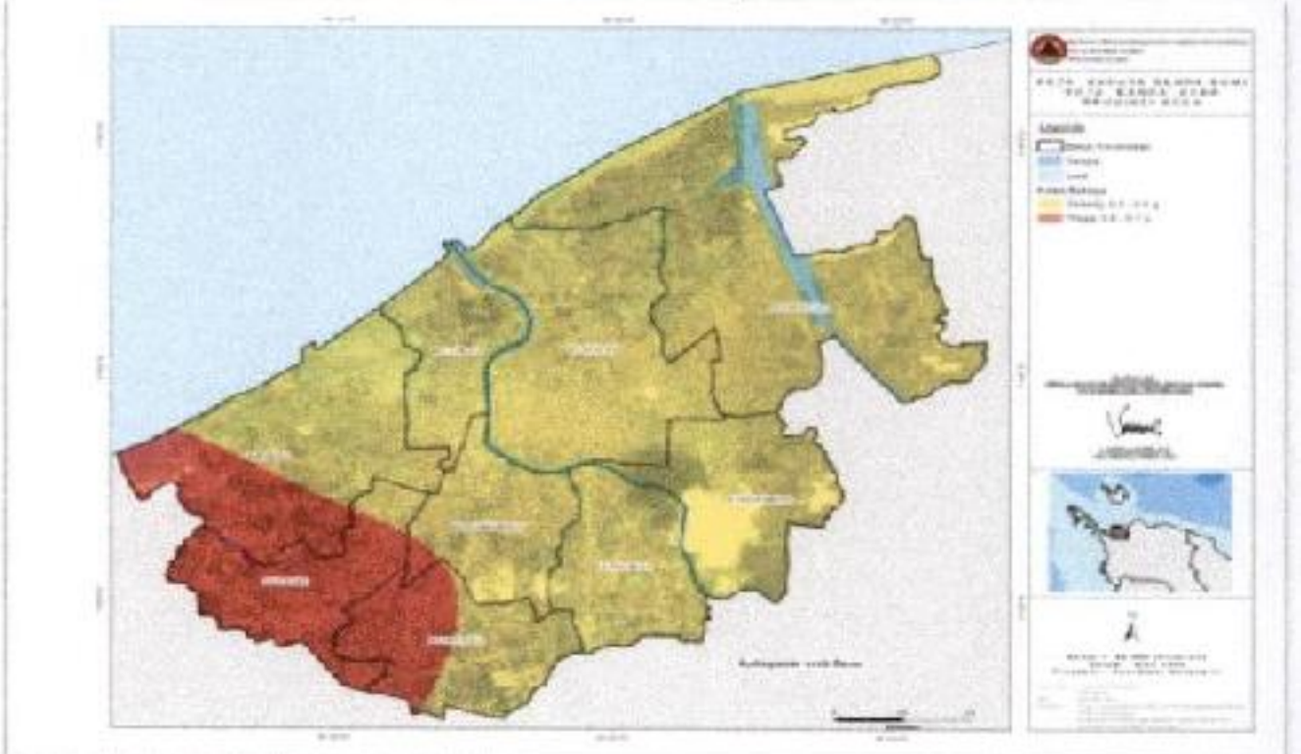

Sumber : BPBD Kota Banda Aceh

Gambar 2.14.
Peta Wilayah Rawan Bencana Tsunami Kota Banda Aceh



Sumber : BPBD Kota Banda Aceh

Potensi ancaman bencana di Kota Banda Aceh dapat dilihat dalam Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Potensi Ancaman Bencana Di Kota Banda Aceh

Bencana Geologi

NO	Jenis Ancaman			
	Tsunami	Gunung berapi	Gempa	Tanah longsor
	Kecamatan			
1 2 3 4 5 6	Meuraxa Syiah kuala Jaya Baru Kuta Alam Baiturrahman Kuta Raja		1. Meuraxa 2. Syiah kuala 3. Jaya Baru 4. Kuta Alam 5. Baiturrahman 6. Kuta Raja 7. Banda Raya 8. Ulee Kareng 9. Lueng Bata	

Bencana Hidrometeorologi

No	Jenis Ancaman				
	Banjir genangan	Angin puting beliung	Abrasi erosi	Gelombang pasang	Kekeringan
	Kecamatan				
1 2	Lueng Bata Bandar Raya	1. Syiah Kuala 2. Baiturahman 3. Kuta Alam 4. Jaya Baru 5. Banda Raya 6. Meuraxa	1. Meraxa 2. Kuta raja 3. Kuta Alam 4. Syiah kuala	1. Jaya baru 2. Meraxa 3. Kuta raja 4. Kuta Alam 5. Syiah kuala 6. Bandar Raya	Semua kecamatan

Bencana Sosial

No	Jenis Ancaman			
	Kebakaran	Konflik	Kejadian Luar Biasa	Kegagalan Tehnologi
	Kecamatan			
1	Meuraxa	-	-	-
2	Syiah kuala	-	-	-
3	Jaya Baru	-	-	-
4	Kuta Alam	-	-	-
5	Baiturrahman	-	-	-
6	Kuta Raja	-	-	-
7	Ulee Kareng	-	-	-
8	Banda Raya	-	-	-
9	Lueng Bata	-	-	-

Sumber : UPTD Kota Banda Aceh

Salah satu upaya pengurangan risiko bencana, bahwa di Kota Banda Aceh terdapat 4 (empat) Escape Building yaitu di Alue Deah Teungoh, Deah Glumpang, Lambung dan Gampong Pie. Dari empat*Escape Building* tersebut, tiga diantaranya dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh, hanya satu *Escape Building* yaitu yang terletak di gampong Pie yang pada saat sekarang dipergunakan oleh *Tsunami Disaster Mitigation Research Center* (TDMRC) Unsyiah.

Kegunaan *Escape Building* tersebut telah di sosialisasikan kepada masyarakatyaitu pada saat bencana dipergunakan sebagai gedung penyelamatan, dan pada saat tidak terjadi bencana boleh dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan sosial dan pendidikan lainnya seizin BPBD.

Selain pembangunan *Escape Building*dalam rangka pengurangan risiko bencana (PRB) dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah penyelenggara penanggulangan bencana serta peningkatan kapasitas,

partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lain dalam pengurangan risiko bencana melalui kegiatan pencegahan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dan bahaya kebakaran serta penanganan pada saat bencana dan pasca bencana melalui kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Selain rawan terhadap bencana alam Kota Banda Aceh juga rawan terhadap bencana non alam seperti bencana kebakaran, penanggulangan bahaya kebakaran saat ini wilayah cakupan layanannya selain Kota Banda Aceh juga melayani sebagian wilayah Aceh Besar. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat Jumlah dan jenis armada pemadam kebakaran di Kota Banda Aceh.

Tabel 2.8

Armada Pemadam Kebakaran

No.	Nama/Jenis Barang	Merk / Type	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Kondisi	Keterangan
1	Mobil Pemadam Kebakaran 01	Isuzu	APBD	1984	Rusak Berat	Pos Sp. Mesra
2	Mobil Pemadam Kebakaran 02	Isuzu	Bantuan Pemko (APBD)	1986	Rusak Berat	Pos Sp. Mesra
3	Mobil Pemadam Kebakaran 04	Mercedes Benz	APBD	1996	Rusak Ringan	Posko Induk
4	Mobil Pemadam Kebakaran 05	Isuzu Borneo	APBD	2001	Baik (Isapan Air tidak berfungsi)	Pos Sp. Mesra
5	Mobil Pemadam Kebakaran 06	Isuzu Borneo	APBD	2001	Baik (Isapan Air tidak berfungsi)	Pos Pango
6	Mobil Pemadam Kebakaran 07	Isuzu ELF	APBD	2001	Baik	Pos Pelangi
7	Mobil Pemadam Kebakaran 08	Isuzu Borneo	Bantuan Jepang	2006	Baik	Posko Induk
8	Mobil Pemadam Kebakaran 09	Isuzu Borneo	Bantuan Jepang	2006	Baik (Isapan Air tidak berfungsi)	Pos Pelangi
9	Mobil Pemadam Kebakaran 10	Mercedez Benz	Bantuan Belanda	2006	Baik	Posko Induk
10	Mobil Pemadam Kebakaran 11	Mitsubishi	Bantuan NAD	2004	Baik	Pos Pango
11	Mobil	Isuzu	Bantuan	2004	Baik	Posko Induk

No.	Nama/Jenis Barang	Merk / Type	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Kondisi	Keterangan
	Pemadam Kebakaran 12	FTR	NAD		Isapan Air tidak berfungsi	
12	Mobil Pemadam Tangga	Volvo	Bantuan Provinsi Aceh	2014	Baik	Posko Induk

Sumber : BPBD Kota Banda Aceh 2015

Pertumbuhan alat transportasi dalam wilayah Kota Banda Aceh meningkat tajam, sehingga terjadi kemacetan di mana mana lebih lebih di jalan umum apalagi pada jam jam sibuk dapat dibayangkan berapa waktu dibutuhkan untuk mencapai titik sasaran kebakaran. Sehingga pada tahun 2015 akan di fungsikan 2 pos pembantu lagi untuk tercapainya waktu tanggap darurat *(Response Time)* layanan kebakaran.

2.1.4 Demografi

Kota Banda Aceh dengan luas wilayah 61,36 Km² didiami penduduk sebanyak 249.282 jiwa yang terdiri dari 128.333 jiwa penduduk laki-laki dan 120.949 jiwa penduduk perempuan pada tahun 2013.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio
Kota Banda Aceh Tahun 2013

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1	Meuraxa	10.044	8.918	18.962	112,63
2	Jaya Baru	12.618	11.842	24.460	106,55
3	Banda Raya	11.490	11.451	22.941	100,34
4	Baiturrahman	18.003	17.215	35.218	104,58
5	Lueng Bata	12.582	11.978	24.560	105,04
6	Kuta Alam	25.756	23.747	49.503	108,46
7	Kuta Raja	6.862	5.957	12.819	115,19
8	Syiah Kuala	18.201	17.470	35.671	104,18
9	Ulee Kareng	12.777	12.371	25.147	103,28
	Jumlah	**128.333**	**120.949**	**249.282**	**106,11**

Sumber : BPS Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh mengalami pertambahan penduduk sebesar 10.498 jiwa atau sekitar 4,40 persen dari penduduk pada tahun 2012. Tetapi jumlah penduduk pada tahun 2008 dan 2009 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2007 yaitu sebanyak 219.659 menjadi 217.918 pada tahun 2008 dan menurun lagi menjadi 212.241 pada tahun 2009, hal ini disebabkan berakhirnya rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Banda Aceh sebagian penduduk yang dahulunya bekerja di Kota Banda Aceh berpindah kembali kedaerah asalnya.

Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Kuta Alam dan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Kuta Raja, untuk lebih jelasnya dapat dilihatpadaTabel 2.13

Tabel 2.10.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Banda Aceh
Tahun 2010-2013

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk	Rata-rata Kepadatan Penduduk	
				Per Desa	Per km²
1	Meuraxa		18.962	1.185	2.612
2	Jaya Baru		24.460	2.718	6.471
3	Banda Raya		22.911	2.294	4.789
4	Baiturrahman		35.218	3.522	7.757
5	Lueng Bata		24.560	2.729	4.599
6	Kuta Alam		49.503	4.500	4.926
7	Kuta Raja		12.819	2.137	2.460
8	Syiah Kuala		35.671	3.567	9.505
9	Ulee Kareng		25.147	2.794	4.089
Jumlah		2013	249.282	2.770	4.063
		2012	238.784	2.653	3.892
		2011	228.562	2.540	3.725
		2010	223.446	2.482	3.642

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2014

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh sex rasio yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun 2013 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki.

Kota Banda Aceh memiliki komposisi dominan pada penduduk kelompok umur muda. Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur 20–24 tahun yaitu sebanyak 41.304 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk umur 25-29 tahun sebanyak 29.351 jiwa dan penduduk umur 0-4 tahun sebanyak 25.775 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik. 2.1.
Piramida Penduduk Kota Banda Aceh 2013

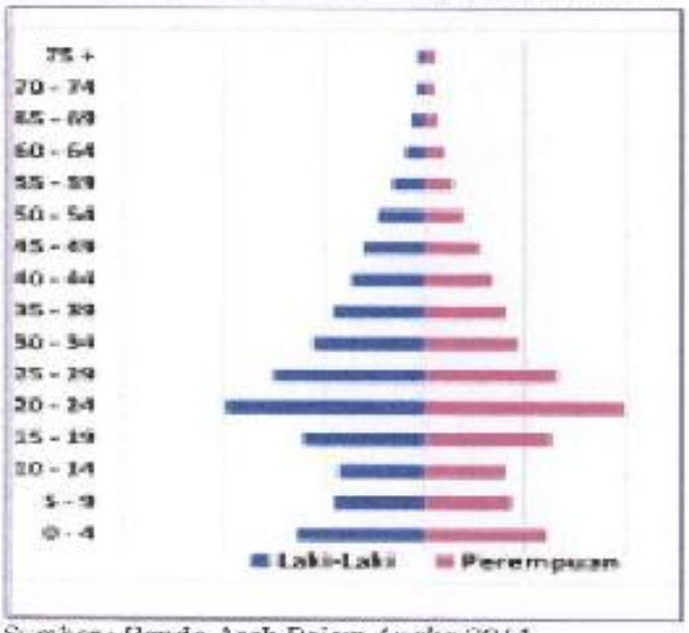

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2014

Kepadatan penduduk kota Banda Aceh mencapai 4.063 jiwa per km^2. Penduduk terpadat berada pada kecamatan Baiturrahman yang mencapai 7.757 jiwa per km^2, sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kuta Raja dengan kepadatan penduduk sebesar 2.460 jiwa per km^2(lihat Grafik 2.2).

Grafik. 2.2.
Kepadatan Penduduk di Kota Banda Aceh, 2013

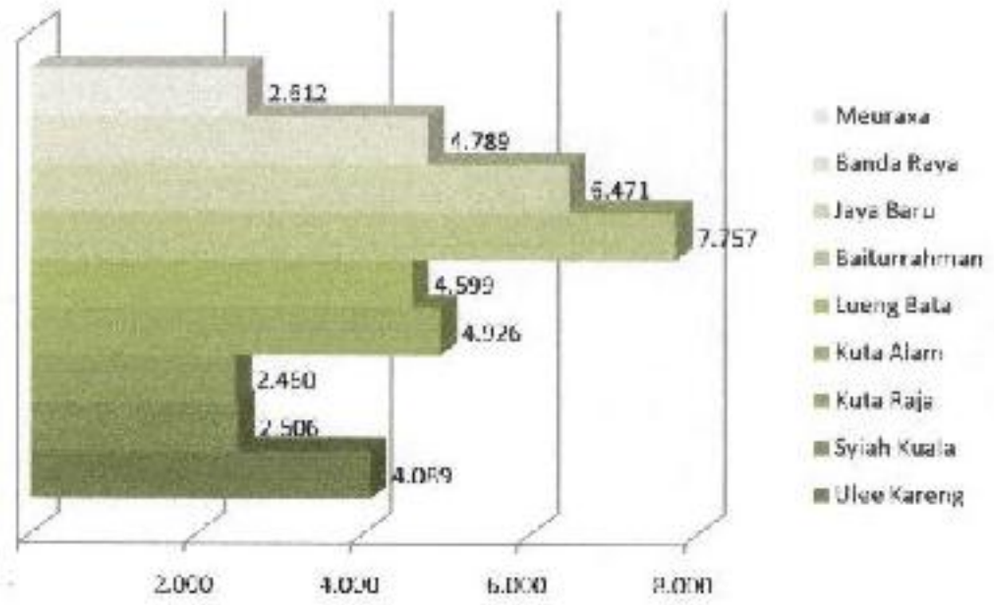

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2014

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Untuk melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.11
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2013

No	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	Pertumbuhan (%)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (juta rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	2007	4.346.371,64	25,88	2.584.966,28	19,00
2	2008	5.354.160,76	23.19	2.730.636,38	5.64
3	2009	6.502.124,76	21.44	2.885.586,85	5.67
4	2010	7.734.842,61	18.96	3.056.186,08	5.91

5	2011	8.992.047,65	16.25	3.241.173,56	6.05
6	2012	10.359.382	15.21	3.441.154	6.17
7	2013	11.781.706	13.73	3.651.734	6.12

Sumber : BPS Kota Banda Aceh 2014

Data Tabel 2.14 menunjukkan bahwa perkembangan PDRB Kota Banda Aceh atas dasar harga berlaku mengalami penurunan dari 25,88 persen pada tahun 2007 menjadi 13,73 persen pada tahun 2013. PDRB atas dasar harga berlaku dipengaruhi oleh tingkat inflasi, untuk itu digunakan sebagai petunjuk adalah pertumbuhan riil PDRB anas dasar harga konstan 2000. PDRB anas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2007 sebesar 19,00 persen, mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2008 sebesar 5,64 persen dan mengalami kenaikan hingga 6,12 persen pada tahun 2013.

Untuk mengetahui laju pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh menurut lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 2.15

Tabel 2.12
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banda Aceh menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2013

No	Sektor	Atas Dasar Harga Berlaku (%)							Atas Dasar Harga Konstan 2000 (%)						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	2,92	2,55	2,31	2,15	1,96	1,80	1,71	3,05	5,62	3,71	3,58	3,55	3,45	3,36
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Industri Pengolahan	2,02	2,17	2,11	2,07	1,92	1,84	1,77	2,09	2,14	2,21	2,25	2,25	2,21	2,19
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,55	0,57	0,62	0,70	0,79	0,87	0,94	0,38	0,41	0,42	0,45	0,45	0,52	0,56
5	Bangunan/ Konstruksi	8,81	8,08	9,06	9,00	8,70	8,48	8,30	6,06	5,13	6,16	6,21	6,28	6,45	6,25
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	36,91	36,33	35,11	33,12	33,18	33,14	32,18	22,06	21,03	21,57	22,17	22,79	23,59	24,30
7	Pengangkutan dan Komunikasi	21,20	24,25	26,68	28,50	29,87	27,23	25,56	15,00	15,93	16,54	16,71	17,08	15,97	15,77
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,36	3,66	3,78	3,81	4,10	4,00	3,75	2,37	2,26	2,30	2,28	2,40	2,42	2,40
9	Jasa-jasa	30,93	30,38	30,47	29,68	30,93	32,60	35,90	48,16	48,13	47,21	46,25	45,25	45,61	45,01

Sumber : BPS Kota Banda Aceh 2014

Tabel 2.15 memperlihatkan laju pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh didominasi oleh sector jasa-jasa, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sector perdagangan, hotel dan restoran memberikan konstribusi terbesar terhadap total PDRB Kota Banda Aceh.

PDRB atas dasar harga konstan 2000 sektor jasa-jasa mengalami trend penurunan dari 48,16 persen tahun 2007 menjadi 45,09 persen tahun 2013, sector pengangkutan dari 16,00 persen pada tahun 2007 turun sedikit pada tahun 2008 menjadi 15,98 persen dan pada tahun 2013 turun lagi menjadi 15,76 persen , sector perdagangan, hotel dan restoran trend naik dari 20,99 persen pada tahun 2008 menjadi 24,30 persen pada tahun 2013.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari PDRB Kota Banda Aceh yang lebih tinggi dari Kabupaten Aceh Besar dan Kota Sabang, Data PDRB Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Kota Sabang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 2.3.

Grafik 2.3
Perbandingan PDRB Regional (trilyun rupiah), 2013

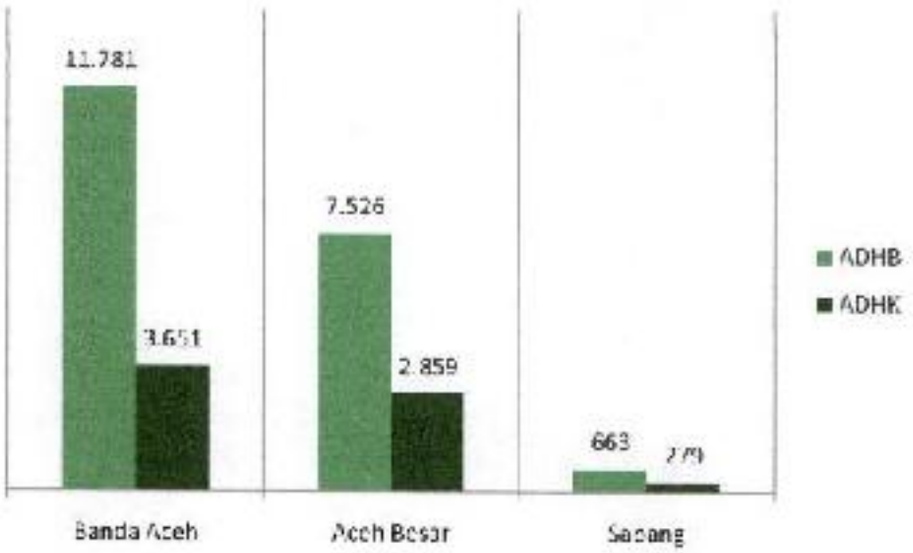

Sumber : Statistik Daerah Kota Banda Aceh 2014

2.2.1.2 Laju Inflasi Kota Banda Aceh

Inflasi menjadi tolok ukur kestabilan perekonomian di suatu daerah. Sebagai dampak dari Tsunami 2004, laju inflasi di Kota Banda Aceh hingga tahun 2008 berada di kisaran 10 persen. Namun pada empat tahun berikutnya, laju inflasi tetap terjaga di bawah lima persen. Pada tahun 2012, laju inflasi melambung menjadi 0,06 persen atau

mendekati terjadinya deflasi. Kenaikan harga BBM pada pertengahan Juni tahun 2013 menyebabkan laju inflasi tahun 2013 naik menjadi 6,39 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 2.5 dan grafik 2.6.

Grafik 2.4
Laju Inflasi Kota Banda Aceh 2005-2013

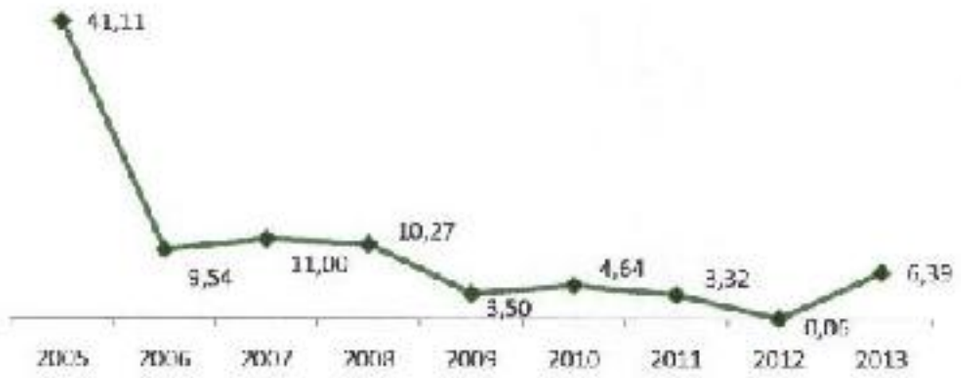

Sumber: Banda Aceh Dalam Angka 2014

Grafik 2.5
Tingkat Inflasi/Deflasi Kota Banda Aceh, 2013

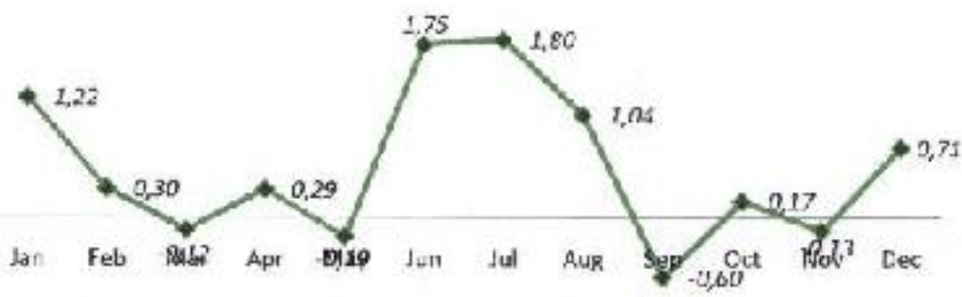

Sumber: Banda Aceh Dalam Angka 2014

Selama tahun 2013, terjadi delapan kali inflasi dan empat kali deflasi. Inflasi tertinggi Juli 2014 disebabkan masih adanya pengaruh kenaikan BBM di bulan Juli bersamaan dengan di mulainya bulan puasa.

Inflasi Kota Lhokseumawe selalu di atas Kota Banda Aceh selama tahun 2008- 2013. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan barang secara umum di Lhokseumawe lebih tinggi bila dibandingkan di Kota Banda Aceh. Kondisi ini salah satunya disebabkan lebih stabilnya

pasokan barang ke pasar-pasar di Kota Banda Aceh, sehingga permintaan barang dapat terpenuhi dan inflasi berada pada posisi lebih rendah (lihat Tabel 2.16).

Tabel 2.13
Inflasi Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan Indonesia (persen) tahun 2008-2013

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Banda Aceh	10,27	3,50	4,64	3,32	0,06	6,39
2	Lhokseumawe	13,78	3,96	7,19	3,55	0,39	8,27
3	Provinsi Aceh	11,92	3,72	5,86	3,43	0,22	7,31
4	Nasional	11,06	2,78	6,96	3,79	4,3	8,4

Sumber : Aceh Dalam Angka 2014

Walapaun laju inflasi Kota Banda Aceh tahun 2013 mencapai 6,39 persen, angka ini masih merupakan laju inflasi terkecil di seluruh kota penghitungan inflasi di Pulau Sumatera pada tahuntersebut (Grafik 2.7).

Grafik 2.6
Perbandingan Inflasi di Pulau Sumatera, Tahun 2013

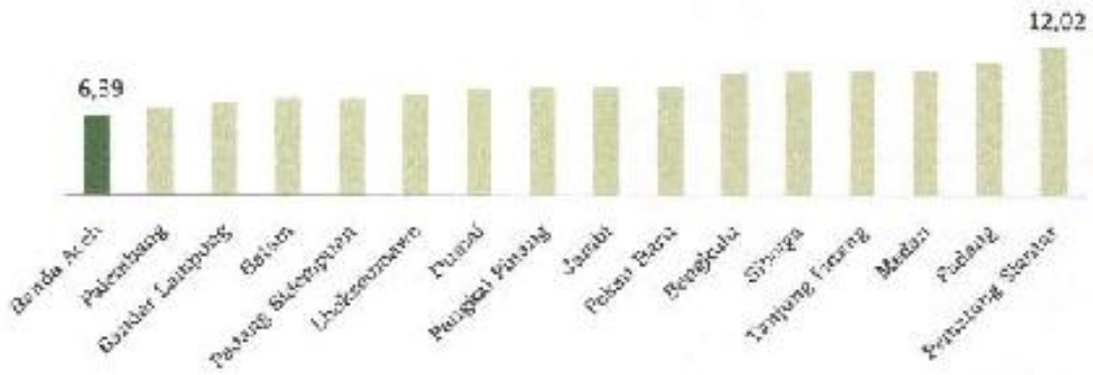

Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2014*

2.2.1.3 PDRB Perkapita

Pertumbuhan perekonomian yang tinggi belum menjamin kemakmuran yang tinggi bagi masyarakat oleh karena mungkin perkembangan penduduknya juga cukup tinggi. Tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita lebih menunjukkan perkembangan kemakmuran, sebab bila dilihat dari sudut konsumsi, berarti masyarakat akan mempunyai

kesempatan untuk menikmati barang dan jasa yang lebih banyak atau yang lebih tinggi kualitasnya.

Tabel 2.14
PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhannya di Kota Banda Aceh, 2010-2013

Tahun	ADHB	Pertumbuhan (%)	ADHK	Pertumbuhan (%)
2010	34.496.195	15,47	13.580.960	0,85
2011	39.175.573	13,56	14.120.792	3,97
2012	44.173.265	12,76	14.673.367	3,91
2013	49.212.652	11,41	15.253.440	3,95

Sumber : PDRB Kota Banda Aceh Tahun 2014

PDRB perkapita baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar konstan Kota Banda Aceh selama duas tahun terakhir tetap mengalami peningkatan, namun mengalami laju pertumbuhan yang menurun.

Grafik 2.7
Perbandingan PDRB Perkapitaantara Kota Banda Aceh dan ke-33 ibukota provinsilainnya di Indonesia Tahun 2012

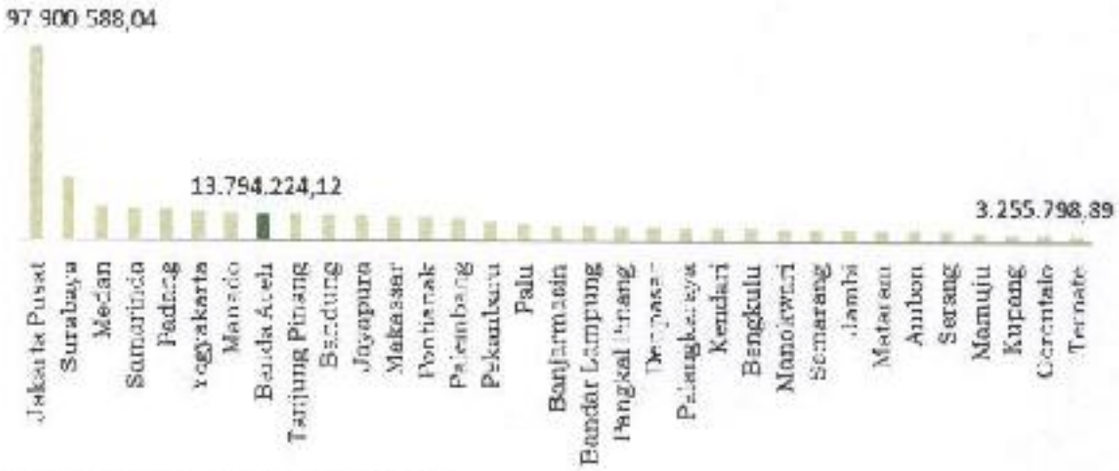

Sumber : www.kemitraan.or.id. 2014

Secara nasional, Perbandingan PDRB perkapita (ADHK) antara Kota Banda Aceh danibukotaprovinsilainnya di Indonesia untukTahun 2012, termasuk yang tinggiyaitu di urutan ke-8 dari 34 ibukota di Indonesia. Lebihtinggidari rata-rata provinsi (Rp 6.248.134,37,-) danNasional (Rp 9.665.117,07). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan dan ekonomi Kota Banda Aceh sudah lebih baik daripada Aceh dan Nasional.

2.2.1.1 Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan Makanan (GKM) dan garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Untuk lebih jelasnya perkembangan jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kota Banda Aceh dari tahun 2007 s/d tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.15
Garis Kemiskinan Dan Jumlah Penduduk Miskin
Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

Tahun	Pengeluaran Per kapita sebulan (Rp)			Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah penduduk Miskin (Jiwa)
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
2007	327.729	387.342	715.071	346.750	14.519
2008	399.959	649.802	1.049.761	362.992	20.832
2009	578.097	621.911	1.199.998	414.172	19.014
2010	537.460	600.744	1.138.204	435.195	20.534
2011	552.121	768.987	1.321.108	477.669	20.753
2012	599,349	698.069	1.297.428	485.543	20,390
2013	650.180	793527	1.443.707	498.558	19,420

Sumber: BPS Kota Banda Aceh

Persentase penduduk miskin Kota Banda Aceh dari tahun 2006 s/d tahun 2013 dapat terlihat dengan jelas pada grafik 2.13.

Grafik 2.8
Persentase Penduduk Miskin Kota Banda Aceh tahun 2006 – 2013

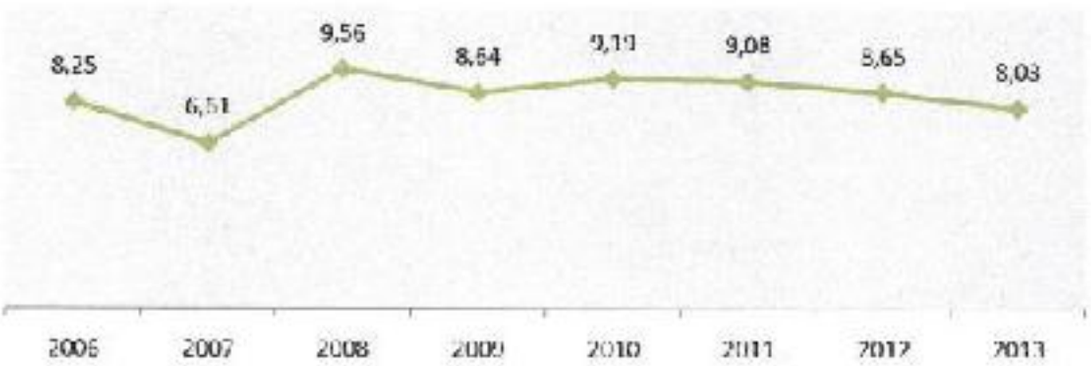

Berdasarkan Tabel 2.28 dan Grafik 2.13 dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk miskin Kota Banda Aceh dari tahun 2006 s/d 2013 secara fluktuatif mengalami penurunan dan peningkatan. Hal ini dikarenakan penurunan dan peningkatan jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain , pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan perekonomian daerah serta sumber daya alam yang ada.

Persentase penduduk miskin tertinggi terdapat pada tahun 2008 dan terendah terdapat pada tahun 2007, hal ini sangat dipengaruhi dengan pertumbuhan perekonomian yang signifikan pada tahun 2007 karena adanya banyak lapangan pekerjaan yang berasal dari BRR, NGO dan LSM baik lokal maupun asing yang melaksanakan program pemulihan pasca tsunami tahun 2004, sedangkan pada tahun 2008 telah terjadi penurunan lapangan pekerjaan karena telah selesainya program NGO serta LSM dalam pemulihan pasca tsunami tahun 2004 lalu.

Keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Untuk Tahun 2013, persentase kemiskinan di Kota Banda Aceh paling kecil di antara kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh, yaitu 8,03 persen. Angka ini lebih rendah dari rata rata provinsi (17,72 persen) dan rata-rata nasional (11,47 persen) seperti terlihat pada grafik 2.14.

Grafik 2.9
Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2013

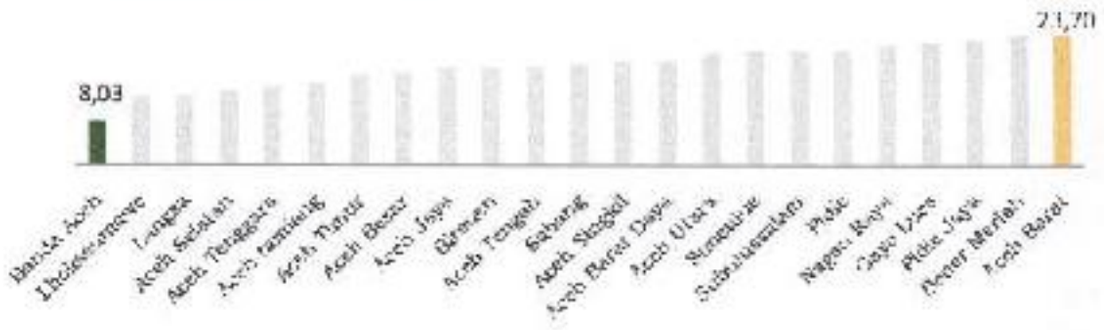

Sumber : BPS Provinsi Aceh 2014

Tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh Tahun 2012, menempati posisi ke-6 dari 23 kab/kota di Provinsi Aceh. Penyebab utama peningkatan angka pengangguran ini adalah tidak sebandingnya peningkatan angkatan kerja dibandingkan dengan lowongan kerja yang tersedia. Jumlah lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi di Banda Aceh terus meningkat, sementara lowongan kerja sangat terbatas karena tidak ada penerimaan PNS/CPNS, tidak ada industry yang menerima tenaga kerja massal, dan keenggaan sebagian besar lulusan perguruan tinggi kembali ke kamporg halaman masing-masing setelah selesai kuliah.

Solusi dari permasalahan di atas, Pemerintah Kota Banda Aceh perlu terus meningkatkan pendidikan keterampilan dan pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja, mempermudah investasi dan penanaman modal dalam negeri maupun modal asing, dan memotivasi pencari kerja agar berani mengikuti lowongan-lowongan kerja di luar daerah maupun di luar negeri.

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua Negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah Negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (*Sumber Wikipedia*). Untuk Kota Banda Aceh, IPM terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 79 pada tahun 2013, melampaui IPM Nasional (Tahun 2012 : 73,81) dan Provinsi Aceh (73,05) (lihat Grafik 2.10)

Grafik 2.10
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh 2009-2013

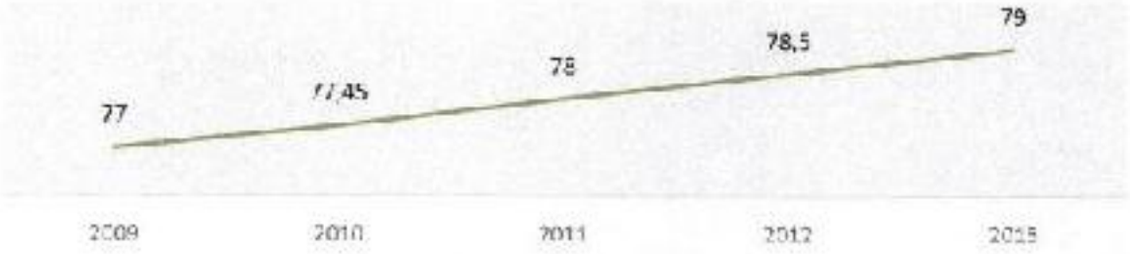

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2013 & 2014

Berdasarkan website BPS Indonesia, angka IPM Kota Banda Aceh termasuk rata-rata tinggi di Indonesia, di atas kota-kota lain seperti Kota Surabaya (78,97), Kota Medan (78,62), dan Batam (78,62)

Grafik 2.11
Perbandingan IPM antara Kota Banda Aceh dan kab/kota di Indonesia Tahun 2013

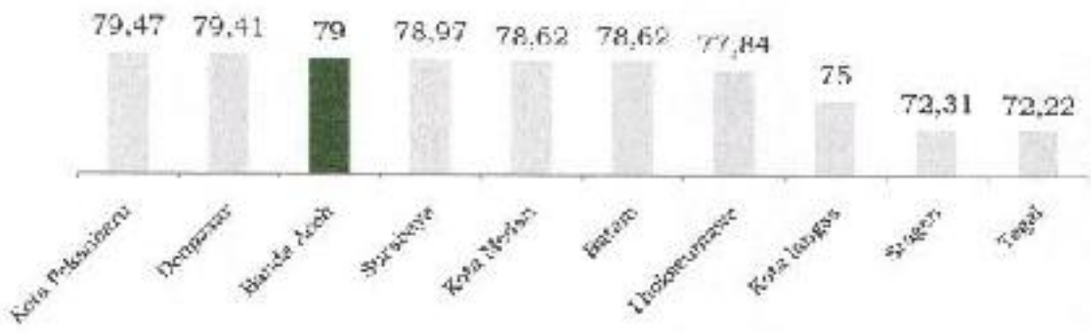

Sumber : BPS Indonesia, 2014 (www.bps.go.id)

2.2.1.6 Pengeluaran Perkapita Rupiah

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat diukur dari tingkat pendapatan. Ukuran ini juga dapat didekati dengan pendekatan tingkat pengeluaran penduduk. Rata-rata pengeluaran perkapita atau belanja rumah tangga selama sebulan di Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan (Tahun 2014 : Rp 1.353.977,-). Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat Kota Banda Aceh semakin meningkat, bahkan melampaui rata-rata Provinsi (Tahun 2014 : Rp 619.275,-) yang mengindikasikan perekonomian di Kota Banda Aceh sudah baik.

Grafik 2.12
Pengeluaran Perkapita per bulan di Kota Banda Aceh pada Tahun 2011-2014

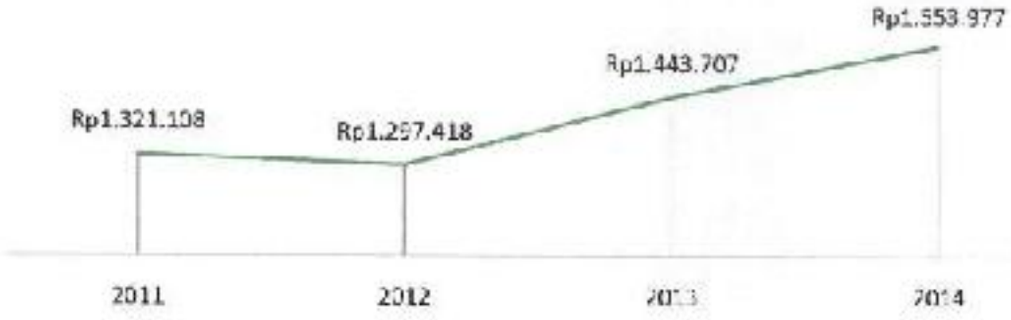

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2015

2.2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi selain inflasi dan ketimpangan neraca pembayaran. Pengangguran menjadi masalah yang sangat serius dan menjadi momok yang menakutkan bagi setiap negara. Tingginya angka pengangguran disebabkan besarnya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Iklim investasi yang sehat dan kemudahan-kemudahan birokrasi bagi pengusaha yang ingin menanamkan modalnya serta terciptanya keamanan yang kondusif sangat mendukung terciptanya investasi dalam mengurangi angka pengangguran yang terus bertambah.
Perkembangan angka pengangguran di Kota Banda Aceh dari tahun 2007 sampai tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.109.

Tabel 2.16
Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

Tahun	Pengangguran (Orang)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2007	2.675	7,9
2008	12.090	11,4
2009	10.071	9,8
2010	10.505	11,6
2011	8.916	8,5
2012	7.029	7,17
2013	Tdk ada data	Tdk ada data
2014	11.475	10,24

Sumber : BPS Aceh Tahun 2015

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah pengangguran yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Pada tahun 2007 jumlah pengangguran di Banda Aceh sebanyak 2.675 orang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,9%. Pada tahun 2008 terjadi lonjakan pengangguran dikota Banda Aceh Sebesar 351,9 % atau sebanyak 12.090 jika dibandingkan Tahun 2007 hal ini disebabkan banyaknya NGO baik dari luar dan dalam negeri yang mengakhiri masa kerjanya di Kota Banda Aceh pasca tsunami tahun 2004.

Pada tahun 2009 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun sebesar 9,8% dengan jumlah pengangguran berjumlah 10.071 orang menurun sebesar 16,7% jika dibandingkan tahun 2008. Seiring dengan berakhirnya masa kerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) di Provinsi Aceh pada tanggal 16 April 2009, terjadi lonjakan jumlah pengangguran pada tahun 2010 sebesar 4,3% dengan TPT sebesar 11,6 %. Dan pada akhir tahun 2012 tingkat pengangguran di Banda Aceh menurun menjadi 7.029 orang dengan TPT sebesar 7,17% ini berarti terjadi penurunan angka pengangguran sebesar 18,5% jika dibandingkan dengan tahun 2011, sedangkan tahun 2013 tidak ada data angka TPT yang dikeluarkan oleh BPS disebabkan jumlah quisioner tidak mencukupi kuota, tetapi tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka Kota Banda Aceh naik kembali menjadi 10,24%. Hal ini disebabkan antara lain tingginya arus urbanisasi, terbatasnya lapangan kerja yang tersedia, dan masih rendahnya keahlian dan keterampilan pencari kerja sehingga sangat menyulitkan dalam mendapatkan kesempatan kerja.

Grafik 2.13
Perbandingan Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2012

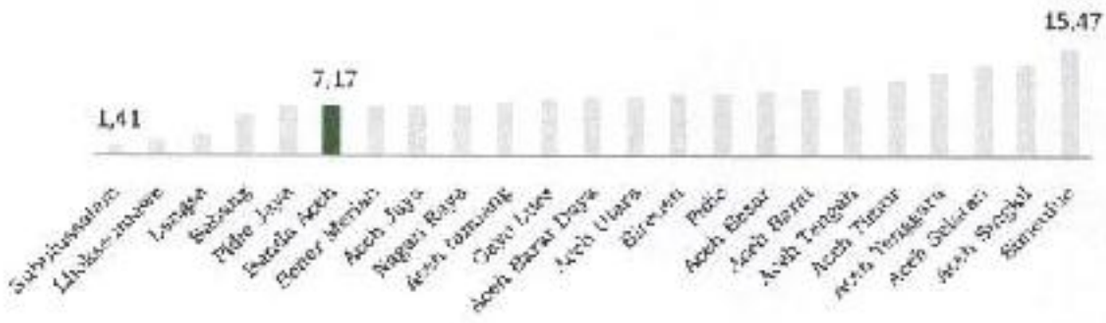

Sumber : BPS Provinsi Aceh 2014

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

2.2.2.1 Pendidikan

Komponen penting dalam pembangunan pendidikan adalah peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan menjadi kunci untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang handal, berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan, yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan, daya saing murid di tingkat nasional, dan meningkatkan peran generasi muda.

2.2.2.1.1 Angka Melek Huuf

Literasi atau melek huruf merupakan modal penduduk dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dengan kemampuan membacanya. Penduduk yang memiliki literasi berada pada usia 15 tahun keatas. Kota Banda Aceh memiliki tingkat melek huruf yang tinggi mencapai 99,39 persen, sedangkan sisanya 0,61 persen masih dalam kategori buta huruf. Penduduk dalam kategori buta huruf diperkirakan

merupakan usia tua yang kemungkinan sulit mendapatkan pelayanan pendidikan dimasa lampau.

Grafik 2.14
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Banda Aceh
Tahun 2011-2013

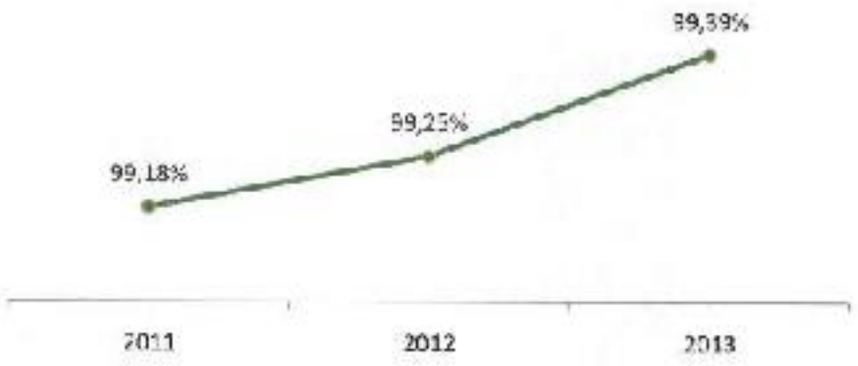

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2014

Gambar 2.9 menunjukkan perkembangan angka melek huruf di Kota Banda Aceh dari tahun 2011 sampai 2013 terus konsisten. Tahun 2013 AMH Kota Banda Aceh berada pada posisi 99,39 persen. Kondisi ini merupakan suatu pencapaian atas usaha Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memajukan sektor pendidikan baik formal maupun non formal. Kota Banda Aceh dapat mempertahankan pencapaian ini dengan terus memfokuskan diri pada program-program peningkatan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan memberikan jaminan kemudahan akses pendidikan bagi semua lapisan penduduk. Tabel berikut menunjukkan perkembangan jumlah penduduk usia 15 tahun yang bisa membaca dan menulis di Kota Banda Aceh dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013.

Perkembangan angka melek huruf berfluktuatifdari dari 99,6 persen pada tahun 2007 menjadi99,39 persen pada tahun 2013. Kondisi ini merupakan dinamika yang terjadi atas pertumbuhan jumlah penduduk dan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca. Usaha Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memajukan sektor pendidikan terus memfokuskan pada program-program peningkatan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan memberikan jaminan kemudahan akses pendidikan bagi semua lapisan penduduk. Tabel

berikut menunjukkan perkembangan angka melek huruf di Kota Banda Aceh dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013.

Tabel 2.17
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2007 s.d 2013
Kota Banda Aceh

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	179.898	182.321	149.346	166.819	170.673	178.438	187.161
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	180.676	182.963	150.702	168.232	172.084	179.785	188.510
3	Angka melek aksul	**99,60**	**99,60**	**99,10**	**99.16**	**99,18**	**99,25**	**99,39**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

2.2.2.1.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas diseluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani atau bisa juga disebut sebagai suatu angka yang menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Kota Banda Aceh mencapai 12,27 tahun pada tahun 2013 atau sudah menamatkan pendidikan dasar 9 tahun atau tamat SMA sederajat. Pencapaian angka pada tahun 2013 tersebut sudah memenuhi target pencapaian nasional rata-rata 12 tahun.

Grafik 2.15
Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Banda Aceh
Tahun 2011-2013

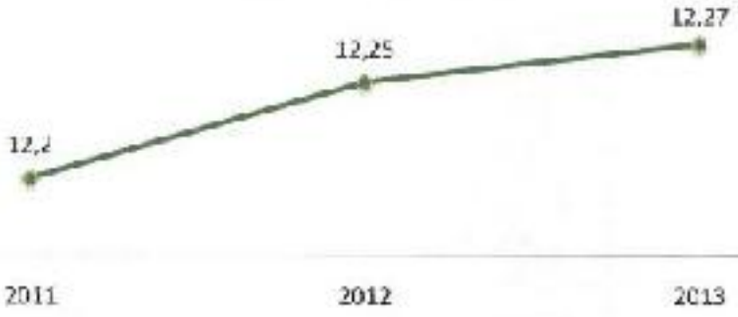

Sumber : Statistik Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2014

2.2.2.1.3 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan MDG's dalam mengukur pencapaian kesetaraan gender dibidang perdidikan. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun. APM di Kota Banda Aceh untuk tingkat SD/MI tahun 2013 sebesar 95,13 persen. Penyebaran sekolah untuk jenjang SD/MI sampai sekolah menengah sudah merata dan menjangkau seluruh wilayah Kota Banda Aceh sampai ke daerah pinggiran kota. Sedangkan untuk SMA/SMK juga tersebar di Kota Banda Aceh dan mudah dijangkau dan berada di setiap kecamatan.

Para lulusan jenjang SD/MI pada umumnya dapat melanjutkan ke SMP/MTSN sejalan kebijakan Pemerintah tentang Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh tentang Pendidikan yang terbebas dari hambatan biaya untuk 12 tahun dengan pendidikan universal dengan program subsidi BOSDA dan beasiswa bagi keluarga miskin. Tabel 2.17 berikut memberikan gambaran APM Kota Banda Aceh dari tingkat SD/MI sampai SMA/MA/SMK.

Tabel 2.18
Perkembangan Jumlah Siswa dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

No	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	**SD/MI**							
1.1.	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	20.043	20.362	20.459	21.004	21.821	17.679	23.304
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	21.428	19.812	19.835	17.981	18.977	19.359	20.837
1.3.	APM SD/MI	93,54	102,78	103,15	116,81	114,99	91,32	95,13
2	**SMP/MTs**							
2.1.	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	9.774	9.262	9.282	9.688	9.096	8,127	9.233
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	15.707	11.473	11.623	10.226	10.791	11.019	11.626
2.3.	APM SMP/MTs	62,53	80,73	79,86	94,74	84,29	73,75	86,09
3	**SMA/MA/SMK**							
3.1.	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	11.029	9.703	10.682	10.541	10.078	8.680	10.028
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	17.8383	14.556	14.108	13.231	13.965	14,241	14.726
3.3.	APM SMA/ MA/SMK	61,83	66,66	75,72	79,67	72,17	60,95	55,83

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

Tabel 2.19
Jumlah Siswa dan Angka Partisipasi Murni menurut Kecamatan
Kota Banda Aceh Tahun 2013/2014

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK		
		Jumlah Siswa Usia 7-12 th Bersekolah di SD/MI	Jumlah Penduduk usia 7-12 th	APM	Jumlah Siswa Usia 13-15 th Bersekolah di SMP/MTs	Jumlah Penduduk Usia 13-15 th	APM	Jumlah Siswa Usia 16-18 th Bersekolah di SMA/MA/ SMK	Jumlah Penduduk Usia 16-18th	APM
1	Kuta Alam	5.014	4.107	122,08	3.249	2.192	148,22	3.830	2.672	143,34
2	Kuta Raja	1.313	891	147,36	307	422	72,75	306	559	54,74
3	Syiah Kuala	3.250	2.737	119,11	965	1.716	56,24	1.020	2.634	38,72
4	Ulee Kareng	2.168	2.270	95,51	562	1.274	44,11	240	1.520	15,79
5	Baiturrahman	4.418	3.305	133,68	1.396	1.784	78,25	724	2.196	32,97
6	Lueng Bata	1.347	2.227	60,48	1.221	1.326	92,08	445	1.611	27,62
7	Meuraxa	1.237	1.224	101,06	585	660	88,64	627	847	74,03
8	Banda Raya	1.753	2.135	82,11	652	1.172	55,63	2.493	1.318	189,15
9	Jaya Baru	2.794	1.941	143,95	296	1.080	27,41	343	1.369	25,05
	Jumlah	**23,304**	**20.837**	**111,84**	**9.233**	**11.626**	**79,42**	**10.028**	**14.726**	**68,10**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

2.2.2.1.4 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa menunjukkan ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

Berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang tercatat, ternyata APK tertinggi di Kota Banda Aceh terdapat di tingkat SD yaitu 137,94 persen dan yang terendah di tingkat SMA yaitu 100,50 persen. Tingginya APK adalah akibat banyaknya siswa usia di luar usia sekolah yang berada di jenjang tersebut ditambah dengan siswa lain penduduk luar Kota Banda Aceh yang bersekolah di Kota Banda Aceh. Berikut tabel penjelasan perkembangan APK Kota Banda Aceh tahun 2007-2013.

Tabel 2.20
Perkembangan Jumlah Siswa dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

NO	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	**SD/MI**							
1.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	23.593	24.349	24,824	23,342	25.899	26,840	28,74
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	21.428	19.812	19.835	17.981	21.821	19.359	20.83
1.3.	APK SD/MI	110,10	122,90	125,15	129,81	118,69	138,64	137,9
2	**SMP/MTs**							
2.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	12.157	12.528	12.831	12.782	12.709	13.026	13.29
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	15.707	11.478	11.623	10.226	9.096	11.019	11.62
2.3.	APK SMP/MTs	77,40	109,20	110,39	125,00	139,72	118,21	114,3

NO	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3	**SMA/MA/SMK**							
3.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikanSMA/MA /SMK	14.223	13.936	14.550	14.639	14.939	14.954	14.799
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	17.838	14.556	13.386	13.684	13.965	14.241	14.720
3.3.	APK SMA/MA/ SMK	79,73	95,74	108,70	106,98	106,97	105,01	100,56

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

Tabel 2.21
Jumlah Siswa dan Angka Partisipasi Kasar menurut Kecamatan
Kota Banda Aceh Tahun 2013/2014

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa Bersekolah di SD/MI	Jumlah Penduduk Usia 7-12 th	APK	Jumlah Siswa Bersekolah di SMP/MTs	Jumlah Penduduk Usia 13-15 th	APK	Jumlah Siswa Bersekolah di SMA/MA/ SMK	Jumlah Penduduk Usia 16-18th	APK
1	Kuta Alam	6.283	4.107	152,98	4.464	2.192	203,65	5.772	2.672	216,02
2	Kuta Raja	1.605	891	180,13	451	422	106,87	388	559	69,41
3	Syiah Kuala	3.952	2.737	144,39	1.097	1.715	63,93	1.601	2.634	60,78
4	Ulee Kareng	2.576	2.270	113,48	868	1.274	68,13	469	1.520	30,86
5	Baiturrahman	5.390	3.305	163,09	2.131	1.784	119,45	956	2.196	43,53
6	Lueng Bata	1.665	2.227	74,76	1.832	1.326	138,16	770	1.611	47,80
7	Meuraxa	1.515	1.224	123,77	1.069	660	161,97	1.020	847	120,43
8	Banda Raya	2.198	2.135	102,95	1.021	1.172	87,12	3.315	1.318	251,52
9	Jaya Baru	3.559	1.941	183,36	364	1.080	33,70	508	1.369	37,11
	Jumlah	**28.743**	**20.837**	**137,94**	**13.297**	**11.626**	**114,37**	**14.799**	**14.726**	**100,50**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

2.2.2.1.5 Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Rasio murid per-guru tahun 2013 untuk semua jenjang pendidikan rata-rata telah mencapai standar 10 : 1 dibandingkan SNP 28 : 1. Dari jumlah guru 3.781 orang hanya mengajar rata-rata 41.734 orang murid, namun di sisi lain masih terjadi kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu terutama guru produktif pada SMK dan guru TIK. Untuk mengatasi kelebihan guru dilaksanakan alih fungsi pada mata pelajaran tertentu dan mutasi secara merata di samping pengangkatan sebagai pengawas sekolah dan kepala sekolah.

Kualitas SDM dapat dilihat dari pendidikan yang ditamatkan. Angka pendidikan yang ditamatkan tahun 2013 hanya tercapai 100 persen pada jenjang SD/MI, sementara jenjang SMP/Mts dan SMA/MA/SMK belum tercapai 100 persen artinya belum mampu meluluskan siswanya 100 persen. Berikut tabel penjelasan perkembangan APT Kota Banda Aceh tahun 2007 – 2013.

Tabel 2.22
Perkembangan Jumlah Siswa dan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Kota Banda AcehTahun 2007-2013

No	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	**SD/MI**							
1.1.	Jumlah siswa Lulusan di jenjang pendidikan SD/MI	3559	3795	3,517	3,591	3,759	4,003	4,188
1.2.	Jumlah Siswa Tkt. VI	3563	3796	3,522	3,661	3,811	4,073	4,188
1.3.	APT SD/MI	99,89	99,97	99.85	98.09	98.64	98.28	100.00
2	**SMP/MTs**							
2.1.	Jumlah siswa lulusan di jenjang SMP/MTs	3650	3573	4,179	3,951	3,711	4,102	4,095
2.2.	Jumlah siswa Tkt. III	1339	3874	4,255	4,038	3,715	4,115	4,111
2.3.	APT SMP/MTs	93,28	92,23	98.21	97.85	99.89	99.66	99.61
3	**SMA/MA/SMK**							
3.1	Jumlah siswa Lulusan di jenjang SMA/MA/SMK	4,181	4,002	4,267	4,287	4,079	4,453	4,800
3.2.	Jumlah Tkt Siswa III	4516	4391	4,506	4,606	4,205	4,475	4,803
3.3.	APT SMA/ MA/SMK	92,58	91,14	94.70	93.07	97.00	99.51	99.94

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

Berdasarkan Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) menurut kecamatan, angka yang mencapai 100 persen terdapat di jenjang SD/MI pada tahun 2013, SMP/MTsN maupun SMA/SMK yaitu Kecamatan Kuta Raja dan Kecamatan Meuraxa, sedangkan yang mencapai 100 persen di semua jenjang yaitu kecamatan Syiah Kuala. Berikut tabel penjelasan perkembangan APT menurut kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2013.

Tabel 2.23
Perkembangan Jumlah Siswa dan Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)
menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2013/2014

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa Kelulusan di SD/MI	Jumlah Siswa tkt. VI	APT	Jumlah Siswa Kelulusan di SMP/MTs	Jumlah Siswa Tkt. III	APT	Jumlah Siswa Kelulusan di SMA/MA/ SMK	Jumlah Siswa Tkt. III	APT
1	Kuta Alam	943	943	100,00	1.304	1.304	100,00	1.811	1.812	99,94
2	Kuta Raja	218	218	100,00	141	141	100,00	189	190	99,47
3	Syiah Kuala	489	489	100,00	344	349	98,57	532	533	99,81
4	Ulee Kareng	375	375	100,00	256	256	100,00	79	79	100,00
5	Baiturrahman	866	866	100,00	717	719	99,72	335	335	100,00
6	Lueng Bata	257	257	100,00	515	523	98,47	248	248	100,00
7	Meuraxa	173	173	100,00	373	374	99,73	326	326	100,00
8	Banda Raya	360	360	100,00	355	355	100,00	1.053	1.053	100,00
9	Jaya Baru	507	507	100,00	90	90	100,00	227	227	100,00
	Jumlah	**4,188**	**4,188**	**100,00**	**4.095**	**4.111**	**99,61**	**4.800**	**4.803**	**99,94**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

Kualitas pendidikan bila dilihat dari Angka Pendidikan yang ditamatkan, secara rata-rata menunjukkan angka cukup menggembirakan, APT Tingkat SD/MI telah mencapai 100 persen, APT Tingkat SMP/MTs mencapai 99,61 persen, dan APT Tingkat SMA/MA/SMK mencapai 99,94 persen. Belum tercapainya 100 persen APT menunjukkan masih rendahnya kualitas sebagian anak didik, sehingga harus menamatkan pendidikannya lebih dari masa yang seharusnya.

Untuk menunjang suksesnya program Penerapan Pendidikan Terpadu antara pendidikan umum dengan pendidikan agama (diniyah), maka Pemerintah Kota Banda Aceh merencanakan membangun Banda Aceh Madani Education Center (BMEC), dengan Lokasi perencanaan berada di eks STM Lampineung persimpangan jl. Tgk. Daud Bereueh dan jl. P. Nyak Makam seluas ± 9.0 ha (lihat Gambar 2.16 Lokasi BMEC) melalui konsep ***"greening the city"*** yang terpadu guna meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan serta sarana prasarana di Kota Banda Aceh.



Gambar 2.16 Lokasi BMEC

2.2.2.2 Kesehatan

2.2.2.2.1 Angka Kematian Bayi

Jumlah kematian bayi di Kota Banda Aceh sampai dengan akhir tahun 2013 berjumlah 30 dari 5060 kelahiran hidup atau setelah dikonversikan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 6 per 1000 kelahiran hidup, bila dibandingkan target pencapaian MDGs adalah 32 per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2015, maka dapat dikatakan bahwa angka kematian bayi di Kota Banda Aceh masih tergolong

rendah. Walaupun demikian, AKB di Kota Banda Aceh harus tetap dipantau karena angka ini adalah angka yang dilaporkan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi AKB tetapi tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dengar tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat AKB.

Tabel 2.24
Jumlah Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2013

Kecamatan	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun pada tahun 2013	Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun 2013	AKHB	AKB
Kuta Alam	3	961	997/1000	3/1000
Kuta Raja	1	228	996/1000	4/1000
Syiah Kuala	2	788	998/1000	2/1000
Ulee Kareng	1	493	998/1000	2/1000
Baiturrahman	5	725	994/1000	6/1000
Lueng Bata	1	561	999/1000	1/1000
Meuraxa	7	358	981/1000	19/1000
Banda Raya	9	472	981/1000	19/1000
Jaya Baru	1	477	998/1000	2/1000

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih terjadi di semua kecamatan menunjukkan pelayanan di bidang kesehatan masih belum baik. Ini mengindikasikan kualitas pelayanan minimal belum berjalan optimal dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Pelayanan yang baik dan optimal ini juga ditemukan oleh tersedianya berbagai fasilitas penunjang baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

Tabel 2.25
Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB)
Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Kematian Bayi	20	33	16	15	20	14	30
2.	Jumlah kelahiran hidup Bayi	3.508	4.048	4.163	4.412	4.828	4.849	5.060
3.	Ratio (AKB)	5	8	5	6	2	2	6

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Tabel diatas menggambarkan Angka kematian bayi di Kota Banda Aceh pada pada kurun waktu 2007 – 2013. Selama tujuh tahun waktu tersebut AKB di Kota Banda Aceh mengalami kenaikan dan penurunan kasus kematian. Tahun 2007 ratio kematian bayi sesebsar 5 per 1000 kelahiran hidup, tahun 2008 meningkat menjadi 8 per 1000 kelahiran hidup, kemudian tahun 2009 kembali menurun sama dengan tahun 2008 menurun menjadi 5 per 1000 kelahiran hidup. Tahun 2010 ratio kematian bayi meningkat menjadi 6 per 1000 kelahiran hidup, tahun 2011 menurun menjadi 2 per 1000 kelahiran, tahun 2012 masih tetap sama dengan tahun 2011, namun terjadi peningkatan di tahun 2013 menjadi 6 per 1000 kelahiran hidup.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi AKB tetapi tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk mengubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat AKB. Secara nasional, target pencapaian MDGs untuk AKB adalah 32 per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2015. Kondisi ini telah dicapai oleh Kota Banda Aceh bahkan sejak Tahun 2007. Walaupun demikian, AKB di Kota Banda Aceh harus tetap dipantau karena angka ini adalah angka yang dilaporkan.

2.2.2.2.2 Persentase Balita Gizi Buruk

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Gizi buruk adalah status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U) yang merupakan padanan istilah underweight (gizi kurang) dan severely underweight (gizi buruk). Target MDG's di tahun 2015, angka kurang gizi (gizi buruk dan gizi kurang) adalah 0,18 persen. Untuk Kota Banda Aceh persentase gizi buruk di akhir tahun 2013 sebesar 0,11 persen. Selama kurun waktu tujuh tahun persentase gizi buruk hanya dibawah 1 persen yaitu tahun 2007 sebesar 0,43 persen dan tahun 2013 hanya 0,11 persen.

Tabel 2.26
Status Gizi Buruk Balita
Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Balita Ditimbang	21.046	26.764	18.012	18.012	23.815	24.946	19.379
2	Jumlah Balita Gizi Buruk	90	99	70	85	3	7	22
3	Rasio	0,43	0,37	3,8	0,47	0,01	0,02	0,11

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

2.2.3.1 Kebudayaan dan Olah Raga

Pariwisata merupakan sektor yang penting dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat di Kota Banda Aceh. Dapat dikatakan bahwa industri pariwisata Kota Banda Aceh saat ini memiliki prospek yang baik dan memiliki daya tarik yangkompetitif.

Banyaknya obyek dan daya tarik wisata di Kota Banda Aceh telah menyerap kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Keanekaragaman budaya didukung oleh kreatifitas seni dankeramahtamahan masyarakat, membuat Kota Banda

Aceh mampu menciptakan produk-produk budaya dan pariwisata yang menjanjikan. Secara geografis, Kota Banda Aceh juga diuntungkan olehjarak antara lokasi obyek wisata yang terjangkau dan mudah ditempuh.

Potensi pariwisata juga didukung oleh adanya beberapa situs *heritage* tsunami, pluralisasi Kota Banda Aceh dapat dilihat dari banyaknya pendatang dari berbagai suku bangsa di Indonesia maupun beberapa suku keturunan yang berasal dari India, Cina, Arab, dan lain-lain dengan berbagai kepentingan seperti pelajar, mahasiswa, dan usahawan. Kehadirammereka dimungkinkan membentuk berbagai akulturasi budaya. Keberadaan merekaselain sebagai pasar yang potensial sekaligus juga merupakan alat promosi yang baikbagi pariwisata Kota Banda Aceh. Kekhasan budaya yang didukung dengan pelaksanaan syariat Islam akan menjadi salah satu produk wisata yang menarik yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia. Tabel 2.32. berikut menjelaskan perkembangan seni dan olahraga di Kota Banda Aceh selama 2007-2013.

Tabel 2.27
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kota Banda AcehTahun 2007-2013

No	Capaian Pembangunan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	63	67	75	73	75	89	46
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	0	0	0	0	0	0	1
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	42	44	46	46	46	0	0
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	0	0	1	1	1	1	1

Sumber : Disbudpar Kota Banda Aceh dan Dinasdikpora Kota Banda Aceh

Pelaksanaan syariat islam yang menyeluruh belum terlaksana dengan baik di Kota Banda Aceh,hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya pelanggaran syariat di tempat-tempat wisata. Pelanggaran ini lebih disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran para wisatawan untuk mengamalkannya. Hal ini menjadi suatu pertanda masih perlunya peningkatan kesadaran bagi warga Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kesadaran di dalam pengamalan syariat Islam. Tidak hanya itu, pelanggaran syariat islam juga terjadi pada pendangkalan aqidah yang terjadi di dalam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 2.28
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Menurut Kecamatan Di Kota Banda AcehTahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Meuraxa	1	-		
2	Baiturrahman	17	4		
3	Kuta Alam	14			
4	Syiah Kuala	5	1		
5	Kuta Raja	2	-		
6	Ulee Kareng	1	1		1
7	Lueng Bata	2	-		
8	Banda Raya	4	-		
9	Jaya Baru	3	-		
	Jumlah	**49**	**6**		**1**

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh

Tabel 2.29
Jumlah Penghargaan Budaya Kota Banda AcehTahun 2007-2013

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Seni	-	-	8	-	2	-	-
2	Pemberdayaan Generasi Muda	-	-	-	-	2	-	-

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh

Tabel 2.30
Jumlah Karya Budaya Yang Diaktualisasikan Kembali Pada Masyarakat Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Seni Tari	40	42	45	50	50	101	106
2	Sanggar Tari	95	82	94	100	75	31	40

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh

Tabel 2.31
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Gedung Kesenian	5	4	4	4	4	4	4
2	Sanggar Seni	82	87	94	97	100	91	-
3	Gelanggang Remaja	0	0	0	0	0	-	-
4	Arena Permainan	3	3	3	4	6	-	-
5	Panti Pijat	4	6	8	10	12	-	-
6	Taman Rekreasi	7	7	7	7	7	-	-
7	Jasa Impresaria & Promotor	0	0	0	0	7		
8	Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi & Pameran	0	0	0	0	8	-	-

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh

Tabel 2.32
Jumlah Benda, Situs dan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Kota Banda AcehTahun 2007-2013

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Situs Cagar Budaya	35	39	39	39	39	39	39
2	Cagar Budaya	16.135	16.691	16.691	16.691	16.691	16.691	16.691

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh

Tabel 2.33
Jumlah Usaha dan Tenaga Kerja Bidang Jasa Pariwisata
Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Usaha Jasa Perjalanan Wisata	31	31	27	62	65	65	-
2	Tenaga Kerja Usaha jasa Perjalanan Wisata	190	191	147	247	246	-	-
3	Usaha Jasa makanan dan minuman	180	201	223	246	174	241	262
	Restauran	38	48	51	62	25	0	38
	Rumah Makan	115	120	130	139	113	139	38
	Cafe	27	33	42	45	36	45	46
4	Tenaga Kerja Usaha Jasa Makanan dan Minuman	1080	1906	1338	1475	1044	-	-
5	Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi	35	40	43	43	43	43	43
	Hotel Bintang	17	17	22	22	22	22	-
	Hotel Non Bintang	19	23	21	21	17	17	-
6.	Tenaga Kerja Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi	962	896	946	946	760	-	-
7	Usaha Jasa Daya Tarik Wisata	59	59	59	59	59	59	59
	Peninggalan Sejarah dan Purbakala	36	36	36	36	36	36	36
	Objek Ziarah	20	20	20	20	-	-	20
	Museum	3	3	3	3	3	3	3

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

2.3.1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah

Tabel 2.34
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kota Banda AcehTahun 2007-2013

No	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	**SD/MI**							
1.1.	jumlah murid usia 7-12 thn	20.043	20.362	20.459	21.004	21.821	21.702	23.304
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	21.428	19.812	19.835	17.981	18.977	19.359	20.834
1.3.	APS SD/MI	100,07	100,97	103,15	116,81	114,99	112,10	111,86
2	**SMP/MTs**							
2.1.	jumlah murid usia 13-15 thn	9.774	9.262	9.282	9.688	9.096	8.984	9.233
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	15.707	11.473	11.623	10.226	10.791	11.019	11.626
2.3.	APS SMP/MTs	100,61	100,24	79,86	94,74	84,29	81,53	79,42
3	**SMA/MA/SMK**							
3.1.	jumlah murid usia 16-18 thn	11.027	9.703	10.682	10.841	10.078	10.071	10.028
3.2.	jumlah penduduk usia 16-18 thn	17.838	14.556	14.108	13.231	13.965	14.241	14.726
3.3	APS SMA/MA/ SMK	61,82	66,66	75,71	79,66	72,17	70,72	68,10

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

Tabel 2.35
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Banda Aceh menurut kecamatan Tahun 2013/2014

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah murid Usia 7-12 thn	Jumlah Penduduk Usia 7-12 th	APS	Jumlah Murid Usia 13-15 thn	Jumlah Penduduk Usia 13-15 th	APS	Jumlah Murid Usia 16-18 thn	Jumlah Penduduk Usia 16-18 th	APS
1	Kuta Alam	5,014	4,107	122.08	4,464	2,192	203.65	2,850	2,672	141.34
2	Kuta Raja	1,313	891	147.36	451	422	106.87	306	539	56.77
3	Ulee Kareng	3,260	2,797	116.11	1,597	1,716	93.06	1,026	2,654	38.72
4	Lueng Bata	2,168	2,270	95.51	868	1,274	68.13	240	1,520	15.79
5	Baiturrahman	4,418	3,305	133.68	2,131	1,784	119.45	724	2,196	32.97
6	Syiah Kuala	1,347	2,227	60.48	1,532	1,036	138.15	645	1,611	27.62
7	Meuraxa	1,247	1,224	101.06	1,069	660	161.97	627	847	74.03
8	Banda Raya	1,753	2,132	82.22	1,021	1,172	87.13	3,493	1,318	189.15
9	Jaya Baru	2,724	1,941	140.95	364	1,080	33.75	343	1,368	25.05
	Jumlah Total	**23,304**	**20,834**	**111.86**	**13,297**	**11,626**	**114.37**	**10,028**	**14,726**	**68.10**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

2.3.1.1.2 Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah

Tabel 2.36
Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah
Kota Banda AcehTahun 2007-2013

NO	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	**SD/MI**							
1.1.	Jumlah gedung sekolah	111	92	92	92	92	92	97
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	21.498	19.819	19.835	17.981	21.821	19.359	28.743
1.3.	Rasio	193	215	216	195	237	210	296
2	**SMP/MTs**							
2.1.	Jumlah gedung sekolah	36	36	37	37	38	39	40
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	15.707	11.473	11.623	10.226	9.096	10.048	11.626
2.3.	Rasio	436	319	314	276	239	258	291
3	**SMA/MA/SMK**							
3.1.	Jumlah gedung sekolah	7	5	6	7	7	42	45
3.2.	jumlah	17.838	14.556	14.108	13.231	13.955	14.241	14.726

NO	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	penduduk kelompok usia 16-18 tahun							
3.3	Rasio	2.578	2.911	2.351	1.890	1.995	339	327

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

Tabel 2.37
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah menurut KecamatanKota Banda AcehTahun 2013

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jml Gdg Skh	Jml Pddk Usia 7-12 th	Rasio	Jml Gdg Skh	Jml Pddk Usia 13-15 th	Rasio	Jml Gdg Skh	Jml Pddk Usia 16-18 th	Rasio
1	Kuta Alam	17	4,107	242	10	2,192	219	14	2,672	191
2	Kuta Raja	6	891	149	4	422	106	3	559	186
3	Syiah Kuala	15	2,737	182	3	1,716	572	4	2,634	659
4	Ulee Kareng	8	2,270	284	3	1,274	425	2	1,520	760
5	Baiturrahman	16	3,306	207	6	1,781	297	8	2,196	275
6	Lueng Bata	6	2,227	371	5	1.326	265	3	1.611	537
7	Meuraxa	10	1,224	122	3	660	220	3	847	282
8	Banda Raya	8	2,132	267	3	1,172	391	6	1,318	220
9	Jaya Baru	11	1,941	176	3	1,080	360	2	1,369	685
	Jumlah	**97**	**20,834**	**215**	**40**	**11,626**	**291**	**45**	**14,726**	**327**

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

2.3.1.1.3 Rasio Guru per Murid

Tabel 2.38
Jumlah Guru dan Murid menurut Jenjang Pendidikan Kota Banda AcehTahun 2007-2013

No	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	**SD/MI**							
1.1.	Jumlah Guru	1.247	1.340	1.386	1.380	1.342	1.320	1.806
1.2.	Jumlah Murid	23.593	23.593	24.349	24.824	23.342	26.840	28.743
1.3.	Rasio	19	18	18	18	19	20	16
2	**SMP/MTs**							
2.1.	Jumlah Guru	1.046	1.116	1.146	1.096	1.059	1.027	1.194
2.2.	Jumlah Murid	12.157	12.528	12.831	12.782	12.709	13.026	13.297
2.3.	Rasio	12	11	11	12	12	13	11
3	**SMA/MA/SMK**							
3.1.	Jumlah Guru	1.287	1.369	1.356	1.340	1.330	1.640	1.693
3.2.	Jumlah Murid	14.223	13.936	14.550	14.639	15.034	10.071	10.028
3.3	Rasio	11	10	11	11	11	6	6

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh

Apabila diperhatikan dari rasio penduduk terhadap murid dan rasio murid terhadap guru, telah menunjukkan kondisi yang ideal untuk Kota Banda Aceh. Ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh telah relatif baik.

2.3.1.1.4 Jumlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tercapai

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan itu sendiri terdiri dari 8 poin yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi;
3. Standar Proses Pendidikan;
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5. Standar Sarana dan Prasarana;
6. Standar Pengelolaan;
7. Standar Pembiayaan Pendidikan, dan
8. Standar Penilaian Pendidikan

Secara bertahap Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya agar penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di Kota Banda Aceh dapat memenuhi 8 poin SNP, sampai dengan tahun 2014, telah 3 SNP (38%) yang tercapai, yaitu Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Kompetensi Lulusan. Sebagaimana yang ditunjukkan pada grafik berikut ini.

Grafik 2.16
Persentase Jumlah SNP yang tercapai di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

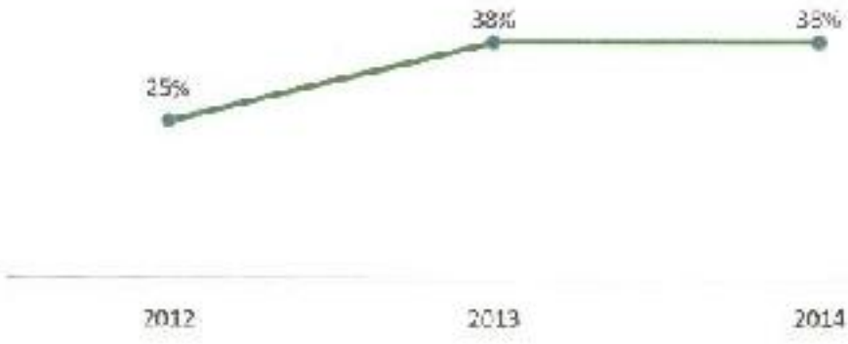

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh

2.3.1.1.5 Peringkat Kelulusan Tingkat Nasional

Ujian Nasional biasa disingkat UN / UNAS adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Depdiknas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, yang menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ujian Nasional diselenggarakan pada tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

Secara Nasional, pada Tahun 2013 Kota Banda Aceh menduduki peringkat ke 8 dan menjadi peringkat ke 13 pada Tahun 2014.

2.3.1.2 Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan hak dasar rakyat adalah mempermudah masyarakat di dalam memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Hal ini mengingat bahwa pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi jangka panjang dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas

sumberdaya manusia dan pembangunan ekonomi yang kompetitif serta peningkatan kesejahteraan sosial yang pada akhirnya menjadi upaya penanggulangan kemiskinan.

Arah pembangunan kesehatan di Kota Banda Aceh secara umum adalah terselenggaranya program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memperinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, dan lingkungan sehat, serta peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan.

2.3.1.2.1 Rasio Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Posyandu adalah unit yang berasal dari masyarakat, untuk masyarakat dan dilaksanakan pula oleh masyarakat. Sesuai standar nasional, idealnya 1 posyandu melayani 100 balita. Keadaan rasio posyandu terhadap balita di Kota Banda Aceh, tahun 2013 adalah 1 posyandu melayani 171 balita. Bila dibandingkan dengan standar nasional masih sangat kurang. Dari jumlah balita 19.379 Kota Banda Aceh selayaknya memiliki 194 posyandu. Namun hal ini belum dapat diwujudkan karena masih kurangnya peran serta masyarakat terhadap keberadaan posyandu, hal ini dibuktikan dengan jumlah kunjungan posyandu dan partisipasi kader yang sangat minim di tiap bulannya.

Meskipun jumlah posyandu masih relatif rendah, masyarakat Kota Banda Aceh mempunyai berbagai pilihan akses pelayanan kesehatan karena terdapat banyak fasilitas kesehatan di daerah ini.Hal ini disebabkan oleh posisi Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh sehingga fasilitas pelayanan kesehatan tersedia.Dengan tingkat pendapatan yang relatif baik, masyarakat mampu mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Tabel 2.39
Jumlah Posyandu dan Balita Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Posyandu	110	112	112	112	113	113	113
2.	Jumlah Balita	21.046	26.764	18.012	18.012	23.815	24.946	19.379
3.	Rasio	1:191	1: 238	1: 160	1: 160	1 : 210	1 : 221	1 : 171

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Tabel 2.40
Jumlah Posyandu dan Balita menurut Kecamatan
Kota Banda AcehTahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
1	Kecamatan Ulee Kareng	9	1.887	1/210
2	Kecamatan Syiah Kuala	11	3.263	1/297
3	Kecamatan Kuta Raja	6	721	1/120
4	Kecamatan Kuta Alam	15	1.720	1/115
5	Kecamatan Lueng Bata	10	1.430	1/143
6	Kecamatan Baiturrahman	18	1.938	1/108
7	Kecamatan Banda Raya	10	1.037	1/104
8	Kecamatan Jaya Baru	16	967	1/60
9	Kecamatan Meuraxa	18	1.656	1/92
	Jumlah	**113**	**14.619**	1/129

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Dari Tabel 2.44 dan 2.45dapat disimpulkan bahwa dari sembilan kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh, hampir semua wilayah kecamatan sudah memiliki jumlah posyandu yang cukup dengan rata-rata satu posyandu melayani kurang dari 200 balita, kecuali wilayah Kecamatan Ulee Kareng dan Kecamatan Syiah Kuala yang setiap posyandu melayani 210 dan 297 balita.

2.3.1.2.2 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu

Tabel 2.41
Jumlah Puskesmas,Pustu dan Polindes/Poskesdes
Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Puskesmas	10	11	11	11	11	11	11
2.	Jumlah Pustu, Polindes/ poskesdes	31	57	59	59	60	60	60
3.	Jumlah Penduduk	219,559	202,774	220.073	223,466	228,562	238.784	249.282
4.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	1 : 21.956	1 : 18.434	1 : 20.006	1 : 20.313	1: 20.778	1 : 21.708	1 : 22.662
5.	Rasio Pustu, Polindes/ poskesdes per desa/gampong	34.44%	63,33%	65,55%	65,56%	66.67%	66,67%	66,57%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di tingkat puskesmas, idealnya adalah satu puskesmas melayani 20.000 masyarakat. Keadaan di Kota Banda Aceh, pada tahun 2013 tiap satu puskesmas rata-rata melayani 22.662 masyarakat. Keadaan ini dapat dianggap sudah memenuhi standar.

Tabel 2.42
Jumlah Puskesmas, Pustu, Polindes/poskesdes menurut Kecamatan dalam Kota Banda AcehTahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Pustu		Polindes/ Poskesdes	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1	Ulee Kareng	25.148	1	1:25.148	2	1:12.574	8	1:3.144
2	Syiah Kuala	35.671	2	1:17.836	3	1:11.890	6	1:5.945
3	Kuta Raja	12.819	1	1:12.819	2	1:6.410	0	0
4	Kuta Alam	49.503	2	1:24.752	3	1:16.501	1	1:49.503
5	Lueng Bata	24.560	1	1:24.560	2	1:12.280	3	1:8.187
6	Baiturrahman	35.218	1	1:35.218	2	1:17.609	3	1:11.739
7	Banda Raya	22.941	1	1:22.941	2	1:11.471	6	1:3.824
8	Jaya Baru	24.460	1	1:24.460	4	1:5.115	3	1:8.153
9	Meuraxa	18.962	1	1:18.962	5	1:3.792	5	1:3.792
	Jumlah	**249.282**	**11**	**1:22.662**	**25**	**1:9.971**	**35**	**1:7.122**

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Dari 11 puskesmas, 25 pustu, 35 polindes, dan satu rumah sakit di Kota Banda Aceh saat ini digunakan untuk melayani lebih kurang 249.282 jiwa penduduk Kota Banda Aceh. Keberadaan sumber daya kesehatan ditujukan untuk peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan serta efektifitas penggunaan terutama jumlah tenaga medis yang ada pada setiap puskesmas dan rumah sakit.

Sesuai dengan ketentuan Menteri Kesehatan, di tiap satu desa selayaknya memiliki satu sarana pelayanan kesehatan (dapat pustu, polindes atau poskesdes). Kota Banda Aceh memiliki 90 desa dengan jumlah sarana pelayanan kesehatan di luar Puskesmas dan Rumah sakit sampai dengan akhir tahun 2013 sebanyak 60 unit (66,6 persen). Berarti kekurangannya sekitar 30 unit lagi (33,4 persen).

2.3.1.2.3 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Standar untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah 1 rumah sakit untuk 10.000 penduduk, keadaan di tahun 2013 untuk wilayah Kota Banda Aceh menunjukkan keadaan 1 rumah sakit memberi pelayanan kesehatan untuk 41.547 penduduk. Keadaan ini menunjukkan kekurangan rumah sakit untuk wilayah Kota Banda Aceh, namun kekurangan ini telah tercukupi dengan adanya 12 rumah sakit swasta yang tersebar di Kota Banda Aceh sampai dengan tahun 2011.

Tabel 2.43
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
Kota Banda AcehTahun 2007 -2013

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah Provinsi)	1	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah Kota)	1	1	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	1	1	1	2	2	2	2

4.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	2	2	2	2	2	2	2
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	5	5	5	6	6	6	6
6.	Jumlah Penduduk	219.659	217.918	212.241	223.446	228.562	238.784	249.282
7.	Rasio	1 / 43.932	1 / 43.584	1 / 42.448	1 / 37.241	1 / 38.094	1 / 39.797	1 / 41.547

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

2.3.1.2.4 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Standar nasional adalah satu orang dokter diperuntukkan untuk memberi pelayanan kesehatan kepada 2.500 penduduk. Keadaan di Kota Banda Aceh di tahun 2013, satu orang dokter melayani 8.309 penduduk, ini menunjukkan ketimpangan, di mana jumlah dokter ternyata masih sangat kurang untuk wilayah Kota Banda Aceh. Seharusnya dengan jumlah penduduk Kota Banda Aceh sebanyak 249.282 jiwa, maka diperlukan jumlah dokter =100 orang, sedangkan yang ada sekarang adalah 30 orang, berarti masih kurang 70 orang dokter lagi.

Tabel 2.44
Jumlah Dokter di Kota Banda AcehTahun 2007-2013

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Dokter	70	76	63	51	74	40	30
2	Jumlah Penduduk	219.659	217.918	212.241	223.446	228.562	238.784	249.282
3	Rasio	1 / 3.138	1 / 2.867	1 / 3.369	1 / 4.381	1 / 3.089	1 / 5.970	1 / 8.309

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Tabel 2.45
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
1	Ulee Kareng	25.148	2	1 / 12.574
2	Syiah Kuala	35.671	4	1 / 8.918
3	Kuta Raja	12.819	2	1 / 6.410
4	Kuta Alam	49.503	6	1 / 8.251
5	Lueng Bata	24.560	5	1 / 4.912

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
6	Baiturrahman	35.218	2	1 / 17.609
7	Banda Raya	22.941	3	1 / 7.647
8	Jaya Baru	24.460	3	1 / 8.153
9	Meuraxa	18.962	3	1 / 6.321
	Jumlah	**249.282**	**30**	1 / 8.309

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Pada Tabel 2.50 menunjukkan penyebaran dokter di lingkungan pemerintahan Kota Banda Aceh yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Jika dilihat berdasarkan penyebaran tenaga medis di tiap kecamatan, maka dapat dilihat bahwa dokter paling kurang terdapat di Kecamatan Baiturrahman, di mana satu orang dokter memberikan pelayanan kesehatan untuk 17.609 penduduk.

2.3.1.2.5 Puskesmas yang sudah menerapkan e-health dan bersertifikasi ISO/akreditasi

Dimulai sejak tahun 2013 Pemerintah Kota Banda Aceh telah merintis pembangunan jaringan e-health dan pada Tahun 2014 telah 6 puskesmas yang menerapkan e-health, dan seluruh jaringan e-health puskesmas telah terkoneksi langsung ke Dinas Kesehatan.

ISO 9001: 2008 adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengontrol organisasi berkaitan dengan mutu. Pada tahun 2014 Puskesmas Kuta Alam berhasil meraih sertifikasi ISO, dimana sebelumnya Puskesmas Kopelma Darussalam dan Puskesmas Baiturrahman telah meraih sertifikasi ISO masing-masing pada tahun 2012 dan 2013.

Grafik 2.17
Jumlah Puskesmas yang sudah menerapkan e-health dan bersertifikasi ISO/akreditasi Tahun 2012-2014

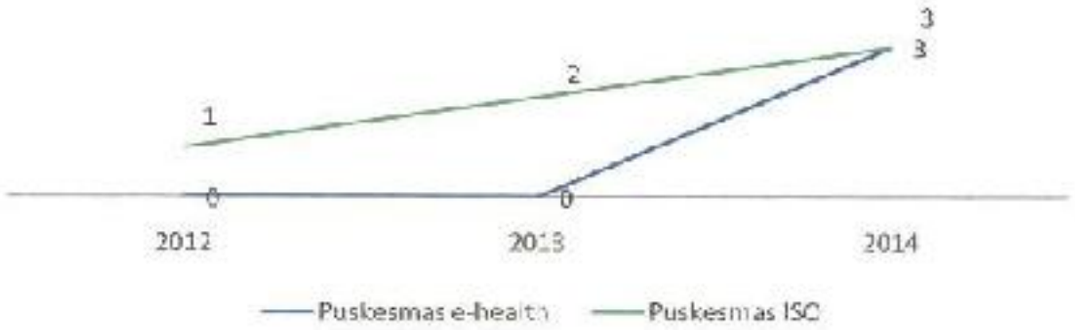

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

2.3.1.2.6 Model Gampong Sehat

Program model gampong sehat merupakan salah satu terobosan Pemerintah Kota Banda Acehuntuk meningkatkan derajat kesehatan warga di Banda Aceh. Melalui model gampong masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan terutama menyangkut aspek aspek promotif dan preventif (pencegahan). Karena selama ini selama ini fokus pembangunan kesehatan hanya pada aspek kuratif (pengobatan) sehingga dirasa kurang efektif. Program ini mulai diwacanakan pada tahun 2014, yang diawali dengan proses penyusunan regulasi.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum

2.3.1.3.1 Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%)

Saat ini total panjang jalan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh adalah 707.343 km. Panjang jalan dengan kondisi baik sampai tahun 2014 sepanjang 680.110 km, sedangkan panjang jalan dengan kondisi rusak adalah 27.230 Km.

Tabel 2.46
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi
Kota Banda AcehTahun 2007-2014

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kondisi Baik	192.540	531.127	631.457	650.860	705.230	705.231	703.621	680.130
2	Kondisi Rusak Sedang	114.130	67.114	-	-	-	-	-	-
3	Kondisi Rusak	181.323	109.102	72.886	47.483	2.110	2.122	3.322	27.330
4	Kondisi Rusak Berat			-	-	-			
5	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)	487.943	707.343	707.343	707.343	707.343	707.343	707.343	707.343

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh

Meningkatnya pertumbuhan lalu lintas yang meliputi jumlah kendaraan dan kepemilikan kendaraan (*demand*) yang tinggi tidak diimbangi dengan pertumbuhan prasarana transportasi (*supply*). Dengan kondisi tersebut menimbulkan permasalahan transportasi yaitu kemacetan di ruas-ruas jalan Kota Banda Aceh. Salah satu titik dengan tingkat kemacetan yang cukup tinggi adalah Simpang Surabaya. Kondisi saat ini kapasitas Simpang Surabaya mulai tidak mampu melayani arus kendaraan yang melaluinya, hal ini terindikasi dari kemacetan yang sering terjadi terutama pada saat jam sibuk (*peak hours*). Selain itu simpang ini merupakan salah satu titik simpul penghubung jalur evakuasi Kota Banda Aceh.

Oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan tipe simpang dari tipe sebidang menjadi tipe tidak sebidang dengan membangun fly over pada Simpang Surabaya.

Tabel Data Teknis Pembangunan Fly Over Sp. Surabaya

Panjang Jalan	850,954 m (Termasuk Fly Over)
Panjang Fly Over	275 m
Jumlah Bentang	8 (Delapan) Bentang
Lebar Fly Over	17,5 m
Pondasi Flyover	Bore Pile dia. 100 cm (144 titik)

Pier / Kolom	7 buah
Panjang Oprit	SisiTimur - 281.00 m. Sisi Barat - 294.954 m

Salah satu permasalahan krusial dalam program pembangunan dan peningkatan kapasitas jaringan jalan Kota Banda Aceh adalah harga tanah yang tinggi untuk dibebaskan.Sebagai gambaran pembebasan lahan untuk pekerjaan Pembangunan Fly Over simpang Surabaya dan Underpass simpang Beurawe menelan biaya sebasar 26 Milyar. Demikian juga dengan pembangunan jalan Sultan Malikulsaleh yang menghabiskan biaya sebesar 23 milyar untuk keperluan pembebasan lahan, belum lagi program pembangunan prioritas, peningkatan kapasitaas jaringan jalan strategis lainnya yang secepatnya membutuhkan lahan untuk dibebaskan. Kondisi ini jelas sangat membebani keuangan daerah yang hanya bersumber dari APBK Kota Banda Aceh.

Pesatnya pembangunan infrastruktur di kota Banda Aceh pada beberapa tahun terakhir ini berdampak pada penurunan kondisi jalan kota Banda Aceh. Kendaraan yang mengangkut material seperti batu-batu gajah untuk keperluan pekerjaan tanggul pemecah ombak di kawasan pantai berdampak terhadap kerusakan jalan yang dilalui, seperti pada jalan Focus Baren yang mengalami kerusakan cukup parah sehingga harus di lakukan pemeliharaan berkala pada Tahun Anggaran 2016 ini oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh. Kendaraan pengangkut material dengan tingkat tonase tinggi dalam rute perjalanan dari quary menuju lokasi proyek memang harus memasuki kawasan kota, akibat tipe jaringan kota Banda Aceh yang bersifat radial dimana arus pergerakan kendaraan terpusat pada kawasan pusat kota, apalagi kota Banda Aceh saat ini belum memiliki jalan lingkar yang dapat memungkinkan sistem pergerakan tidak terpusat di kawasan pusat kota.

Sistem perparkiran di kota Banda Aceh terutama di kawasan jalan protokol dan perdagangan perlu dilakukan traffic demand management untuk menghindari kemacetan akibat penyempitan ruas jalan yang

dipakai sebagai lokasi parkir. Pada jalan – jalan protokol dan perdagangan seperti Jl. Panglima Polem, Jl. Cut Nyak Dhien, Jl. Prof. Dr. Moh. Hasan, Jl. Hasan Saleh dan Jl. T. Iskandar dapat dilihat bahwa parkir pada badan jalan menyebabkan hambatan samping yang besar bagi pengguna jalan, oleh sebab itu perlu difikirkan sistem parkir yang ideal baik untuk pendapatan daerah dan juga kenyamanan pengguna jalan.

Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan yang disebabkan oleh perparkiran di Kota Banda Aceh, yaitu:

1. Memaksimalkan penggunaan ruang parkir di dalam bangunan *(basement)*.
2. Menyediakan moda transportasi umum yang nyaman bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya.
3. Menambah jumlah petugas lapangan guna menertibkan perparkiran di Kota Banda Aceh.

2.3.1.3.2 Rasio Jaringan Drainase

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air disebutkan bahwa pemeliharaan jaringan drainase merupakan upaya menjaga dan mengamankan jaringan drainase kota agar dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. Pengertian pemeliharaan adalah semua pekerjaan rutin dan berulang yang diperlukan untuk memelihara suatu fasilitas sehingga fasilitas tersebut dapat berfungsi maksimal sesuai dengan perencanaan.

Kota Banda Aceh termasuk salah satu kota pantai, dengan topografi yang berada pada elevasi 0,80 meter di atas permukaan air laut. Secara hidrolis Kota Banda Aceh menerima banjir kiriman, banjir genangan dan banjir pasang air laut, berhubung kondisi topografi yang relatif datar maka banjir ini tidak dapat dibuang dengan gravitasi.

Untuk itu dalam perencanaan drainase terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dan perlu pertimbangan seperti : pendangkalan saluran (sedimentasi), limbah, sampah dan pasang surut air laut, dan pada tempat-tempat tertentu seperti pada pertemuan drainase dengan badan air *(receiving waters)* khususnya di dekat pantai perlu direncanakan bangunan kolam pengumpul yang dilengkapi dengan *pumping station* karena aliran secara gravitasi sudah tidak mungkin dilakukan secara optimal.

Pada tahun 2005 melalui Satuan Kerja Sementara Pengendalian Banjir Kota Banda Aceh dan Pengaman Pantai Dinas Sumber Daya Air Provinsi Aceh melaksanakan SID Drainase Induk Kota Banda Aceh dan melakukan Review Master Plan Drainase Kota Banda Aceh dengan membagi wilayah pengaliran air menjadi 8 zona drainase seluas 4.706 Ha.

Gambar 2.15
Peta Pembagian Zona Drainase Kota Banda Aceh



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh

Kondisi drainase pada saat itu adalah terjadinya sedimentasi, sampah, dinding saluran yang runtuh dan menutup saluran, penyempitan dimensi saluran dan gorong-gorong, hambatan akibat bangunan lain seperti pipa PDAM, tiang listrik, tiang telepon, sisa-sisa bekesting dan sebagainya serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang

sampah pada tempatnya. Hal ini menyebabkan air tergenang diseparjang saluran dan menjadi tempat berkembangnya nyamuk serta menimbulkan bau yang tidak sedap, pada gilirannya akan menggganggu kesehatan. Sedimentasi, sisa-sisa bangunan, sampah dan tumbuh-tumbuhan diperkirakan hampir 70 persen dari parjang saluran.

Pemeliharaan saluran dramase sangat diperlukan agar fungsi sistem drainase menjadi lebih efektif. Dengan pemeliharaan yang baik maka dapat mengurangi dampak banjir atau genangan. Pemeliharaan druinase yang dilakukan pada saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal dikarenakan belum tersedianya data base saluran yang baik dan terorganisir sehingga akan berakibat dengan kebutuhan besaran dana yang diperlukan untuk setiap tahunnya. Pemeliharaan sistem druinase sampai dengan saat ini sekitar 71 persen yang telah tertangani.

Tabel 2.47
Perkembangan Kondisi Main Drain Kota Banda Aceh

No	Tahun	Panjang Saluran (Km)	Panjang Penanganan (Km)	Kondisi Baik (Km)	Kondisi Rusak (Km)	Kondisi Rusak Berat (Km)
1	2007	138,79	15,00	35,99	102,80	12,40
2	2008	141,39	-	50,99	90,40	-
3	2009	165,3	62,50	113,49	51,81	-
4	2010	172,3	7,00	120,49	51,81	-
5	2011	186,6	91,00	175,50	11,10	-
6	2012	3.246,56	1.6907	177,19	11,10	10,76
7	2013	2.246,43	1.8093	179,00	550,40	9,06
8	2014	2.248,24	8.5504	187,56	552,21	7,26

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh dengan topografi pada elevasi 0,8 meter diatas permukaan air laut, sehingga secara hidrolis Kota Banda Aceh menerima banjir kiriman, banjir genangan, dan banjir pasang laut yang tidak dapat dibuang dengan gravitasi. Untuk hal tersebut, saat ini Kota Banda Aceh memiliki sembilan rumah pompa yang sangat diperlukan khususnya apabila munculnya musim penghujan bersamaan dengan pasang purnama, karena kondisi aliran pada tempat tersebut saat pasang purnama sudah merupakan aliran balik *(back water)*. Tanpa

stasiun pompa ulimin air sudah stagnan dan khususnya pada lokasi genangan permanen dalam drainase, sehingga kelebihan air tidak dapat dikurangi dan dikhawatirkan di musim kemarau akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Tabel 2.48
Kondisi Rumah Pompa Kota Banda Aceh

No	Lokasi	Kecamatan	Kondisi	Zona	Jumlah Mesin	Kapasitas
1	Lampaseh P2.1	Kuta Raja	Baik	II	4	0,5 m³/dt
2	Kp. Lance P2.2	Kuta Raja	Baik	II	2	0,5 m³/dt
3	Punge Jurong P2.3	Meuraxa	Baik	II	2	0,5 m³/dt
4	Peunayong P3.1	Kuta Alam	Baik	III	2	0,5 m³/dt
5	Tgk. Dililang P3.2	Kuta Alam	Baik	III	2	0.5 m³/dt
6	Lampulo P3.3	Kuta Alam	Baik	III	4	0.5 m³/dt
7	Peuniti P4.1	Baiturrahman	Baik	IV	2	0,5 m³/dt
8	Panteriek	Lueng Bata	Baik	VI	2	0.5 m³/dt
9	Jeulingke P5.2	Syiah Kuala	Baik	V	3	0.5 m³/dt

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh

Wilayah yang mengalami banjir genangan disebabkan oleh tidak tersdianya drainase mikro. Untuk pengadaan drainase mikro diwilayah banjir genangan terkendala oleh ketersediaan lahan dan biaya pembebasan yang kurang.

2.3.1.3.3 Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Kebutuhan manusia akan air bersih sangat tinggi dan kompleks antara lain untuk minum, masak, mandi, mencuci dan lain-lain. Kebutuhan masyarakat akan air bersih terus meningkat seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk. Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh berkerjasama dengan PDAM telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersihdapat dilihat pada Tabel 2.59.

Tabel 2.49
Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih dan Jumlah Penduduk Kota Banda AcehTahun 2007 2014

No.	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Penduduk yang mendapatkan Akses air Bersih	78.530	108.785	140.850	165.055	190.070	196.728	207.824	208.07
2	Jumlah penduduk	319.659	317.918	212.211	223.146	228.562	238.784	249.292	249.49
3	Persentase penduduk berakses air bersih (%)	35,75	49,9	66,4	74,3	83,16	82,61	83,37	83,39

Sumber : PDAM Kota Banda Aceh

Tabel 2.50
Proporsi Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum menurut Kecamatan dalam Kota Banda AcehTahun 2014

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Pelanggan (SL)	Jumlah Penduduk yang mendapatkan Akses Air Minum	Persentase
1	Meuraxa	18.979	3.700	18.500	97,47
2	Jaya Baru	24.481	3.004	15.020	61,35
3	Banda Raya	22.961	2.942	14.710	64,01
4	Baiturrahman	35.249	4.850	24.250	68,79
5	Leung Bata	24.581	4.536	22.680	92,26
6	Kuta Alam	49.545	9.358	46.790	94,44
7	Kuta Raja	12.831	2.420	12.100	94,30
8	Syiah Kuala	35.702	6.755	33.775	94,60
9	Ulee Kareng	25.170	4.049	20.245	80,43
Total		**249.499**	**41.614**	**208.070**	
Rata-rata (%)					**83.39**

Sumber : PDAM Kota Banda Aceh

Sistem pelayanan air minum di Kota Banda Aceh dengan cakupan pelayanan pada akhir tahun 2014 sebesar 83,39%. Dari angka tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh telah melampaui target MDGs 2015 untuk menurunkan hingga setengah proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak yaitu sebesar 75%.

Meskipun begitu, upaya pengembangan sistem air minum di Kota Banda Aceh juga memiliki beberapa kendala, antara lain:

1. Belum meratanya jaringan air minum pada masyarakat.
2. Belum optimalnya pengelolaan sistem penyediaan air minum yang memenuhi standar 3K (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) akibat

dari dimensi pipa yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini.

3. Rusaknya sistem jaringan perpipaan akibat pembangunan infrastruktur perkotaan, seperti pelebaran jalan, pembangunan drainase, penanaman kabel listrik dan kabel telekomunikasi.
4. Tingkat kehilangan air masih tinggi yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat terhadap sistem jaringan air minum.
5. Peningkatan cakupan pelayanan air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan, belum dapat mengimbangi tingginya aktivitas perkotaan dan jumlah penduduk.

Jumlah sambungan rumah pada tahun ini telah mencapai 43.008 sambungan melalui jaringan perpipaan. Pelayanan air bersih di wilayah pelayanan PDAM Tirta Daroy mempunyai angka kebocoran ±46%. Permasalahan yang dihadapai PDAM Tirta Daroy saat ini masih tingginya tingkat kehilangan air, efisiensi penagihan, management demand dan supply belum memadai dan kondisi kuantitas dan kualitas air baku tidak stabil.

2.3.1.3.4 Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tabel 2.51
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2014

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Realisasi RTRW	50	50	100	100	100	100	100	100
2	Rencana Penuntukan RTRW	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Rasio (1/2)	50	50	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Banda Aceh

Tercapai nilai ketaatan penuntukan dan realisasi RTRW menunjukkan bahwa ketaatan hukum warga kota Banda Aceh telah meningkat. Artinya, kesadaran hukum masyarakat telah semakin baik.

2.3.1.4 Perumahan

2.3.1.4.1 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)

Tabel 2.52
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih di Kota Banda AcehTahun 2007-2014

No.	Sumber Air Bersih	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Leding (Perpipaan)	18.706	21.767	28.170	33.219	38.014	39.836	46.695	42.062
2	Sumur Lindung	-	-	-	-	-			
3	Sumur tidak Terlindung	-	-	-	-	-			
4	Mata Air Terlindung	-	-	-	-	-			
5	Mata Air Tidak Terlindung	-	-	-	-	-			
6	Sungai	-	-	-	-	-			
7	Danau/Waduk	-	-						
8	Air Hujan	-	-	-	-	-			
9	Air Kemasan	-	-	-	-	-			
10	Lainnya	-	-	-	-	-			
11	Total jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	18.706	21.767	28.170	33.219	38.014	39.836	46.695	42.062
12	Jumlah Rumah Tangga	46.570	48.572	50.762	62.762	54.572			
13	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan Air Bersih (11/12)	33,73	44,79	55,51	52,97	69,66			

Sumber : PDAM Kota Banda Aceh

2.3.1.4.2 Rasio Rumah Tinggal berakses Sanitasi (%)

Dalam upaya mengurangi efek limbah baik dari perumahan/permukiman maupun perdagangan/jasa telah dilaksanakan berbagai program/kegiatan dalam upaya memenuhi mengurangi efek pengolahan limbah yang tidak benar. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Limbah di Kota Banda Aceh. Jumlah rumah tinggal yang bersanitasi di Kota Banda Aceh terus meningkat dengan persentasenya seperti tercantum dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.53
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2014

No.	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	41.498	46.560	48.705	50.111	50.562	45.166	63.305	54.277
2	Jumlah rumah tinggal	46.570	48.572	50.752	52.752	54.572	49.837	74.944	62.332
3	Persentase	90,39	90,49	91,99	93	92,65	90,58	84,55	87,05

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh

Hingga saat ini Kota Banda Aceh belum memiliki sistem pengelolaan air limbah secara off-site. Sebagian besar warga kota membuang limbah kakus (*black water*) ke dalam septic tank yang tidak dirancang dan dibangun dengan baik sehingga tidak memberikan pengolahan optimal terhadap limbah tersebut. Buangan dari septic tank ini sebagian besar dialirkan ke saluran sehingga sangat berpotensi terjadinya pencemaran air. Tahun 2013 pemerintah Kota Banda Aceh dengan sumber dana APBN melalui Satker PPLP Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya, melakukan penyusunan Masterplan Air Limbah Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2032.

Arahan pengembangan dibagi dalam 4 program tahapan, yaitu :

a) Program Jangka Mendesak (tahun 2012-2017)
b) Program Jangka Menengah (tahun 2017-2022)
c) Program Jangka Panjang Pertama (tahun 2022-2027)
d) Program Jangka Panjang Kedua (tahun 2027-2032)

2.3.1.5 Penataan Ruang

2.3.1.5.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

Kegiatan Sosialisasi Rencana Tata Ruang/Tata Kota dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Bangunan Umum mempunyai beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- Ketersediaan sarana dan prasarana fisik bangunan umum yang memadai.
- Meningkatkan kualitas prasarana fisik bangunan umum baik secara struktural maupun arsitektural
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana fisik bangunan umum yang ramah terhadap penyandang cacat (aksesibilitas penyandang cacat)

Selanjutnya untuk pelaksanaan pembangunan agar sesuai RTRW dilakukan kegiatan pengendalian dan pemanfaatan ruang yang meliputi

- Pengawasan Pemanfaatan Ruang
- Sosialisasi Tata Ruang/Tata Bangunan
- Penataan Bangunan
- Pemutihan IMB Dalam Kawasan Kota Banda Aceh
- Peningkatan Sarana Dan Prasarana Fisik Bangunan Umum
- Penyusunan Rencana Tata Ruang
- Pengawasan Pemanfaatan Ruang
- Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Peningkatan jumlah penduduk dan aktifitasnya menyebabkan peningkatan penggunaan lahan. Banyak ruang terbuka berubah menjadi kawasan terbangun. Keberadaan ruang terbuka hijau harus diperhatikan agar kondisi kota tetap indah, sehat dan nyaman. Perkembangan rasio RTH di kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.73.

Tabel 2.54
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
Kota Banda AcehTahun 2007-2014

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Luas Ruang Terbuka Hijau	1.809,30	1.809,30	1.809,30	1.809,30	1.809,30	1.809,30	1.809,30	1.809,30
2	Luas wilayah ber HPL/HGB	552,24	588,26	644,28	690,3	736,32	726,1	726,1	729,8
3	Luas wilayah	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136
4	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)	3,28	3,07	2,80	2,62	2,46	2,49	2,49	2,48

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh

Tabel 2.55
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah menurut Kecamatan Kota Banda AcehTahun 2014

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Luas wilayah ber HPL/HGB	Luas Ruang Terbuka Hijau	Rasio Ruang Terbuka Hijau
1	Kuta Alam	1005	193,6	193,6	100
2	Kuta Raja	521	241	241	100
3	Jaya Baru	378	9,9	9,9	100
4	Banda Raya	454	4,6	4,6	100
5	Lueng Bata	534	4,3	4,3	100
6	Ulee Kareng	615	5,7	5,7	100
7	Syiah Kuala	1424	312,6	312,6	100
8	Meuraxa	726	425,5	425,5	100
9	Baiturrahman	479	35,5	35,5	100
10	RTH Tibang, Lambung dan Rusunawa		14	14	100
	Jumlah	**6136**	**1250,6**	**1250,6**	**100**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh

2.3.1.5.2 Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan Umum

Pengawasan pemanfaatan ruang selama ini dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Adapun bentuk bangunan yang diregur terdiri dari :

- Bangunan yang dibangun tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan IMB.
- Bangunan yang didirikan tanpa IMB dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh.
- Bangunan yang didirikan diatas tanah negara dan diatas saluran atau sarana umum yang merupakan milik pemerintah.

Tahapan teguran meliputi :

Surat teguran I dan teguran II, yaitu berupa perintah penghentian pekerjaan dan pengurusan IMB, serta dapat berupa peringatan pembongkaran bangunan yang menyimpang dari ketentuan penataan ruang dan bangunan. Surat teguran III, yaitu berupa surat perintah pembongkaran.

Kegiatan pengawasan ini berdampak positif terhadap peningkatan jumlah pemilik bangunan yang mengurus IMB serta meningkatkan PAD Kota Banda Aceh.

Tabel 2.56
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2014

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	34.684	35.356	35.937	35.601	37.563	45.937	46.746	47.445
2.	Jumlah Bangunan	57.247	58.448	59.541	51.112	62.449	63.802	64.926	65.865
3.	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	60,6	60,5	60,2	60,2	60,1	72,00	72,00	72,03

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh

Tabel 2.57
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota Banda Aceh menurut Kecamatan Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Bangunan	Jumlah Bangunan ber-IMB	Rasio bangunan ber-IMB
1.	Kuta Alam	11.692	9.158	78
2.	Kuta Raja	3.851	2.312	60
3.	Jaya Baru	6.932	4.606	66
4	Banda Raya	4.782	3.347	70
5.	Lueng Bata	6.157	5.048	82
6.	Ulee Kareng	6.707	4.896	73
7.	Syiah Kuala	9.871	7.403	75
8.	Meuraxa	7.254	4.571	63
9.	Baiturrahman	8.615	6.204	72
	Jumlah	**65.865**	**47.445**	**72**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh

2.3.1.5.3 Persentase Luas Pemukiman Yang Tertata

Untuk mendukung terbangunnya permukiman yang layak huni dan dapat mendorong tumbuh kembang wilayah itu sendiri, diperlukan beberapa sarana dan prasarana pendukung yang dapat diwujudkan melalui :

- Pembangunan jalan utama dalam kawasan permukiman terbangun
- Pembangunan saluran air hujan/drainase
- Pembangunan jaringan distribusi air minum
- Pembangunan sistem pengolahan air limbah

Kelayakan huni suatu rumah akan mempengaruhi kondisi perumahan di kawasan tersebut.

Pada suatu lingkungan permukiman keberadaan sarana dan prasarana merupakan ukuran standar kelayakan, artinya lingkungan permukiman yang dilengkapi sarana dan prasarana (utilitas) yang memadai cenderung akan mengalami peningkatan taraf kesejahteraan. Hal ini cukup beralasan seperti keberadaan jalan-jalan penghubung ke daerah sekitar maupun ke pusat kota akan terjadi kemudahan akses interaksi dengan lingkungan permukiman sekitarnya maupun ke kawasan-kawasan utama pada daerah perkotaan. Disisi lain keberadaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan permukiman akan memacu pula peningkatan aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi.

Tabel 2.58
Persentase Luas Permukiman yang Tertata
Kota Banda AcehTahun 2007-2014

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Luas area permukiman tertata (Ha)	2324,08	2329,58	2335,08	2340,58	2346,08	2351,58	2357,08	2362,58
2.	Luas area permukiman keseluruhan (Ha)	2506,64	2506,64	2506,64	2506,64	2506,64	2506,64	2506,64	2506,64
	Persentase	92,72	92,91	93,13	93,39	93,59	93,81	94,03	94,25

Sumber : Dinas PU Kota Banda Aceh

Meskipun Luas Permukiman yang tertata di Kota Banda Aceh telah menunjukkan angka hampir 100 persen, akan tetapi Kota Banda Aceh masih memiliki Kawasan Kumuh. Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kota yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan ketentuan tata cara penetapan lokasi.

Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Banda Aceh terbagi 2 (dua) tingkatan yaitu: Tingkat Kekumuhan Sedang, dan Tingkat Kekumuhan Ringan. Kawasan tersebut meliputi sejumlah 20(Dua Puluh) lokasi, di 9 (sembilan) kecamatan, dengan luas total sebesar 797,60 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Enam Puluh) hektar. Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Banda Aceh merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh. Pada saat ini rumah tidak layak huni masih terdapat di pinggiran wilayah Kota Banda Aceh. Sebagian kecil warga yang bertempat tinggal di pinggiran/perbatasan Kota Banda Aceh termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Untuk mengantisipasi kebutuhan akan perumahan yang berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan tingkat daya beli masyarakat yang cenderung fluktuatif serta faktor faktor lain yang mempengaruhi tingginya harga rumah (nilai lahan), maka diperkirakan kemampuan masyarakat menengah kebawah untuk

membeli rumah akan menurun. Untuk itu telah dilakukan upaya dengan pengembangan rumah susun sewa (Rusunawa).

Pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) di Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh dimulai sejak tahun 2009 dan saat ini sudah ada yang beroperasi. Rumah susun tersebut keseluruhan sebanyak 4 x 98= 392 unit dengan asumsi 3 blok untuk hunian keluarga dan 1 blok untuk hunian lajang bekerja.

Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang membutuhkan hunian murah dan layak huni yang belum dapat diterima dan terpaksa harus masuk daftar tunggu/antrian disebabkan terbatasnya jumlah unit hunian yang ada sedangkan jumlah peminat jauh lebih banyak dari daya tampung Rusunawa.

2.3.1.6 Perencanaan Pembangunan

2.3.1.6.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJP, RPJM dan RKPK Kota Banda Aceh

Berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pada tahun 2007, Kota Banda Aceh telah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 2007-2027 dan disahkan melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007. Sementara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh periode 2012-2017 yang mencantumkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh telah disahkan melalui Peraturan Walikota Nomor 37 tahun 2012. Begitu juga dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPK) Kota Banda Aceh yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2014.

2.3.1.6.2 Persentase Program RPJM yang tertuang dalam RKPK

Salah satu indikator untuk mengukur keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah jumlah program RPJM yang tertuang dalam RKPK. Untuk Kota Banda Aceh, jumlah program RPJMD yang tertuang dalam RKPK sampai tahun 2014 sebesar 96%. Belum seluruhnya program RPJMD tertuang dalam RKPK lebih disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kota Banda Aceh. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penyusunan APBK setiap tahunnya membuat prioritas program dan anggaran yang melibatkan program pmgram yang langsung menyentuh urusan dasar masyarakat.

Grafik 2.18
Persentase Program RPJMD yang tertuang dalam RKPK

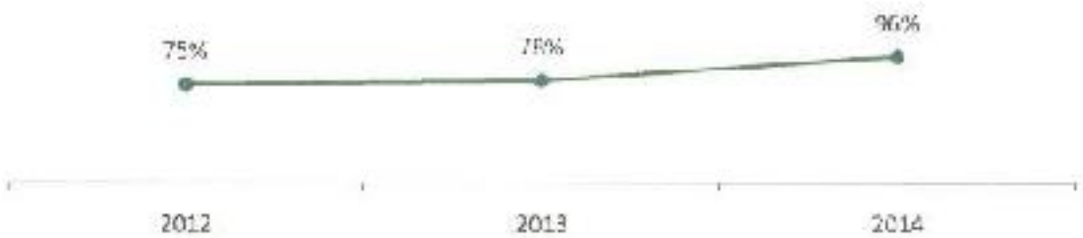

Sumber : Bappeda Kota Banda Aceh

2.3.1.7 Perhubungan

2.3.1.7.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (PJU)

Tabel 2.59
Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2014

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah penumpang Bis	133.756	146.000	394.200	662.721	526.623	941.921	1.007.855	799.785
3.	Jumlah penumpang ASDP	110.490	168.753	186.485	207.586	198.234	223.466	428.653	535.565
5.	Total Jumlah Penumpang	244,246	314,753	580,685	870,307	724,857	1.165.387	1.436.508	1.335.350

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

Dari Tabel 2.77 tampak bahwa jumlah penumpang angkutan umum meningkat dari tahun 2007–2010 dan tahun 2012-2013, sementara tahun 2011 dan 2014 terjadi penurunan penumpang pada terminal AKAP/AKDP.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah membuat Rencana Penerapan Dan Pengembangan Angkutan MassalKota Banda Aceh

Maksud dan Tujuan Pembangunan Angkutan Massal Kota Banda Aceh, adalah :

- Mengatasi permasalahan transportasi perkotaan: kemacetan, kesemrawutan parkir, kecelakaan lalu lintas dan polusi
- Meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk secara massal dan nyaman
- Menunjang pergerakan sumber daya untuk pertumbuhan ekonomi
- Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai model Kota Madani

Terdapat 6 (enam) koridor yang direncanakan, yaitu :

No	Koridor	Panjang Trayek (PP) (Km)	Jumlah Halte (Unit)	Perkiraan Jumlah Bus (Unit)
1	Pusat Kota - Darussalam	23,75	34	11
2	Bandara SIM – Pusat Kota – Pelabuhan Ulee Lheu	52,02	56	23
3	Pusat Kota – Mata Ie	17,18	22	8
4	Pusat Kota – Ajun – Lhoknga	34,71	43	16
5	Ulee Kareng – Terminal Tipe A	16,31	21	8
6	Terminal Tipe A - Syiah Kuala	14,03	18	7

2.3.1.7.2 Rasio Izin Trayek

Rasio izin trayek dinitung berdasarkan jumlah izin trayek yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah penduduk. Rasio izin trayek untuk tahun 2007 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.78

Tabel 2.60
Rasio Izin Trayek Kota Banda AcehTahun 2007-2014

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Izin Trayek perkotaan	588	496	360	539	322	358	358	358
2	Izin Trayek perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah Izin Trayek	588	702	662	798	632	654	114	114
4	Jumlah penduduk	219.659	217.918	212.241	223.446	228.562	238.784	249.282	267.340
5	Rasio Izin Trayek	0.0027	0.0023	0.0017	0.0015	0.0014	0,0014	0,0014	0,0013

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

Dari Tabel 2.78 tampak pada tahun 2011 terjadi penurunan pemberian izin trayek. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa banyak masyarakat yang sudah memiliki kendaraan pribadi untuk beraktivitas, sehingga minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan kota menurun drastis maka dengan sendirinya angkutan kota tersebut berangsur-angsur berkurang karena angkutan tersebut sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan operasionalnya dalam melayani trayek tersebut.

Tabel 2.61
Jumlah Halte Yang Di Layani Angkutan Umum Dalam Trayek
Kota Banda AcehTahun 2007-2014

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Halte	38	38	38	38	36	41	41	41
	Jumlah	**38**	**38**	**38**	**38**	**36**	**41**	**41**	**41**

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

Dari Tabel 2.79 tampak bahwa jumlah halte yang dilayani angkutan umum dalam trayek dari tahun 2007 – 2014 berjumlah 41 unit dengan lokasi halte yang telah ada berada pada jalur – jalur utama trayek angkutan umum yaitu pada Jl. Tgk. Daud Beureueh 12 Unit, Jl. T. Nyak Arief 8 Unit, Jl. Chik Ditiro 2 Unit, Jl. Tgk. Imuem Lueng Bata 3, Jl. T. Umar 11 Unit, Jl. ST. Iskandar Muda 1 Unit, Jl. T.P. Polem 1 unit, Jl. Soekarno Hatta 2 unit dan Jl. T. Hamzah Bendahara1 Unit.

Tujuan perekayasaan halte kendaraan penumpang umum adalah :

- menjamin kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas;
- menjamin keselamatan bagi pengguna angkutan penumpang umum
- menjamin kepastian keselamatan untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang;memudahkan penumpang dalam melakukan perpindahan moda angkutan umum atau bus.

Tujuan dari pemasangan fasilitas perlengkapan jalan adalah untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan pergerakan yang teratur terhadap pengguna jalan. Fasilitas perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien.

Jumlah fasilitas perlengkapan jalan Kota Banda Aceh seperti marka jalan, rambu dan traffic light dari tahun 2007-2014 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.62
Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2014

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Rambu	917 Unit	967 Unit	1017 Unit	1067 Unit	1368 Unit	1468 Unit	1848 Unit	150 Unit
2	Jumlah Marka	1340 M^1	1552 M^1	1750 M^1	2235 M^1	19396 M^1	10164 M^1	38363 M^1	14316 M^1
3	Jumlah Traffic Light	15 Titik	15 Titik	15 Titik	15 Titik	15 Titik	16 Titik	17 Titik	24 Titik

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

Tabel 2.80 memperlihatkan bahwa jumlah fasilitas perlengkapan jalan dari tahun 2007 – 2011 bertambah. Jumlah rambu lalu lintas setiap tahun terus bertambah (termasuk yang direhab) yang terdiri rambu tiang tunggal, rambu RPPJ dan Rambu Type F. Jumlah marka setiap tahun terus bertambah (termasuk yang dilakukan pengecatan kembali untuk marka yang telah pudar) yang terdiri marka putus – putus, marka lambang, marka utuh, marka chevpron, marka zebra cross, marka pita penggaduh dan marka yellow box. Jumlah traffic light dari tahun ke tahun tetap, namun setiap tahun terdapat titik trafic light yang dilakukan pergantian baru atau rehab. Selanjutnya perlu dilakukan perawatan, peremajaan dan pergantian secara berkala fasilitas perlengkapan jalan yang berada di Kota Banda Aceh

Tujuan dari pemasangan fasilitas perlengkapan jalan adalah untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan pergerakan yang teratur terhadap pengguna jalan.Fasilitas perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh memiliki program dan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran bagi pengguna jalan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas angkutan jalan. Masih rendahnya kesadaran ini menjadi salah satu penyebab tingginya kecelakaan di Kota Banda Aceh. Beberapa kegiatan tersebut adalah:

1. Melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah di Kota Banda Aceh akan pentingnya kesadaran dalam mematuhi perundang-undangan lalu lintas angkutan jalan.
2. Melaksanakan himbauan secara langsung bagi masyarakat melalui informasi mobil keliling.
3. Menerapkan sistem gembok roda bagi masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dengan memarkirkan kendaraannya pada tempat yang dilarang.
4. Menambah jumlah petugas lapangan guna menertibkan lalu lintas angkutan jalan.

2.3.1.7.3 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi:

- Uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Uji berkala untuk angkutan umum dilakukan secara periodik 6 bulan sekali.

Data jumlah kir angkutan umum di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.81. Dari Tabel 2.81 terlihat bahwa jumlah kir kendaraan di Kota Banda Aceh terjadi penurunan terutama pada tahun 2014, hal ini memungkinkan karena kendaraan dapat melakukan uji kir pada daerah lain.

Tabel 2.63
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2014

No	Angkutan Umum	2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014		
		Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%
1	Mobil penumpang umum	613	1,141	92.46	712	1,362	95.65	436	781	50.71	987	899	83.49	497	647	67.61	772	529	92,48	540	540	100,18	120	245	50,20
2	Mobil bus	890	1,701	85.54	830	1,487	97.65	908	1.613	53.32	580	1,000	84.29	1.187	1,879	70.72	1,466	1,879	100,79	1.921	2.045	100,71	800	1,740	51,37
3	Mobil barang	4.032	7,0..	85.03	3.186	6,206	96.87	4.026	7.240	89.96	4.212	7.165	89.29	4.167	9.333	111.99	5.358	5.796	107,45	6.731	7.597	111,83	3,021	6.174	48,92
4	Kereta gandengan																								
5	Kereta tempelan																								
	Jumlah	6.535	7,752	87.04	4.727	9.055	96.42	5.420	9.644	88.82	5.240	9.424	88.09	5.831	11.857	99.96	7.365	7.844	53.3	9.317	10.178	104,92	4.026	8.159	50.16

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

2.3.1.7.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelaksanaan pembangunan di sektor perhubungan, Kota Banda Aceh telah memiliki satu unit terminal penumpang terpadu type A melayani trayek AKAP dan AKDP jurusan Barat Selatan yang terletak di Jln DR. Mr. Tgk.H.Mohd. Hasan Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata dengan fasilitas yang memadai dibangun secara bertahap oleh satker BRR (pelaksanaan pembangunan tahun 2006 s/d 2008), dan juga memiliki satu unit terminal AKDP jurusan Timur – tenggah yang terletak di Jalan Tgk. Imum Lueng Bata, terminal Angkutan Kota, untuk kepertingan terminal Mobar Kota Banda Aceh sampai saat ini masih dalam pengawasan dan pengendalinan Dinas Perhubungan, Komintel Aceh.

Kota Banda Aceh juga memiliki satu unit Pelabuhan Penyeberangan ASDP yang terletak di pantai Ulee Lheue Jalan Iskandar muda Gampung Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa untuk melayani transportasi pengebarangan dengan aktivitas keberangkatan dari Banda Aceh ke Sabang dan Banda Aceh ke Pulo Aceh atau sebaliknya yang merupakan bantuan UNDP Pasca Tsunami, telah berfungsi secara maksimal dan telah berjalan lancar dalam melayani masyarakat.

Pengguna jasa transportasi terus meningkat baik dari masyarakat domestik maupun mancanegara.Oleh sebab itu kita terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana serta fasilias penunjang lainnya yang memadai melalui program/kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun kedepan (tahun 2002 sampai tahun 2017),kondisi fasilitas transportasi dalam Kota Banda Aceh diperlihatkan pada Tabel 2.82.

Tabel 2.64
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2014

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah pelabuhan ASDP	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Jumlah pelabuhan udara	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Jumlah terminal bis	2	2	2	2	3	3	3	3
	Jumlah	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

2.3.1.7.5 Tersedianya pelabuhan penyeberangan yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran

Kota Banda Aceh saat ini memiliki 1 pelabuhan penyebrangan laut yaitu pelabuhan ulee lheue yang melayani rute lintasan Banda Aceh – Sabang dan Banda Aceh Lamteng Kabupaten Aceh Besar. Pelabuhan Ulee Lheue memiliki luas yaitu sekitar 8 Ha dengan pembagian lahan untuk terminal penumpang sebagai bangunan utama, lahan parkir, dermaga kapal cepat, dermaga kapal lambat (ferry), kolam pelabuhan, dan lain-lain.

2.3.1.7.6 Tersedianya terminal angkutan penumpang/barangdi Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

Seluruh terminal angkutan di Kota Banda Aceh telah terlayani rute angkutan umum perkotaan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses keberadaan terminal. Hal ini dipengaruhi keberadaan terminal angkutan penumpang/barang yang berada didekat kawasan pusat kota.

Jumlah terminal di Kota Banda Aceh saat ini sebanyak 4 terminal, yaitu :

1. Terminal pelayanan tipe A (terminal batoh) yang melayani angkutan antar provinsi.
2. Terminal Pelayanan Tipe B (terminal L-300 Lueng Bata) yang melayani angkutan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
3. Terminal pelayanan tipe C (terminal APK Keudah) yang melayani angkutan dalam kota.
4. Terminal mobil barang (terminal santar).

2.3.1.7.7 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota

Kerangka jalan Kota Banda Aceh dibentuk oleh 3 sistem poros utama sebagai sistem jaringan jalan primer kota, yaitu poros timur (Jl. T. Daud Beureueh – Jl. T. Nyak Arief) , poros selatan (Jl. Teungku Imum Leung Bata atau dikenal sebagai Jalan Raya Banda Aceh – Medan lintas timur), dan poros barat (Jl. T. Umar – Jl. Cut Nyak Dhien).

Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum diwilayah Kota Banda Aceh sepanjang 66 Km dari total Jaringan Jalan di Kota Banda Aceh yaitu sepanjang 765,67 KM artinya panjang Jaringan Jalan Kota Banda Aceh yang Terlayani Angkutan Umum mencapai 8,60% dari total jaringan jalan di Kota Banda Aceh.

Perkembangan sistem jaringan jalan lokal lebih banyak dipengaruhi oleh kerangka utama kota, sehingga pola jalan cenderung membentuk grid mengikuti sistem jaringan jalan utama yang membentang cukup panjang. Sistem jaringan jalan internal Kota Banda Aceh untuk jalur pergerakan utama sudah cukup memadai, namun saat ini tidak ditunjang oleh jaringan sekunder yang berfungsi sebagai pembagi arus lalu lintas atau pengumpul (kolektor) pergerakan kendaraan, sehingga pada ruas-ruas jalan tertentu yang menghubungkan antara pusat-pusat kegiatan kota menghubungkan antara jalan primer sering timbul kemacetan lalu lintas cukup parah pada saat jam sibuk (peak hour).

Jenis angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh antara lain : mobil penumpang umum (labi-labi), mobil bis umum, taksi dan becak motor. Sebagai angkutan kota mobil penumpang umum dan bis umum menjadi saranan angkutan umum yang memilki rute tetap.

Mobil bis umum melayani 2 trayek yaitu Pusat Kota Banda Aceh – Bandara Sultan Iskandar Muda dan Pusat Kota Banda Aceh – Darussalam (kawasan kampus perguruan tinggi). Sedangkan untuk mobil angkutan umum melayani 11 rute trayek yang terbagi ke dalam beberapa kelompok tujuan. Saat ini, rute angkutan penumpang umum di Kota Banda Aceh umumnya hanya melintasi jalan-jalan utama dalam kota, sedangkan jalan lingkungan ataupun jalan gampong/desa sebagian besar belum terlayani oleh rute angkutan penumpang.

Berikut daftar rute trayek mobil angkutan umum dalam Kota Banda Aceh :

a. Terminal APK Keudah – Darussalam, PP (02B)
b. Terminal APK Keudah – Lampineung, PP (02A)
c. Terminal APK Keudah – Krueng Cut, PP (02C)
d. Terminal APK Keudah – Ulee Kareng, PP (06B)
e. Terminal APK Keudah – Keutapang Dua, PP (03A)
f. Terminal APK Keudah – Lamteumen, PP (04A)
g. Terminal APK Keudah – Ulee Lheue, PP (05A)
h. Terminal APK Keudah – lampeuneurut, PP (07A)
i. Terminal APK Keudah – Mibo, PP (07B)
j. Terminal APK Keudah – Tanjung, PP (08B)
k. Terminal APK Keudah – Lueng Bata, PP (08A)

2.3.1.8 Lingkungan Hidup

2.3.1.8.1 Persentase Penanganan Sampah

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh pada tahun 2010 memiliki total penduduk sebanyak 223.446 jiwa, tersebar di sembilan kecamatan dan 90 gampong. Jika rata-rata timbulan sampah adalah 0,75 kg/kapita, maka

Banda Aceh memproduksi sampah sekitar 167 ton/hari. Dari 167 ton/hari produksi sampah di Kota Banda Aceh, 78 persen produksi sampah sudah dapat terangkut ke TPA Gp. Jawa yang berasal dari gampong, jalan protokol, pasar, sekolah, rumah sakit/puskesmas, terminal/pelabuhan, hotel, rumah makan/restoran dan fasilitas umum lainnya. Sedangkan sisanya 17 persen sudah di daur ulang (baik pengelolaannya oleh dinas maupun oleh swasta), dan 5 persen lagi masih di bakar/dikubur oleh masyarakat, terutama di wilayah gampong.

Keberhasilan dalam pengelolaan persampahan sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah ketersediaan berbagai sumber daya dalam hal kualitas dan kuantitas, sedangkan faktor eksternal meliputi aspek ekonomi, sosial dan budaya, serta kondisi fisik kota yang semakin berkembang dengan segala dinamikanya.

Dalam hal sumber daya, yang meliputi sumber daya manusia, dana, peralatan, material, dan manejemen, secara umum Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Kota Banda Aceh telah memilikinya. Dengan sumber daya yang dimiliki sekarang DK3 telah mampu memberikan tingkat pelayanan persampahan, sebagai berikut :

Pelayanan Sampah Terangkut	:	78 persen
Luas Wilayah Pelayanan	:	86 persen
Jumlah Penduduk Terlayani	:	80 persen
Jumlah Desa yang terlayanai	:	100persen (90gampong)
Frekwensi pelayanan	:	1-7 hari sekali
Jumlah Gampong yang diberikanpelayanan secara "door to door"dan membayar retribusi sampah	:	65 gampong

Disisi lain DK3 masih menghadapi banyak tantangan dan persoalan yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduk, ekonomi, budaya, dan pembangunan fisik kota, yaitu :

- Timbulan sampah yang semakin meningkat setiap tahunnya. Volume sampah rata-rata yang dihasilkan sekarang, sebesar 780 m^3/hari.
- Potensi masyarakat dalam pengelolaan sampah belum optimal dikembangkan secara sistematis yang terintegrasi dengan pola pelayanan DK3.
- Perilaku warga masyarakat membuang sampah secara sembarangan sehingga munculnya TPS-TPS liar di banyak tempat, sedangkan pewadahannya masih sangat terbatas.
- Keberadaan Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi menjadikan Kota Banda Aceh sebagai objek kunjungan masyarakat dari kabpaten/kota lain di Aceh, yang pada umumnya masih berperilaku buruk dalam pengelolaan sampah.
- Biaya pengelolaan sampah masih didominasi oleh subsidi APBK sebesar 87 persen, sedangkan pembayaran retribusi dari warga masyarakat masih sangat rendah, yaitu 13 persen, akan tetapi kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan daerah-daerah lain Aceh dan di Indonesia pada umumnya.
- Belum berfungsinya penegakan hukum, yaitu Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Kebersihan dan Keindahan.
- Armada pengangkutan sampah yang sebagian besar sudah mencapai usia pakai 10 tahun, sehingga diperlukan anggaran yang tidak sedikit untuk peremajaan armada pengangkutan sampah.
- Kondisi perkembangan kota menuntut ketersediaan sarana persampahan yang lebih modern, representatif dan efisien.
- Dalam hal-hal tertentu/khusus, masih dirasakan keterbatasan jumlah personil.
- TPA Gp. Jawa yang masa pakainya diperkirakan tinggal 3 tahun lagi, sementara operasional TPA Regional Blang Bintang masih belum optimal.

Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh perlu terus melakukan upaya-upayan untuk peningkatan cakupan pelayanan hingga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, hal ini ditempuh dengan penambahan armada dan perluasan kawasan yang dilayani secara "*door to door*". Hal ini tentunya terkait juga dengan

upaya peningkatan penerimaan retribusi di sektor rumah tangga, namun demikian pelayanan sampah dengan kontainer masih akan terus dilakukan. Untuk pelayanan dengan kontainer akan diupayakan untuk pengalihan titik kontainer dari pusat kota dan jalan jalan protokol ke wilayah pinggiran. Disamping itu untuk TPS yang selama ini ditempatkan kontainer 4 m2 lebih dari satu, secara bertahap akan digantikan dengan kontainer ukuran 8 m3, di beberapa TPS, wadah kontainer diganti dengan wadah sampah komunal ukrang 660 liter.

Disamping itu juga akan dilakukan upaya pengurangan jumlah TPS liar di jalan-jalan utama baik di kota maupun di gampong baik dengan sosialisasi dan gotong royong serta berkoordinasi dengan pihak gampong dan kecamatan. Sampah-sampah yang selama ini dibuang ke TPS liar dapat dialihkan ke kontainer terdekat.

Pengumpulan sampah secara *door-to-door* merupakan sistem pengumpulan sampah yang dilakukan secara regular, terjadwal dan terjamin. Sistem ini hanya bisa diterapkan di kawasan pemukiman dimana infrastruktur jalan baik jalan utama maupun lorong memungkin dilalui oleh armada sampah.

Tingkat pelayanan dengan sistem ini sangat tergantung pada jadwal pengangkutan, yaitu saat kapan sampah tersebut diangkut (misalnya : dipagi hari atau di sore hari), frekwensi pengumpulan (misalnya : sekali, dua kali atau tiga kali per minggu). Mungkin ada yang beranggapan bahwa semakin sering frekwensi pengangkutannya akan semakin baik, akan tetapi frekwensi yang tinggi juga akan berdampak pada biaya. Semakin sering truk sampah lewat maka akan semakin menimbulkan gangguan (kebisingan, emisi) dan dapat mengganggu orang yang lalu lalang di jalan tersebut. Disamping itu tiap kali sampah diangkut pasti ada sampah yang tertinggal dipinggir trotar jalan.

Kebersihan dari sistem operasional pengumpulan sampah juga sangat tergantung pada bagaimana sampah ditempatkan di titik pengumpulan, dan karena tidak ada ketentuan tentang hal ini, maka sudah bisa dipastikan akan ditemui beragam cara orang mengemas sampah,

misalnya: dimasukkan dalam kantong plastik, dimasukkan dalam tong plastik/logam, dimasukkan dalam kotak, dan sebagainya. Sebenarnya dengan menetapkan standar pengemasan sampah akan mempermudah proses pengumpulan sehingga secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan.

Sistem pengumpulan ini akan lebih baik lagi bila sampah ditempatkan di tempat tepat di depan rumah sehingga pemilik rumah secara tidak langsung merasa dilibatkan dan bertanggung jawab dalam proses tersebut dar dan diharapkan mau membersihkan sisa sampah yang tidak disengaja tertinggal sedikit

Tabel 2.65
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah
Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2013

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah sampah yang terangkut ke TPA	525	465	467	502	520	558	583	608
2	Jumlah volume produksi sampah (m3)	600	610	640	670	685	716	748	780
3	Persentase	87	76	73	75	76	78	78	78

Sumber : Dinas Kebersihan dan Kendahan Kota Banda Aceh

Tabel 2.66
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah menurut Kecamatan
Kota Banda AcehTahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Sampah yang diangkut (m^3/hari)	Jumlah Volume Produksi Sampah (m3/hari)	Persen Tase
1	Baiturrahman	108	110	98
2	Kuta Alam	160	162	99
3	Lueng Bata	70	77	91
4	Jaya Baru	31	76	41
5	Banda Raya	59	75	79
6	Kuta Raja	23	41	56
7	Meuraxa	27	60	45
8	Ulee Kareng	51	76	67
9	Syiah Kuala	79	103	77

Sumber : Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Bila aliran sampah ke TPS terlalu besar, penggunaan kontainer perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan. Hal

penting yang perlu disadarai bahwa penempatan kontainer perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dengan berkonsultasi dengan masyarakat setempat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar keberadaan kontainer dapat diterima:

- Tersedianya areal yang memungkinkan truk bermanuver saat meletakkan dan mengangkat container
- Kondisi tanah yang memadai, akan lebih baik dilengkapi dengan landasan yang dibeton
- Tidak merusak/mengganggu pandangan
- Bila penuh dapat ditukar dengan cepat (tidak meluber)
- Tidak disalah gunakan
- Dilakukan pembersihan secara berkala pada lokasi titik kontainer dan memasukkan sampah yang tercecer di luar ke dalam kontainer

Titik kontainer harus dipilih di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar, baik untuk membuang langsung atau menggunakan jasa pengumpul swasta. Keberadaan kontainer diharapkan bisa menjadi penunjang dari sistem pengumpulan rumah tangga, ataupun sebaliknya, sehingga dalam hal ini sistem pengumpulan menjadi perpaduan antara *door-to-door* dan sistem kontainer.

Pengangkutan dengan sistem *door-to-door* umumnya truk masuk ke TPA sekali setiap shift (4 jam) sehingga dalam sehari 2 trip. Sedangkan dengan sistem kontainer rata-rata setiap armroll truck mengangkat kontainer ke TPA sebanyak 7-10 trip per hari.

Sistem kontainer umumya hanya menggunakan 2 tenaga kerja (1 orang supir dan 1 orang kernek), sedangkan sistem *door-to-door* dengan menggunakan truk membutuhkan 4 orang tenaga kerja (1 supir dan 3 kernek). Apabila digunakan pick up/becak cukup hanya menggunakan 2 orang tenaga kerja.

Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota saat ini memberikan pelayanan pengangkutan sampah di semua jalan protokol dan semua gampong dari 90 gampong yang ada di Kota Banda Aceh. Adapun pengumpulan sampah di gampong sudah termasuk juga penanganan sampah di jalan jalan protokol atau jalan utama yang secara administratif juga masuk dalam wilayah gampong. Namun demikian ada 2 gampong yaitu Deah Raya dan Alue Naga, meskipun sudah dilayani, namun sampah yang ada di sana relatif sedikit karena jumlah penduduk yang sedikit. Di samping itu masyarakat di kedua gampong tersebut cenderung untuk menimbun sendiri sampah di lahan mereka dan ada juga yang membawa sampah ke kontainer terdekat.

Untuk memudah pelaksanaan pekerjaan di lapangan, DK3 membagi wilayah berdasaran Zona, sehingga lebih memudahkan pengawasan. Adapun zona dibagi dalam 3 zona yang terdiri atas Zona I (Meuraksa, Banda Raya, Jaya Baru), Zona II (Syiah Kuala, Ulee Kareng dan Kuta Alam, Zona III (Baiturrahman, Kutaraja dan Lueng Bata). Setiap zona tersebut dipimpin oleh satu orang Manager Zona yang membawahi 3 manager kecamatan.

Komposisi sampah di kota Banda Aceh berdasarkan hasil audit sampah yang pernah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.

Tabel 2.67
Komposisi Sampah di Kota Banda Aceh

Komposisi	Persentase
Makanan (organik)	39,5
Kertas/kerdus	15,6
Plastik	12,5
Botol plastik	1,4
Kebun	8,4
Kayu	4,0
Logam (besi)	0,9
Logam (non-besi)	1,7
Kaca	2,2
Tekstil	2,6
Kulit dan karet	2,7

Komposisi	Persentase
Keramik	1,5
Ban bekas	1,6
Konstruksi/Material bongkaran	3,9
Lain-lain	1,4

Sumber : Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Tabel 2.68
Kendaraan dan Peralatan Untuk Mendukung Kegiatan Pengelolaan Sampah

No	Peralatan	Jumlah	Tujuan Operasional	Kondisi Saat Ini
1.	Dump Truk	34 unit	Pengangkutan sampah/1 unit untuk operasional landfill	Baik
2.	Compactor	4 unit	Pengangkutan sampah	Baik
3.	Pick Up	17 unit	Pengangkutan sampah	Baik
4.	Becak	30 unit	Pengangkutan sampah	Baik
5.	Armroll	6 unit	Pengangkutan Kontainer	Baik
6.	Bulldozer	3 unit	Operasional landfill	Baik
7.	Excavator	3 unit	Operasional landfill	Baik
8.	Mobil siram	1 unit	Operasional landfill	Baik
9.	Wheel Loader	2 unit	Composting di landfill	Baik
10	Mobile Waste Shredding Machine	1 unit	Composting dilandfill	Baik
11.	Kontainer	60 unit	Pengumpulan sampah	Baik/rusak ringan
12.	Mesin Potong Rumput	19 unit	Pengumpulan sampah	Baik

Sumber : Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Pelayanan retribusi persampahan sudah berjalan sejak tahun 2007 yang dulunya difasilitasi oleh UNDP-TRWMP. Pada awal program ini berjalan, hanya beberapa desa yang menjadi lokasi pilot project retribusi gampong. Seiring dengan peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh DK3 maka dalam beberapa tahun terakhir ini penguripan retribusi sampah sudah dilakukan di 65 gampong dari 90 gampong yang ada dalam wilayah Kota Banda Aceh, yaitu desa-desa yang sudah mendapatkan pelayanan pengangkuran sampah "*door to*

door secara baik. Dari 65 desa tersebut, rata rata *collection ratio* baru 30 persen.

Pada saat ini, Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota terus berbenah untuk meningkat pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan adanya penambahan armada kendaraan seperti, mobil pick up, dump truck dan compactor, sehingga dapat mengoptimalkan pengangkutan sampah sekaligus peremajaan terhadap armada lama yang sudah mulai using.

Dari tahun ke tahun target penerimaan retribusi terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Banda Aceh menargetkan Rp. 1,1 miliyar penerimaan retribusi baik untuk komersil maupun gampong. Tahun pertama, target penerimaan tercapai 100 persen. Pada tahun selanjutnya targetnya terus ditingkatkan namun realisasinya belum mencapai 100 persen. Pada tahun 2014 dari target sebesar Rp. 3,85 milyar, dapat direalisasikan sebesar 75 persen.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi selama ini :

- Di beberapa gampong masih didapati tempat pembuangan sampah liar di lahan warga. Hal ini disebabkan oleh sistem pewadahan sampah permukiman belum terpasang. Kondisi ini menjadi dilema bagi DK3 karena peraturan perundangan tidak memberikan kewajiban untuk memasang wadah sampah kepada DK3. Pewadahan menjadi kewajiban bagi setiap pemilik dan atau yang menempati bangunan. Adapun solusi untuk permasalahan ini adalah dengan mendirikan titik-titik pengumpulan sampah (collecting point) di kawasan permukiman melalui inisiatif gampong.
- Masyarakat membuang sampah yang tidak siap kemas ke dalam kontainer bahkan keluar kontainer.
- Peran serta Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam pengelolaan sampah masih sangat rendah atau hampir tidak ada sama sekali, terutama yang menghasilkan sampah dalam volume besar, seperti pedagang minuman air kelapa dan air tebu.
- Masyarakat masih menganggap sampah itu harus diambil setiap hari, padahal yang lebih penting adalah diambil tepat waktu sesuai

dengan jadwal yang dijanjikan (bisa saja setiap 2 hari sekali atau seminggu 3 kali)

- Masih ada petugas yang tidak konsisten untuk memberikan pelayanan sesuai jadwal yang disepakati (petugas lalai, truk/pick up rusak, dsb)
- Masih banyak sampah yang tidak dikemas dengan baik dan tidak dibawa ke tempat yang mudah diambil oleh petugas
- Masih ada masyarakat yang merasa tidak perlu membayar retribusi sampah karena sampah tidak diambil langsung ke rumah, padahal rumah yang bersangkutan tidak dapat dilalui oleh kendaraan DK3 dan sampah bisa dibuang ke lokasi kontainer terdekat dan akhirnya juga diangkut oleh truk DK3.
- Masih terbatasnya tenaga lapangan yang melakukan pengutipan sehingga tidak mampu menjangkau semua desa yang ada di Kota Banda Aceh.

Untuk memaksimalkan pengutipan retribusi sampah, Pemko Banda Aceh merencakan pengalihan pengutipan yang selama ini dilakukan oleh DK3 akan dilakukan oleh pihak desa langsung. Hal ini mengacu pada Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 88 tahun 2012 tentang Pengalihan Pengutipan Retribusi Gampong. Namun pola seperti ini tidak berjalan mulus, sehingga pengutipan dialihkan kembali kepada petugas retribusi DK3.

2.3.1.8.2 Pencemaran Status Mutu Air

Laju kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan semakin meningkat dan tidak menunjukkan gejala penurunan. Rantai kerusakan tersebut menjalar dan meluas ke sungai, danau, pantai, pesisir dan laut. Pencemaran air dan udara khususnya di wilayah padat penduduk telah berada pada ambang yang tidak hanya membahayakan kesehatan penduduk tetapi juga telah mengancam kemampuan pulih dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya hayati. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut, dari faktor demografis, etika, sosial, ekonomi, budaya, hingga faktor institusi dan politik.

Salah satu faktor strategis yang menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah karena portofolio kebijakan, rencana dan program (KRP) pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan cenderung terlepas atau terpisah dari KRP pembangunan wilayah dan sektor, tidak menyatu atau tidak terintegrasi.

Dengan meningkatnya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran air dan meningkatnya pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup pada Pemerintah Kota Banda Aceh, diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal agar masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup.

Dalam rangka pencapaian penerapan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup daerah Kota Banda Aceh yang terkait erat dengan permasalahan lingkungan di Kota Banda Aceh, diperlukan upaya pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien melalui upaya pencegahan dan penanggulangan berdasarkan data hasil pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut.

Adapun jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota (Permen LH No. 20/2008) diprioritaskan pada :

- Pencegahan pencemaran air
- Pencegahan pencemaran udara
- Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Berikut disajikan data kualitas air untuk beberapa lokasi khususnya parameter yang melebihi baku mutu kualitas air.





Tabel 2.69
Pencemaran Status Mutu Air

No	Lokasi Sampling / Parameter	Thn 2007		Thn 2008		Thn 2009		Thn 2010		Thn 2011		Thn 2012		Thn 2013		Thn 2014		Baku Mutu (PP 82/ 2001)	
		DO	BOD	DO	BOD	DO	BOD	DO	BOD	DO	BOD	DO	BOD	DO	BOD	DO	BOD	DO	BOD
Krueng Aceh																			
1.	Belakang PLTD	8,02	-	8,1	-	-	-	6,12	-	6,35	-	-	-	2,95	4,8	-	-	3	6
2.	Jembatan Sp. Surabaya	10,67	-	7,8	-	-	-	5,9	6,2	-	-	3,80*	8,4*	2,75	5,2	6,9*	1,38	3	6
3.	Jbtn Peunayong	7,59	-	6,8	-	-	-	6,4	14,7	4,20	12,6	3,80*	8,4*	1,80	5,2*	6,55*	1,64	3	6
Krueng Doroy																			
1.	Depan SMA 7	-	-	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
2.	Blkng Mesjid At-Taqwa Setui	-	-	-	-	-	-	3,10	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
3.	Jbtn Neusu	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10	5,00	3,15*	7,6*	-	-	-	-	3	6
4.	Jbtn Peuniti	-	-	7,1	-	-	-	3,9	6,3	4,25	5,9	4,50*	7,8*	-	-	6,81*	2,14	3	6
5.	Jbtn POM	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	6,69*	1,23	3	6
6.	Jbtn Geuceu Komplek	-						3,12	-	-	-	-	-	-	-	7,2*	1,74	3	6
7.	Jbtn Setui	-						5,47	11,8	3,40	7,12	-	-	-	-	-	-	3	6
Krueng Doy																			
1.	Jbtn Blower	-	-	-	-	-	-	5,41	11,9	-								3	6
2.	Jbtn Samping RRI							6,10	13,4							6,12*	0,92	3	6
3.	Jbtn Lampaseh	-	-	-	-	-	-	6,37	13,6	-	-	-	-	-	-	5,83*	1,43	3	6
Krueng Lueng Paga																			
1.	Stadion Harapan Banpas	-	-	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,14*	1,74	3	6
2.	Jbtn Ateuk Jawo	-	-	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,53*	1,54	3	6
3.	Jbtn Sp Sby Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10*	5,8	-	-	2,6	1,03	3	6
Krueng Lamnyong																			
1.	Sp. Mesra, Jeulingke	5,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-							3	6
2.	Jbtn Lamnyong	6,65						6,2	11,0	-	-	2,95	5,4	-	-	6,71*	2,77	3	6

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh

Parameter kualitas air yang terpenting adalah BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan DO (Dissolved Oxygen). BOD merupakan salah satu variabel kunci yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas air sungai, sedangkan DOadalahsalah satu parameter yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas suatu perairan yang menunjukkan tingkat kesegaran air sebagai akibat dari pencemaran air oleh parameter organik. Parameter organik (sebagai BOD) adalah parameter umum yang sering dipakai untuk menunjukkan tingkat pencemaran organik dari sumber pencemar seperti industri, domestik, pertanian dan perikanan. Beban BOD yang berlebihan mengganggu kualitas air sungai karena menyebabkan konsentrasi DO rendah sehingga sungai tidak layak untuk kehidupan flora dan fauna.

Data dari tabel pencemaran status air berdasarkan data hasil analisa laboratorium terhadap beberapa titik lokasi pengambilan sampel airsungai dari tahun 2007 s/d 2014 terlihat kualitas air sungai di Kota Banda Aceh telah mengalami pencemarar. air sungai yang didominasi oleh buangan air limbah domestik. Untuk mengurangi beban pencemaran dan semakin meningkatnya pencemaran maka diperlukan tindak lanjut berupa pengawasan dan pengendalian terhadap buangan limbah baik yang berasal dari buangan limbah rumah tangga maupun usaha kegiatan agar tidak membuang langsung limbah cairnya ke sungai, melainkan diperlukan pengolahan terlebih dahulu sehingga limbah cair yang dibuang ke lingkungan telah sesuai dan memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.

2.3.1.8.3 Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Berikut disajikan data tentang pengawasan lingkungan yang pernah dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.70
Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL

No	Usaha/Kegiatan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Rumah Sakit	10	10	1	13	11	1	-	5
2	Bengkel	194	-	-	-	-	-	-	1
3	Tahu/Tempe		19			5			
4	PLTD Lueng Bata		1	1		1	1		
5	Rumah Potong Hewan	-	-	1	-	-	-	-	-
6	Tanggul Air Asin Lampaseh			1					
7	Hotel/Penginapan	-	-	-	-	4		4	5
8	Laundry	-	-	-	-	3	1	-	-
9	Restoran/Cafe	-	-	-	-	4	-	-	-
10	SPBU					5		1	3

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh

Berikut disajikan data tentang kasus-kasus lingkungan yang pernah ditangani oleh Kantor Lingkungan Hidup dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.71
Kasus Lingkungan

No	Jenis Kasus	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pencemaran air		4				1	1
2.	Pencemaran udara	2	3	-	-	1	1	1
3.	Kebisingan	-	1	2	2			
4.	Pencemaran tanah	-	-	-	-			
5.	Pengelolaan Lingkungan hidup	-	-	1	4			

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh

Masalah yang diadukan tahun 2011, yaitu:

1. Tergenangnya air akibat bocornya pipa PDAM di kawasan Neusu dekat pabrik es dan diperparah lagi karena adanya doorsmeer dan pabrik es yang diduga memperparah genangan air di wilayah tersebut.(statusnya telah diselesaikan).
2. Rusaknya tambak warga di daerah Peulanggahan yang diakibatkan derasnya air yang masuk ketambak tersebut dari pintu air, dimana pintu air tersebut merupakan tempat penampungan air drainase kota. Warga meminta tempat penampungan tersebut dibuat saluran yang dialirkan langsung kelaut.(statusnya telah diselesaikan).

Masalah yang diadukan tahun 2012, yaitu:

1. Pembuangan dan pembakaran sejumlah limbah medis berupa obat-obatan kadaluarsa dll yang pengelolaannya tidak sesuai dengan prosedur (SOP) di TPA Gampong Jawa yang diadukan oleh masyarakat Gampong Jawa. (statusnya telah diselesaikan).

Masalah yang diadukan tahun 2013, yaitu:

1. Pengaduan dari masyarakat Gp. Panteriek tentang pencemaran air di sungai mati oleh salah satu perusahaan angkutan bahan bakar minyak (statusnya telah diselesaikan).
2. Pengaduan dari masyarakat Gp. Mibo tentang pencemaran udara oleh incenerator RSU Meuraxa Kota Banda Aceh (statusnya telah diselesaikan).

Masalah yang diadukan tahun 2014, yaitu:

1. Pengaduan dari masyarakat karena banyak ikan mati secara riba-tiba di Krueng Doy Lampaseh. (statusnya telah diselesaikan).
2. Suara mesin penggiling bakso dan asap yang dikeluarkan dari mesin di tempat penggilingan bakso Peunayong yang mengganggu masyarakat sekitar kawasan tersebut. (statusnya telah diselesaikan).

Kasus-kasus Pencemaran dan perusakan lingkungan seringkali tidak dapat tertangani langsung dikarenakan Kantor LingkunganHidup Kota tidak memiliki personil/tenaga laboran dan laboratorium yang dapat

mengumbil sampel dan menguji langsung hasil sampling tersebut. Selama ini Kantor Lingkungan Hidup selalu melakukan kerjasama dengan pihak laboratorium lain untuk pengujian dan analisa data.

Dalam kasus darurat seperti ini seringkali Kantor LH terbentur dengan administrasi yang harus disiapkan dan untuk laboratorium yang dihubungi personilnya belum tentu dapat bergerak segera untuk melakukan sampling di lapangan. Kondisi ini kerap membuat kesulitan bagi Kantor LH untuk dapat memberikan informasi secara cepat dan akurat berdasarkan hasil analisa yang dilakukan.

2.3.1.8.4 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk

Sejak Januari 2009, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gp. Jawa yang merupakan satu-satunya TPA di Kota Banda Aceh yang dibangun dengan standard Sanitary Landfill sudah mulai beroperasi yang berarti sejak saat itu praktek oper. dumping sudah dihentikan, hal ini mengacu dengan Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Untuk melakukan operasional TPA dengan sistem sanitary landfill, TPA Gp. Jawa dilengkapi dengan 3 unit bulldozer (2 aktif, 1 standby), 2 unit excavator. Untuk penutupan harian (daily cover), setiap tahunnya disediakan 5.000 m3 tanah timbun yang didatangkan dari luar Kota Banda Aceh. Di samping itu TPA Gp. Jawa merupakan TPA terpadu di mana kegiatan pengomposan dan pemilahan barang-barang yang bisa di-daur ulang (recyclable material) dilakukan di TPA. Bahkan sejak 1 Pebruari 2012 jembatan timbang di TPA Gp. Jawa sudah mulai dioperasikan, di mana sebelumnya volume sampah yang masuk TPA hanya diestimasi dengan tingkat akurasi yang rendah, tetapi dengan adanya jembatan timbang, berat volume sampah yang masuk TPA sudah dapat dihitung dengan akurat.

Saat ini setiap kendaraan pengangkut sampah yang masuk dan keluar TPA, harus masuk ke jembatan timbang untuk dihitung berat sampah yang diangkut. Sampah sampah organik yang berupa daun, ranting pohon, pohon diturunkan di unit pengomposan di mana sampah-

sampah organik tersebut akan diangkut dengan loader dan dimuat ke mesin pencacah (Mobile Waste Shredding Machine) dengan kapisitas 16 ton/jam. Sedangkan sampah non organik yang memiliki nilai ekonomis diturunkan di unit daur ulang (recycling). Recyclable material seperti plastic gelas/botol dijual kepada pengumpul di TPA untuk diolah lebih lanjut di Pabrik Plastik Mini Panteriek yang dikelola oleh DK3. Sedangkan bahan-bahan daur ulang jenis lainnya seperti kertas, kardus, kaleng, dan berbagai jenis logam lainnya dikumpulkan dan dijual ke pedangan pengumpul yang ada di sepanjang jalan akses menuju TPA Gp. Jawa.

Setelah semua recyclable material, baik organik maupun non organik dipisahkan, baru sampah sisanya dibuang ke sel sampah. Dengan demikian sebagian sampah sudah masuk ke landfill sudah dapat dikurangi, sehingga akan sangat membantu dalam memperpanjang umur TPA.

TPA Gampong Jawa memiliki Transfer Station yang merupakan bagian dari Pembangunan TPA Regional Blang Bintang, sebagai tempat pemilahan sampah sebelum dibawa ke Blang Bintang. Penggunaan Transfer Station saat ini belum optimal dikarenakan operasional TPA Blang Bintang yang masih belum berjalan dengan baik. Selain itu, TPA Gp. Jawa memiliki fasilitas pengolahan sampah organik menjadi gas methan, yang disebut ITF (Intermediate Treatment Facility). Namun karena ini merupakan teknologi yang baru dikenalkan, masih ada sedikit kendala operasional yang secara perlahan akan diatasi. Bila berfungi dengan baik, diperkirakan akan menghasilkan energi listrik sebesar 45 Kwatt.

Kawasan TPA Gampong Jawa juga dilengkapi dengan fasilitas Intalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dibangun oleh Unicef dan JICA. Dengan adanya fasilitas ini, limbah tinja yang dihasilkan di Kota Banda Aceh dan sebagian Kabupaten Aceh Besar sudah terkelola dengan baik. Fasilitas ini merupakan salah satu tempat pengolahan limbah tinja yang ada di Provinsi Aceh.

Tujuan pengolahan limba tinja sendiri adalah untuk mengurangi tingkat pencemaran yang disebabkan oleh limbah tinja, mengingat limbah tinja sangat berbahaya bagi lingkungan khususnya kualitas air.

Manfaat dari pengolahan limbah tinja ini dapat diperoleh dari hasil olahan yang dihasilkan. Lumpur hasil pengolahan, dapat digunakan untuk pembuatan kompos (budidaya pertanian). Selain itu, dapat digunakan untuk meningkatkakan kualitas lingkungan, khususnya kualitas air (perairan).

Khusus untuk IPLT sistem tertutup, proses pengolahan lumpur tinja sudah dapat menghasilkan gas methan yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan bakar gas dan pembangkit listrik (penggerak genset).

Selain itu, dalam kawasan TPA Gampong Jawa memiliki Workshop Perbengkelan berstandar internasional. Workshop ini dibangun oleh UNDP melalui program TRWMP. Workshop DK3 melakukan kegiatan pemeliharaan semua kenderaan operasional baik perbaikan ringan sampai berat. Tenaga mekanik yang dimiliki oleh Workshop DK3 sudah diberikan training tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berstandar international. Bengkel ini sendiri direncanakan akan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga dapat memberikan kontribusi dari segi pendapatan asli daerah.

Tabel 2.72
Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk
Kota Banda AcehTahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	TPS		
			Jumlah Kontainer	Jumlah Daya Tampung (m3)	Rasio
1	Banda Raya	22.941	6	24	1:956
2	Jaya Baru	24.460	8	32	1:764
3	Meuraxa	18.962	3	12	1.580
4	Kuta Alam	49.503	7	28	1:1.768
5	Syiah Kuala	35.671	10	40	1:891
6	Ulee Kareng	25.148	3	12	1:2.095
7	Lueng Bata	24.560	5	20	1:1.228

8	Baiturrahman	35.218	10	40	1:880
9	Kuta Raja	12.819	2	8	1:1.602
Jumlah		**249.282**	**54**	**216**	**1:1.154**

Sumber : Dinas Kebersihan dan Kelndahan Kota Kota Banda Aceh

2.3.1.8.5 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau *(Green Openspaces)* adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, Ruang Terbuka Hijau *(Green Openspaces)* di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota.

Target capaian Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 30 persen dari luas wilayah, yaitu 10 persen RTH *private* dan 20 persen RTH Publik. Adapun luas RTH publik yang ada di Kota Banda Aceh saat ini baru mencapai 14 persen dari luas kota. Pemko Banda Aceh melalui DK3 Banda Aceh terus memanfaatkan ruang-ruang kosong untuk dimanfaatkan untuk penghijauan terutama daerah-daerah perkotaan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, DK3 berkerjasama dengan pihak desa untuk mendata semua lahan pemakaman umum untuk dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang akan ditanami dengan pohon penghijauan.

Grafik 2.19
Persentase Pemanfaatan RTH terhadap lahan yang tersedia

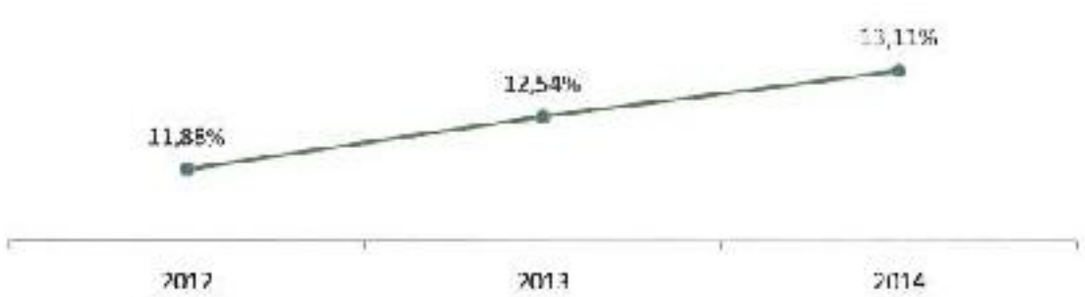

Sumber : Dinas Kebersihan dan Kelndahan Kota Banda Aceh

Untuk mencapai target 20% (atau kurang +7,0% lagi), Pemerintah Kota berupaya keras memprioritaskan dana pembebasan lahan setiap tahunnya agar mencapai target hingga tahun 2029. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain penyusunan rencana-rencana penataan Taman-taman Kota, Hutan Kota, Jalur Hijau Jalan, Penataan Jalur Hijau Sungai yang dikolaborasi dengan konsep Water Frint City, menata jalur sepeda dan pendestrian Kota.

2.3.1.8.6 Pencemaran Tingkat Kebisingan

Berikut disajikan data tentang tingkat kebisingan dari hasil pemantauan dan analisa yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh.

Tabel 2.73
Tingkat Kebisingan

No.	Lokasi	Baku Mutu	Hasil Uji
1.	Pembangunan Pasar Aceh (Jl. Diponegoro)	60 dBA	65,9 dBA
2.	RS Meutia(Jl. Cut Meutia)	60 dBA	61,8 dBA
3	RS Ibu dan Anak(Jl. Prof. A. Madjid Ibrahim)	60 dBA	62,4 dBA
4.	RS Q-Medical Center(Jl. Tgk. Daud Beureuh)	60 dBA	59,3 dBA

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh

2.3.1.8.7 Meraih Adipura

Adipura adalah adalah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Sejak Tahun 2007, Pemerintah Kota Banda Aceh telah berhasil meraih Adipura selama delapan tahun berturut-turut hingga tahun 2014.

2.3.1.8.6 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tabel 2.74
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per-Satuan Penduduk
Kota Banda Aceh Tahun 2012

No	Uraian	Jumlah
1.	Tempat pemakaman umum (TPU)	152
2.	Jumlah penduduk (jiwa)	238.784
3.	Rasio TPU persatuan penduduk (1/6)	1.571

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Tabel 2.75
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per-Satuan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2012

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	
			Jmlh	Keterangan
1.	Kuta Alam	45.115	25	Termasuk kuburan umum dan keluarga
2.	Baiturrahman	32.463	16	
3.	Syiah Kuala	37.243	23	
4.	Ulee Kareng	24.121	13	
5.	Lueng Bata	25.211	9	
6.	Banda Raya	22.325	13	
7.	Jaya Baru	23.543	14	
8.	Kuta Raja	11.149	11	
9.	Meuraxa	17.614	28	
	Jumlah	**238.784**	**152**	

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Tabel 2.76
Tempat Pemakaman Umum Kota Banda Aceh

No	Uraian	Ukuran	Luas	Status Tanah	Ket.
1	Kuburan Kota Baro	95 x 70	6.650 M²	Wakaf	
2	Kuburan Keudah	103 x 97	9.991 M²	Wakaf	
3	Kuburan Beurawe	124 x 20	2.480 M²		
4	Kuburan Peulanggahan	41 x 32	1.312 M²	Wakaf	
5	Kuburan Mulia	115 x 93	10.995 M²	Wakaf	
6	Kuburan Setuy	138 x 41	5.658 M²	Wakaf	
7	Kuburan Massal Kampung Pande	57 x 35	1.995 M²		Tsunami
8	Kuburan Massal Ulhee Lheu	60 x 26	1.560 M²		Tsunami

9	Kuburan Tanah Bahagia	-	3.200 M²		
10	Kuburan Kherkoft	-	7.450 M²		Tentara Belanda

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

2.3.1.8.9 Persentase Penerangan Jalan Umum

Selain penataan taman dan ruang terbuka hijau, DK3 juga melakukan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) terutama untuk jalan-jalan umum baik di gampong maupun di perkotaan.

Sampai saat ini jumlah lampu yang telah terpasang di Kota Banda Aceh sudah mencapai 8.000 unit yang tersebar diseluruh Banda Aceh. Perencanan ke depan dilakukan program meterisasi yaitu pemasangan meteran pada semua lampu jalan terutama yang ada di jalan protokol guna mencegah pemborosan pembayaran listrik.

Grafik 2.20
Persentase Penerangan Jalan Umum Kota Banda Aceh

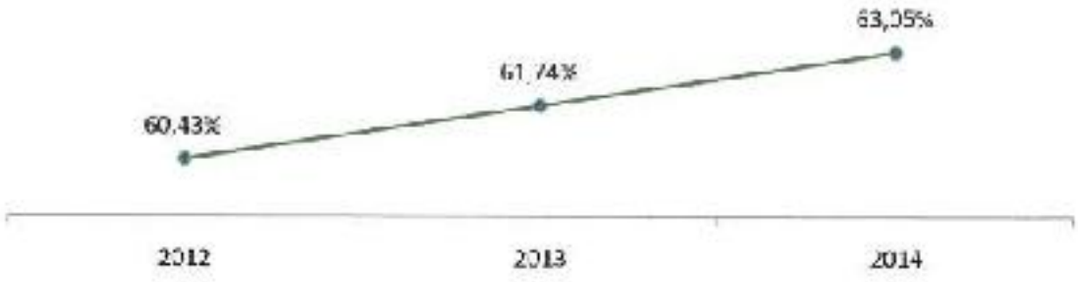

Sumber : Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

2.3.1.9 Pertanahan

2.3.1.9.1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Tabel 2.77
Luas Lahan Bersertifikat di Kota Banda Aceh
Tahun 2009-2014

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Luas wilayah daratan						
2	Luas tanah bersertifikat HGB (m2)	19.849.031	19.933.611	20.175.757	20.184.413	20.198.185	20.212.957
3	Luas tanah bersertifikat HGU (m2)	2.562	2.562	2.562	2.562	2.562	2.562
4	Luas tanah bersertifikat HM (m2)	23.824.124	26.025.483	27.948.076	28.427.809	29.938.306	29.461.028
5	Luas tanah bersertifikat HP (m2)	6.005.563	6.175.072	5.246.286	6.349.791	6.949.108	6.979.004
6	Luas tanah bersertifikat HPL (m2)		3.933	3.933	3.933	3.933	3.933

Sumber: Badan Pertanahan Nasional

2.3.1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil

2.3.1.10.1 Rasio Cakupan Kepemilikan KTP (%)

Tabel 2.78
Jumlah Cakupan Kepemilikan KTP Di Wilayah Kota Banda Aceh Menurut Kecamatan
Tahun 2009- 2013

Kecamatan	Cakupan Kepemilikan KTP														
	Tahun 2009			Tahun 2010			Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013		
	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Penerbitan KTP	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Penerbitan KTP	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Penerbitan KTP	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Penerbitan KTP	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Penerbitan KTP
Baiturrahman	35.153	24.781	24.578	30.377	23.418	23.226	31.079	23.985	23.772	36.857	26.036	25.823	37.046	26.024	25.811
Kuta Alam	42.664	34.133	33.872	42.217	33.586	33.329	43.184	34.836	34.565	50.411	36.784	36.504	52.075	37.547	37.268
Meuraxa	12.189	10.098	10.017	15.484	10.591	10.506	16.861	12.085	11.988	19.595	12.984	12.880	19.949	12.973	12.869
Syiah Kuala	32.564	23.813	23.625	34.850	24.012	23.822	35.648	25.678	25.475	36.216	26.778	26.566	37.322	27.082	27.462
Ulee Kareng	21.437	14.586	14.474	23.592	15.309	15.191	24.132	16.939	16.825	25.553	17.962	17.824	25.834	18.157	18.017
Kuta Raja	7.850	7.606	7.549	10.433	7.558	7.501	10.673	7.859	7.800	12.383	8.511	8.546	13.487	9.213	9.144
Banda Raya	20.332	14.296	14.177	20.891	14.399	14.279	21.369	15.031	15.301	23.630	16.102	15.958	24.129	16.388	16.252
Jaya Baru	20.127	15.528	15.407	22.021	15.273	15.154	22.535	16.973	16.841	26.177	17.962	17.822	25.730	17.512	17.375
Ulee Kareng	19.865	14.877	14.755	23.571	15.426	15.300	23.088	16.661	16.521	25.335	17.435	17.293	26.452	18.314	18.164
Jumlah	**212.241**	**159.720**	**158.454**	**223.446**	**159.372**	**158.109**	**228.562**	**172.707**	**171.338**	**266.147**	**180.254**	**178.825**	**262.224**	**183.810**	**182.353**
Rasio Penerbitan KTP	99,21 %			99,21 %			99,21 %			99,21%			99,21%		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh

Dalam rangka menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat, Pemerintah Kota Banda Aceh telah membangun satu unit pelayanan publik terpadu pada KPPTSP yang bertempat di Gedung Balai Kota. Selain untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat, juga masyarakat diberikan kenyamanan dan keamanan di dalam mendapatkan dan menunggu pelayanan yang diberikan.

Dalam gedung pelayanan publik tersebut selain pelayanan perizinan dan non perizinan, juga diberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat. Pelayanan dalam bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 16 jenis pelayanan yang antara lain adalah pelayanan kartu keluarga (KK), Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pelayanan Akta Kelahiran. Dalam Tabel 2.103 disajikan data penduduk berdasarkan kepemilikan KTP, KK dan Akta Kelahiran pada tahun 2013.

Tabel 2.79
Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh
Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Nikah
Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan						
		KTP		KK		AktaKelahiran		AktaNikah
		Sdh	Blm	Sdh	Blm	Sdh	blm	
1	Baiturrahman	25.811	11.235	10.605	-	17.023	20.181	3.826
2	KutaAlam	37.528	14.817	15.199		23.395	29.398	4.374
3	Meuraxa	12.869	7.080	6.276	-	10.614	10.954	2.234
4	Syiah Kuala	27.462	10.059	11.066	-	18.202	20.846	3.485
5	Ulee ng Bata	18.017	7.817	7.185	-	13.785	13.259	2.776
6	Kuta Raja	9.144	4.343	4.367	-	6.354	7.521	1.218
7	Banda Raya	16.252	7.877	6.553		12.497	11.696	3.006
8	Jaya Baru	17.375	8.355	7.156	-	12.636	13.952	2.697
9	UleeKareng	18.164	8.288	7.237	-	13.759	12.905	3.318
	Jumlah	**182.353**	**79.871**	**75.644**	**-**	**168.265**	**140.712**	**26.934**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Dari Tabel 2.103 dapat dilihat beberapa poin penting, yaitu kepemilikan KTP bagi penduduk yang wajib KTP sudah sangat baik, dimana dari jumlah wajib KTP sebesar 183.810 jiwa, hanya 79.871jiwa yang belum memiliki atau mengurus KTP. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) juga sudah sangat baik, Hal ini menunjukan adanya kesadaran penduduk akan pentingnya KK dan mau mengurus KK nasional sebagai pengganti dari KK merah yang keluaran lama.

Pada bidang pencatatan sipil, penduduk yang sudah mengurus akta kelahiran sebesar 168.265 jiwa dan yang belum mengurus akta kelahiran diperkirakan berjumlah 140.712 jiwa. Besarnya jumlah penduduk yang belum meiliki akta kelahiran disebabkan adanya sebagian besar penduduk yang sudah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Instansi pelaksana di tempat kelahirannya dan ada pula penduduk yang sudah memiliki akta kelahiran namun belum tercatat pada Sistem Informatika Administrasi Kependukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.

2.3.1.10.2 Rasio Cakupan Kepemelikan Akta Kelahiran (%)

Untukmencekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat PartisipasiPasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (Akseptor KB) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Tabel 2.104 dan tabel 2.105 menunjukkan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan penduduk peserta KB di Kota Banda Aceh.

Tabel 2.80
Jumlah Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2013

Jenis-jenis Akta	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Penduduk	219.659	202.774	220.073	223.514	244.724	256.147	262.324
Akta Kelahiran	13.049	25.164	33.578	41.663	62.168	114.514	168.265
Rasio	**5,94**	**12,41**	**15,26**	**18,64**	**25,40**	**44,71**	**64,17**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan dan pengurangan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Laju pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk beberapa tahun ke depan.

Pertumbuhan penduduk selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik migrasi dari luar maupun ke luar Kota Banda Aceh. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan dan penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam ke luar.

Beberapa komponen yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah :

a. Faktor Penambah
   1) Kelahiran (fertilitas);
   2) Migrasi Masuk (migrasi)
b. Faktor Pengurang
   1) Kematian (Mortalitas)
   2) Migrasi keluar (emigrasi)

Dari jumlah penduduk Kota Banda Aceh sebanyak 219.659 jiwa pada tahun 2007 dan 249.282 jiwa pada tahun 2013 maka dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh adalah sebesar 5,17 persen rata rata per tahun. Laju pertumbuhan penduduk tersebut masih tergolong normal selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun. Namun laju pertumbuhan penduduk tersebut harus dapat dikendalikan oleh Pemerintrah Kota Banda Aceh pada masa yang akan datang guna menghindari dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari padatnya penduduk kota, yaitu munculnya berbagai masalah sosial ekonomi

seperti kemiskinan, kriminalitas, permukiman kumuh dan lain-lain sebagainya.

Pada tahun 2013, jumlah penduduk yang masuk ke Kota Banda Aceh sebesar 6.260 jiwa dengan rasio 2,51 persen, sedangkan penduduk yang keluar Kota Banda Aceh sebanyak 5.321 jiwa dengan rasio sebesar 2,13 persen. Hal ini berarti penduduk yang masuk ke Kota Banda Aceh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang keluar Kota Banda Aceh.

Tabel 2.81
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2013

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk							Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007-2013
1	Baiturrahman	40.989	36.124	35.153	30.377	31.073	32.463	35.218	1.27
2	Kuta Alam	43.746	43.792	42.664	42.217	43.184	45.115	49.503	5.38
3	Jaya Baru	15.317	20.658	20.127	22.031	22.535	23.543	24.460	10.86
4	UleeKareng	27.935	20.409	19.865	22.571	23.088	24.121	25.148	2.49
5	Lueng Bata	23.083	22.025	21.437	23.592	24.132	25.211	24.560	3.76
6	Kuta Raja	4.639	8.076	7.890	10.433	10.672	11.149	12.819	25.67
7	Banda Raya	29.363	20.907	20.352	20.891	21.369	22.325	22.911	0.24
8	Meuraxa	3.719	12.494	12.159	15.484	16.861	17.614	18.962	49.06
9	Syiah Kuala	30.867	33.433	32.564	34.850	35.648	37.243	35.671	5.31
	JUMLAH	**219.659**	**217.918**	**212.241**	**223.446**	**228.562**	**238.784**	**249.282**	**5.17**

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2008 - 2014

Dapat dilihat pada Tabel 2.94bahwa laju pertumbuhan penduduk yang paling besar adalah di Kecamatan Meuraxa sebesar 49,06persen dari jumlah penduduk tahun 2007 sebesar 3.719 jiwa berkembang menjadi 18.962 jiwa pada tahun 2013. Hal ini kemungkinan terjadi karena kecamatan tersebut merupakan salah satu kecamatan yang terdekat dengan pusat kota dan merupakan salah satu kawan wisata yang paling ramai dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun domestik, di kawasan tersebut terdapat 3 (tiga) objek wisata terbesar yaitu Wisata Tsunami yaitu Kuburan Massal, Mesjid Baiturrahim dan Wisata Laut Pantai Ulee Lheue yang mempunyai pemandangan yang sangat bagus di kala pagi dan sore hari.

Sementara itu laju pertumbuhan penduduk yang mengecil terdapat di Kecamatan Baiturrahman sebesar 1,27persen, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2007 sebasar 40.989 jiwa, dan pada tahun 2013 terjadi penurunan pertumbuhan penduduk menjadi 35.218 jiwa. Hal ini terjadi karena adanya mobilitas penduduk yang tersebar ke beberapa kecamatan yang berada di dekat pusat kota dan menjadi sentral bisnis baru seperti Kecamatan Meuraxa, Kuta Alam, Ulee Kareng dan Lueng Bata, sehingga terjadi penurunan penduduk yang signifikan.

Laju pertumbuhan penduduk juga dipengaruhi dengan angka kelahiran (fertilitas) dan angka kematian (mortalitas). Berikut ini hasil perhitungan laju pertumbuhan penduduk yang dituangkan dalam angka kelahiran kasar (CBR), angka kematian kasar (CDR) dan angka kematian bayi (IMR).

Tabel 2.82
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Angka Kelahiran Kasar (CBR), dan Angka Kematian Bayi (IMR) di Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

No	Fertilitas/ Mortalitas	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Angka Kelahiran Hidup	3.508	4.048	4.163	4.412	4.828	4.849	5.060
2	Angka Kematian Bayi(IMR)	20	33	16	15	20	14	30
3	Rasio Angka Kematian Bayi (IMR)	5	8	5	5	2	2	6

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Jumlah penduduk dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis data yang diperlukan untuk kebutuhan perencanaan pembangunan, antara lain pengelompokan data penduduk berdasarkan sex rasio (data terpilah) yang sangat bermanfaat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis gender, pengelompokkan data penduduk berdasarkan umur yang dapat bermanfaat dalam perencanaan kebutuhan pangan, sandang dan papan, pendidikan, kesehatan, serta lapangan pekerjaan.

Kota Banda Aceh yang memiliki 9 kecamatan dan 90 Gampong, pada tahun 2013 memiliki jumlah penduduk laki-laki sebesar 128.333 jiwa dan perempuan sebesar 120.949 jiwa, yang dapat dirinci berdasarkan kecamatan sesuai Tabel 2.96.

Tabel 2.83
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan
Dalam Kota Banda Aceh Tahun 2013

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
Baiturrahman	18.003	17.215	35.218	104,58
Kuta Alam	25.756	23.747	49.503	108,46
Meuraxa	10.044	8.918	18.962	112,63
Syiah Kuala	18.201	17.470	35.671	104,18
Lueng Bata	12.582	11.978	24.560	105,04
Kuta Raja	6.862	5.957	12.819	115,19
Banda Raya	11.490	11.451	22.941	100,34
Jaya Baru	12.618	11.842	24.460	106,55
Ulee Kareng	12.777	12.371	25.147	103,28
Jumlah Total	**128.333**	**120.949**	**249.282**	**106,11**

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2014

Tabel 2.96 menggambarkan bahwa penduduk Kota Banda Aceh bila dilihat secara sex ratio lebih banyak penduduk laki-lakinya bila dibandingkan dengan penduduk perempuan yaitu 128.333 penduduk laki-laki dan 120.949 penduduk perempuan pada tahun 2013 dengan rasio 106,11 yang artinya bahwa pada setiap seratus jumlah penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki.

Berikut ini disajikan data penduduk laki-laki tahun 2009 - 2013 berdasarkan pengelompokkan umur.

Tabel 2.84
Jumlah Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur
Di Kota Banda Aceh Tahun 2009-2013

Kelompok Umur	2009	2010	2011	2012	2013
0-4	9.111	11.842	12.113	12.642	13.089
5 9	10.491	8.365	8.557	8.931	9.193
10-14	13.296	7.990	8.173	8.530	8.775
15 19	16.403	11.271	11.529	12.031	12.418
20-24	17.747	18.535	18.959	19.787	20.516
25 29	7.966	14.097	14.420	15.048	15.569
30-34	7.226	10.421	10.659	11.127	11.599

Kelompok Umur	2009	2010	2011	2012	2013
35-39	6.754	8.531	8.727	9.107	9.513
40-44	5.610	6.777	6.932	7.234	7.706
45-49	5.711	5.696	5.827	6.082	6.501
50-54	5.150	4.379	4.479	4.675	5.033
55-59	3.085	2.986	3.054	3.186	3.468
60-64	2.536	1.794	1.835	1.917	2.134
65-69	2.816	1.177	1.204	1.257	1.417
70-74	2.771	676	692	722	749
75+	1.526	560	572	598	623
Jumlah	**112.199**	**115.097**	**117.732**	**122.874**	**128.333**

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka

Penduduk laki-laki di Kota Banda Aceh yang terbesar jumlahnya berada pada umur 15 s/d 29 tahun yaitu kelompok umur 15-19 tahun pada tahun 2009 berjumlah 16.403 jiwa, tahun 2010 sebanyak 11.271 jiwa, tahun 2011 sebesar 11.529 jiwa, tahun 2012 sebesar 12.031 jiwa, dan tahun 2013 sebesar 12.418 jiwa; kelompok umur 25-29 tahun pada tahun 2009 sebesar 7.966 jiwa, tahun 2010 sebesar 14.097 jiwa, tahun 2011 sebesar 14.420 jiwa, tahun 2012 sebesar 15.048 jiwa, dan tahun 2013 sebesar 15.569 jiwa; kelompok umur 20–24 tahun pada tahun 2009 berjumlah 11.747 jiwa, tahun 2010 sebesar 18.535 jiwa, tahun 2011 sebesar 18.959 jiwa, tahun 2012 sebesar 19.787 jiwa, dan tahun 2013 sebesar 20.516 jiwa.

Sedangkan jumlah penduduk laki-laki terkecil berada pada kelompok umur 70–74 tahun dan kelompok umur 75 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Banda Aceh rata-rata usia harapan hidupnya adalah berkisar pada umur 50 tahun ke bawah.

Tabel 2.85
Proyeksi Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur di Kota Banda Aceh dari Tahun 2014–2018

Kelompok Umur	2014	2015	2016	2017	2018
0-4	13.377	13.671	13.972	14.279	14.594
5-9	9.395	9.602	9.813	10.029	10.250
10-14	8.968	9.165	9.367	9.573	9.784
15-19	12.691	12.970	13.256	13.547	13.845
20-25	20.967	21.429	21.900	22.382	22.874
25-29	15.912	16.262	16.619	16.985	17.359
30-34	11.854	12.115	12.381	12.654	12.932
35-39	9.722	9.936	10.155	10.378	10.606
40-44	7.876	8.049	8.226	8.407	8.592

Kelompok Umur	2014	2015	2016	2017	2018
45 49	6.644	6.790	6.940	7.092	7.248
50 54	5.144	5.257	5.373	5.491	5.612
55-59	3.644	3.622	3.702	3.783	3.867
60-64	2.181	2.229	2.278	2.328	2.379
65-69	1.479	1.511	1.545	1.579	1.613
70 74	765	782	800	817	835
75+	637	651	665	680	695
Jumlah	**131.156**	**134.042**	**136.991**	**140.004**	**143.085**

Tabel 2.98 menunjukkan proyeksi jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2014 sebesar 131.156 jiwa atau naik sebesar 2.823 jiwa dari tahun 2013. Pada tahun 2018, proyeksi jumlah penduduk laki-laki terbanyak terdapat pada umur 20-24 tahun sebesar 22.874 jiwa, sedangkan jumlah terkecil sebesar 1.530 jiwa dimana komposisi penduduk umur 75 tahun ke atas yaitu berjumlah 695 jiwa.

Tabel 2.86
Jumlah Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur
Kota Banda Aceh Tahun 2009-2013

Kelompok Umur	2009	2010	2011	2012	2013
0-4	7.393	11.440	11.702	12.236	12.686
5-9	10.974	8.100	8.285	8.661	8.957
10-14	10.274	7.477	7.648	7.999	8.272
15-19	11.255	11.787	12.057	12.609	13.108
20-24	9.044	18.690	19.118	19.995	20.788
25 29	7.313	12.392	12.675	13.258	13.782
30-34	7.783	8.720	8.920	9.329	9.835
35-39	6.733	7.526	7.698	8.050	8.491
40-44	5.992	6.352	6.498	6.797	7.191
45-49	6.273	5.076	5.192	5.431	5.716
50-54	3.972	3.497	3.577	3.743	3.951
55-59	2.511	2.567	2.626	2.748	2.939
60 64	3.632	1.814	1.856	1.939	2.010
65-69	3.041	1.172	1.199	1.252	1.293
70-74	2.111	806	824	862	894
75+	1.541	933	955	998	1.042
Jumlah	**100.042**	**108.349**	**110.830**	**116.910**	**120.949**

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka

Penduduk perempuan di Kota Banda Aceh yang terbesar jumlahnya berada pada umur 15 s/d 29 tahun yaitu kelompok umur 15–19 tahun pada tahun 2009 berjumlah 11.255 jiwa, tahun 2010 sebesar 11.787 jiwa, tahun 2011 sebesar 12.057 jiwa, tahun 2012 sebesar 12.609 jiwa, dan tahun 2013 sebesar 13.108 jiwa; kelompok umur 20–

24 tahun pada tahun 2009 berjumlah 9.044 jiwa, tahun 2010 sebesar 1.869 jiwa, tahun 2011 sebesar 19.118 jiwa, tahun 2012 sebesar 19.995 jiwa, dan tahun 2013 sebesar 20.788 jiwa; kelompok umur 25–29 tahun pada tahun 2009 sebesar 7.313 jiwa, tahun 2010 sebesar 12.302, tahun 2011 sebesar 12.675 jiwa, tahun 2012 sebesar 13.258 jiwa, dan tahun 2013 sebesar 13.782 jiwa; Sedangkan jumlah penduduk perempuan terkecil berada pada kelompok umur 70–74 tahun dan kelompok umur 75 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Banda Aceh rata-rata usia harapan hidupnya adalah berkisar pada umur 50 tahun ke bawah.

Tabel 2.87
Proyeksi Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur
di Kota Banda Aceh Tahun 2014-2018

Kelompok Umur	2014	2015	2016	2017	2018
0-4	12.965	13.250	13.542	13.840	14.144
5-9	9.154	9.356	9.561	9.772	9.987
10-14	8.454	8.640	8.830	9.024	9.223
15-19	13.396	13.691	13.992	14.300	14.615
20-24	21.245	21.713	22.190	22.679	23.178
25-29	14.085	14.395	14.712	15.035	15.366
30-34	10.051	10.273	10.498	10.729	10.966
35-39	8.678	8.869	9.064	9.263	9.467
40-44	7.349	7.511	7.676	7.845	8.018
45-49	5.842	5.970	6.102	6.236	6.373
50-54	4.041	4.130	4.221	4.314	4.409
55-59	2.994	3.060	3.128	3.196	3.267
60-64	2.054	2.099	2.146	2.193	2.241
65-69	1.321	1.351	1.380	1.411	1.442
70-74	914	934	954	975	997
75+	1.065	1.088	1.112	1.137	1.162
Jumlah	**123.610**	**126.329**	**129.109**	**131.949**	**134.852**

Pertumbuhan penduduk perempuan, di sisi lain, tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan penduduk laki-laki. Proyeksi jumlah penduduk perempuan pada tahun 2014 sebesar 123.610 jiwa atau naik sebesar 2.661 jiwa dari tahun 2013. Pada tahun 2018, proyeksi jumlah penduduk perempuan sebesar 134.852 jiwa. Dengan komposisi penduduk perempuan terbanyak terdapat pada umur 20-24 tahun yaitu sebesar 23.178 jiwa. Sedangkan proyeksi jumlah penduduk perempuan terkecil adalah pada umur 70-75 tahun keatas yang berjumlah 2.159 jiwa pada tahun 2018.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk tahun 2013 sebesar 249.282 jiwa yang tersebar dalam 9 kecamatan. Kecamatan Kuta Alam dengan luas wilayah 10,05 km2 adalah merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 49.503 jiwa. Kemudian diikuti dengan Kecamatan Syiah Kuala sebesar 35.671 jiwa dan Kecamatan Baiturrahman sebesar 35.218 jiwa. Jumlah penduduk terkecil berada pada Kecamatan Kuta Raja sebesar 12.819 jiwa. Lihat Tabel 2.101.

Tabel 2.88
Sebaran Penduduk Kota Banda Aceh Menurut Luas Wilayah dan KepadatanTahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km2)	Kepadatan (%)
1	Baiturrahman	35.218	4,54	3,11
2	Kuta Alam	49.503	10,05	1,98
3	Meuraxa	18.962	7,26	1,05
4	Syiah Kuala	35.671	14,24	1,00
5	Lueng Bata	24.560	5,34	1,84
6	Kuta Raja	12.819	5,21	0,99
7	Banda Raya	22.941	4,79	1,92
8	Jaya Baru	24.460	3,78	2,60
9	UleeKareng	25.148	6,15	1,64
Jumlah se-Kota Banda Aceh		**249.282**	**61,36**	**1,63**

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka

Jumlah penduduk terpadat berada di Kecamatan Baiturrahman dengan tingkat kepadatan sebesar 3,11 persen kemudian diikuti dengan Kecamatan Jaya Baru 2,60 persen dan Kecamatan Kuta Alam 1,98 persen. Sedangkan penduduk terjarang berada di Kecamatan Kuta Raja yaitu sebesar 0,99 persen.

2.3.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.1.11.1 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)

Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah acalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Jumlah perempuan yang menduduki jabatan eselon II pada tahun 2011 sebanyak 2 orang, eselon III 29 orang, dan eselon IV 158 orang, jumlah pekerja perempuan di pemerintah sebanyak 4079 orang sedangkan total pekerja perempuan 16.638 orang jika kita lihat secara persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebanyak 24,52 persen, hal ini dapat diambil kesimpulan jumlah pekerja perempuan di pemerintah masih memiliki persentase yang kecil, hal ini karena minat perempuan dan peluang perempuan masih di sektor non pemerintah. Jika dibandingka dengan total pekerja di pemerintah baik laki-laki dan perempuan, perempuan memiliki persentase sebesar 65,39 persen.

Tabel 2.110 menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menduduki jabatan eselon II sangat kecil perbandingan nya dengan jumlah laki-laki. Keadaan tersebut berlangsung dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, walaupun pada tahun 2011 sudah terdapat perempuan yang menduduki eselon II namun persentasenya sangat kecil. Hal ini tentu menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Banda Aceh yang sudah memprakarsai peningkatan pemberdayaan perempuan di Kota Banda Aceh.

Tabel 2.89
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	0	3	2	2	2	1	1
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III & IV	0	180	180	185	187	209	205
3	Jumlah Pegawai di Pemko Banda Aceh	7.483	6.580	6.691	6.511	6.366	6.111	6.077
	Jumlah Pegawai Perempuan di Pemko Banda Aceh	**2.456**	**3.738**	4.413	**4.215**	4.268	**4.064**	**4.029**
	Persentase Pegawai	**32,82**	**56,81**	65,95	**64,74**	65,03	**66,50**	**66,30**

	perempuan Pemko							
4	Jumlah pekerja perempuan	18.598	17.894	14.533	16.339	16.038	11.088	8.937
5	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	13,21	20,89	30,36	25,80	25,65	35,56	45,08

Sumber: BKPP & Kantor PP & KB Kota Banda Aceh

Tabel 2.90
Jumlah Pekerja Perempuan di lembaga
Keschatan dan Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

No	Uraian	Tahun						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Dokter	23	22	21	21	21	21	21
2	Drg	5	5	4	4	4	6	6
3	S1 Keperawatan	5	5	5	5	5	7	7
4	Akper	26	26	25	25	25	23	23
5	Akbid	45	45	45	43	43	67	66
6	Bidan	60	60	59	57	57	39	39
7	SPK	25	25	25	25	25	34	34
8	SKM	43	42	43	43	43	22	27
9	GIZI	0	0	0	5	0	20	20
10	Apoteker	0	0	0	0	0	1	1
11	Aktar	4	4	4	4	4	6	6
12	SMF	16	16	16	16	16	14	14
13	AAK	3	3	3	3	3	3	3
14	SMAK	14	14	14	14	14	14	14
15	AKG	10	13	13	13	13	13	13
16	AKZI	10	10	10	10	10	10	12
17	APIKES	2	2	2	2	2	2	2
18	AKL	9	9	9	9	9	10	10
19	ATEM	0	0	0	0	0	0	0
20	SPPH	6	6	6	6	6	2	2
21	SPMG	11	11	11	11	11	17	17
22	SPAG	2	2	2	2	2	1	1
23	Perkarya Kes	3	3	3	3	3	0	0
24	KPAA	0	0	0	0	0	2	2
25	S2	13	13	13	13	13	55	55
26	S1	7	7	7	7	7	1832	1831
27	D3	3	3	3	3	3	360	358
28	SMA	7	7	7	7	6	347	345
29	SMP	2	2	2	2	2	1	1
30	SD	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Banda Aceh

Tabel 2.91
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif
Tahun 2007 - 2013

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah perempuan di lembaga legislatif	2	2	1	1	1	1	1
2	Jumlah Anggota Legislatif	30	30	30	30	30	30	30
3	Rasio perempuan di lembaga Legislatif	6,7	6,7	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

Sumber : Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Banda Aceh

Minimnya jumlah perempuan tercapat pula pada lembaga legislatif. Dari jumlah anggota DPRK sebanyak 30 orang, perempuannya hanya satu orang pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 atau 3,3 persen.

2.3.1.11.2 Persentase Pertisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Pekerja perempuan di lembaga swasta adalah pekerja perempuan yang tidak bekerja di lembaga pemerintah atau sektor formal lainnya. Pada tahun 2011 jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta terjadi penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 144 orang.Hal ini karena banyaknya lembaga swasta pada tahun 2011 mengalami penurunan juga salah satunya karena habisnya masa kerja lembaga swasta tersebut di Kota Banda Aceh. Jika dilihat dari persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta juga memiliki kontribusi yang sangat kecil hanya 0,87 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.115.

Tabel 2.92
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2013

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta	1.289	1.360	1.365	1.375	1.444	4.972	2.860
2	Jumlah pekerja perempuan	5.234	5.835	5.894	6.124	6.258	14.403	8.520
3	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta	24,63	23,31	23,16	22,45	23,07	34,52	33,57

Sumber : Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Banda Aceh

2.3.1.11.3 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terdata dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 terus mengalami peningkatan dari 9 kasus pada tahun 2009 terus mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 31 kasus dan jika dilihat dari rasio KDRT pada tahun 2011 meningkat menjadi 0,071.

Tabel 2.93
Rasio KDRT yang Didampingi Kota Banda Aceh
Tahun 2009- 2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah KDRT	9	19	31	11	43
2	Jumlah Rumah Tangga	37.099	42.072	43.509	45.711	47.687
3	Jumlah Penanganan Kasus KDRT	9	19	31	11	5
4	Rasio KDRT	0,024	0,045	0,071	0,057	0,813
5	Rasio Penaganan Kasus KDRT	100	100	100	100	100

Sumber: Kantor PP&KB Kota Banda Aceh

2.3.1.11.4 Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Jumlah pekerja di bawah umur yang berusia 5 – 14 tahun dari tahun 2009 sampai tahun 2011 terus mengalami penurunan dari 374 orang pada tahun 2009 menjadi 198 orang pada tahun 2011.Jika dilihat dari persetanse jumlah tenaga kerja di bawah umur juga mengalami penurunan hingga pada tahun 2011 menjadi 0,48 persen. Hal ini disebabkan karena semakin baiknya pembinaan terhadap anak di bawah umur melalui pembinaan pendidikan dan pembinaan keluarga anak-anak tersebut. Keadaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.115.

Tabel 2.94
Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur Kota Banda Aceh
Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pekerja anak usia 5-14 tahun	374	310	198	0	0
2	Jumlah Pekerja	36.333	40.849	41.595	0	0
	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	1,03	0,76	0,48	0	0

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh

2.3.1.11.5 Kota Layak Anak

Sejak tahun 2013 Kota Banda Aceh telah ditetapkan sebagai Pilot Project Kota Layak Anak (KLA) oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A). KLA adalah suatu strategi pembangunan kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang terencana dan berkelanjutan dalam program kegiatan pemenuhan hak anak.KLA ini dimaksud untuk membangun inisiarif pemerintah kabupaten/kotu yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak di dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota. Berikut ini adalah persentase capaian Indikator Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh.

Grafik 2.21
Persentase Capaian Indikator Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh

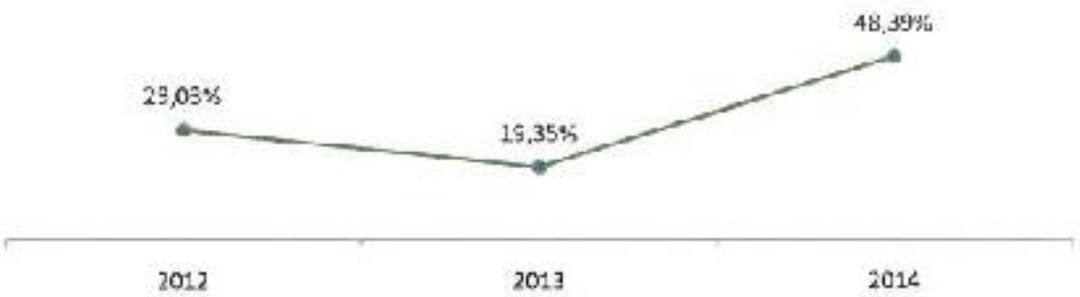

Sumber : Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Banda Aceh.

2.3.1.12 Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)

2.3.1.12.1 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga, pada tahun 2009 dan 2010 sebanyak satu anak per keluarga tetapi pada tahun 2011 meningkat menjadi dua anak per keluarga. Salah satu indikator keberhasilan program keluarga berencana adalah menurunkan rata-rata jumlah anak per keluarga.Dari data tersebut rata-rata jumlah anak per keluarga terjadi peningkatan, maka program keluarga berencana perlu

melakukan strategi yang lebih tepat dengan cara menekan laju kelahiran.

Tabel 2.95
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga
Kota Banda AcehTahun 2007-2013

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah anak	141.282	152.232	152.232	157.489	144.844	37.366	39.652
2	Jumlah keluarga	39.245	41.144	41.144	44.997	45.264	45.771	47.687
3	Rata rata jumlah anak per keluarga	3,6	3,7	3,7	3,5	3,2	3,2	3,1

Sumber: Kantor PP & KB Kota Banda Aceh

2.3.1.12.2 Rasio Akseptor KB

Jumlah akseptor KB dari tahun 2009 sampai dengan 2011 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2009 berjumlah 16.922 akseptor menjadi 18.140.Hal ini tentu saja, kerja keluarga berencana menunjukkan hasil yang signifikar, juga diikuti dengan peningatan pasangan usia subur pada tahun 2011 menjadi 28.799 pasangan. Jika dilihat dari rasio akseptor KB mengalami nilai yang berfluktuasi hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2011 banyaknya pasangan usia subur yang baru menikah.

Tabel 2.96
Rasio Akseptor KB Di Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah akseptor KB	10.495	14.599	16.922	18.323	18.140	19.608	19.942
2	Jumlah pasangan usia subur	22.415	25.061	27.867	28.555	28.799	29.904	30.925
3	Rasio akseptor KB	46,82	58,25	60,72	64,17	62,99	65,57	64,48

Sumber: Kantor PP & KB Kota Banda Aceh

Tabel 2.97
Jumlah Penyuluh KB Di Kota Banda Aceh
Tahun 2007 – 2013

No	Kecamatan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Baiturrahman	2	2	2	2	2	2	2
2	KutaAlam	2	2	2	2	2	2	2
3	Kuta Raja	1	1	1	1	1	2	2
4	Meuraxa	1	1	1	1	2	3	3
5	Jaya Baru	2	2	2	2	2	2	2
6	Lueng Bata	1	1	1	1	2	3	3
7	Ulee Kareng	2	2	3	1	1	2	2
8	Jaya Baru	2	2	2	2	1	2	2
9	Banda Raya	2	2	2	2	2	2	2
Jumlah		**15**	**15**	**15**	**14**	**13**	**21**	**21**
Rasio PL KB Per Wil. Kerja		**1:6**	**1 : 6**	**1 : 6**	**1:6**	**1:5**	**1:2**	**1:2**

Sumber: Kantor PP & KB Kota Banda Aceh

Namun secara keseluruhan pertahunnya terdapat peningkatan persentase pasangan usia subur yang mengikuti program KB. Peningkatan tersebut diharapkan akan lebih besar lagi apabila jumlah penyuluh KB dapat direkrut kembali untuk dilatih. Rasio yang diharapkan agar jumlah penyuluh KB pada satu wilayah kerja, rasionya adalah 1 : 3 yaitu dalam tiga desa harus memiliki satu orang tenaga fungsional penyuluh KB.

Tabel 2.98
Jumlah Penduduk Peserta KB di Kota Banda Aceh
Menurut KecamatanTahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Peserta KB		
		PUS	Peserta KB	AnmedNeet
1	Meuraxa	2.625	1.582	690
2	Jaya Baru	2.785	1.941	591
3	Banda Raya	3.145	2.278	441
4	Baiturrahman	3.710	2570	783
5	Lueng Bata	3.276	1.925	865
6	KutaAlam	6.442	3.674	1522
7	Kuta Raja	1.769	1.137	221
8	Syah Kuala	4.144	2.901	647
9	UleeKareng	3.029	1.934	390
Jumlah		**30.925**	**19.942**	**5.650**

Sumber : Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Banda Aceh

2.3.1.13 Sosial

2.3.1.13.1 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Program bantuan sosial adalah upaya pelayanan pemerintah kepada masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Program Bantuan Sosial menjadi salah satu komponen Program Jaminan Sosial yang menjadi bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kondisi masyarakat yang miskin, terlantar, cacat, ketunaan sosial serta korban bencana di Kota Banda Aceh. Tanggungjawab ini dituangkan menjadi salah satu sasaran utama dalam Rencana Pembangunan Kota Banda Aceh periode ini.

Berdasarkan data Pemerintah Kota Banda Aceh, umumnya PMKS tersebut berasal dari luar Kota Banda Aceh. Selama ini pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh hanya diperuntukan bagi PMKS yang memiliki KTP Banda Aceh, sedangkan bagi PMKS yang berdomisili dari luar daerah, dipulangkan kembali ke daerah asal dengan pembiayaan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Grafik 2.22

Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

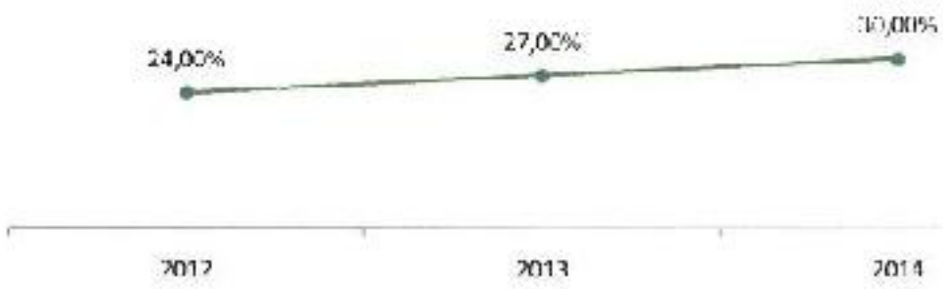

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.

Penanganan terhadap PMKS di Banda Aceh terus dilakukukan secara terus menerus oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.

PMKS setiap tahun terus diberikan pembinaan dan pemberdayaar, terutama dari kalangan fakir miskin. Bantuan dan pemberdayaan yang terus menerus dilakukan antara lain adalah melalui Proram Keluarga Harapan, kelompok usaha bersama (KUBE), bantuan berusaha bagi keluarga miskin, pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin, dan lain-lain bantuan yang bersumber dari APBA dan APBN.

Penggunaan database kemiskinan yang telah disiapkan aplikasinya oleh Bappeda Kota Banda Aceh, terkendala karena tidak ada orang/staf khusus yang menangani aplikasi dan mengupdate data, serta keterbatasan perangkat komputer yang mendukung menjalankan aplikasi tersebut tersebut di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.

2.3.1.13.2 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Dalam rangka pengurangan risiko terhadap bencana kebakaran Kota Banda Aceh telah memiliki 1 (satu) pos utama pemadam dan 5 (lima) pos pembantu dengan lokasi di Gampong Mulia, Pango, Jeulingke, Keudah, dan Asoe Nanggro. Khusus Pos Gampong Asoe Nanggroe dan Pos Gampong Keudah belum difungsikan karena armada Pemadan Kebakaran masih kurang. Pada tahun 2014, BPBD Kota Banda Aceh mendapat 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran yang memiliki tangga hidrolik hibah dari Pemerintah Aceh.

Kondisi pelayanan dan kasus kebakaran dapat dilihat pada Tabel 2.9 s.d Tabel 2.10.

Tabel 2.99
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Banda Aceh

Tahun	Wilayah Manajemen Kebakaran (km²)		Luas Kota Banda Aceh (km²)	Persentase (%)
2007	7.5	1 Pos	61.36	12.2
2008	7.5	1 Pos	61.36	12.2
2009	7.5	1 Pos	61.36	12.2
2010	7.5	2 Pos	61.36	24.4
2011	7.5	2 Pos	61.36	24.4
2012	7.5	3 Pos	61.36	36.7
2013	7.5	4 Pos	61.36	48.9
2014	7.5	4 Pos	61.36	48.9

Sumber : BPBD Kota Banda Aceh

2.3.1.15.3 Waktu Tanggap Darurat (*Response Time*) Layanan

Tabel 2.100
Waktu Tanggap Darurat (*Response Time*) Layanan

Tahun	Kasus di WMK Yg Tanggap 15 Menit	Kasus Kebakaran Dalam WMK (Tahun 2007 2014)	Persentase
2007	116	128	90.6
2008	70	77	90.9
2009	86	95	90.5
2010	89	99	89.9
2011	95	80	118.8
2012	95	85	111.8
2013	80	86	93.0
2014	70	89	78.7

Sumber : BPBD Kota Banda Aceh

Tabel 2.101
Jumlah Kasus Kebakaran Tahun 2007 - 2014

No	Jenis Kebakaran	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Bangunan Perkantoran Pemerintah/Swasta	9	3	2	33	7	13	15	14
2	Perumahan/pemukiman penduduk.	30	28	36	31	39	16	46	24
3	Hutan/ ilalang/ semak belukar	89	46	57	35	51	55	24	51
JUMLAH		**128**	**77**	**95**	**99**	**97**	**84**	**86**	**89**

Sumber : BPBD Kota Banda Aceh

2.3.1.14 Ketenagakerjaan

2.3.1.14.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan ketenagakerjaan harus menjadi prioritas dalam upaya mengatasi tingkat pengangguran yang cenderung semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi perkembangan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh lima tahun terakhir sejak 2007 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.106

Tabel 2.102
Perkembangan Ketenaga kerjaan Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2013

No	Uraian	Tahun							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	**ANGKATAN KERJA (jiwa)**	**33.811**	**105.820**	**103.018**	**90.840**	**104.602**	**97.973**	Tdk ada data	**112.067**
	Bekerja	31.136	93.730	92.947	80.335	95.686	90.944	tdk ada data	100.592
	Pengangguran	2.675	12.090	10.071	10.505	8.916	7.029	tdk ada data	11.475
2	**BUKAN ANGKATAN KERJA (jiwa)**	**19.648**	**57.136**	**60.689**	**78.472**	**64.888**	**73.728**	tdk ada data	**76.014**
	Sekolah	-	25.935	24.592	41.643	35.756	25.771	tdk ada data	37.826
	Mengurus Rumah Tangga	-	31.209	27.046	28.955	30.828	36.529	tdk ada data	31.077
	Lainnya	-	4.992	9.051	7.873	8.304	11.428	tdk ada data	7.111
3	**TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) %**	**63,3**	**63,0**	**62,9**	**53,7**	**61,7**	**57,06**	tdk ada data	**59,58**
4	**TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)%**	**7,9**	**11,4**	**9,8**	**11,6**	**8,5**	**7,17**	tdk ada data	**10,24**

Sumber: BPS Aceh Tahun 2015

Dari Tabel 2.105 dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terjadi fluktuasi sejak tahun 2007-2014. Demikian pula halnya dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga terjadi

fluktuasi. Namun secara persentase pada tahun 2012, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja setelah terjadi penurunan pada tahun 2012 (57,06 persen), mengalami peningkatan kembali pada tahun 2014 (59,58 persen), sedangkan tahun 2013 tidak ada data angka TPAK yang dikeluarkan oleh BPS disebabkan jumlah quisioner tidak mencukupi kuota.

Perkembangan ketenagakerjaan saat ini ditandai dengan tingginya jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan lowongan kerja yang tersedia sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Hal ini disebabkan karena Kota Banda Aceh bukan merupakan kota industri, melainkan sebagai kota pendidikan dan jasa. Oleh karena itu sangat dibutuhkan arah dan kebijakan pembangunan sumber daya manusia agar dapat menciptakan sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian hidup serta dapat menyediakan lapangan kerja baru yang dapat menampung angkatan kerja yang ada.

Produktifitas kerja adalah kemampuan karyawan/pekerja dalam berproduksi dibandingkankan dengan input yang digunakan, seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan dalam waktu yang singkat dan tepat. Oleh sebab itu untuk meningkatkan produksi pelaku usaha sangat diperlukan peningkatan produktifitas tenaga kerja di suatu daerah. Dengan produktivitas pekerja yang tinggi maka dapat dipastikan pendapatan perkapita penduduk akan tinggi juga. Hal ini sangat mencerminkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah.

Untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ketrampilan, sikap dan etika kerja, motivasi, tingkat penghasilan, teknologi, gizi dan kesehatan. Dalam meningkatkan produktifitas tenaga kerja ini pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai pelatihan dan bimbingan wirausaha bagi pemuda putus sekolah, remaja putri dan ibu rumah tangga. Adapun pelatihan dan bimbingan teknis dan non teknis yang diberikan bertujuan untuk dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja yang nantinya

dibarapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain.

Adapun pelatihan dan bimbingan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh dalam peningkatan produktifitas dan mengurangi angka pengangguran sejak tahun 2007 sampai tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.107.

Tabel 2.103
Pelatihan dan Bimbingan yang Telah diberikan
Kepada Masyarakat kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

No	Jenis Pelatihan	Tahun							Sumber Dana
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Pelatihan Tata Rias	16			-	-	-	-	APBN
2	Operator Komputer	41	30	25	53				APBN/APBK/Donatur
3	Processing /Pengolahan	16	-	-	-	-			APBN
3	Pelatihan Menjahit	45	25	-	-	-	15	20	APBK/Donatur
4	Teknisi Las Listrik	20	-	-	-	-			APBK
5	Teknisi Sepeda Motor	-	63	-	-	-	-	-	PMI
6	Teknisi Kapal Boat	-	16	-	-	-			PMI
7	Teknisi Instalasi Pipa		20			-	-	-	PMI
8	Pertukangan Bangunan Kontruksi	-	10		20				PMI/Donatur
9	Teknisi Meubel		15						PMI
10	Pengolahan ikan menjadi Abon	-	-	20					APBN
11	Pengolahan rumput laut menjadi minuman segar, pembuatan nugget	-	-	-	20	-	-	-	APBN
11	Teknisi Instalasi Listrik	-	20	-	20	-	-	-	APBK/PMI
12	Teknisi Komputer				31				APBN
13	Teknisi Handphone	-	-	-	17				APBK
14	Teknisi Cooling System	-	-	-	20	-	15	20	Donatur
15	Desain Grafis/Sablon	-	-	-	-	20	-	-	APBN
16	Menjahit Border	-	-	-	-	-	-	15	APBK
17	Kewirausahaan Membuat Kue	-	-	-	-	-	-	180	APBK
	Jumlah	**138**	**199**	**45**	**181**	**20**	**30**	**235**	

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pelatihan yang diberikan kepada masyarakat terdiri dari berbagai macam pelatihan dengan jumlah orang yang telah dilatih sejak tahun 2007-2013 sebanyak 848 orang. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut anggaran bersumber dari anggaran APBN Dana Tugas Pembantuan, APBK Kota Banda Aceh, APBD Provinsi Aceh dan donatur-donatur yang peduli terhadap produktifitas Tenaga

Kerja di kota Banda Aceh yaitu PMI Kota Banda Aceh dan PT. Tolan Tiga Indonesia.

Kesempatan kerja adalah peluang pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan guna mendapatkan penghidupan yang layak bagi dirinya sendiri beserta keluarganya. Hal yang mempengaruhi secara langsung terhadap kesempatan kerja adalah jumlah penduduk usia kerja dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Sehingga untuk meningkatkan kesempatan kerja adalah dengan penyediaan lapangan kerja bagi penduduk usia kerja dari semua tingkat pendidikan. Dengan bertambahnya kesempatan kerja dari tahun ke tahun dapat diproyeksikan dengan perkembangan jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dari tahun 2008 s/d tahun 2013 di Kota Banda Aceh yang terdapat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.104
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Kota Banda Aceh Tahun 2008-2012

Tahun	Lapangan Usaha							
	Pertanian	Industri Pengolahan	Bangunan	Perdagangan Restoran & Hotel	Angkutan Pergudangan Komunikasi	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan	Jasa Kemasyarakatan	DII
2008	2232	3596	7955	22055	7932	2994	46998	440
2009	250	144	2364	13023		108	77058	-
2010	485	216	2542	13569		218	52501	869
2011	2936	4563	7539	28400	3824	6598	41370	376
2012	4042	4925	4965	23153	3736	7372	41939	834

Sumber : BPS Kota Banda Aceh Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 2.108 dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kota Banda Aceh bekerja pada sektor jasa kemasyarakatn, perdagangan, restoran dan hotel. Hal ini diakibatkan minimnya lapangan usaha industri yang tersedia di Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota provinsi. Seiring berkembanganya kota Banda Aceh menuju kota Madani membuat beberapa sektor lapangan usaha berkembangan dengan pesat seperti sektor jasa bidang perdagangan, restoran dan perhotelan. Ini ditandai dengan semakin besarnya tenaga kerja yang tertampung pada sektor ini. Disamping itu sektor jasa

kemasyarakatan juga menampung menambung pekerja yang cukup besar dimana pada tahun 2012 terjadi kenaikan pekerja pada sektor ini sebesar 1,37 %. Pada sektor pedagangan, resteran dan hotel tahun 2012 penyerapan tenaga kerja sebanyak 23.153 orang dan ini terjadi penurunan sebesar 23,05% jika dibandingkan tahun 2011. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap pada berbagai sektor usaha pada tahun 2012 membuat kesempatan kerja semakin besar dan angka pengungguran semakin kecil. Akan tetapi, pertumbuhan kesempatan kerja ini tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang terjadi, baik pertumbuhan penduduk alami, maupun arus urbanisasi. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pengangggurar yang relatif tinggi. Ini tentu mempunyai korelasi yang positif bagi meningkatnya kriminalitas di ibukota. Oleh karenanya pemerintah kota harus mengantisipasi untuk menekan angka kriminalitas, penduduk miskin dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.3.1.15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

2.3.1.15.1 Persentase Koperasi Aktif

Perkembangan koperasi selama 7 tahun terakhir dari tahun 2007 sampai dengan 2013 di Kota Banda Aceh mengalami pertambahan yang sangat pesat hal ini terlihat dari data diatas.Selanjutnya pertambahan jumlah koperasi tersebut telah meningkatkan jumlah anggota koperasi, simpanan wajib dan sukarela koperasi di dalam menambah permodalan koperasi yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga keberadaan koperasi di Kota Banda Aceh telah berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi di Kota Banda Aceh ini terlihat dari perkembangan koperasi aktif di Kota Banda Aceh.

Tabel 2.105
Persentase Koperasi Aktif Banda Aceh Tahun 2007-2013

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	JumlahKoperasiAktif	334	353	378	396	413	452	458
2	JumlahKoperasi	727	746	774	789	799	814	814
3	PersentaseKoperasiAktif	46 %	48 %	49 %	50 %	52 %	55 %	56 %

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh Tahun 2014

Tabel 2.106
Persentase Koperasi Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

No	Kecamatan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Baiturrahman							
	Jumlah koperasi aktif	97	103	114	118	122	93	93
	Jumlah koperasi	186	192	203	205	206	197	197
	Persentase koperasi aktif	52,15	53,65	56,16	57,56	59,22	47,21	47,21
2	KutaAlam							
	Jumlah koperasi aktif	96	100	101	106	109	140	140
	Jumlah koperasi	230	234	235	240	240	234	234
	Persentase koperasi aktif	41,74	42,74	42,98	44,17	45,42	59,83	59,83
3	Meuraxa							
	Jumlah koperasi aktif	11	12	13	13	14	31	31
	Jumlah koperasi	26	28	28	28	29	59	59
	Persentase koperasi aktif	42,31	46,43	46,43	46,43	48,27	52,54	52,54
4	Syiah Kuala							
	Jumlah koperasi aktif	57	60	62	66	68	74	80
	Jumlah koperasi	140	143	146	151	153	154	154
	Persentase koperasi aktif	40,71	41,96	42,47	43,71	44,44	48,05	51,95
5	Lueng Bata							
	Jumlah koperasi aktif	17	18	20	23	26	31	31
	Jumlah koperasi	42	42	45	47	50	42	42
	Persentase koperasi aktif	40,48	42,86	44,44	48,94	52	73,81	73,81
6	Banda Raya							
	Jumlah koperasi aktif	15	17	20	20	21	23	23
	Jumlah koperasi	28	30	33	33	34	34	34
	Persentase koperasi aktif	53,57	56,67	60,61	60,61	61,76	67,65	67,65
7	Jaya Baru							
	Jumlah koperasi aktif	14	14	17	18	19	22	22
	Jumlah koperasi	26	26	29	30	30	34	34
	Persentase koperasi aktif	53,85	53,85	58,62	60	63,33	64,71	64,71
8	UleeKareng							
	Jumlah koperasi aktif	19	20	23	23	25	24	24
	Jumlah koperasi	26	27	30	30	32	32	32
	Persentase koperasi aktif	73,08	74,07	76,67	76,67	78,12	75	75
9	Kuta Raja							
	Jumlah koperasi aktif	8	8	8	9	9	14	14
	Jumlah koperasi	23	23	25	25	25	28	28
	Persentase koperasi aktif	34,78	34,78	32	36	36	50	50
	Total Persentase koperasi aktif	**48,07**	**49,56**	**51,15**	**51,90**	**54,28**	**55,51**	**56,27**

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh Tahun 2014

Persentase koperasi aktif di Kota Banda Aceh tahun 2007, yang tertinggi terdapat di Kecamatan Ulee Kareng, dengan persentase sebesar 73,08 persen, tahun 2008 sebesar 74,07 persen, tahun 2009 sebesar 76,67 persen, tahun 2010 sebesar 76,69 persen, tahun 2011 sebesar 78,13 persen, tahun 2012 sebesar 75 persen, dan tahun 2012 sebesar 75 persen trendnya semakin meningkat setiap tahunnya namun di tahun 2011 terjadi penurunan akibat adanya koperasi di Kecamatan Ulee Kareng pindah alamat/tempat kedudukannya ke Kecamatan lain. Kecamatan yang terendah adalah Kecamatan Kuta Raja dengan koperasi aktif hingga tahun 2011 hanya sebesar 36 persen, sedangkan di tahun 2012 dan 2013 persentase koperasi aktif terendahterdapat di Kecamatan Baiturrahman hanya sebesar 47,21 persen.

2.3.1.15.2 Jumlah BPR/LKM

Peran serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Kota Banda Aceh sebagai sebuah lembaga keuangan telah mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi bagi para pelaku ekonomi lemah, dimana pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada masyarakat tanpa peraturan yang ketat, tetapi permasalahan yang timbul sekarang permodalan lembaga keuangan mikro sangat terbatas sedangakan para UMKM yang membutuhkan modal di LKM tidak dapat ditangani baik.

Untuk lebih jelasnya jumlah BPR/ LKM dari Tahun 2007 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.91.

Tabel 2.107
Jumlah BPR/LKM Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah BPR	2	2	2	2	2	2	2
2	Jumlah LKM	15	19	21	21	21	21	21
3	Jumlah BPR dan LKM	17	21	23	23	23	23	23

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh Tahun 2014

Sehubungan dengan perkembangan industri kecil di Kota Banda Aceh, yang dilakoni berbagai ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri maka perkembangan tersebut menjadi perhatian berbagai kalangan

pengusaha di Kota Banda Aceh. Namun untuk bisa diakui oleh pasar hasil dari para perajin ini, perlu diberikan pemahaman / pemantapan tentang kewirausahaan, sehingga hasil yang dilakukan oleh para perajin tersebut akan menunjukkan kualitas yang lebih baik dan diakui peredarannya di pasaran, karena pada kenyataannya industri-industri yang ada di Banda Aceh, sampai saat ini sangat membutukan pembinaan yang sangat serius dan dukungan dari pihak pemerintah. Untuk lebih jelasnya perkembangan Industri dan perdagangan tahun 2007-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.92.

Tabel 2.108
Perkembangan Industri dan Perdagangan Kota Banda Aceh
Tahun 2007–2013

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah perusahaan industri	1707	1883	2016	2294	2390	2438	2573
2	Jumlah sentra industri	5	6	6	7	8	10	10
3	Tenaga kerja industri	3651	7164	7378	7780	7992	8088	8190
4	Jumlah industri informal	1707	1883	2016	2294	2390	2438	2573

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh Tahun 2014

Tabel 2.109
Jumlah UKM Non BPR/LKM Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlahseluruh UKM	5083	5236	5324	5481	5801	5861	5937
2	Jumlah BPR/LKM	17	21	23	23	23	23	23
3	Jumlah UKM Non BPR/LKM	5083	5236	5324	5481	5801	5861	5937

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh Tahun 2012

2.3.1.16 Penanaman Modal

2.3.1.16.1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Jumlah investor di kota Banda Aceh dari tahun 2007- 2013 mengalami fluktuasi, pada tahun 2007 jumlah investor (PMDN) sebanyak 130 investor dengan nilai investasi 130.260 (juta rupiah) dan pada tahun 2013 jumlah investor PMDN (4 investor) dan PMA (20 investori dengan nilai investasi 77.928.847 (juta rupiah), jumlah investor dan nilai investasi dapat dilihat pada tabel 2.86. Secangkan rasio daya serap tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dapat dilihat pada tabel. 2.87.

Tabel 2.110
Jumlah Investor PMDN/PMA dan Nilai Investasi Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2013

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total	Nilai Investasi (Juta)
2007	Jumlah Investor	130		130	130.260
2008	Jumlah Investor	103	-	103	103.020
2009	Jumlah Investor	77	-	77	77.023
2010	Jumlah Investor	36	-	36	36.023
2011	Jumlah Investor	40	-	40	20.469
2012	Jumlah Investor	310	4	305	489,211,11
2013	Jumlah Investor	4	20	24	77.928.847

Sumber : KPPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2014

2.3.1.16.2 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Tabel 2.111
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2013

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	6.990	10.732	11.271	10.746	14.840		28
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	147	184	218	1.665	8.324	-	28
3	Rasio daya serap tenaga kerja	47	58	51	6	2	-	7

Sumber : Disnasnaker Kota Banda Aceh Tahun 2012

2.3.1.17 Kepemudaan dan Olahraga

2.3.1.17.1 Jumlah Organisasi Pemuda

Tabel 2.112
Jumlah Organisasi Pemuda Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

No	Kecamatan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kuta Alam	10	10	13	13	14	17	17
2	Lueng Bata	4	5	6	5	7	9	9
3	Kuta Raja	9	9	11	11	12	10	10
4	Syiah Kuala	9	9	9	9	9	9	9
5	Baiturrahman	9	11	12	13	14	14	14
6	Meuraxa	3	3	3	3	3	4	4
7	Banda Raya	1	1	1	2	2	2	2
8	Jaya Baru	5	5	4	5	5	5	6
	Jumlah	**53**	**56**	**62**	**61**	**67**	**70**	**71**

Sumber : Dinas pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Banda Aceh

2.3.1.17.2 Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Tabel 2.113
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2013

No	Kecamatan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	KutaAlam	0	0	1	0	1	Tdk ada data rinci per-kec.	Tdk ada data rinci per-kec.
2	Kuta Raja	0	0	0	0	0	Tdk ada data rinci per-kec.	Tdk ada data rinci per-kec.
3	Syiah Kuala	0	0	0	0	0	Tdk ada data rinci per kec.	Tdk ada data rinci per kec.
4	UleeKareng	0	0	0	0	0	Tdk ada	Tdk ada

No	Kecamatan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
							data rinci per-kec.	data rinci per-kec.
5	Baiturrahman	0	0	0	0	0	Tdk ada data rinci per-kec	Tdk ada data rinci per-kec
6	Lueng Bata	0	0	0	0	0	Tdk ada data rinci per-kec.	Tdk ada data rinci per-kec.
7	Meuraxa	0	0	0	0	0	Tdk ada data rinci per kec.	Tdk ada data rinci per kec.
8	Banda Raya	0	0	0	0	0	Tdk ada data rinci per-kec.	Tdk ada data rinci per-kec.
9	Jaya Baru	0	0	0	0	0	Tdk ada data rinci per-kec.	Tdk ada data rinci per-kec.
	Jumlah	**0**	**0**	1	**0**	**1**	**5**	**3**

Sumber : Dinas pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Banda Aceh.

2.3.1.17.3 Jumlah Kegiatan Olahraga

Tabel 2.114
Jumlah Organisasi Olahraga Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2013

No	Kecamatan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kuta Alam	28	28	28	28	31	32	32
2	Kuta Raja	0	0	0	0	0	0	0
3	Syiah Kuala	0	0	1	0	0	0	0
4	Ulee Kareng	2	2	2	2	2	2	2
5	Baiturrahman	1	1	1	1	1	1	1
6	Lueng Bata	0	0	0	0	0	0	0
7	Meuraxa	0	0	0	0	0	0	0
8	Banda Raya	0	0	0	3	4	3	4
9	Jaya Baru	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	**31**	**31**	**32**	**34**	**38**	**39**	**40**

Sumber : Dinas pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Banda Aceh

Tabel 2.115
Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2013

No	Kecamatan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	KutaAlam	3	3	5	6	6	6	6
2	Kuta Raja	0	0	0	0	0	0	0
3	Syiah Kuala	1	0	6	0	0	0	0
4	UleeKareng	0	0	1	4	5	4	5
5	Baiturrahman	1	1	1	1	1	1	1
6	Lueng Bata	0	0	0	0	0	0	0
7	Meuraxa	0	0	0	0	0	0	0
8	Banda Raya	3	3	3	5	2	2	5
9	Jaya Baru	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	**8**	**7**	**16**	**16**	**14**	**13**	**17**

Sumber : Dinas pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Banda Aceh.

Jumlah organisasi kepemudaan yang relatif banyak, belum menunjukkan perannya yang berarti di dalam pembangunan Kota Banda Aceh. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya partisipasi langsung atau tidak langsung yang dilakukan. Jumlah kegiatan kepemudaan yang sangat rendah menunjukkan bukti untuk itu. Hanya kegiatan-kegiatan olah raga saja yang menjadi perhatian mereka. Sementara kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, pengembangan masyarakat miskin atau kegiatan pembangunan lainnya belum menunjukkan indikasi yang berarti.

2.3.1.17.4 Peningkatan Potensi Pemuda melalui Pembinaan dan Pelatihan Pembangunan Kota Banda Aceh

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah. Dalam konteks Kota Banda Aceh Pemuda harus mengambil peran untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai Model Kota Madani. Hal itu sejalan dengan salah satu misi Pemerintah Kota Banda Aceh yakni meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota.

Untuk meningkatan Potensi pemuda melalui pembinaan dan pelatihan pembangunan kota Banda Aceh diukur melalui pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi para pemuda. Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan pelatihan bagi 135 pemuda dari perwakilan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di Kota Banda Aceh. Berikut ini adalah grafik Peningkatan potensi pemuda melalui Pembinaan dan pelatihan pembangunan Kota Banda Aceh.

Grafik 2.23
Peningkatan potensi pemuda melalui Pembinaan dan pelatihan pembangunan Kota Banda Aceh

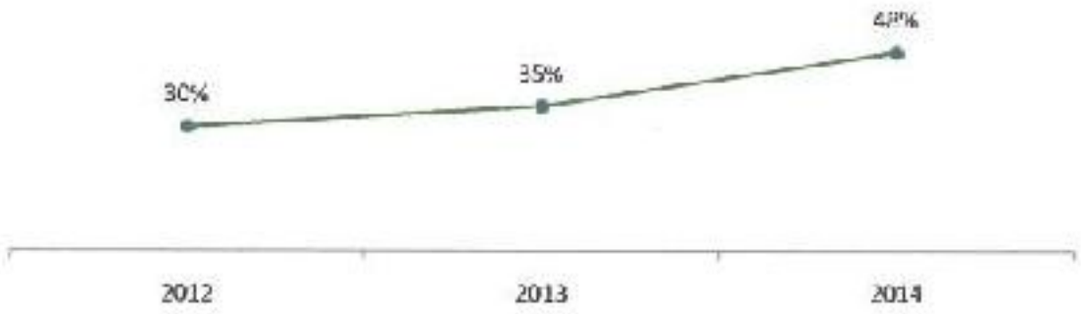

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh

2.3.1.17.5 Pembinaan Kepemudaan sebagai Modal Utama dalam Pencapaian Peningkatan Pembangunan

Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Kota Banda Aceh yang berkelanjutan dibutuhkan partisipasi aktif dari generasi muda. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemko Banda Aceh untuk selalu mengajak dan melibatkan pemuda dalam mewujudkan pembangunan demi kesejahteraan berkendilan. Selain itu generasi muda diarahkan agar dapat berperan aktif dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kota Banda Aceh. Berikut ini adalah Grafik Pembinaan Kepemudaan sebagai Modal Utama dalam Pencapaian Peningkatan Pembangunan.

Grafik 2.24
Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina sebagai Modal Utama dalam Pencapaian Peningkatan Pembangunan

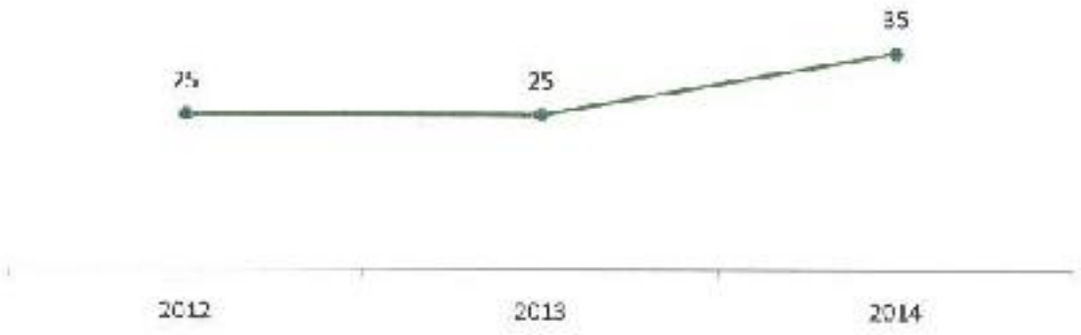

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh

2.3.1.18 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

2.3.1.18.1 LSM, Ormas dan OKP terdaftar

Organisasi lembaga swadaya masyarakat diatur berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1985, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986.

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Organisasi Kemasyarakat dapat berbentuk, LSM, Yayasan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan lainnya.Adapun LSM yang terdaftar dan aktif di Kota Banda Aceh sesuai dengan Tabel 2.130.

Tabel 2.116
Jumlah LSM Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah LSM terdaftar	15	9	7	37	26	23	1
2	Jumlah LSM tidak aktif	-	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah LSM aktif (1-2)	15	9	7	37	26	23	1

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Tabel 2.117
Jumlah Ormas, OKP Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Ormas	23	13	21	17	25	71	59
2	OKP	8	3	5	3	2	10	10
3	Yayasan	3	6	7	27	9	14	10
4	NGO Asing	7	55	51	17	5	-	-
	Jumlah	**105**	**87**	**84**	**74**	**41**	**95**	**79**

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

2.3.1.18.2 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk

Kota Banda Aceh sebagai ibukota propinsi memiliki masyarakat dengan kultur budaya berbeda yang dipengaruhi oleh banyaknya pendatang dari luar daerah.Umumnya hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi dimana ibukota propinsi dianggap lebih memberikan kesempatan dan lapangan kerja yang lebih besar. Selain faktor mencari kerja, terdapat sebagian orang yang memanfaatkan situasi dengan mengambil kesempatan melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tingkat kesenjangan sosial menjadi faktor dominan yang menyebabkan terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan di Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya mengantisipasi dan menjaga lingkungan dari gangguan ketertiban dan keamanan, merekrut Satuan Perlindungan Masyarakat dari setiap gampong yang bertugas membantu kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Selain itu di setiap gampong dibangun pos Siskamling yang merupakan salah satu usaha dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat setempat. Sistem keamanan lingkungan atau Siskamlingmelibatkan unsur masyarakat, untuk melakukan pengawasan, terhadap keamanan dilingkungannya dengan mengutamakan upaya upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas.

Pemerataan anggota satuan linmas merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan ketrentraman masyarakat. Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satuan linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Adapun Rasio Jumlah Linmas sesuai Tabel 2.135.

Tabel 2.118
Rasio Jumlah Linmas Kota Banda Aceh Per 10.000 Penduduk
Tahun 2007-2013

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Linmas	1,420	1,420	1,240	1,240	1,240	1.300	1.320
2	Jumlah penduduk	219.659	202.774	220.073	223.516	244.724	238.784	249.282
3	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	64	70	56	55	55	54	57

Sumber: Kesbanggolinmas Kota Banda Aceh

2.3.1.18.3 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Gampong

Dalam menjaga situasi dan kondisi suatu daerah perlu adanya Satuan Linmas dan perangkatnya maka setiap daerah perlu adanya pos siskamling Gampong untuk pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat mengganggu ketrentraman dan kenyamanan di lingkungan masyarakat.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kota Banda Aceh 2012-2017



Tabel 2.119
Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan di Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2013

NO	Kecamatan	2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013		
		Jmlh Siskamling	Jmlh Desa	Rasio	Jmlh Siskamling	Jmlh Desa	Rasio	Jmlh siskamling	Jmlh Desa	Rasio	Jmlh Siskamling	Jmlh Desa	Rasio	Jmlh Siskamling	Jmlh Desa	Rasio	Jmlh Siskamling	Jmlh Desa	Rasio	Jmlh Siskamling	Jmlh Desa	Rasio
1	Kuta Alam	40	11	3,6	40	11	3,6	42	11	3,8	43	11	3,9	43	11	3,9	43	11	3,9	43	11	3,9
2	Meuraxa	26	16	1,6	26	15	1,6	28	16	1,7	29	16	1,8	29	16	1,8	29	16	1,8	29	16	1,8
3	Baiturrahman	32	10	3,2	32	10	3,2	33	10	3,3	35	10	3,5	35	10	3,5	35	10	3,5	35	10	3,5
4	Banda Raya	18	10	1,8	18	10	1,8	20	10	2,2	20	10	2,0	20	10	2,0	20	10	2,0	20	10	2,0
5	Kutaraja	13	6	2,1	13	6	2,1	15	6	2,5	15	6	2,5	15	6	2,5	15	6	2,5	15	6	2,5
6	Ulee Kareng	10	9	1,1	10	9	1,1	12	9	1,3	12	9	1,3	12	9	1,3	12	9	1,3	12	9	1,3
7	Lueng Bata	14	9	1,5	14	9	1,5	16	9	1,8	18	9	2,0	18	9	2,0	18	9	2,0	18	9	2,0
8	Syiah Kuala	30	10	3,0	30	10	3,0	30	10	3,0	32	10	3,2	32	10	3,2	32	10	3,2	32	10	3,2
9	Jaya Baru	23	9	2,5	23	9	2,5	21	9	2,3	23	9	2,5	23	9	2,5	23	9	2,5	23	9	2,5
	Jumlah	**206**	**90**	**2,28**	**206**	**90**	**2,28**	**217**	**90**	**2,2**	**227**	**90**	**2,5**	**227**	**90**	**2,5**	**227**	**90**	**2,5**	**227**	**90**	**2,5**

Sumber: Kesbangpolinmas Kota Banda Aceh

2.3.1.19 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.3.1.19.1 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Tabel 2.120
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2014

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah polisi pamong praja	83	93	139	170	133	134	147	215
2	Jumlah penduduk	219.659	217.918	212.211	223.446	228.552	256.147	262.224	267.340
3	**Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk**	**3,7**	**4,3**	**6,6**	**7,6**	**6,06**	**5,2**	**5,6**	**8,0**

Sumber: Kantor Satpol PP & WH Kota Banda Aceh

Pada tahun 2012 jumlah Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh berjumlah 134 orang, dengan jumlah penduduk pada saat itu sebanyak 256.147 jiwa maka rasio jumlah personil Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah per 10.000 penduduk adalah 5,2 dengan kata lain 5 personil Satpol PP dan WH untuk 10.000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah personil Satpol PP dan WH berjumlah 147 orang, dengan jumlah penduduk 262.224 jiwa dan rasio jumlah personil Satpol PP dan WH per 10.000 penduduk adalah 5,6. Pada tahun 2014 personil Satpol PP dan WH meningkat sehubungan dengan adanya penerimaan tenaga kontrak baru yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH dengan jumlah penduduk saat itu adalah 267.340 jiwa maka rasio jumlah personil Satpol PP dan WH per 10.000 penduduk adalah 8,0 dengan kata lain 8 personil Satpol PP dan WH untuk 10.000 Penduduk.

2.3.1.19.2 Ketahanan Pangan

Kebutuhan pangan di Kota Banda Aceh dengan jumlah penduduk yang terus bertambah tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan untuk tanaman khususnya pertanian yang menghasilkan makanan pokok seperti beras, jadi bisa dikatakan kebutuhan beras tidak mencukupi jika hanya mengandalkan produksi dari lahan pertanian di Kota Banda Aceh.

Produksi beras yang dihasilkan dari luas lahan panen padi di Kota Banda Aceh sebesar 94 Ha menghasilkan 515 ton Gabah Kering Panen (GKP). Dari total 515 ton GKP setelah diolah rata-rata menghasilkan 334.750 kg beras. Sedangkan kebutuhan beras di Kota Banda Aceh mencapai 34.879.872 kg. Untuk menutup kekurangan beras tersebut, maka dipasok dari luar daerah sebanyak 34.545.122 kg. Pada tahun 2014, ketersediaan pangan utama mencapai 392,04 kg. Ketersediaan pangan dalam hal ini beras di Kota Banda Aceh sangat rendah sehingga tidak mampu menutupi kebutuhan beras bagi masyarakat setiap tahunnya. Faktor pertambahan laju penduduk berbalik belakang dengan semakin sempitnya lahan untuk tanaman makanan pokok. Salah satu upaya mengantisipasi kekurangan tersebut melalui pasokan dari luar daerah. Berikut ini adalah grafik ketersediaan pangan utama (kg) di Kota Banda Aceh.

Grafik 2.25
Ketersediaan Pangan Utama (kg) di Kota Banda Aceh tahun 2012-2014



Sumber : DKPP Kota Banda Aceh

2.3.1.20 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.3.1.20.1 Pemerintahan Gampong

Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan pembenahan dan pembinaan pemerintahan sejak dari tingkat yang terendah yaitu dimulai dari pemerintahan gampong. Dalam rangka menciptakan pemerintahan gampong yang baik, tertib administrasi dan berfungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu ada regulasi yang mengatur tata kelola pemerintahan gampong dari berbagai aspek kepemerintahan.

Tabel 2.121
Rekapitulasi Regulasi Pemerintahan Mukim dan Gampong
Tahun 2007-2014

No	Regulasi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Qanun tentang Pemerintahan Mukim	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Qanun tentang Pemerintahan Gampong	0		0	0	0	0	0	0
3	Qanun tentang TPG (Qanun Kota Banda Aceh 6/2005)	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Qanun tentang Reusam Gampong (Qanun Kota Banda Aceh 7/2005)	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Qanun tentang Keuangan Gampong (Qanun Kota Banda Aceh 8/2005)	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Qanun tentang Tata Cara Pencalonan Geuchik	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Qanun tentang pembentukan, penggabungan dan penghapusan Gampong (Qanun Kota Banda Aceh 10/2005)	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Qanun tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat Gampong.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**

Sumber : Bagian Hukum Setdako Banda Aceh

2.3.1.20.2 Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kota

Pemerintah kecamatan sebagai unit pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat juga dituntut untuk dapat bekerja secara professional didalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat maupun didalam menjalankan kegiatan rutinnya schari-hari.Disamping harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah kecamatan juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan kepada penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau Gampong (PP 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 15 ayat 1 point F).

Pemerintahan Kecamatan dalam Kota Banda Aceh telah memiliki kewenangan dalam pembinaan pemerintah gampong, sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Pertauran Walikota Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Walikota kepada Camat, schingga sangat besar pengaruh/andil Kecamatan dalam penyelenggaraan roda Pemerintahan Gampong, diantaranya dalam Penyusunan Reusam Gampong, administrasi pelayanan gampong, pembinaan aparatur gampong, dan sebagai perantara/fasilitasi kepada SKPD terkait pemenuhan kebutuhan gampong.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik pada tingat kota maupun kecamatan dan gampong maka diperlukan adanya regulasi yang mengatur berbagai aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.3.1.20.3 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah gampong dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan..

Kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah gampong dalam mewujudkan aspirasi

dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, misalnya kelompok pemuda/karang taruna, remaja mesjid dan lain lain. Jumlah Kelompok binaan LPM dalam Kota Banda Aceh dari tahun 2008 s/d 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.126.

Tabel 2.122
Kelompok Binaan LPM Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

No	Kecamatan	2008			2009			2010			2011			2012			2013		
		Jmlh LPM	Jmlh Klp Binaan	Rata-rata Jmlh LPM	Jmlh LPM	Jmlh Klp Binaan	Rata-rata Jmlh LPM	Jmlh LPM	Jmlh Klp Binaan	Rata-rata Jmlh LPM	Jmlh LPM	Jmlh Klp Binaan	Rata-rata Jmlh LPM	Jmlh LPM	Jmlh Klp Binaan	Rata-rata Jmlh LPM	Jmlh LPM	Jmlh Klp Binaan	Rata-rata Jmlh LPM
1	2	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15	18	19	20=19/15	21	22	23=22/15
1	Baiturrahman	10	10	1,00	10	14	1,40	10	16	1,60	10	18	1,80	18	1,80	10	18	1,80	18
2	Kuta Alam	11	11	1,00	11	14	1,27	11	18	1,64	11	21	1,91	21	1,91	11	21	1,91	21
3	Meuraxa	16	16	1,00	16	20	1,25	16	21	1,31	16	22	1,38	22	1,38	16	22	1,38	22
4	Syiah Kuala	10	10	1,00	10	12	1,20	10	14	1,40	10	19	1,90	19	1,90	10	19	1,90	19
5	Lueng Bata	9	9	1,00	9	12	1,33	9	15	1,67	9	18	2,00	18	2,00	9	18	2,00	18
6	Kuta Raja	6	6	1,00	6	8	1,33	6	10	1,67	6	10	1,67	10	1,67	6	10	1,67	10
7	Banda Raya	10	10	1,00	10	12	1,20	10	15	1,50	10	18	1,80	18	1,80	10	18	1,80	18
8	Jaya Baru	9	9	1,00	9	11	1,22	9	13	1,44	9	14	1,56	14	1,56	9	14	1,56	14
9	Ulee Kareng	9	9	1,00	9	12	1,33	9	15	1,67	9	15	1,67	15	1,67	9	15	1,67	15
	Jumlah se Kota Banda Aceh	**90**	**90**	**1,00**	**90**	**115**	**1,28**	**90**	**135**	**1,50**	**90**	**155**	**1,72**	**155**	**1,72**	**90**	**155**	**1,72**	**155**

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh

Dari Tabel 2.126 terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah kelompok binaan LPM di Kota Banda Aceh, yang pada tahun 2008 sebesar 1 kelompok per gampong, meningkat menjadi 1,72 kelompok per gampong pada tahun 2013.

2.3.1.20.4 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kota Banda Aceh melaksanakan pembinaan secara berjenjang dari TP. PKK Kecamatan sampai TP.PKK Gampong. Selanjutnya TP. PKK Gampong membina kelompok PKK Dusun dan Kelompok Dasa Wisma. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Gampong yang terdiri dari Kelompok PKK Dusun dan Kelompok Dasa Wisma. Jumlah Kelompok PKK Dusun dan Dasawisma adalah sesuai dengan jumlah dusun dan dasawisma yang ada di gampong.Jumlah Kelompok binaan PKK dalam Kota Banda Aceh dari tahun 2007 s/d 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.127.

Dari Tabel 2.127 terlihat bahwa jumlah kelompok binaan PKK terus meningkat dari tahun 2007 s/d tahun 2013. Pada tahun 2013 jumlah Kelompok Binaan PKK dalam Kota Banda Aceh sebesar 2.188 kelompok. Jumlah Tim Penggerak PKK di kecamatan terdiri dari TP.PKK Kecamatan dan TP. PKK Gampong di wilayah masing-masing kecamatan.

Tabel 2.123
Kelompok Binaan PKK Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

No	Kecamatan	2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013		
		Jmlh PKK	Jmlh Klp Binaan	Rata-rata Jmlh PKK	Jmlh PKK	Jmlh Klp Binaan	Rata-rata Jmlh PKK	Jmlh PKK	Jmlh Klp Binaan	Rata-rata Jmlh PKK	Jmlh PKK	Jmlh Klp Binaan	Rata-rata Jmlh PKK	Jmlh PKK	Jmlh Klp Binaan	Rata-rata Jmlh PKK	Jmlh PKK	Jmlh Klp Binaan	Rata-rata Jmlh PKK	Jmlh PKK	Jmlh Klp Binaan	Rata-rata Jmlh PKK
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15	18	19	20=19/15	21	22	23=22/15
1	Baiturrahman	11	428	7,09	11	409	37,09	11	414	37,67	11	414	37,67	11	417	37,91	11	417	37,9	11	418	38,00
2	Kuta Alam	12	216	0,00	12	264	21,86	12	284	23,67	12	304	25,33	12	308	25,67	12	308	25,67	12	308	25,67
3	Meuraxa	17	160	9,41	17	160	9,41	17	160	9,41	17	160	9,41	17	160	9,41	17	160	9,41	17	160	9,41
4	Syiah Kuala	11	347	1,55	11	345	31,36	11	345	31,36	11	345	31,36	11	347	31,55	11	347	31,55	11	347	31,55
5	Ulee Kareng	10	129	3,90	10	130	13,00	10	145	14,50	10	145	14,50	10	145	14,50	10	145	14,50	10	145	14,50
6	Kuta Raja	7	108	5,43	7	108	15,43	7	108	15,43	7	108	15,43	7	108	15,43	7	108	15,43	7	108	15,43
7	Banda Raya	11	151	4,64	11	221	20,09	11	229	20,82	11	229	20,82	11	229	20,82	11	229	20,82	11	230	20,91
8	Jaya Baru	10	106	9,60	10	206	20,60	10	206	20,60	10	210	21,00	10	210	21,00	10	210	21,00	10	210	21,00
9	Ulee Kareng	10	168	8,80	10	263	26,20	10	259	25,90	10	262	26,20	10	262	26,20	10	262	26,20	10	262	26,20
	Jumlah se-Kota Banda Aceh	**99**	**1.948**	**9,65**	**99**	**2.111**	**21,32**	**99**	**2.163**	**21,76**	**99**	**2.177**	**21,99**	**99**	**2.186**	**22,08**	**99**	**2.186**	**22,08**	**99**	**2.188**	**22,10**

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh

2.3.1.20.5 Jumlah PKK Aktif

Berdasarkan pembinaan, jumlah PKK aktif meningkat setiap tahun, karena dukungan dari pemerintah gampong melalui Dana ADG. Jumlah PKK Aktif dari tahun 2007 s/d 2011 dapat dilihat pada Tabel 2.128.

Tabel 2.124
PKK Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah TP. PKK	99	99	99	99	99	99	99
2	Jumlah TP. PKK tidak aktif	76	67	56	46	37	20	10
3	Jumlah TP. PKK aktif (1-2)	23	32	43	53	62	79	89
4	Persentase	23,23	32,32	43,43	53,54	62,63	79,80	89,90

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh

Dari Tabel 2.128terlihat bahwa persentase PKK Aktif pada tahun 2007 sebesar 23,23 persen meningkat menjadi 89,90persen pada tahun 2013.

2.3.1.20.6 Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah Gampong

Tabel 2.125
Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintahan Gampong
Kota Banda AcehTahun 2007-2013

No.	KECAMATAN	SD							SMP							SMA							Diploma/Sarjana						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I	**Kec. Baiturrahman**																												
1	Gampong	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	5	6	5	5	5	6	6	6	6	5	5
2	Sekretaris Desa	3	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	9	8	0	0	0	0	0	1	1
3	Kaur	3	0	0	0	0	0	0		1	1	1	1	1	1	34	34	34	35	37	38	38	13	16	16	16	12	12	12
4	Kadus	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	32	32	32	30	32	30	30	5	9	9	9	9	9	9
	Jumlah I	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**80**	**80**	**80**	**85**	**85**	**78**	**78**	**30**	**30**	**30**	**28**	**28**	**27**	**27**
II	**Kec. Kuta Alam**																												
1	Gampong	3	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	4	3	6	5	6	5	5	5	5	5	5	5
2	Sekretaris Desa	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	5	7	6	4	4	4	4	4	4	4
3	Kaur	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	38	38	38	41	41	41	41	8	10	10	13	13	13	13
4	Kadus	3	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	41	41	41	41	41	41	41	7	17	17	17	17	17	17
	Jumlah II	**3**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**90**	**90**	**90**	**92**	**93**	**94**	**94**	**24**	**36**	**36**	**39**	**39**	**39**	**39**
III	**Kec. Meuraxa**																												
1	Gampong	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	9	9	9	10	10	10	10	6	6	6	5	5	5	5
2	Sekretaris Desa	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	9	9	6	6	6	6	6	6	6
3	Kaur	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	31	31	31	30	30	21	21	21	21	21	14	14
4	Kadus	8	8	8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4	40	40	40	40	41	40	40	10	10	10	10	10	8	8
	Jumlah III	**9**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**110**	**110**	**110**	**111**	**112**	**109**	**109**	**43**	**43**	**43**	**42**	**42**	**34**	**34**
IV	**Kec. Syiah Kuala**																												
1	Gampong	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	6	6
2	Sekretaris Desa	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6
3	Kaur	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	18	18	18	17	5	23	23	20	20	20	20	20	21	21
4	Kadus	7	5	5	5	5	8	8	3	3	3	3	3	3	3	12	12	12	12	12	13	13	18	18	18	18	18	18	18
	Jumlah IV	**5**	**6**	**6**	**6**	**6**	**10**	**10**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**39**	**39**	**39**	**38**	**32**	**44**	**44**	**49**	**49**	**49**	**49**	**49**	**51**	**51**
V	**Kec. Lueng Bata**																												
1	Gampong	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7	7	3	3	3	3	3	3	3
2	Sekretaris Desa	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	7	7	3	3	3	3	3	3	3
3	Kaur	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	36	36	35	33	30	6	9	9	9	9	12	12
4	Kadus	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	30	31	31	31	3	3	3	3	3	4	4
	Jumlah V	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79**	**79**	**79**	**79**	**79**	**78**	**75**	**15**	**18**	**18**	**18**	**18**	**22**	**22**
VI	**Kec. Meraxa**																												
1	Gampong	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
2	Sekretaris Desa	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
3	Kaur	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	16	16	16	15	14	14	12	13	13	13	11	11	9	9

No.	KECAMATAN	PAUD							TK/RA							SD/MI							Diploma/Sarjana						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
6	Kadus	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	30	31	31	31	31	30	29	5	4	4	4	4	3	3
	Jumlah VI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	**47**	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**	**45**	**23**	**22**	**22**	**18**	**18**	**16**	**15**
VII	**Kec. Banda Raya**																												
1	Kadus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	7	7	7	8	7	6	3	3	3	3	2	3	3
2	Sekretaris Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	4	4	5	2	2	2	2	2	2	2
3	Kaur	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	33	33	33	33	33	32	33	15	15	15	15	15	14	14
4	Kadus	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	29	29	29	29	29	29	29	10	10	10	10	10	9	9
	Jumlah VII	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**6**	**6**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**72**	**73**	**30**	**30**	**30**	**30**	**29**	**28**	**28**
VIII	**Kec. Jaya Baru**																												
1	Kadus	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	1	1	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4
2	Sekretaris Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	6	6	6	6	4	4	1	1	1	1	1	1	1
3	Kaur	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	2	2	32	32	32	32	32	30	31	7	7	7	7	7	6	6
4	Kadus	2	2	2	2	2	2	2	9	9	9	9	9	9	9	28	28	28	28	28	21	21	3	3	3	3	3	4	4
	Jumlah VIII	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**13**	**13**	**69**	**69**	**69**	**69**	**69**	**59**	**60**	**14**	**14**	**14**	**14**	**15**	**15**	**15**
IX	**Kec. Ulee Kareng**																												
1	Kadus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3
2	Sekretaris Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3
3	Kaur	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	29	29	29	32	29	27	27	16	16	16	16	16	17	17
4	Kadus	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	19	19	19	19	19	18	18	6	6	6	6	6	6	6
	Jumlah IX	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**58**	**58**	**58**	**62**	**59**	**55**	**55**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	**29**	**29**
	Jumlah TOTAL	**16**	**15**	**16**	**16**	**16**	**22**	**20**	**91**	**91**	**91**	**91**	**92**	**91**	**91**	**602**	**603**	**603**	**640**	**650**	**633**	**629**	**234**	**263**	**263**	**258**	**265**	**288**	**289**

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh

Tingkat Pendidikan aparatur gampong dalam Kota Banda Aceh didominasi oleh tingkatan SMA. Pada tahun 2013 tingkat pendidikan aparatur gampong secara persentase adalah SD 2,09 persen, SMP 5,32 persen, SMA 65,66 persen dan Diploma/S1 sebesar 29,93 persen.

2.3.1.21 Komunikasi dan Informasi

Dari Tabel 2.119 terlihat bahwa pada tahun 2007 jaringan telepon seluler terdapat 32 BTS, namun seiring meningkatnya pemakaian telepon seluler maka para pengusaha yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi (provider) menambah BTS nya sehingga pada tahun 2014 telah berjumlah 119 BTS.

Tabel 2.126
Jaringan Komunikasi Kota Banda Aceh Tahun 2007-2014

No	Uraian	2007	2011	2014
1	Jumlah jaringan telepon genggam	32	70	119
2	Jumlah jaringan telepon stasioner	Tidak terdaftar		
3	Total jaringan Komunikasi (1+2)	32	70	119

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh.

Dalam rangka pemberian layanan informasi publik, Bidang Kominfo Kota Banda Aceh pada awal tahun 2008 telah membangun 1 (satu) unit Media Center berbasis IT (Information Technology) dengan kapasitas yang sangat terbatas. Untuk pengembangannya maka pada tahun 2010 telah diupayakan penguatan infrastruktur IT nya yaitu dengan bantuan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) 2010. Saat ini telah tersedia 12 unit komputer yang ditempatkan di ruangan khusus yang dinamakan INTERNET ROOM dengan jaringan internet yang terkoneksi ke Dishubkominfo Aceh (Gedung eks. BPDE NAD).

Dalam rangka meningkatkan informasi dan komunikasi Bidang Kominfo Kota Banda Aceh akan melakukan langkah-langkah strategis. Pertama, memperluas jaringan informasi sebagai upaya publikasi informasi publik yaitu dengan melakukan kerjasama penyebarluasan informasi publik yang dituangkan dalam MoU dengan 3 (tiga) SKPD (

Disdukcapil, Dinkes dan Disperindagkop) dan lembaga lain. Kedua, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, menyangkut pemasukan jaringan telepon kabel ke terminal penumpang. Ketiga, peningkatan SDM bidang TIK (teknologi informasi dan komunikasi) melalui pelatihan bagi pegawai.

Untuk penyampaian informasi dan komunikasi secara cepat, tepat dan akurat kepada publik Pemerintah Kota Banda Aceh telah menjalin hubungan kerja sama dengan media massa lokal dan membina warnetyang beroperasi dalam Kota Banda Aceh. Rasio wartel/warnet disajikan dalam Tabel 2.120.

Tabel 2.127
Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Tahun 2007-2014

No	Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Penduduk	219.659	217.918	212.241	223.446	228.562	238784	249282	267.340
2	Jumlah Wartel	12	7	4	2	0	0	0	0
3	Jumlah warnet	48	53	62	112	68	77	89	40
4	Rasio wartel	0,05	0,055	0,018	0,008	0	0	0	0
5	Rasio warnet	0.021	0,024	0,029	0,05	0,03	0.032	0.035	0.014

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

Pada tahun 2007 jumlah Wartel di Kota Banda Aceh sebanyak 12 unit usaha, namun seiring dengan kemajuan dan perkembangan TIK maka pengusaha jasa wartel mulai berkurang karena masyarakat telah beralih menggunakan telepon seluler, sehingga kondisi saat ini usaha di bidang jasa telekomunikasi (wartel) sudah tidak beroperasi lagi. Demikian juga halnya dengan pengelola jasa warnet, di mana pada tahun 2007 hanya berjumlah 48 unit usaha, namun pada Tahun 2014 menurun menjadi 40 unit.

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita

rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain. Semakin banyak jenis surat kabar terbitan nasional/lokal di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media cetak sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Jumlah surat kabar terbitan nasional yang masuk ke Kota Banda Aceh setiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2007 hanya 2 (dua) jenis surat kabar dan pada tahun 2014 telah mencapai 10 (sepuluh) jenis surat kabar. Sementara surat kabar terbitan lokal pada Tahun 2014 berjumlah 6 (enam) jenis. Adapun jenis dan jumlah surat kabar nasional/lokal di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.128
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2014

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	2	3	5	7	7	10	10	10
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan local	5	5	4	4	3	10	10	6
3	Total jenis surat kabar (1+2)	7	8	9	11	10	20	20	16

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Target SPM yang ditetapkan sebesar 100% dalam bidang penyiaran Radio/TV local telah berhasil dicapai oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Pertumbuhan penyiaran radio lokal di Kota Banda Aceh pada tahun 2007 hanya berjumlah 5 (lima) penyiaran. Pada tahun 2014 bertambah menjadi 17 penyiaran. Penyiaran radio nasional dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 meningkat menjadi 3 (tiga). Pada

tahun 2009 terdapat 1 (satu) stasiun televisi lokal yang telah mulai melakukan penyiaran yaitu Televisi Aceh. Pada tahun 2014 bertambah menjadi 3 (tiga) stasiun yaitu Televisi Aceh, Kuta Raja TV dan Kompas TV. Penyiaran televisi nasional pada tahun 2007 hanya 2 (dua) penyiaran dan pada tahun 2014 bertambah menjadi 10 (sepuluh) penyiaran.

Tabel 2.129
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal di Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2014

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah penyiaran radio lokal	5	7	11	13	18	20	19	17
2	Jumlah penyiaran radio nasional	1	1	1	1	1	1	3	3
3	Jumlah penyiaran TV lokal	0	0	1	1	2	2	2	3
4	Jumlah penyiaran TV nasional	2	2	4	6	5	6	9	10

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

2.3.1.21.1 Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional

Tabel 2.130
Pelaksanaan Diseminasi Inf. & Pendistribusian Inf Nasional

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Target	Ket
1	Media massa	12	12	12	12	12	39	10	12	12/thn	sesuai
2	Media online (Website)	-	48	55	60	76	85	340	140	365/thn	Belum tercapai
3	Media tradisional petunjuk rakyat	2	2	1	1	-	1	-	-	12/thn	Belum tercapai
4	Media interpersona	3	3	2	2	2	2	2	10	12/thn	Belum tercapai
5	Media luar ruang	12	12	12	12	12	12	12	12	12/thn	sesuai

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

2.3.1.21.2 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Gamping (KIG) di Tingkat Kecamatan (%)

Tabel 2.131
Pengembangan & Pemberdayaan KIG (Kelompok Informasi Gampong) Rasio Jumlah KIG di Tingkat Kecamatan

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah KIG	9	6	3	3	3	3	5	9
2	Rasio KIG	100	67	33	33	33	33	55	100

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh

2.3.1.22 Perpustakaan

2.3.1.22.1 Jumlah Perpustakaan

Jumlah perpustakaan baik milik pemerintah daerah maupun lainnya pada tahun 2007 sebanyak 13 perpustakaan.Kemudian adanya peningkatan hingga tahun 2011 menjadi 49 perpustakaan (pemda+non pemda). Adapun terbentuknya perpustakaan tersebut tidak terlepas dari bantuan baik perpustakaan nasional maupun bantuan dari donatur asing. Akan tetapi, jumlah perpustakaan yang ada saat ini belum memenuhi target seperti yang diharapkan, karena keberadaan perpustakaan digampong belum seluruhnya merata. Oleh karena itu diharapkan di setiap gampong mempunyai perpustakaan yang sesuai dengan standarisasi perpustakaan gampong.

Tabel 2.132
Jumlah Perpustakaan Tahun 2007-2013
Kota Banda Aceh

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	11	17	25	31	34	37	41
2	Jumlah Perpustakaan milik non pemda	1	2	3	4	5	-	-
3	Total Perpustakaan (1+2)	**13**	**23**	**34**	**43**	**49**	**37**	**41**

Sumber: Kantor Perpustakaan dan arsip Kota Banda Aceh

- – tahun 2012-2013 tak ada data

Saat ini, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Banda Aceh memiliki satu buah *gedung* yang khusus melayani bidang perpustakaan, yaitu perpustakaan yang berlokasi di Taman Sari Banda Aceh. Adapun kendala saat ini, yaitu gedung pustaka yang sudah tersedia perlu dibenahi dan diperhatikan guna meningkatkan kenyamanan pengunjung dan koleksi perpustakaan yang masih kurang memadai seperti koleksi buku perpustakaan (translasi) alih aksara (tranliterasi) dan tidak tersedianya SDM yang profesional.

Hingga saat ini, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Banda Aceh belum memiliki gedung yang khusus untuk penyimpanan dan pemeliharaan arsip- arsip yang kian bertambah dari hari ke hari. Pelaksanaan, penyimpanan dan pemeliharaan Kearsipan saat ini masih berbaur dengan pelaksanaan perpustakaan.

Mulai tahun 2007 sampai saat ini telah tersedia tiga unit mobil perpustakaan keliling. Adapun mobil-mobil tersebut diperoleh dari bantuan Pemerintah Kota Banda Aceh, SIKIB dan bantuan Masyarakat Kota Augsburg Jerman. Adapun kendala yang dihadapi saat ini adalah, kurangnya koleksi buku pada mobil pustaka keliing, schingga para pembaca mulai mulai merasa jenuh.

2.3.1.22.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Tabel 2.133
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2013

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	850	900	1100	1200	1350	1665	1767
2	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	475	489	801	1320	1705	-	-
3	Total pengunjung Perpustakaan (1+2)	**1351**	**1432**	**2014**	**4822**	**6061**	**1665**	**1767**

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Banda Aceh
= tahun 2012 – 2013 tdk ada data

Grafik 2.26
Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Perpustakaan keliling Per tahun (org) di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

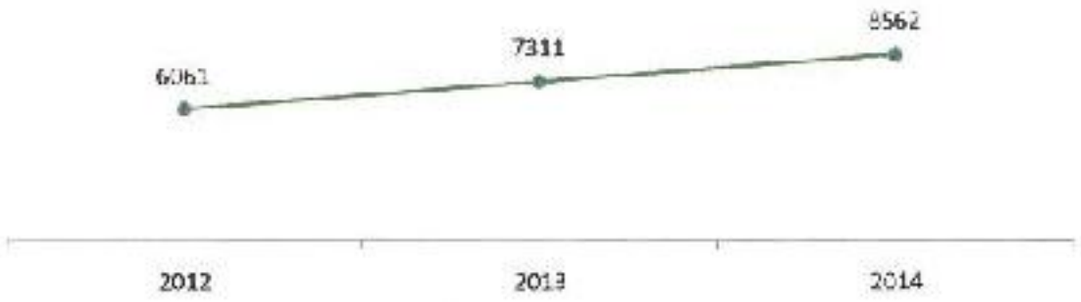

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Banda Aceh

2.3.1.22.3 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Grafik 2.27
Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

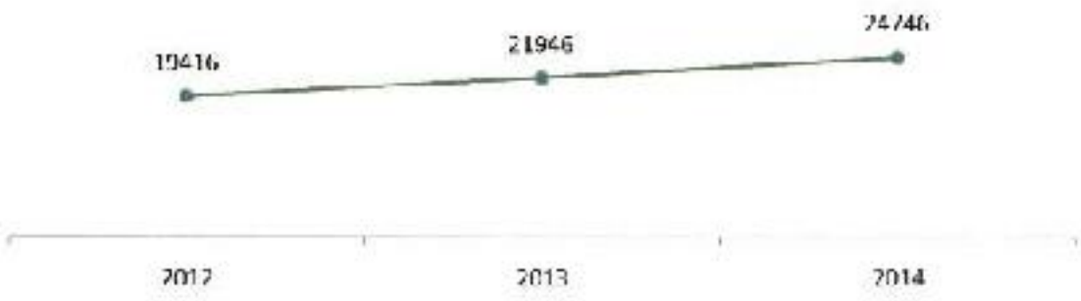

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Banda Aceh

2.3.1.23 Pertanian

2.3.1.23.1 Cakupan Bina Kelompok Petani/Ternak

Kelompok petani/ternak yang diberikan pembinaan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh adalah 62% dari total 167 jumlah kelompok petani/ternak di Kota Banda Aceh. Pembinaan yang diberikan meliputi pemanfaatan lahan perkarangan untuk pengembangan pangan dengan memberikan bantuan benih sayur-sayuran, pupuk NPK dan polybag serta alat-alat pertanian. Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan gizi keluarga secara mandiri dan berlungsinya lahan perkarangan secara optimal sehingga akan meningkatkan hasil produksi dan pendapatan

masyarakat. Selain itu juga dilakukan penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan, dan pendistribusian bibit ternak kepada kelompok masyarakat. Berikut ini adalah Grafik 2.... Persentase Cakupan Bina Kelompok Petani/Ternak.

Grafik 2.28
Persentase Cakupan Bina Kelompok Petani/Ternak.

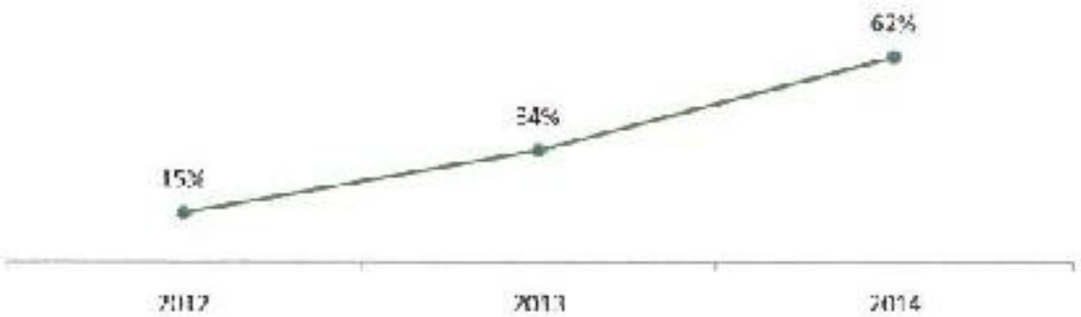

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Banda Aceh

Kondisi lahan yang terbatas, menyebabkan sektor pertanian bukanlah sektor prioritas di Kota Banda Aceh. Berikut adalah permasalahan yang dihadapi oleh petani di Kota Banda Aceh :

- Rendahnya pengetahuan pelaku usaha di bidang pertanian untuk meningkatkan kualitas produk usaha mereka.
- Sulitnya memperoleh bahan baku untuk kemasan yang berkualitas.

2.3.1.24 Pariwisata

2.3.1.24.1 Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara (org)

Tabel 2.134
Data Arus Kunjungan Wisatawan

No	KunjunganWisatawan	Manca Negara	Nusantara	Jumlah
1	Tahun 2007	9.940	82.743	92.683
2	Tahun 2008	6.960	129.657	136.617
3	Tahun 2009	4.820	157.891	162.711
4	Tahun 2010	4.068	138.305	142.370

5	Tahun 2011	4.264	159.439	163.703
6	Tahun 2012	4.319	172.646	176.965
7	Tahun 2013	5.684	238.348	163.703
Total				**1.119.081**

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh

Grafik 2.29
Kunjungan Wisatawan berdasarkan hunian hotel Tahun 2007 - 2013

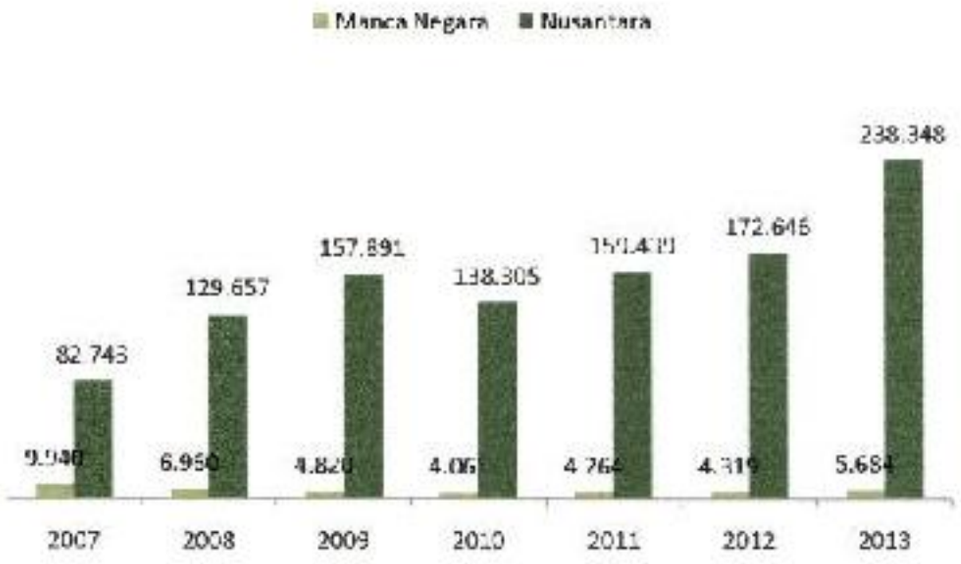

Jumlah arus kunjungan wisatawan pertahun di peroleh dari data hunian tamu Hotel/wisma/Losmen yang ada dalam wilayah Kota Banda Aceh. Kunjungan wisatawan nusantara mengalami peningkatan dari tahun 2007 sampai dengan 2013.

Jumlah kunjungan wisatawan manca negara tahun 2007 sebanyak 9.940 orang sangat tinggi dibanding tahun-tahun setelahnya. Hal ini terjadi karena selama masa 2007 sampai dengan 2009 di Kota Banda Aceh masih dalam tahap rehab/Rekon Pasca Tsunami tahun 2004 lalu. Banyak terdapat pekerja asing baik di NGO maupun organisasi pemerintah lainnya yang bekerja di wilayah Kota Banda Aceh dan Propinsi Aceh. Telah terjadi peningkatan kunjungan wisatawan asing dari tahun 2010 sampai 2013. Wisatawan asing yang berkujung sebagian besar berasal dari wilnyah ASEAN, ini berarti Banda Aceh telah menjadi destinasi wisata dunia.

Data tersebut hanya berdasarkan angka hunian namun banyak wisatawan yang berkunjung ke Banda Aceh yang tidak menginap di

hotel ada juga menginap di tempat keluarga, seperti pada masa libur anak-anak sekolah.Kemudian juga ada yang tidak menginap, untuk tempat yang akan ke sabang, mereka memanfaatkan waktu satu hari untuk city tour di Banda Aceh sebelum berangkat ke Sabang, diperkirakan wisatawan yang tidak menginap sekitar 40 persen dari wisatawan yang menginap di hotel.

2.3.1.25 Kelautan dan Perikanan

2.3.1.25.1 Produksi Perikanan

Selain Kota perdagangan, Kota Banda Aceh juga punya potensi perikanan yang cukup besar. Kawasan Ulee Lheue, Alue Naga dan Meuraxa, punya potensi besar untuk lebih dikembangkan dalam memproduksi ikan budidaya. Selain itu Kota Banda Aceh dikenal sebagai salah satu sentra penghasil ikan tangkap terbesar di Aceh, dengan dukungan pelabuhan perikanan samudera (PPS) yang terdapat di Lampulo, maka potensi pemrosesan dan cold storage ikan menjadi usaha yang paling menarik. Dengan tambahan pemrosesan hasil perikanan tangkap dan tersedianya cold storage yang memadai, menjadi salah satu penunjang bisnis perikanan sehingga berpengaruh terhadap gairah sektor perikanan khususnya perikanan tangkap yang dengan sendirinya meningkatkan produksi.

Produksi perikanan Kota Banda Aceh tahun 2014 mencapai 7321 ton, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, yakni 7083,93 ton. Peningkatan produksi perikanan sangat berpengaruh terhadap pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan, faktor utama peningkatan produksi perikanan disebabkan semakin banyaknya nelayan dan pembudidaya ikan yang memanfaatkan teknologi dalam operasional penangkapan ikan maupun pembudidayaan ikan, selain faktor tersebut pembinaan dan pendampingan yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui SKPD terkait menjadi motor penggerak peningkatan produksi perikanan. Produksi perikanan di Kota Banda Aceh memiliki trend yang positif naik, artinya bahwa produksi perikanan selalu meningkat setiap tahunnya, sebagaimana yang ditampilkan pada Grafik

2... Produksi Perikanan di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 berikut ini: .

Grafik 2.30
Produksi Perikanan di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 (%)

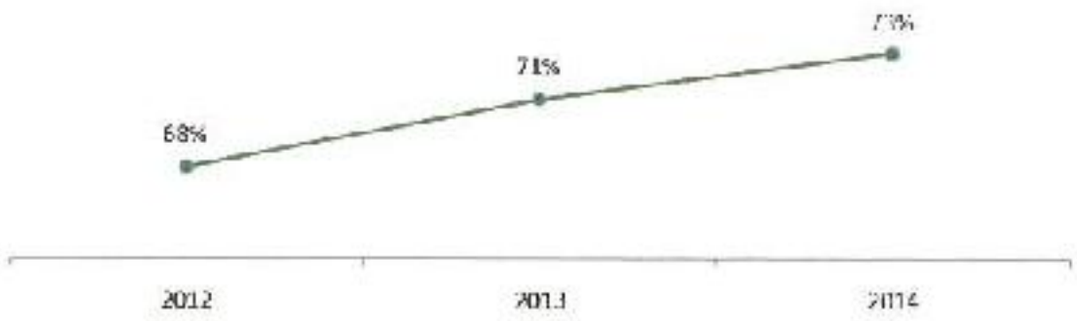

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian

2.3.1.25.2 Cakupan Bina Kelompok Perikanan

Secara geografis letak wilayah Kota Banda Aceh dikelilingi oleh lautan dan dengan luas wilayah yang kecil hanya sebesar ± 61,36 km², mayoritas peruntukan wilayahnya lebih diarahkan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang merupakan ciri wilayah perkotaan.

Kondisi geografis yang kurang mendukung tersebut membuat sektor pertanian dan perkebunan tidak menjadi sektor unggulan. Pengembangan lahan pertanian lebih diarahkan pada pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan disetiap gampong dengan tujuan pemenuhan gizi keluarga secara mandiri dan berfungsinya lahan perkarangan secara optimal sehingga akan menambah pendapatan masyakat. Luas area yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan ± 106 Ha, yang mayoritas ditanami sayur-sayuran dan buah-buahan.

Melilik dari kondisi geografis tersebut potensi kelautan menjadi sektor unggulan terutama sektor perikanan tangkap dan budidaya perikanan. Sektor perikanan tersebut merupakan salah satu sektor penyerap tenaga kerja yang cukup besar yang mencapai 1.547 orang yang terdiri dari 960 nelayan dan 587 petani perikanan.

Cakupan bina kelompok nelayan digunakan untuk melihat persentase jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemerintah terhadap jumlah kelompok nelayan. Pembinaan dan pengembangan kelompok perikanan bertujuan untuk memberikan dukungan agro input bagi kelompok pembudidaya ikan sehingga terbina dan berkembangnya usaha budidaya ikan dan meningkatkan produktifitas pembudidaya ikan di Kota Banda Aceh. Selain itu pembinaan yang dilakukan melalui pemberian pelatihan dan bantuan sarana dan prasarana penangkapan dan pemasaran hasil perikanan. Berikut adalah Grafik 2... Cakupan Bina Kelompok Perikanan di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 (%)

Grafik 2.31
Cakupan Bina Kelompok Perikanan di Kota Banda Aceh
Tahun 2012-2014 (%)

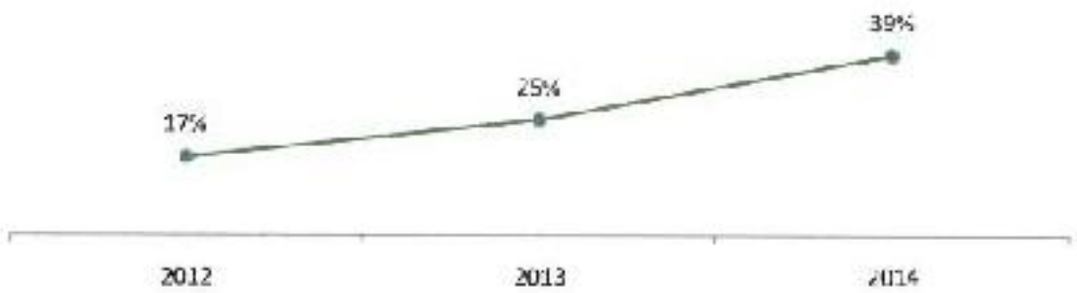

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian

Secara umum permasalahan yang dialami para nelayan dikota Banda Aceh terdiri dari dua bagian besar, yaitu permasalahan internal dan permasalahan eksternal. Permasalahan internal berasal dari ruang lingkup perikanan tangkap sendiri, Sedangkan permasalahan eksternal berasal dari kebijakan pemerintah, atau sektor di luar perikanan tangkap yang terkait.

Permasalahan internal yang dihadapi para nelayan diKota Banda Aceh umumnya adalah:

1. Terjadi ketidakseimbangan dalam pemanfaatan Sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan yang diakibatkan oleh Kegiatan Ofer fishing oleh armada yang berukuran besar

2. Lemahnya usaha perikanan tangkap skala kecil akibat minimnya kemampuan untuk meningkatkan produktifitas. Kemampuan yang rendah disebabkan penguasaan teknologi, keterbatasan akses permodalan dan akses pasar

Terapan teknologi merupakan kendala utama yang dihadapi oleh nelayan Pesisir dikota Banda Aceh, secara umum nelayan kita masih melaksanakan penangkapan ikan dengan cara tradisional belum memanfaatkan tehnologi yang ada, seperti menggunakan alat bantu Fish Finder, Radar, Kompas dan Radio Komunikasi.

Peralatan teknologi ini sangat dibutuhkan oleh nelayan ketika kondisi alam sedang ekstrem (musim Barat), bagi nelayan yang telah memiliki alat bantu teknologi maka mereka dapat melaut walaupun kondisi alam sedang ekstrim, namun bagi nelayan yang belum memanfaatkan teknologi yang ada maka mereka tidak dapat melaksanakan kegiatan penangkapan ikan.

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian telah memberikan beberapa jenis alat bantu penangkapan Ikan kepada nelayan sebagai bahan percontohan , dengan harapan agar seluruh nelayan di Kota Banda Aceh akan menggunakan terapan teknologi dalam usaha penagkapan ikan sehingga mereka dapat beroperasional dalam berbagai musim.

Sedangkan permasalahan eksternal yang umumnya mereka hadapi adalah kenaikan harga BBM, dimana dapat menyebabkan beban biaya operasional penangkapan bagi nelayan kecil bertambah.

2.3.1.26 Perdagangan

2.3.1.26.1 Jumlah Pasar yang Sudah Berfungsi Secara Optimal

Perkembangan pasar di Kota Banda Aceh pada tahun 2013 berjumlah 13 unit yang tersebar di seluruh Kota Banda Aceh tetapi sentra utama perdagangan masih berada di Pasar Aceh dan Peunayong sehingga pada wilayah tersebut menumpuknya para pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Kota Banda Aceh, dari 13 pasar tersebut ada beberapa pasar yang perlu perhatian pemerintah untuk melakukan perbaikan sehingga dengan berfungsinya pasar secara optimal maka keberadaan pedagang kaki lima dapat teratasi dengan baik, yang dapat memberikan kenyamanan bagi para pembeli di Kota Banda Aceh. Untuk lebih jelasnya perkembangan pasar dapat dilihat padaTabel 2.93.

Tabel 2.135
Jumlah dan Kondisi Pasar Kota Banda Aceh Tahun 2007-2013

No	NamaPasar	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013	
		Jumlah	Kondisi	Jumlah	Kondisi	Jumlah	Kondisi	Jumlah	Kondisi	Jumlah	Kondisi	Jumlah	Kondisi	Jumlah	Kondisi
1	Pasar Aceh	1	baik	1	baik	1	baik	1	baik	1	Baik	1	baik	1	baik
2	Pasar Kp. Baru	1	baik	1	baik	1	baik	1	baik	1	Baik	1	baik	1	baik
3	Pasar Peuniti	1	Rekbrt	1	Rekbrt	1	Rekbrt	1	Rekbrt	1	Rekbrt	1	baik	1	baik
4	Pasar Ikan Peunayong	1	baik	1	baik	1	baik	1	baik	1	Baik	1	baik	1	baik
5	Pasar Daging Peunayong	1	baik	1	baik	1	baik	1	baik	1	Baik	1	baik	1	baik
6	Pasar Bumbu Peunayong	1	baik	1	baik	1	baik	1	baik	1	Baik	1	baik	1	Baik
7	Pasar Nasabe Peunayong	1	baik	1	baik	1	baik	1	baik	1	Baik	1	baik	1	baik
8	Pasar Sayur dan Buah Peunayong	1	baik	1	baik	1	baik	1	baik	1	Baik	1	baik	1	baik
9	Pasar Rex Peunayong	1	baik	1	baik	1	baik	1	baik	1	Baik	1	baik	1	baik
10	Pasar Batoh	-	-	-	-	-	-	1	baik	1	Baik	1	baik	1	baik
11	Pasar Unggas Peunayong	1	baik	1	baik	1	baik	1	baik	1	Baik	1	baik	1	baik
12	Pasar Ulee Kareng	-	-	-	-	-	-	1	baik	1	Baik	1	baik	1	baik
13	Pasar Setui	1	Krgbaik	1	Krgbaik	1	Krgbaik	1	Krgbaik	1	Krgbaik	1	Krgbaik	1	Krg baik

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kota Banda Aceh Tahun 2014

Pasar di Kota Banda Aceh belum seluruhnya berfungsi secara optimal. Pasar yang telah berfungsi secara optimal sebanyak 11 unit, antara lain : Pasar Atjeh, Pasar Gampong Baru, Pasar Seutui, Pasar Kartini, Pasar Peuniti, Pasar Ikan, Pasar Daging, Pasar Bumbu, Pasar Unggas, Pasar Nasabe, Pasar Rex, Pasar Ulee Kareng, Pasar Newton, dan Pasar Pusat Kuliner dan Souvenir. Berikut adalah Grafik 2... Persentase Pasar yang sudah berfungsi secara optimal di Kota Banda aceh (%)

Grafik 2.32
Persentase Pasar yang sudah berfungsi secara optimal di Kota Banda Aceh (%)

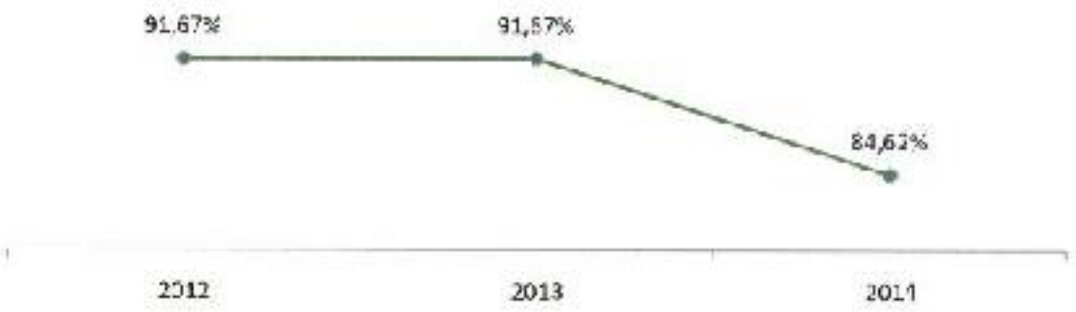

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banda Aceh.

Dari grafik diatas dapat terlihat perbandingan jumlah pasar yang berfungsi optimal tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 jumlahnya menurun, hal ini karena dilakukan renovasi bangunan pasar, sehingga aktifitas pasar tersebut dipindahkan sementara.

Khusus untuk masalah Pedagang Kaki Lima (PKL), Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan penataan PKL pada 13 pasar yang telah disiapkan oleh pemerintah kota Banda Aceh, namun pada pelaksanaannya masih ditemukan beberapa pedagang yang berjualan ditempat-tempat terlarang seperti dipinggir jalan, didepan pertokoan, diteras pasar serta ditempat keramaian lainnya, PKL masih bersikap antipati terhadap upaya-upaya penataan melalui penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH kota Banda Aceh, dan sering kali melakukan perlawanan.

Berbagai solusi penataan yang dilaksanakan oleh pemerintah juga belum dapat mencapai keberhasilan dalam menata PKL, untuk itu Pemerintah Kota Banda Aceh harus mengambil beberapa kebijakan

kebijakan baik menetukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penataan PKL dalam kota seperti mempersiapkan lokasi tempat berjualan para PKL sehingga nantinya Pemerintah Kota Banda Aceh akan lebih mudah dalam melakukan pengaturan/penataan PKL ditempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

Roda perekonomian di Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun tetap berjalan sebagaimana mestinya namun dipandang belum optimal dalam menata persaingan antar pasar, pusat perbelanjaan dan toko modern. Dengan semakin besarnya aktivitas pasar, maka Pemerintah Kota Banda Aceh perlu menetapkan kebijakan yang lebih mengedepankan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha mikro. Selain itu untuk melaksanakan penataan pasar dan toko modern tersebut Pemerintah Kota Banda Aceh juga harus berupaya menjaga dan memelihara konsistensi dan koordinasi semua pihak guna melakukan penataan dan pembinaan pasar dan toko swalayan.

2.3.1.27 Perindustrian

2.3.1.27.1 Jumlah UKM yang mendapatkan bantuan perbankan

Pembangunan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Perkembangan dan pertumbuhan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi di Kota Banda Aceh sangat signifikan, dan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah terjadi peningkatan dari tahun 2009, 5.324 menjadi 5,937 pada tahun 2013, sebagaimana yang terlihat pada Grafik 2 .... Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh Tahun 2009-2013 berikut ini.

Grafik 2.33
Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh
Tahun 2009-2013



	2009	2010	2011	2012	2013
Perdagangan	1504	1370	1304	1314	1353
Pertanian	40	42	40	41	43
Perikanan & Kelautan	18	18	18	18	20
Industri	1913	1959	2190	2430	2454
Aneka Jasa	2049	2092	2049	2058	2063

Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya mendorong keberadaan dan perkembangan UKM melalui berbagai kebijakan dan program baik secara stimultan dan lintas sektoral, mengingat keberadaan UKM adalah merupakan salah satu pendorong pereknomian Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh memfasilitasi adanya akses perbankan dan lembaga penjaminan kredit daerah untuk mengatasi permasalahan penguatan modal bagi para pelaku UKM. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Adanya stimulan melalui bantuan pembiayaan diharapkan UKM dapat mengembangkan produk unggulan yang berdaya saing, sesuai dengan program pemerintah melalui pendekatan *One Village One Product* (OVOP).

Grafik 2.34
Jumlah UKM Yang Mendapatkan Bantuan Perbankan 2012-2015



Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banda Aceh

Melalui kerjasama yang dijalin antara Pemerintah kota Banda Aceh dengan perbankan yaitu Bank Aceh dan Bank Bukopin, tahun 2014 telah diberikan bantuan permodalan kepada pelaku UKM dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bantuan diberikan kepada 16 UKM, yang bergerak diberbagai bidang usaha produktif. Peran Pemerintah Kota Banda Aceh disini adalah mendorong pihak perbankan dalam memfasilitasi permodalan kepada UKM.

Melalui bantuan tersebut diharapkan UKM dapat berkembang dan mandiri sehingga mampu meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM dalam proses pembangunan daerah, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

2.3.1.27.2 Jumlah IKM yang mampu melakukan pemasaran komoditi

Pemberdayaan IKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat IKM harus mampu menghadapai tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk danjasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai produk yang dihasilkan, utamanya agar dapat bersaing denganproduk-produk dari luar yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur.

Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan perhatian serius dalam upaya menumbuhkembangkan sekaligus memberdayakan Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai pilar ekonomi lokal. Perhatian tersebut diwujudkan dalam bentuk pembinaan melalui pelatihan kepada pelaku IKM. Pada tahun 2014 terdapat 130 IKM yang mampu melakukan pemasaran komoditi. Jumlah ini masih tergolong kecil jika dibandingkan jumlah IKM di Kota Banda Aceh yang berjumlah kurang lebih 2.127 IKM. Umumnya IKM yang telah mampu memasarkan komoditi bergerak pada produksi pengolahan ikan, dendeng sapi, kain sarung, komoditi border dan souvenir aceh dan kue tradisional.

Grafik 2.35
Jumlah IKM yang Mampu Melakukan Pemasaran Komoditi

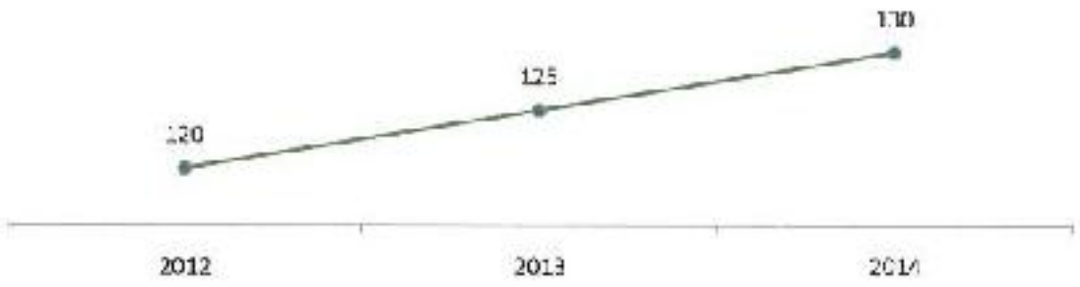

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banda Aceh

Dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan makanan dan minuman, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banda Aceh bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Aceh, Kejaksaan Aceh, Polresta Aceh dan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) masih banyak menemukan barang/produk yang tidak layak dikonsumsi oleh konsumen namun masih diperjual-belikan oleh pihak penjual. Tim pengawasan telah melakukan teguran/pembinaan langsung terhadap pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman yang tidak layak dikonsumsi serta melakukan penyitaan terhadap barang/produk kadaluarsa, juga mengingatkan para pedagang/penjual/pelaku usaha baik dalam pasar maupun di toko-toko agar tidak mencampurkan bahan kimia terhadap makanan/minuman yang diperjual belikan terhadap konsumen.

Untuk mengoptimalkan pengawasan makanan dan minuman pada toko/swalayan dalam Kota Banda Aceh perlu dilakukan pengawasan secara rutin bersama-sama dengan tim secara terus-menerus dan berkesinambungan setiap bulannya.

2.3.1.27.3 Jumlah Produk yang Menunjang Program *One Village One Product*

Pembangunan ekonomi kota berbasis kreativitas dan inovasi merupakan program Pemerintah Kota Banda Aceh. Program ini sejalan dengan pencanangan one village one product sebagai salah satu program mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Pemerintah Kota mendorong setiap gampong menghasilkan produk unggulan dengan memanfaatkan potensi yang ada di gampong masing-masing. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2007, dan kini perkembangannya semakin baik. Semua kelompok di gampong dibina dengan melibatkan lintas sektor baik pemerintah maupun swasta.

Pada Tahun 2015 Kota Banda Aceh telah memiliki 10 produk unggulan yang telah memiliki standar one village one product, antara lain :

- Pengolahan kopi
- Pengolahan ikan
- Kerajinan border
- Kue tradisional
- Batik
- Tenun
- Anyaman rotan
- Produk sabun cuci
- Produk peci border
- Produk minuman Juice Kozy

Grafik 2.36

Jumlah Produk yang menunjang Program *One Village One Product* di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

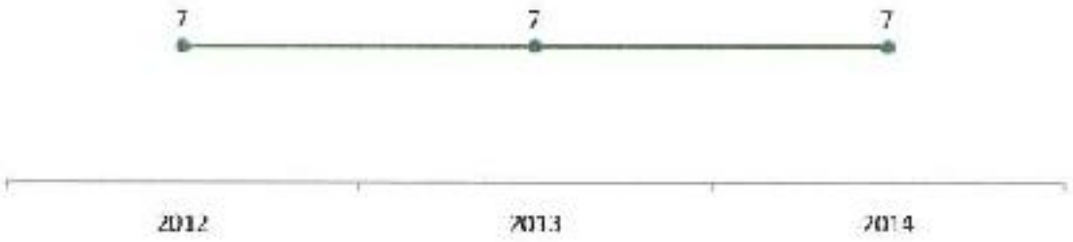

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Banda Aceh

2.3.1.28 Syari'at Islam

2.3.1.28.1 Jumlah Kelompok Aliran Sesat dan Sempalan

Urusan keagamaan merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan signifikan di Provinsi Aceh. Setelah lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh, pelaksanaan syariat islam di Aceh telah memiliki payung hukum yang kuat. UU Nomor 11 Tahun 2016 merupakan pengakuan Negara terhadap keistimewaan dan kekhususan Aceh. Pelaksanaan syariat islam meliputi ibadah, ahwal alsyakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islamyang ketentuannya diatur dalam Qanun (Peraturan Daerah).

Kota Banda Aceh memilki posisi strategis dalam pelaksanaan syariat islam, sebagai ibukota propinsi otomatis Kota Banda Aceh menjadi barometer dan sorotan terhadap penerapan syariat islam. Kota Banda Aceh yang memiliki penduduk heterogen, merupakan tempat berkumpulnya orang dengan suku, adat istiadat, budaya, dan agama berbeda, sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh negatif seperti prilaku dan aliran menyimpang.

Hasil identifikasi Tim Penegakan Syariat Islam Kota Banda Aceh pada tahun 2012 terdapat 4 aliran yang terindikasi sesat di Kota Banda Aceh. Aliran yang terindikasi sesat tersebut antara lain :

1. Aliran Millata Abraham

   Aliran Millata Abraham merupakan salah satu aliran sesat di Indonesia masuk ke Banda Aceh melalui Universitas Syiah Kuala dan menyebarkan alirannya di Kota Banda Aceh tahun 2011. Aliran ini telah difatwakan sesat oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Perkembangan Aliran Millata Abraham di Kota Banda Aceh

umumnya menyasar para generasi muda yang pengetahuan agamanya masih rendah.

2. Syiah

Syiah salah satu aliran yang terindikasi menyimpang dari islam, hal ini karena terdapat beberapa fakta utama yang bertentangan dengan ajaran islam, seperti :

- Mengkafirkan para sahabat terutama Abu Bakar, Umar, Usman dan Aisyah (istri Nabi Muhammad SAW)
- Menurut pandangan pengikut syiah imam mereka kedudukannya lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW.

3. LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) , berdasarkan keputusan MPU Aceh Nomor 04 tahun 2004 tanggal 15 Syakban 1425 H/28 September 2004 yang menyatakan aliran LDII bertentangan dengan ajaran Islam dan dilarang mengadakan kegiatan. Hal ini terkait dengan pihak LDII yang mengajarkan Quran dan Kutubusittah dalam pemahaman yang diajarkan oleh Nurhasan Alkadzdzab, yang telah dinyatakan sesat dan membahayakan aqidah pada Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005.

4. Suluk (Lampaseh) Banda Aceh

Berikut ini adalah grafik 2.. Jumlah Kelompok Aliran Sesat dan Sempalan di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

Grafik 2.37
Jumlah Kelompok Aliran Sesat dan Sempalan di Kota Banda Aceh Tahun 2012 2014



Sumber : Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh

2.3.1.28.2 Jumlah Pelanggaran Qanun Syari'at Islam

Perkembangan kota dan arus informasi yang pesat membuat pola kehidupan warga kota menjadi berubah, seperti cara pergaulan, berpakaian, dan sebagainya. Hal tersebut berimbas pada terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap Qanun Syari'at Islam.

Sebagai salah satu propinsi di Indonesia yang diberikan keistimewaan dan otonomi khusus dalampenerapan syariat islam, melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, diterbitkan payung hukum yang mengatur terhadap pelanggaran syariat islam dalam bentuk Qanun/Perda, yaitu:

1. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya
2. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian)
3. Qanun Nomor 14 Tahun 2004 tentang khalwat (mesum)

Berikut ini adalah Grafik 2... Jumlah Pelanggaran Qanun Syari'at Islam di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

Grafik 2.38
Jumlah Pelanggaran Qanun Syariat Islam di Kota Banda Aceh
Tahun 2012-2014

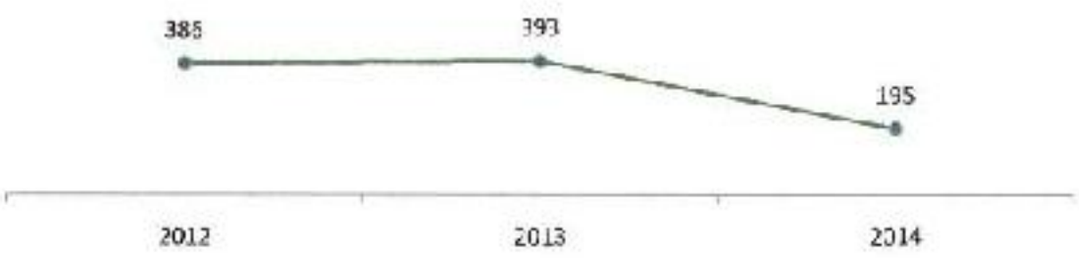

Sumber : Satpol PP & WH Kota Banda Aceh

2.3.1.28.3 Kemampuan Baca Al-Qur'an Siswa Tingkat Sekolah Menengah

Era globalisasi membawa perubahan-perubahan yang cukup drastis dalam kehidupan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai masuknya budaya asing membawa dampak yang cukup signifikan meneskup kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Sebagai pengambil dan pelaksana kebijakan, Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya membentengi pengaruh negatif yang berkembang dari efek globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat. Namun, kebijakan yang diterapkan tidak serta merta menutup diri dari modernisasi, hal ini terlihat dari sasaran Kota Banda Aceh untuk menciptakan masyarakat cerdas dalam menghadapi era globalisasi. Upaya yang dilakukan lebih diarahkan untuk menyeimbangkan iptek dan imtaq. Berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menguatkan nilai imtaq terutama bagi generasi muda yang rentan terhadap pengaruh negatif globalisasi, salah satunya adalah dengan melaksanakan kurikulum yang berbasis islami melalui kompetensi inti, yang terdiri dari aspek sikap spiritual (aspek ketuhanan) dan aspek sikap sosial. Sebagai daerah yang memiliki kekhususan terkait penerapan syariat islam, Pemerintah Kota Banda Aceh menerapkan kebijakan pendidikan diniyah yang merupakan program untuk meningkatkan pengetahuan agama bagi generasi muda guna memperkuat akidah sesuai dengan ajaran islam yang benar.

Berikut ini adalah Grafik 2...Kemampuan Baca Al-Qur'an Siswa Tingkat Sekolah Menengah Tahun 2012-2014.

Grafik 2.39
Kemampuan Baca Al-Qur'an Siswa Tingkat Sekolah Menengah
Tahun 2012-2014

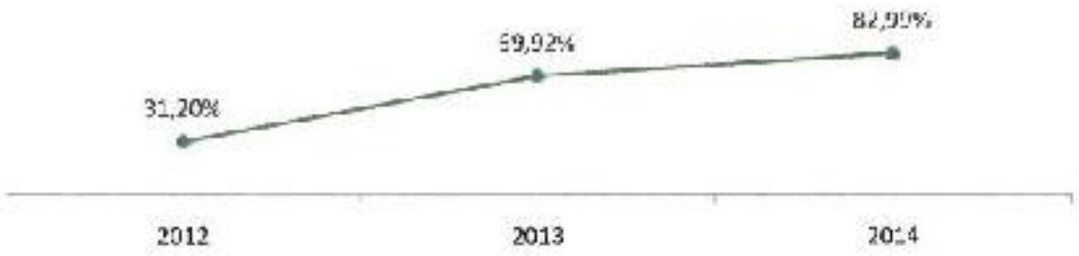

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh

Dapat dilihat dari grafik di atas, bahwa kemampuan baca Al Qur'an Siswa Tingkat Sekolah Menengah di Kota Banda Aceh terus meningkat, pencapaian target ini didukung melalui adanya persyaratan masuk sekolah menengah di Kota Banda Aceh yang harus melampirkan sertifikat diniyah bagi siswa dari lingkup sekolah Kota Banda Aceh dan adanya tes baca quran bagi siswa dari luar lingkup sekolah Kota Banda Aceh. Walaupun sudah berjalan berjalan, namun masih ada kendala dalam SDM guru Diniyah, sehingga menjadi bahan evaluasi untuk dilaksanakan program kualitas SDM guru Diniyah.

2.3.1.28.4 Kemampuan Baca Tulis Arab Jawi Siswa Sekolah

Pendidikan diniyah mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama islam baik formal, non-formal maupun informal. Para siswa diajarkan berbagai materi agama islam meliputi ilmu ketauhidan, Al-quran, budi pekerti, dan pemahaman hukum-hukum islam (fikih) serta kemampuan untuk baca tulis arab jawi.

Berikut ini adalah Grafik 2... Kemampuan Baca Tulis Arab Jawi Siswa Sekolah di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

Grafik 2.40
Kemampuan Baca Tulis Arab Jawi Siswa Sekolah di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

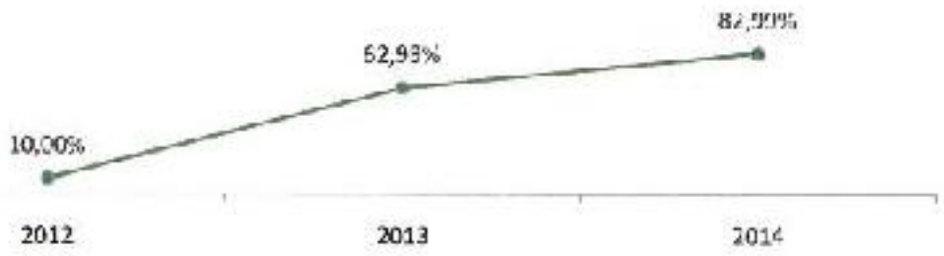

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh

2.3.1.28.5 Frekwensi Kegiatan Syiar dan Dakwah di Masyarakat

Dalam mendukung terwujudnya visi Banda Aceh sebagai model kota madani, Pemerintah Kota Banda Aceh menjadikan pemahaman dan pengamalan syariat islam sebagai prioritas pembangunan, yang diarahkan untuk mewujudkan tatanan kerja birokrasi pemerintah dan kehidupan masyarakat dalam bingkai aturan dalam syariat Islam. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah syiar dan dakwah dimasyarakat. Usaha dakwah dan syiar islam sebagai salah satu upaya sosialisasi Syariat Islam bagi seluruh warga Kota Banda Aceh. Dinamisasi dan globalisasi dunia saat ini menuntut kita agar terus menghidupkan dakwah dan syiar dalam berbagai aspek kehidupan.

berbagai kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan frekwensi kegiatan syiar dan dakwah di masyarakat, sebagai berikut :

1. Kajian Bagi Pejabat Pemko dan Masyarakat
2. Da'iyah Ramadhan
3. Dakwah Simpatik
4. Dakwah Umum Jumátan
5. Dakwah Keliling
6. Dakwah Radio
7. Safari Dakwah
8. Dakwah Gampong
9. Dakwah Publik

Berikut ini adalah Grafik 2... Frekwensi Kegiatan Syiar dan Dakwah di Masyrakat Kota Banda Aceh

Grafik 2.41
Frekwensi Kegiatan Syiar dan Dakwah di Masyrakat Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

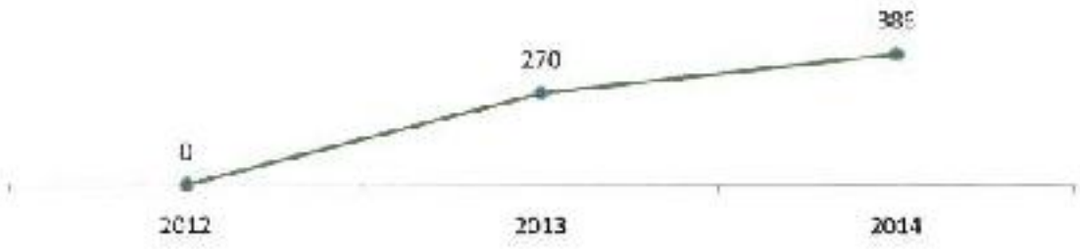

Sumber : Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh.

2.3.1.28.6 Jumlah Mesjid yang Memenuhi Standar Kebersihan dan Ketertiban

Masjid merupakan pusat peradaban Islam sejak masa dahulu. Untuk mengoptimalkan masjid sebagai pusat pembinaan umat Islam, maka Pemerintah Kota Banda Aceh, melakukan Pembinaan terhadap seluruh Masjid dalam wilayah Kota Banda Aceh. Pembinaan masjid meliputi imarah, idharah, riayah dan aspek-aspek pendukung kemakmuran masjid lainnya. Melalui pembinaan yang dilakukan, diharapkan agar terwujudnya masjid yang tertib, bersih dan perannya dapat berjalan optimal. Secara bertahap dilakukan peningkatan sarana dan prasarana mesjid yang salah satunya melalui peningkatan standar kebersihan dan ketertiban mesjid.

Krireria yang menjadi penilaian untuk mesjid yang memenuhi standar kebersihan dan ketertiban, antara lain :

1. Bidang Imarah (pelaksanaan ibadah), item yang dinilai :
   - Pelaksanaan shalat ferdhu lima waktu berjamaah
   - Tertib pelaksanaan shalat jumát
   - Tertib pelaksanaan ibadah sosial
2. Bidang Idharah
   - Tertib administrasi mesjid (diuraikan ketersediaan struktur kepengurusan mesjid)

3. Bidang Riayah
   - Pemeliharaan bangunan mesjid
   - Pemeliharaan halaman dan lingkungan mesjid

Berikut ini adalah Grafik 2... Jumlah Mesjid yang Memenuhi Standar Kebersihan dan Ketertiban di Kota Banda Aceh Tahun 2012 2014

Grafik 2.42
Jumlah Mesjid yang Memenuhi Standar Kebersihan dan Ketertiban di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

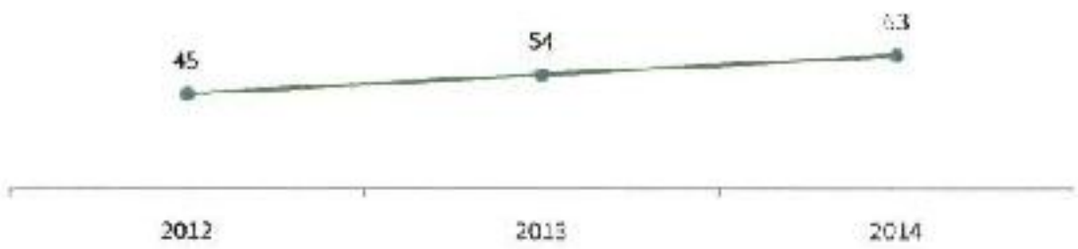

Sumber : Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh

2.3.1.28.7 Penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) (Milyar) dan Jumlah Muzzakki (org)

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat. Sebagai implementasi UU Nomor 11 Tahun 2006, dimana Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal. Lewat Qanun Kota Banda Aceh 5 Tahun 2010, dibentuk struktur organisasi lembaga keistimewaan, termasuk salah satunya struktur organisasi dan tata kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh yang dikuatkan dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010.

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga independen yang bertugas mengelola ZIS mulai dari memungut, menyimpan, dan tugas mendistribusikan harta zakat sehingga pengelolaan zakat dapat dikelola secara profesional dan terorganisir. Untuk mewujudkan manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel, selain terdapat pengurus juga dibentuk dewan pengawas melalui Peraturan

Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh..

Dalam pengelolaan zakat, Baitul Mal telah mengadopsi fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi Perencanaan, pengorganisasian, Pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Informasi pengelolaan ZIS juga dapat langsung diakses oleh masyarakat melalui http://baitulmal.bandaacehkota.go.id/. Melalui situs tersebut masyarakat dapat langsung mengawasi kinerja dan penyaluran zakat oleh Baitul Mal.

Berikut ini adalah Grafik 2... Jumlah Mesjid yang Memenuhi Standar Kebersihan dan Ketertiban di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

Grafik 2.43
Penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) (Milyar) dan Jumlah Muzzakki (org) di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

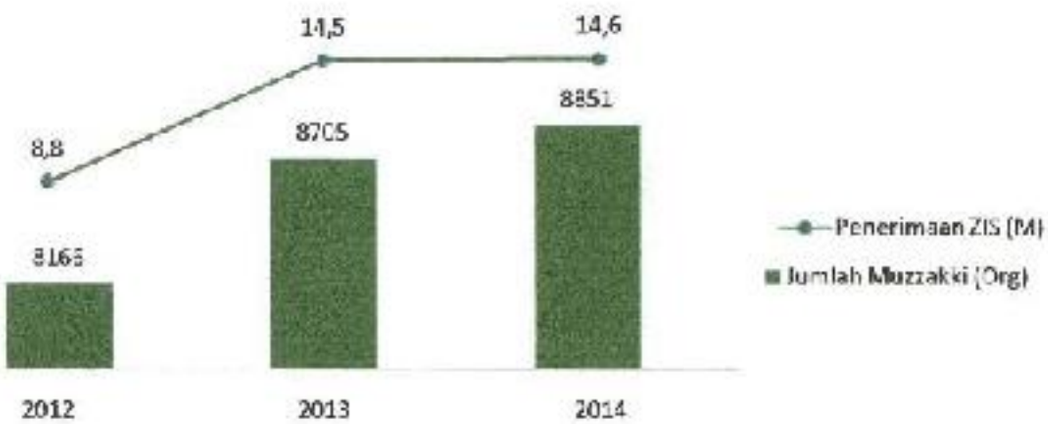

Sumber : Baitul Mal Kota Banda Aceh

Khusus untuk wilayah Kota Banda Aceh belum pernah dilakukan survey zakat baik oleh Baitul Mal maupun pihak lain, namun untuk keseluruhan Provinsi Aceh, Baitul Mal Aceh pernah melakukan survey pada tahun 2015 bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan UIN Ar-Raniry dengan membagi delapan Zona Ekonomi Aceh versi BAPPEDA Aceh.

Menurut hasil survey tersebut maka untuk zona satu atau zona pusat yang tergabung antara Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Kota Sabang potensi zakat mencapai 64 M, dengan rincian sebagai berikut :

1. Banda Aceh 23 Milyar
2. Aceh Besar 21 Milyar
3. Sabang 10 Milyar

Baitul Mal Kota Banda Aceh juga menyadari bahwa di Banda Aceh juga ada Baitul Mal Aceh (Propinsi) yang juga menggarap zakat sektor swasta yang ada di Kota Banda Aceh, disamping itu Baitul Mal Kota Banda Aceh juga harus berpacu dengan lembaga-lembaga zakat swasta nasional dan local baik yang legal maupun illegal yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha lokal. Beberapa kampus ternama seperti UIN,UNSYIAH dan Muhammadiyah juga mengelola zakat sendiri. Dan persoalan paling klasik, yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh masih harus melancarkan perang terhadap pemahaman-pemahaman yang keliru dari para calon muzakki maupun elit agama (Tradisional)yang masih menerjakkan zakat "bawa pulang ke daerah asal", dan "bagi-bagi sendiri". Kelompok ini masih sangat besar di Banda Aceh yang membutuhkan kerja keras Baitul Mal dengan dukungan Pemko untuk mendobrak atau paling tidak memberikan penyadaran-penyadaran.. Terbatasnya informasi bagi masyarakat akan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh juga menjadi salah satu kendala di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.1.1 Perhubungan

2.4.1.1.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kenderaan dihitung berdasarkan jumlah panjang jalan dibagi dengan jumlah kenderaan. Rasio panjang jalan per jumlah kenderaan untuk Tahun 2007 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.136
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Banda Aceh
Tahun 2007-2014

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Panjang Jalan	487,943	707,343	707,343	765,666	765,666	765,666	765,666	765,666
2	Jumlah Kendaraan	88,947	112,654	135,754	161,540	174,859	188,817	200,436	199,991
3	Rasio	5.49	6.31	5.21	4.74	4.38	4.06	3.82	3.82

Sumber : Dishubkominfo Banda Aceh

Jumlah panjang jalan di Kota Banda Aceh pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor, banyak faktor yang mempengaruhinya, beberapa faktor tersebut adalah:

a. Kecenderungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi lebih besar, hal ini disebabkan oleh kemudahan dalammenjangkau tempat yang ingin di tuju.
b. Ketersediaan angkutan umum belum maksimal, baik dari jumlah, kemudahan dan kenyamanan.
c. Adanya kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan distributor untuk membeli kendaraan bermotor, seperti cicilan yang murah hingga uang muka yang relatif rendah.

2.4.1.1.2 Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode satu tahun, dapat dilihat pada Tabel 2.150.

Tabel 2.137
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Kota Banda AcehTahun 2007 – 2014

No	Uraian	Satuan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah orang	Orang	135.951	146.000	394.200	662.721	526.623	941.921	1.007.855	799.785
2	Jumlah Barang	Ton	102.300	108.000	108.720	109.800	111.600	132.700	138.008	133.745

Sumber : Dishubkominfo Banda Aceh

Dilihat dari perkembangan jumlah orang dan jumlah barang yang diangkut, menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan fasilitas transportasi dari waktu ke waktu, baik dari fasiltas moda transpor maupun terminal barang dan orang.

2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.2.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.4.2.1.1 Perizinan

Sejak berdirinya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kota Banda Aceh Tahun 2007 sampai dengan sekarang terjadi kenaikan pengurusan perizinan usaha dan pendapatan setiap tahunnya. Dari Tahun 2007 sampai dengan 2013 izin yang telah dikeluarkan oleh KPPTSP sebanyak 83.125 lembar, sementara untuk pendapatan sebesar Rp.21.243.525.382,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.83.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kota Banda Aceh 2012-2017



Tabel 2.138
Realisasi Izin dan Pendapatan Tahun 2007-2013

No	Jenis Perizinan	Jumlah Yang Telah Diterbitkan												
		Perizinan (Unit)						Retribusi (Rp.)						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Izin Gangguan (HO)	420	572	604	661	636	551	646	221.601.325	258.148.152	441.703.740	400.435.225	371.460.225	491.528.600	518.719.725
2	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	3697	1075	5843	6811	6167	3814	6116	6.120.500.000	7.207.775.000	984.000.000	5.795.000.000	490.150.000	-	-
3	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	319	299	1.150	234	362	1248	284	143.000.000	203.000.000	928.500.000	168.000.000	285.500.000	-	-
4	Izin Usaha Industri (IUI)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
5	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1392	1615	1551	1409	1321	1899	1614	174.835.000	197.860.000	181.440.000	168.630.000	161.775.000		
6	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1607	1748	1453	1905	1936	2725	1558	88.350.000	80.630.000	84.400.000	77.200.000	75.425.000	-	-
7	Izin Usaha Kesehatan (UKS)	18	72	134	132	122	126	118	1.275.000	5.500.000	10.725.000	10.475.000	9.825.000	-	-
8	Izin Pariwisata	12	61	82	92	113	91	135	-	-	-	-	-	-	-
9	Izin Usaha Angkutan / Izin Trayek	7	7	9	9	14	55	48	600.000	1.400.000	4.845.000	2.200.000	12.850.000	19.020.000	10.060.000
10	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	38	334	230	388	345	357	444	174.080.500	1.483.111.700	1.068.760.200	1.994.914.467	2.011.731.930	1.901.326.000	2.012.011.000
11	Izin Reklame	126	993	953	1077	1270	864	969	-	-	-	-	541.141.946	1.156.638.416	702.361.550
12	Izin Galian Gaul	2	2	7	1	6	1					-	-	-	-
13	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni & Budaya	37	37	65	58	91	41	63							-
14	Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tanda Daftar Industri (TDI)	52	72	64	51	69	54	75	4.150.000	4.225.000	4.050.000	3.075.000	5.375.000		
16	Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK)	-	-	-	1460	3316	1475	548				38.325.000	85.900.000	-	-
17	Izin Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
	J U M L A H	**7746**	**10304**	**11505**	**12493**	**14133**	**14362**	**12262**	**1.124.833.225**	**2.620.249.852**	**3.258.948.240**	**3.381.254.677**	**4.066.104.051**	**3.567.073.016**	**3.273.562.283**

Sumber : Kab/Kota Kota Banda Aceh

2.4.2.1.2 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Salah satu faktor berjalannya pembangunan adalah tersedianya modal. Hal ini yang yang menjadikan pengelolaan penanaman modal menjadi salah satu bidang penting pelayanan publik dalam menjaring datangnya modal dalam rangka melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal itu ditanamkan.

Semakin banyak nilai realisasi investasi Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

Jumlah Perda/Qanun yang mendukung iklim Usaha di Kota Banda Aceh pada tahun 2014 berjumlah 17 Qanun.

2.4.2.1.3 Persentase Penempatan Pejabat yang sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan dan Diklat Penjenjangan (*The Right Man on the Right Place*) (%)

Penempatan pejabat sesuai disiplin ilmu merupakan salah satu upaya mempercepat proses pelaksanaan kegiatan secara benar dan tepat. Melalui penempatan sesuai latar belakang pendidikan, para pemangku jabatan tersebut dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki terhadap bidang tugas yang ditangani. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan untuk membina karier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan

kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

Pengangkatan pejabat struktural idealnya bahwa pejabat tersebut memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidang jabatan serta telah mengikuti diklat perjenjangan walaupun diklat tersebut dapat diikuti setelah pejabat tersebut menduduki jabatan. Diklat perjenjangan wajib diikuti oleh pejabat struktural sesuai tingkatan eselonering dari jabatan yang diduduki. Pemerintah Kota Banda Aceh setiap tahun menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Tk. III dan IV bagi para pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Berikut ini adalah Grafik 2... Persentase Penempatan Pejabat yang sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan dan Diklat Penjenjangan (*The Right Man on The Right Place)*

Grafik 2.44

Persentase Penempatan Pejabat yang sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan dan Diklat Penjenjangan (*The Right Man on The Right Place)* di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

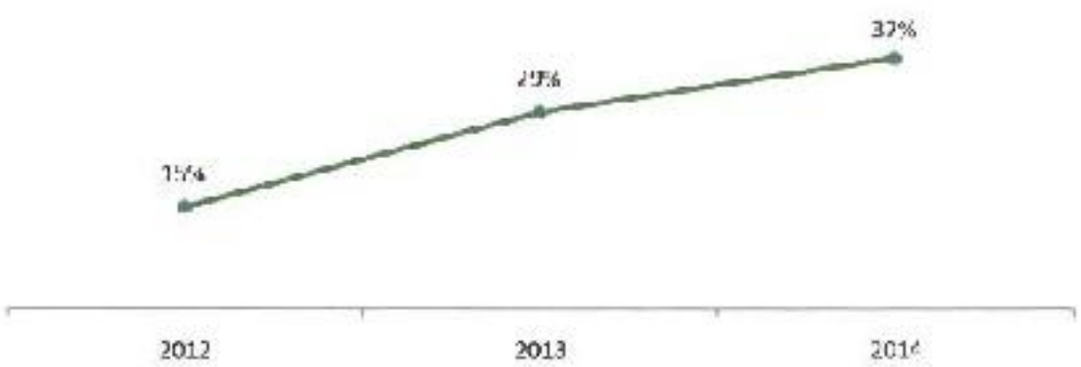

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh

2.4.2.1.3 Jumlah APIP yang bersertifikasi

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian internal adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini sejalan dengan peran dan fungsi pengawas internal untuk membantu pemerintah mencapai tujuan yang telah ditetapkannya melalui pendekatan yang sistematis dan terarah dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*), dan proses tata kelola pemerintahan (*governanceprocess*). APIP juga mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dalam mengemban tugas tersebut dibutuhkan personil APIP yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai. Upaya peningkatan SDM APIP salah satunya melalui pendidikan dan latihan yang terukur dan berkelanjutan.

Berikut ini adalah Grafik 2... Jumlah APIP yang bersertifikasi di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 (org)

Grafik 2.45
Jumlah APIP yang bersertifikasi di Kota Banda Aceh
Tahun 2012-2014 (org)

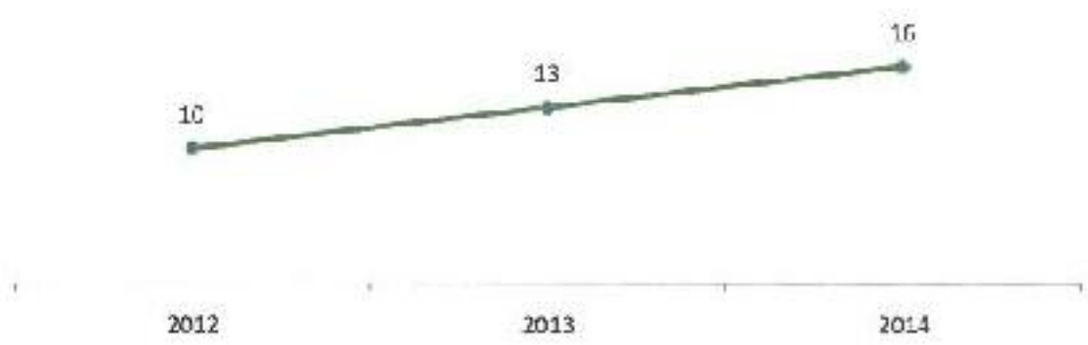

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh

2.4.2.1.4 Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Internal dan External

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Grafik 2.46

Jumlah temuan hasil Pemeriksaan dan Pengawasan internal dan external di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

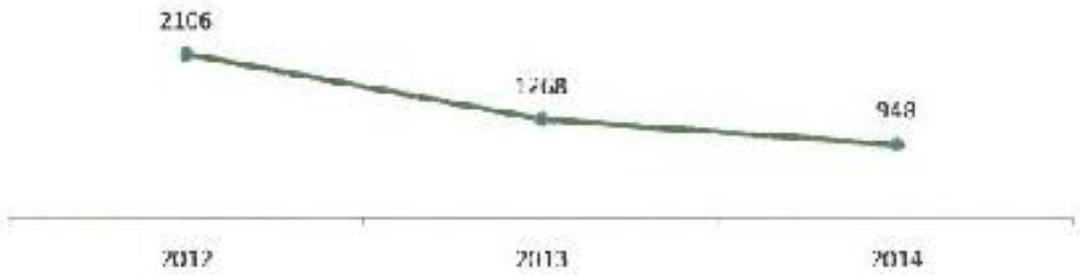

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh

Inspektorat Kota Banda Aceh merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Banda Aceh, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Banda Aceh. Inspektorat telah memiliki wilayah yang jelas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Banda Aceh. Hal ini bertujuan agar kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dapat dilaksanakan secara teratur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Pembinaan, pengawasan dan penanggaran mulai tahun 2007 2014 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun tergantung kemampuan Pemerintah Kota Banda Aceh, sementara jumlah objek/ratio

pemeriksaan dan pembinaan obrik dari tahun 2007-2014 tidak mengalami perubahan yang mendasar, dapat dilihat pada Tabel 2.140 Jumlah Pegawai tidak banyak terjadi perubahan, akan tetapi Tingkat Kompetensi Aparatur Pengawasan dari Tahun 2007–2014 terjadi penambahan auditor dan JFP2UPD dari 11,11 persen menjadi 46,51 persen dari jumlah pegawai, dapat dilihat pada Tabel 2.141.

Jumlah Temuan BPK, BPKP, Inspektorat Aceh dan Inspektorat Kota Banda Aceh Serta Penyelesaian TLHP Tahun 2007–2014 dapat dilihat pada Tabel 2.142.

Tabel 2.139
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Anggaran dan Jumlah Objek Pemeriksaan Serta Ratio Pembinaan/Obrik dari Tahun 2007-2014

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah pembinaan dan pengawasan	191	87	57	160	93	118	245	184
2	Jumlah anggaran pembinaan dan pengawasan	461.310.000	559.825.000	684.540.000	604.750.000	331.610.000	398.576.000	779.200.000	690.376.000
3	Jumlah objek pemeriksaan	260	260	260	265	265	260	245	247
4	Ratio pembinaan/ obrik (%)	73,46	33,46	60,38	60,38	35,09	45,38	100	74,49

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh

Tabel 2.140
Jumlah Pegawai dan Tingkat Kompetensi Aparatur Pengawasan dari Tahun 2007-2014

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah pegawai	45	51	51	47	42	41	41	43
2	Jumlah auditor dan JFP2UPD	5	5	5	13	12	19	19	20
3	Ratio per-Tahun (%)	11,11	9,8	9,8	27,66	28,57	46,34	46,34	46,51

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh

Tabel 2.141
Jumlah Temuan BPK, BPKP, Inspektorat Aceh dan Inspektorat Kota Banda Aceh Serta Penyelesaian TLHP Tahun 2007-2014

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah rekomendasi BPK	104	29	21	74	51	29	58	47
2	Jumlah penyelesaian	90	25	20	65	45	29	46	19
3	Ratio penyelesaian (%)	86,54	86,21	95,24	87,84	88,24	100	79,31	40,42
4	Jumlah rekomendasi BPKP	-	22	-	2	-	-	-	-
5	Jumlah penyelesaian	-	22	-	2	-	-	-	-
6	Ratio penyelesaian (%)	-	100	-	100	-	-	-	-
7	Jumlah rekomendasi inspektorat Aceh	39	10	13	26	-	68	-	23
8	Jumlah penyelesaian	39	10	7	25	-	68	-	19
9	Ratio penyelesaian (%)	100	100	53,85	96,15	-	100	-	82,60
10	Jumlah rekomendasi Inspektorat kota	250	400	349	385	307	732	1210	928
11	Jumlah penyelesaian	250	400	349	382	288	555	1027	912
12	Ratio penyelesaian (%)	100	100	100	99,22	93,81	75,81	84,87	98,27

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh

2.4.2.1.5 Jumlah PNS yang indisipliner

Disiplin kerja PNS terwujud dalam bentuk ketaatan, kertertiban, tanggungjawab dan loyalitas terhadap segala rata tertib yang berlaku dalam organisasi. Dengan terwujudnya aparatur yang disiplin dan berintegritas maka akan berdampak pada menurunnya jumlah PNS yang Indisipliner.

Upaya penegakan disiplin dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dilakukan melalui monitoring/sidak dan pembinaan secara langsung pada SKPD oleh Tim Pembinaan, Pemeriksaan dan Penegakan Disiplin Aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Banda Aceh.

Bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin ringan, tahapan penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan oleh pimpinan SKPD. Capaian kinerja menurunnya jumlah PNS yang indisipliner mencapai 100% pada tahun 2015. Hal ini merupakan perkembangan positif pembinaan disiplin PNS dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin jauh menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam upaya penegakan disiplin, Pemerintah Kota Banda Aceh telah membangun aplikasi e-disiplin dimana sistem ini berupa aplikasi absensi online yang bertujuan merekam tingkat kehadiran PNS secara online dan memudahkan pembinaan PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.

Aplikasi ini dapat menjadi sebuah alat deteksi dini bagi pegawai terhadap disiplin kerja dan bagi atasan langsung.Pimpinan SKPD serta pejabat pembina kepegawaian dapat menggunakannya sebagai sarana monitoring dan evaluasi dalam memantau tingkat kehadiran pegawai dan meminimalisir pelanggaran/sanksi yang terjadi. Melalui aplikasi e-disiplin, atasan langsung dan pejabat pembina kepegawaian dapat menerima secara otomatis notifikasi terhadap tahapan pelanggaran yang telah dilakukan oleh seorang pegawai.
Berikut ini adalah Grafik 2... Jumlah PNS yang indispliner di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 (org)

Grafik 2.47
Jumlah PNS yang indispliner di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014 (org)

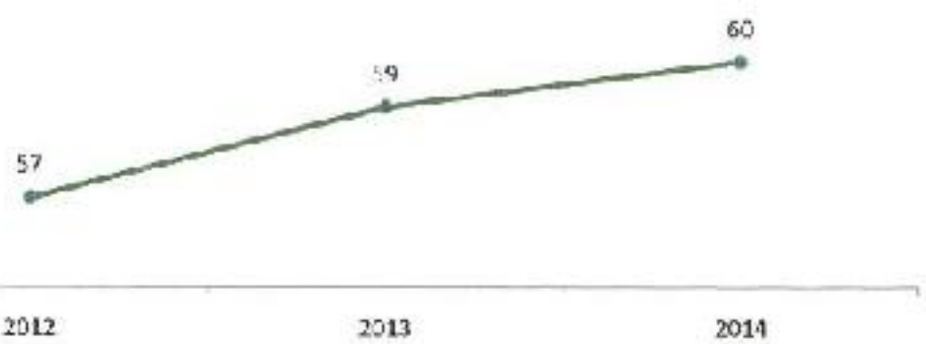

Sumber : BKPP Kota Banda Aceh

2.4.3.2.1.6 Jumlah Pembangunan aplikasi berbasis e-government

Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan hal yang tidak bisa dihindari, karena kebutuhan informasi yang sangat cepat dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama disegala aspek. Keberadaan teknologi merupakan jawaban untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.

Pembangunan pemerintahan berbasis e-government di Kota Banda Aceh mulai menjadi perhatian serius pasca tsunami, dimana Pemerintah Kota Banda Aceh banyak mendapatkan bantuan terutama dari lembaga-lembaga donor yang konsen terhadap peningkatan kapasitas pemerintahan. Hal ini tercermin dari terbentuknya Municipalities Information Manajemen System (MIMS) untuk memfasilitasi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengembangkan Teknologi Komunikasi (TIK) dengan tujuan mengembangkan sebuah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kota yang berbasis elektronik dan terintegrasi secara menyeluruh sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh demi meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik, khususnya di Kota Banda Aceh.

MIMS merupakan proyek kerjasama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan GTZ – SLGSR dan diresmikan pada tahun 2009, sistem tersebut merupakan cikal bakal mewujudkan Banda Aceh sebagai cyber city. Salah satu program cyber city yang telah berjalan adalah dengan memfasilitasi dan memberikan layanan kawasan internet gratis (hotspot) di daerah publik seperti taman bermain dan warung- warung kopi.

Selain itu, seluruh SKPK dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh telah terkoneksi jaringan internet dan memiliki website tersendiri serta terintegrasi dengan website resmi Pemerintah Kota Banda Aceh : www.bandaacehkota.go.id. Saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengadopsi teknologi informasi sebagai infrastruktur utama pelayanan

publik, ini dapat terlihat dari pembangunan berbagai aplikasi pelayanan berbasis e-government baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Berikut ini adalah Grafik 2... Jumlah pembangunan aplikasi berbasis e-government di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

Grafik 2.48
Jumlah Pembangunan Aplikasi Berbasis e-government di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

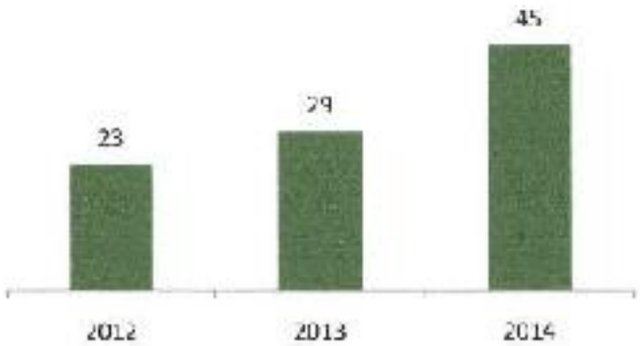

Sumber : Dishubkominfo Kota Banda Aceh

Dari sisi pelayanan umum pada Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyediakan pelayanan umum yang dilakukan berupa sms gateway dan proses verifikasi (pendaftaran perusahaan baru untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa) kepada vendor/rekanan.

Gambaran aspek pelayanan umum (sms gateway) tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.85.

Tabel 2.142
Jumlah Pengaduan, Perusahaan Terverifikasi, dan Jumlah Personil MIMS

Tahun	Jumlah Pengaduan	Jumlah Perusahaan (Buah)	Jumlah Personil MIMS (orang)
2007	-	-	12
2008	-	6	10
2009	2198	181	10
2010	1217	563	10
2011	1736	1074	8

Tahun	Jumlah Pengaduan	Jumlah Perusahaan (Buah)	Jumlah Personil MIMS (orang)
2012	873	1091	7
2013	1436	1061	7
2014	823	457	7

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Banda Aceh

Note : Jumlah personil MIMS berkurang karena terjadi proses mutasi pegawai

2.4.2.1.7 Perolehan Opini dari BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Penilaian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi komponen penting untuk menilai sejauh manakah penilaian yang obyektif bisa dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Hal ini menjadi bagian yang menguatkan akuntabilitas pada aspekpencapaian kinerja sasaran terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif.

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan mendasarkan pada UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Angaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pengukuran untukindikator perolehan opini dari BPK terhadap laporan keuangan daerah, realisasi atas target kinerja yang ditetapkan menunjukkan hasil yang sangat baik.

Selama 6 tahun berturut-turut sejak Tahun 2009, Pemerintah Kota Banda Aceh telah berhasil memperoleh predikat WTP dari BPK.

2.4.2.1.8 Persentase target PAD

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Berikut ini adalah Grafik 2.48 PAD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

Grafik 2.49
PAD di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

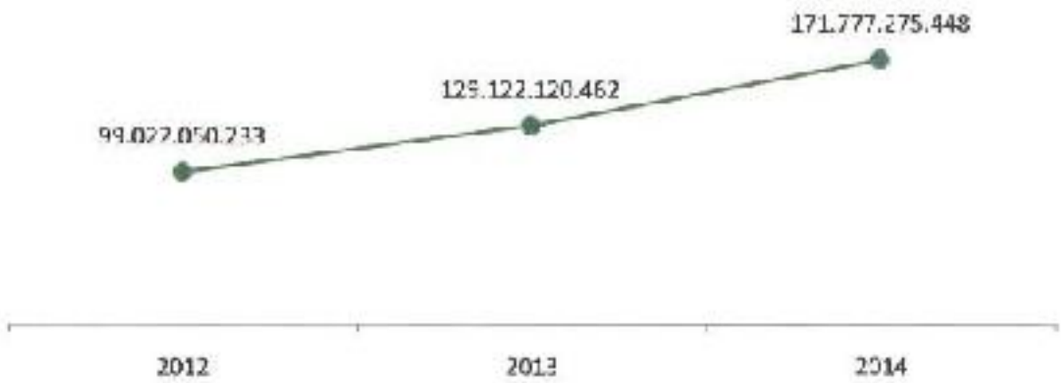

Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh

Peningkatan PAD ini tidak terlepas dari kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota Banda Aceh, antara lain :

1. Intensifikasi penerimaan pendapatan dengan optimalisasi penagihan pajak dan retribusi.
2. Ekstensifikasi pajak dan retribusi dengan menjaring wajib pajak baru
3. Intensifikasi PBB dan BPHTB dengan melakukan validasi NJOP PBB.
4. Sosialisasi peraturan daerah yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah.
5. Pendataan dan pemetaan sumber-sumber potensi baru.
6. Optimalisasi kinerja petugas pemungut pajak dan retribusi.

7. Membentuk sistem dan prosedur adminstrasi pelayanan perpajakan dan retribusi yang nyaman dan sederhana.
8. Mengupayakan peningkatan dana dari pusat dihar DAU dan DAK ke daerah.

2.1.2.1.9 Pemberitaan Positif mengenai Program Pembangunan Kota Band Aceh di Media Lokal dan Nasional

Pemerintah berkewajiban melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara di sisi lain, media massa bisa bertindak sebagai pengawas sekaligus penyampai aspirasi masyarakat. Dengan demikian, antara program pembangunan yang dicanangkan pemerintah bisa terlaksana dengan baik.

Persentase pemberitaan positif mengenai program pembangunan Kota Banda Aceh dimedia lokal dan nasional (cetak dan online) meningkat dari tahun ke tahun. Keberhasilan ini disebabkan upaya dalam menjalankan kegiatan media relations yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Acehdengan menjalin hubungan dengan wartawan. Kepercayaan dari wartawan adalah salah satu aset praktisi Humas Pemerintah Kota Banda Aceh yang paling penting.

Berikut ini adalah Grafik 2.., Pemberitaan Positif mengenai Program Pembangunan Kota Banda Aceh di Media Lokal dan Nasional Tahun 2012-2014

Grafik 2.50

Pemberitaan Positif mengenai Program Pembangunan Kota Banda Aceh di Media Lokal dan Nasional Tahun 2012-2014

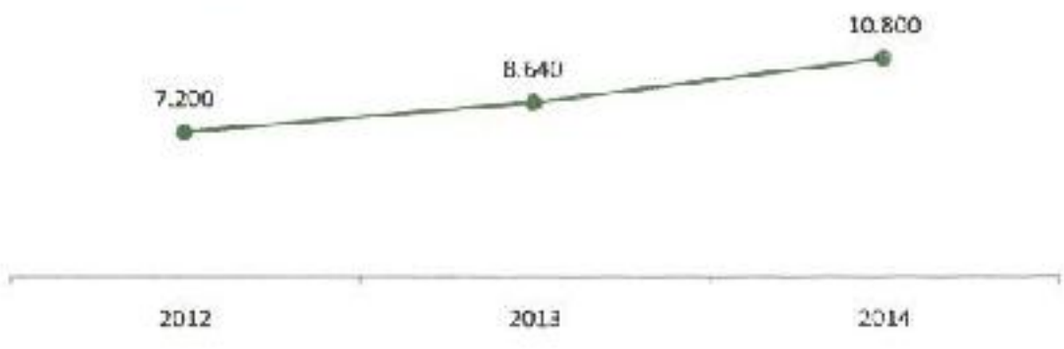

Sumber : Bagian Humas Sekretariat Kota Banda Aceh

3.4.2.1.10 Persentase Penyelesaian Pilar Tanda Tapal Batas

Tabel 2.143
Rasio Jumlah Tapal Batas Gampong Dalam Wilayah Kota Banda AcehTahun 2007 - 2013

No	Kecamatan	2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013		
		Jml Tapal Batas	Jml Gpg	Rasio	Jml Tapal Batas	Jml Gpg	Rasio	Jml Tapal Batas	Jml Gpg	Rasio	Jml Tapal Batas	Jml Gpg	Rasio	Jml Tapal Batas	Jml Gpg	Rasio	Jml Tapal Batas	Jml Gpg	Rasio	Jml Tapal Batas	Jml Gpg	Rasio
1	Kuta Alam	0	11	0.00	0	11	0.00	0	11	0.00	2	11	18.18	3	11	27.27						
2	Kutaraja	0	6	0.00	0	6	0.00	0	6	0.00	2	6	33.33	1	6	16.67						
3	Jaya Baru	0	9	0.00	0	9	0.00	0	9	0.00	0	9	0.00	1	9	11.11						
4	Syiah Kuala	0	10	0.00	0	10	0.00	0	10	0.00	1	10	10.00	2	10	20.00						
5	Lueng Bata	0	9	0.00	0	9	0.00	0	9	0.00	0	9	0.00	1	9	11.11						
6	Ulee Kareng	0	9	0.00	0	9	0.00	0	9	0.00	0	9	0.00	2	9	22.22						
7	Banda Raya	0	10	0.00	0	10	0.00	0	10	0.00	0	10	0.00	0	10	0.00						
8	Meuraxa	0	16	0.00	0	15	0.00	0	16	0.00	0	16	0.00	0	16	0.00						
9	Baiturrahman	0	10	0.00	0	10	0.00	0	10	0.00	0	10	0.00	0	10	0.00						
Total Rasio Kota		**0**	**90**	**0.00**	**0**	**90**	**0.00**	**0**	**90**	**0.00**	**5**	**90**	**5.56**	**10**	**90**	**11.11**						

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setdako Banda Aceh

2.4.2.1.11 Jumlah Regulasi yang Ditetapkan

Permasalahan utama dalam birokrasi pelayanan adalah berkaitan dengan peningkatan pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek salah satunya adalah bagaimana pola penyelenggaraannya, dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan. Proses dan produk pelayanan itu sendiri harus memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi para *stakeholder*. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima lavanan.

Berikut ini adalah Grafik 2... Jumlah Regulasi yang Ditetapkan di Kota Banda Aceh Tahun 20 12-2014

Grafik 2.51
Jumlah Regulasi yang Ditetapkan di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

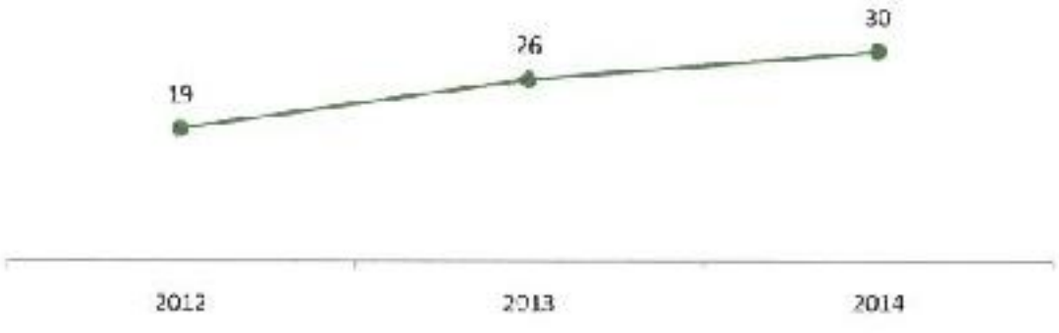

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Kota Banda Aceh

2.4.2.1.12 Jumlah Rancangan Qanun yang disahkan Menjadi Qanun (%)

Dalam rangka memberikan pedoman dan payung hukum pelaksanaan pemerintahan, Tim Legislasi Pemerintah Kota Banda Aceh pada setiap tahun membahas dan menyampaikan rancangan qanun kepada DPRK, yang terus meningkat jumlahnya yaitu tahun 2007 sebanyak 16 rancangan qanun, tahun 2008 sebanyak 21rancangan qanun, tahun 2009 sebanyak 31rancangan qanun, tahun 2010 sebanyak 36, tahun

2011 sebanyak 39 rancangan qanun, tahun 2012 sebanyak 31 rancangan qanun, tahun 2013 sebanyak 37 rancangan qanun, tahun 2014 sebanyak 44 rancangan qanun.

Rancangan qanun hasil inisiatif DPRK pada tahun 2008 ada 5 rancangan qanun, tahun 2009 sebanyak 1 rancangan qanun, tahun 2010 sebanyak 6 rancangan qanun, tahun 2011 sebanyak 4 rancangan qanun, tahun 2012 sebanyak 1 rancangan qanun, dan tahun 2014 sebanyak 1 rancangan qanun.

Dari jumlah rancangan qanun yang diajukan kepada DPRK, yang mampu dibahas dan ditetapkan pertahunnya adalah sebanyak 16 qanun pada tahun 2007 atau 100 persen penyelesaiannya, pada tahun 2008 3 qanun dari 21 rancangan qanun yang disampaikan atau 14,28 persen, tahun 2009 sebanyak 6 qanun dari 31 rancangan qanun yang disampaikan atau 19,45 persen; tahun 2010 sebanyak 8 qanun dari 36 rancangan qanun yang disampaikan ke DPRK atau 23,53 persen, tahun 2011 sebanyak 11 qanun dari 39 rancangan qanun yang disampaikan ke DPRK atau 45,94 persen, tahun 2012 sebanyak 6 qanun dari 31 rancangan qanun atau 19,45 persen, tahun 2013 sebanyak 3 qanun dari 37 rancangan qanun yang disampaikan atau 11,10 persen, dan tahun 2014 sebanyak 6 qanun dari 44 rancangan qanun yang disampaikan atau 25,80 persen. Rendahnya penyelesaian pembahasan dan penetapan qanun tersebut membawa dampak yang tidak baik terhadap kinerja legislatif dan eksekutif dipandangan masyarakat.

Tabel 2.144
Daftar Qanun Kota Banda Aceh yang Ditetapkan Pada Periode 2007-2013

Tahun	Jumlah Program Legislasi Daerah	Pihak Eksekutif			Usul Inisiatif DPRK	Yang Telah Ditetapkan Menjadi Qanun			Rasio Qanun yang Ditetapkan
		Atas Usulan Eksekutif	Yang Disampaikan ke DPRK	Yang Tidak Disampaikan		Usul Eksekutif	Usul Inisiatif DPRK	Total	
2007	16	16	16	-	-	16	-	16	100
2008	21	16	16	-	5	3	-	3	14,28
2009	31	30	30	-	1	6	-	6	19,45
2010	36	30	28	2	6	7	1	8	23,53
2011	39	35	33	2	4	15	2	17	45,94
2012	31	30	30	-	1	6	-	6	19,45
2013	37	37	37	-	-	3	-	3	11,10
2014	44	43	43	-	1	6	-	6	25,80

Sumber : Bagian Hukum Setdako Banda Aceh

2.4.2.1.13 Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)

Pemerintahan gampong merupakan amanah dari UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kelurahan dihapus dan dibentuk gampong. Keluarnya payung hukum pembentukan gampong di Kota Banda Aceh melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong, secara otomatis menghapus jabatan lurah dan digantikan oleh keuchik (kepala desa) yang akan memimpin pemerintahan gampong.

Pemilihan jabatan keuchik dilaksanakan melalui pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh masyarakat gampong untuk masa jabatan 6 tahun, seperti yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.

Pemilihan Keuchik secara langsung merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat gampong, dimana melalui pemiliihan keuchik secara langsung masyarakat dapat berpartisipasi langsung dan berperan aktif dalam tahapan pemilihan. Hal ini sejalan dengan sasaran terbangunnya kehidupan berdemokrasi di gampong.

Berikut ini adalah Grafik 2... Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Keuchik Langsung di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

Grafik 2.52

Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) di Kota Banda Aceh Tahun 2012-2014

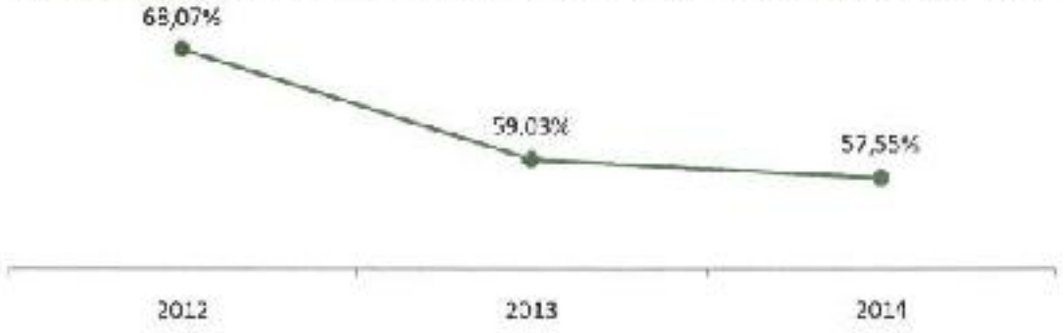

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh

Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan keuchik lebih disebabkan menurunnya kepedulian warga gampong untuk memenuhi undangan yang disebarkan P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) selain karena kegiatan pemilihan umumnya dilakukan pada hari libur dimana masyarakat lebih memilih untuk menghabiskan liburan bersama keluarga.

Untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat Pemerintah Kota Banda Aceh melalui instansi terkait seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Gampong terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat termasuk membuat tahapan-tahapan pemilihan keuchik melalui penyampaian visi dan misi serta kampanye yang menghadirkan masyarakat secara langsung.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.Hak dan kewajiban tersebut mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur tentang danaperimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Pemerintah Daerah dapat menjalankan fungsinya secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan *(money follow function)*.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah sekurang kurangnya 5 tahun sebelumnya.Pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017 memberikan gambaran mengenai arah kebijakan keuangan dengan melihat potensi keuangan yang dimiliki dan kebutuhan terhadap pendanaan pembangunan. Dalam penjabarannya gambaran pengelolaan keuangan daerah akan dituangkan dalam APBD sebagai instrumen operasionalpengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dalam Peraturan Daerah.Dalam hubungannya dengan RPJM Daerah, APBD merupakan komitmen politik penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk mendanai program pembangunan selama kurun waktu 5 tahun. Hubungan antara dokumen perencanaan strategi dengan anggaran, dapat dilihat dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1

Kerangka Hubungan Antara Kebijakan Keuangan Daerah/APBD dengan RKPD dan Visi, Misi, Strategi RPJMD



Arah kebijakan keuangan daerah yang ditetapkanoleh PemerintahKota Banda Aceh mengandung makna bahwa:

1) Arah belanja APBD Kota Banda Aceh digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah, 5 tahunan.
2) Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang berkelanjutan dan jumlah yang memadai.

Mengingat kebijakan masing masing komponen APBD berbeda maka kebijakan keuangan daerah juga dirinci pada masing-masing komponen tersebut, meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.Adapun, hubungan strategi dengan (arah kebijakan) komponen APBD dapat dilihat dalam Gambar 3.2.

Gambar 3.2

Kerangka Hubungan Antara Strategi dan Komponen APBD

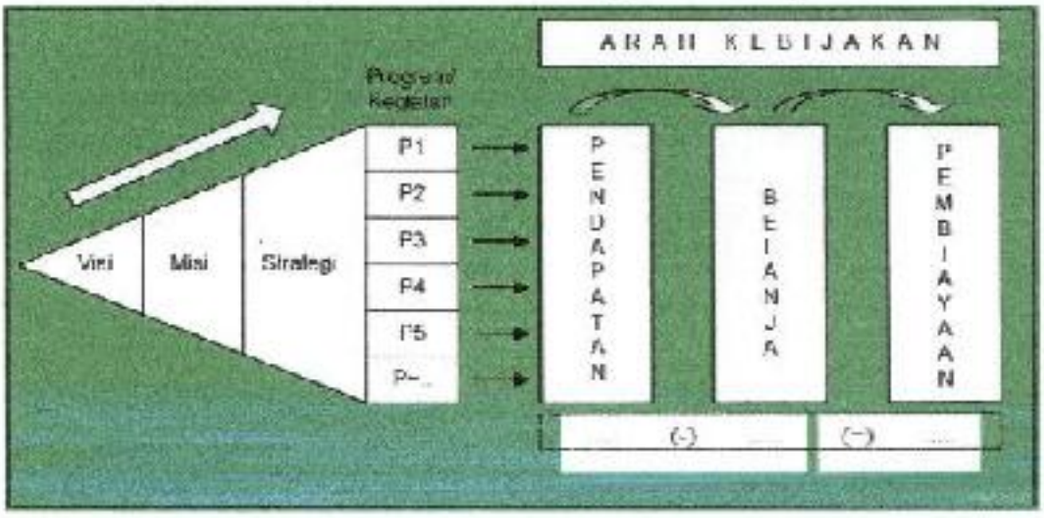

Gambar 3.2 menunjukkan hubungan antara proses perencanaan kegiatan dengan keuangan. Satuan terkecil dari perencanaan strategik adalah program dan kegiatan.Melalui analisis belanja, standar pelayanan, dan standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan, dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Kota Banda Aceh, pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan. Belanja yang tidak strategik dan tidak memiliki nilai tambah *(non value-added)* diminimalisir.

Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBD harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya.Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja.Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD selama ini harus diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur surplus/defisit maka atas selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan.Dalam hal suatu APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih maka atas surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007-2014 memberikan gambaran trend yang positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 13,82% walaupun pada masa itu Kota Banda Aceh masih pada tahap pemulihan pasca tsunami. Bencana gempa dan tsunami yang melanda Kota Banda Aceh pada 26 Desember 2004 secara langsung membawa dampak pada kehidupan dan infrastruktur kota. Namun dalam masa pemulihan pasca bencana terjadi perubahan ekonomi yang besar di Kota Banda Aceh dengan banyaknya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada masa Rehabilitasi Rekonstruksi terutama infrastruktur.Hal ini berdampak pada pergerakan perekonomian dari sektor bangunan/konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.Hal ini membawa dampak signifikan pada perkembangan ekonomi makro karena struktur pendukung ekonomi daerah Kota Banda Aceh yang berbasis pada sektor swasta.

Pendapatan daerah merupakan tolok ukur kemampuan keuangan daerah sebagai pijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Oleh karena itu perencanaan pendapatan daerah merupakan proses yang paling krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program dan kegiatan. Sehingga setiap pengeluaran pembangunan akan mampu diimbangi dengan kemampuan keuangan daerah.

Perkiraan pendapatan daerah yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya sebagaimana dimaksudkan dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 akan sangat membantu proses perencanaan secara maksimal dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan.

Era otonomi daerah menuntut pemerintah daerah agar secara bertahap mampu melepaskan ketergantungannya kepada pemerintah pusat dengan cara memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah sebagai modal utama pembangunan daerah. Daerah yang tidak mampu mencapai nilai PAD nya minimal 10 persen dari nilai APBD nya akan sulit berkembang, bahkan diindikasikan akan mengalami kebangkrutan. Pada kenyataannya angka minimal tersebut sangat sulit diwujudkan karena minimnya potensi PAD masing-masing daerah.Kinerja pelaksanaan APBD Kota Banda Aceh sejak tahun 2007 hingga tahun 2014 digunakan sebagai dasar dalam rencana RPJMD Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2012 2017.

3.1.1 KinerjaPelaksanaan APBD

Dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, sejak tahun 2007 sampai 2014 Pemerintah Kota Banda Aceh telah berhasil meningkatkan PAD nya dari sekitar Rp. 30,8 miliar menjadi Rp 171,7miliar. Hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi Pemerintah Kota Banda Aceh yang dinilai telah mampu mengelola potensi PAD dengan baik walaupun potensi PAD tersebut belum dapat digali sepenuhnya. Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat memperbesar ruang fiskal daerah sehingga besaran dana daerah yang bisa digunakan secara bebas sesuai dengan

kebutuhan daerah dalam satu tahun anggaran akan semakin besar, sehingga kebutuhan dasar masyarakat yang terkait dengan program prioritas akan dapat dipenuhi.

Selama ini sebagian besar pendapatan daerah dipergunakan untuk belanja tidak langsung (belanja aparatur pemerintah/gaji PNS),dan belanjalangsung yang bertujuan untuk mendanai urusan publik. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Banda Aceh akan terus berusaha untuk meningkatkan PAD dengan menggali potensi-potensi yang ada melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD. Sehingga dengan adanya peningkatan PAD, maka akan semakin memperbesar ruang fiskal daerah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan belanja publik.

Dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil dari penerimaan pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Pada Tahun 2007 realisasi dana perimbangan Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar Rp. 391,2 miliar lebih dan pada tahun 2014 sebesar Rp.685,9miliar lebih, mengalami kenaikan rata-rata sebesar 8.58 persen dalam kurun waktu delapan tahun. Pada tahun 2014,sekitar 60 persen dari total realisasi penerimaan pendapatan daerah masih bersumber dari dana perimbangan. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh juga masih sangat tergantung kepada anggaran dari pemerintah pusat.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang sumber pendapatannya bersumber dari Pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak Provinsi, Dana Penyesuaian Otonomi khusus dan Pendapatan Yang Sah Lainnya dari tahun 2007 sampai dengan 2014 menunjukkan trend terus meningkat secara signifikan. Pada tahun 2007 realisasi pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 44,26 miliar dan pada tahun 2014 menjadi Rp. 276,3 miliar meningkat sekitar 29 persen.

Selama kurun waktu 2007 – 2014, target dan realisasi belanja APBK Banda Aceh menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014 realisasi belanja daerah meningkat dari tahun 2013 dengan pertumbuhan sebesar 11 persen. Selama kurun waktu delapan tahun tersebut rata-rata proporsi belanja tidak langsung terhadap belanja daerah sebesar 58 persen dan proporsi belanja langsung terhadap belanja daerah rata-rata sebesar 42 persen.Anggaran belanja tidak langsung, dipergunakan untuk belanja pegawai, bunga, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.Sedangkan anggaran belanja langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing SKPD sesuai dengan fungsi dan urusan Pemerintah Kota Banda Aceh yang harus dilaksanakan.Untuk lebih jelasnya perkembangan realisasi Pendapatan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Banda Aceh
Tahun 2007 -2014

No	Uraian	2007 (Rp.)	2008 (Rp.)	2009 (Rp.)	2010 (Rp.)	2011 (Rp.)	2012 (Rp.)	2013 (Rp.)	2014 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**PENDAPATAN**	**466.404.069.537**	**420.177.896.188**	**500.500.210.649**	**577.316.681.210**	**719.615.023.554**	**787.574.048.247**	**928.240.758.967**	**1.134.104.242.955**	**13.82**
1.1	Pendapatan Asl. Daerah	90.959.082.422	48.097.704.361	49.462.544.620	62.268.722.602	85.550.389.620	99.022.050.235	129.170.160.562	171.777.275.449	29.00
1.1.1	Pajak Daerah	18.812.0[illegible].560	20.518.304.146	27.438.827.267	27.994.906.379	32.545.809.961	38.663.982.208	45.725.096.107	51.601.124.685	19.68
1.1.2	Retribusi Daerah	6.970.6[illegible].011	8.044.628.092	11.400.912.918	12.0[illegible].070.277	14.799.836.701	14.952.456.786	17.897.184.596	7.5[illegible].531.930	14.38
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	769.657.057	914.961.211	730.44[illegible].012	625.110.816	480.671.741	557.015.436	738.014.030	807.146.467	2.20
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asl. Daerah yang Sah	7.846.668.094	8.319.460.912	9.892.363.393	11.573.027.230	27.727.071.217	35.730.595.781	45.054.779.394	66.915.972.097	29.20
1.1.5	Pakar	-	-	-	-	5.000.000.000	1.498.575.110	14.457.080.060	14.736.695.993	3250
1.2	**Dana Perimbangan**	**351.273.298.463**	**336.336.552.429**	**399.485.099.259**	**405.816.604.335**	**481.699.960.314**	**561.416.740.888**	**631.739.103.105**	**685.952.796.648**	**9.63**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasi Bukan Pajak	48.941.298.460	50.65[illegible].267.409	46.436.719.259	36.3[illegible]0.713.335	45.58[illegible].295.314	42.925.615.888	35.101.195.[illegible]05	30.264.945.848	-2.09
1.2.2	Dana Alokasi Umum	308.839.000.003	307.002.315.000	313.[illegible]20.350.000	338.075.282.000	401.480.305.000	491.500.561.000	567.626.858.000	610.354.730.000	10.56
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	34.0[illegible].000.000	38.6[illegible].000.000	40.928.020.000	31.351.600.000	29.636.400.000	27.990.570.000	31.000.110.000	35.[illegible].130.800	5.93
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**44.265.738.652**	**30.744.606.398**	**51.552.566.770**	**110.286.317.173**	**152.364.674.620**	**127.135.557.136**	**167.331.445.300**	**276.374.171.658**	**29.00**
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	1.767.106.431		2.079.438.670		14.29

1.3.2	Dana Darurat	-	-							
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	14.642.533.498	3.933.042.010	10.019.281.574	7.715.715.195	9.427.390.465	10.729.522.595	10.084.348.585	10.668.385.179	29.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	11.377.713.930	5.149.536.000	-	-	12.725.400.000		97.295.580.000	114.931.514.000	-5.20
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau pemerintah Daerah Lainnya	14.682.005.677	-	-				15.000.000.000	112.821.385.723	53.15
1.3.6	Pendapatan Yang Sah Lainnya	3.364.464.547	15.555.935.978	40.413.284.885	111.519.201.978	138.434.115.100	116.405.734.547	42.209.062.715	37.952.810.700	-5.22

Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2015

Dari Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Banda Aceh selama kurun waktu tahun 2007 s/d 2014 mengalami trend positif, yaitu mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 13,82 persen. Di tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kota Banda Aceh akan lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, khususnya dari Pendapatan Asli Daerah antara lain melaluilaw enforcement dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah,intensifikasi dan ekstensifikasi denganmenggunakan data potensi akurat, valid dan terpercaya. Meningkatkan koordinasi dan sistem informasi yang sinergis di bidang pendapatan antarSKPD terkait, meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.

Selain itu Pemerintah Kota Banda Aceh juga berupaya untuk merevisi beberapaqanun, memangkas peraturan, dan prosedur perijinan yang dianggapberbelit-belit yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, serta mengefektifkan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial, meningkatkan efisiensi dalam pemungutannya, serta menyesuaikan tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat dan perkembangan ekonomi daerah. Disamping itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga berupaya untuk melakukan rekonsiliasi terhadap penerimaan-penerimaan yang ditetapkan untuk Kota Banda Aceh dan memberikan data konkrit. Namun demikian, beberapa sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan telah dialokasikan ke setiap daerah sesuai dengan formulasi terukur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

3.1.2 Neraca Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas

dananmerupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan kepurusar yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Rata-rata pertumbuhan neraca daerah Pemerintah Kota Banda Aceh selama kurun waktu 2007-2014 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kota Banda Aceh Tahun 2014

URAIAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
ASET	11.89
ASET LANCAR	41.08
Kas	52.68
Piutang	50.04
Persediaan	23.10
Belanja Dibayar Dimuka	
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	64.94
ASET TETAP	10.91
Tanah	1.33
Peralatan dan mesin	16.15
Gedung dan Bangunan	11.74
Jalan,irigasi, dan jaringan	50.15
Aset tetap lainnya	12.04
Konstruksi dalam pengerjaan	80.09
Dst.....	-
ASET LAINNYA	63.78
Tagihan penjualan angsuran	-
Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-
Kemitraan dengan pihak kedua	

Kemitraan dengan pihak ketiga	25.00
Aset tak berwujud	-
Aset lain-lain	43.15
JUMLAH ASET DAERAH	11.89
KEWAJIBAN	41.15
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	20.97
Utang Perhitungan pihak ketiga	-
Utang muka dari kas Daerah	25.00
Pendapatan diterima dimuka	19.06
Dst.....	-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	39.98
EKUITAS DANA	
EKUITAS DANA LANCAR	40.75
SILPA	59.06
Cadangan piutang	50.04
Cadangan persediaan	-6.50
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	29.03
Pendapatan yang ditangguhkan	158.18
Cadangan Belanja Dibayar Dimuka	23.10
EKUITAS DANA INVESTASI	11.18
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	64.94
Diinvestasikan dalam asset tetap	10.91
Diinvestasikan dalam asset lainnya (tidak termasuk dana cadangan)	63.78
Dst.....	-10.02
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	11.89

Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2015

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan pendapatan daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2014 diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha perusahaan milik daerah dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah.Dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan pendapatan yang sah lainnya.Untuk mendukung pembelanjaan daerah dalam rangka pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategik berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru. Secara umum, upaya peningkatan pendapatan daerah, lebih khusus diupayakan pada sumber PAD, mengingat *controllability*-nya yang tinggi dibanding sumber-sumber pendapatan yang lain. Kebijakan-kebijakan yang sudah ditempuh dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah antara lain :

a. Meningkatkan penyuluhan pajak/restribusi kepada masyarakat.
b. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak/wajib retribusi.
c. Meningkatkan penagihan dengan mendatangi ke lokasi Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
d. Merevisi Qanun pajak/retribusi yang tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini.
e. Mencari sumber-sumber penerimaan baru yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
f. Meningkatkan penegakan hukum (law enforcement) terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang lalai.
g. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi PAD secara rutin.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah Kota Banda Aceh tahun anggaran 2012-2017 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu :dalam rangka memenuhi kebutuhan

masyarakat dan aparatur daerah maka kebijakan umum belanja daerah yang telah ditempuh adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan Belanja Tidak langsung adalah untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan PNS di jajaran Pemko Banda Aceh melalui Peningkatan Tunjangan Presensi Kerja, disamping gaji yang diterima setiap bulannya.
b. Peningkatan Belanja Langsung ditujukan pada peningkatan pelayanan publik, peningkatan SDM, peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kapasitas pemerintahan serta peningkatan pengamalan Syariat Islam.
c. Melakukan penghematan dan efisiensi yang tinggi dengan mengurangi jumlah kepanitiaan suatu kegiatan, menghemat belanja pengadaan barang/jasa, perjalanan dinas, belanja modal aparatur dan belanja–belanja lain yang kurang prioritas, dengan menghitung secara cermat biaya satuan dan volume yang dibutuhkan.
d. Anggaran belanja dialokasikan untuk melaksanakan urusan wajib dan pilihan, yang diprioritaskan pada program/kegiatan, dengan terlebih dahulu melihat dan mempertajam indikator kinerja yang terukur dan pencapaian program yang jelas.

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Selama periode tahun 2007-2014, rata-rata proporsi belanja langsung terhadap jumlah belanja daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah adalah 42 persen. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja

pegawai, belanja barang dan jasa,dan belanja modal. Sedangkan rata-rata belanja tidak langsung periode tahun 2007-2014 adalah 58 persen, yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangandanbelanja tidak terduga. Berikut penjelasan Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Banda Aceh pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Banda Aceh

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp.)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan pengeluaran) (Rp.)	Persentase
1	2	3	4	5 = 3/4 x 100%
1	2009	404.271.654.798	556.062.366.232	72,70%
2	2010	451.856.268.873	602.909.980.933	74,95%
3	2011	511.563.918.505	764.013.118.850	67,35%
4	2012	532.755.565.864	832.734.713.764	63,98%
5	2013	616.744.305.772	989.475.685.419	62,33%
6	2014	677.031.427.834	1.197.981.738.323	56,51%

Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2015

Dari Tabel 3.5 dapat kita lihat bahwa belanja aparatur masih sangat tinggi, hal ini disebabkan Pemerintah setiap tahunnya menaikkan gaji PNS untuk meningkatkan kesejahteraan PNS.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggarar belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBK.Surplus APBK terjadi apabila anggaran pendapatar daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah.Sementara defisit APBK terjadi bila anggaran pendapatan diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja.

Dalam hal APBK diperkirakan surplus, maka diutamakan untuk membiayai pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah pemberian pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya, atau pendanaan jaminan sosial. Sementara dalam hal APBK diperkirakan defisit, maka pembiayaan diutamakan untuk menutup defisit yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan baik penerimaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Penetapan angka pembiayaan sangat mempengaruhi jumlah alokasi belanja yang dianggarkan dalam APBK, sehingga dari penerimaan SiLPA dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran berjalan. Namun karena anggaran pendapatan Kota Banda Aceh dalam setiap tahunnya selalu defisit, maka kita tidak pernah dapat menyisihkan dana untuk saving (transfer ke dana cadangan), sehingga sumber dana yang dapat diperoleh dari pembiayaan hanya bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya. Kondisi pembiayaan daerah dalam kurun waktu Tahun 2009-2014 dapat digambarkan seperti terlihat pada Tabel 3.6 sedangkan untuk menutupi defisit riil anggaran pada kurun waktu yang sama dapat digambarkan komposisinya pada tabel 3.7.

Tabel 3.6
Defisit Riil Anggaran
Kota Banda Aceh

No	Uraian	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	370.370.210.049	377.313.631.515	710.616.053.064	767.571.348.247	988.240.738.967	1.134.134.240.955
2	Belanja Daerah	505.393.826.332	501.550.138.138	761.313.118.850	825.231.713.764	988.076.695.439	1.134.491.768.343
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	700.000.000	1.050.000.000	2.720.000.000	7.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
	Defisit Riil	**(135.962.185.583)**	**(25.593.329.623)**	**(44.396.096.886)**	**(45.160.365.517)**	**(51.334.956.472)**	**(63.857.495.388)**

Sumber: BPKAD Kota Banda Aceh 2013

Tabel 3.7
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Banda Aceh (persen)

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil					
		2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	5,32	2,27	1,82	2,59	4,11	5,27
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
5	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0

Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2015

Untuk realisasi sisa lebih perhitungan anggaran pemerintah daerah, dengan kurun waktu yang sama pada tahun 2009-2014.Gambaran enam tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kota Banda Aceh

No	Uraian	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
		(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA
1	Jumlah SILPA	13.651.721.857	45,25	13.826.878.213	101,28	21.386.469.168	191,82	40.553.782.300	189,60%	62.987.795.452	166,31%	3.000.000.000	4,73%
2	Pelampauan Penerimaan PAD	-894.830.380	-2,03	538.892.971	3,95	5.318.188.403	32,78	7.833.236.155	36,63%	21.892.393.404	52,75%	15.800.941.525	25,09%
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	- 18.725.215.851	-63,13	8.506.331.586	62,31	2.764.655.257	-17,04	724.674.867	3,39%	-6.099.204.895	-15,04%	-2.635.454.152	-4,18%
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	- 11.421.269.338	-38,69	- 19.909.056.552	145,84	28.124.749.829	204,17	- 32.331.193.640	- 151,18%	- 35.972.352.688	-88,70%	- 14.057.487.289	-22,32%
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	38.993.827.356	132,09	24.418.486.000	178,87	46.860.206.983	288,83	59.829.064.921	279,73%	80.166.958.701	197,67%	98.325.170.415	156,13%
6	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai Akhir Tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kegiatan Lanjutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2015

Dari Tabel 3.8 terlihat bahwa selama 6 tahun terakhir (2009-2014), sebagai tahun rujukan yang dijadikan bahan laporan keuangan pemerintah daerah, adanya kecenderungan penurunan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) pada setiap tahunnya. Merujuk pada ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sumber terjadinya SiLPA berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

3.3. Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan pengeluaran keuangan yang harus dilakukan pemerintah daerah, baik terkait dengan pembelanjaan pada kategori kewajiban maupun pengeluaraan pembiayaan. Pengeluaran keuangan pemerintah daerah sepenuhnya mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan normatifnya telah disampaikan dalam uraian sebelumnya.

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Anggaran wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah belanja daerah yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang sifatnya wajib dan tidak bisa ditunda pelaksanaannya, apabila tidak dilaksanakan maka pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan di Kota Banda Aceh tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun pengeluaran wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama adalah belanja gaji dan tunjangan bagi PNS, belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH, belanja honorarium non PNS (tenaga honorer dan

kontrak), Belanja listrik,telepon,dan air. Di dalam pembiayaan daerah juga terdapat pengeluaran yang bersifat wajib, yaitu pembayaran pokok utang, dalam hal ini Pemerintah Kota Banda Aceh berkewajiban membayar utang kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini kepada World Bank untuk pembangunan Pasar Aceh. Untuk lebih jelasnya mengenai besaran pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3.9
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Banda Aceh 2009-2014

No	Uraian	Tahun 2009 (Rp.)	Tahun 2010 (Rp.)	Tahun 2011 (Rp.)	Tahun 2012 (Rp.)	Tahun 2013 (Rp.)	Tahun 2014 (Rp.)	Rata-rata Perkembangan (%)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**303.361.067.035**	**349.973.637.045**	**404.666.062.014**	**484.057.075.788**	**538.826.966.515**	**588.801.785.235**	**14.24**
1	Gaji dan Tunjangan	236.184.316.641	244.063.391.735	273.155.484.390	303.930.227.788	321.053.117.718	348.142.379.271	7.81
2	Tambahan Penghasilan PNS	65.239.971.701	104.001.245.310	129.598.577.624	178.214.548.000	215.830.737.728	242.791.435.964	31.00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRK serta KDH/WKDH	1.936.784.693	1.912.000.000	1.912.000.000	1.912.000.000	1.942.111.069	2.868.000.000	9.59
4	Belanja Bunga	-	-	-				
5	Belanja Bagi Hasil	-	-	-				-
B	**Belanja Langsung**	**53.248.465.740**	**50.359.971.738**	**73.519.660.547**	**83.089.329.074**	**98.116.388.726**	**110.583.742.136**	**12.53**
1	Honorarium Non PNS	38.121.120.000	35.565.169.500	37.256.608.721	45.910.953.500	53.820.875.126	51.862.219.000	6.97
2	Belanja Jasa Kantor (air+listrik+telf)	14.490.845.740	14.763.802.238	17.518.846.925	28.131.765.574	31.911.502.300	43.007.277.136	24.05

3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	636.300.000	30.000.000	940.000.000	55.000.000	195.000.000	310.000.000	631.48
4	Belanja Penunjang Pendidikan	0	0	17.804.205.000	8.688.810.000	9.179.010.000	15.404.246.000	30.57
C	**Pembiayaan Pengeluaran**	**700.000.000**	**0**	**2.000.000.000**	**4.000.000.000**			**0.00**
1	Pembayaran Pokok Utang	700.000.000	0	2.000.000.000	4.000.000.000			0.00
	Total (A+B+C)	**357.309.532.775**	**400.333.608.784**	**480.185.722.661**	**571.146.404.862**	**636.943.355.241**	**699.385.527.371**	**14.45**

Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2015

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Setelah mengetengahkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sampai dengan tahun 2014. Sebagai kerangka keuangan yang telah dimasukan dalam laporan keuangan daerah, selanjutnya akan digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah hingga tahun 2017 mendatang seperti disajikan di Tabel 3.8. Untuk proyeksi rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah 2012-2017, dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kota Banda Aceh

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2013* **(Rp.)**	**Tahun 2014*** **(Rp.)**	**Tahun 2015*** **(Rp.)**	**Tahun 2016**** **(Rp.)**	**Tahun 2017** **(Rp.)**
1	Pendapatan	928.240.738.967	1.134.104.242.955	1.217.866.428.916	1.318.163.038.568	1.449.968.342.425
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0	0	0	0	0
	Total Penerimaan	928.240.738.967	1.134.104.242.955	1.217.866.428.916	1.318.163.038.568	1.449.968.342.425
	Dikurangi :					
4	Belanja dan pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	620.809.335.301	675.428.555.686	676.008.233.987	652.857.248.310	718.142.973.141
	Kapasitas Riil kemampuan Keuangan	**307.431.403.666**	**458.675.687.269**	**541.558.194.929**	**665.295.790.258**	**731.825.369.284**

*) : *Angka Realisasi Anggaran*
**) : *Pagu Anggaran*
Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2015

Tabel 3.11
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Banda Aceh

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
I	**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan**	**Rp 307.431.403.666**	**Rp458.675.687.269**	**Rp 541.558.194.929**	**Rp 665.295.790.258**	**Rp 731.825.369.284**
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I		-		-	-
II.a	Belanja Langsung	417.479.751.383	Rp572.048.593.945	Rp 640.328.445.456	Rp 602.708.542.375	Rp 608.481.382.778
II.b	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
	Dikurangi :			-		-
II.c	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	81.982.358.786	Rp 86.626.770.451	Rp 89.018.341.485	Rp 70.037.009.346	Rp 77.040.710.281
II.d	Pengeluaran Pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	-		-	-	-
II	**Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)**	**335.497.392.597**	**485.421.823.494**	**551.310.103.971**	**532.671.533.029**	**531.440.672.497**
	Sisa kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran	**(28.065.988.931)**	**(26.746.136.225)**	**(9.751.909.042)**	**132.624.257.229**	**200.384.696.786**

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	prioritas I (I-II)					
	Rencana alokasi Pengeluaran prioritas I			-	-	-
III.a	Belanja Tidak langsung	568.495.924.036	Rp622.433.144.378	Rp 620.120.671.090	Rp 713.144.496.193	Rp 784.458.945.812
	Dikurangi :			-	-	-
III.b	Belanja Tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	538.826.966.515	Rp588.801.785.235	Rp 586.989.892.502	Rp 582.820.238.964	Rp 641.102.262.860
III	**Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)**	**29.668.957.521**	**33.631.359.143**	**33.430.778.588**	**130.324.257.229**	**143.356.682.952**
	Surplus anggaran riil atau berimbang (I-II-III)	**(57.734.946.452)**	**(60.377.496.368)**	**(43.182.687.630)**	**2.300.000.000**	**57.028.013.835**

**) : Angka Realisasi Anggaran*
***) : Pagu Anggaran*
Sumber : DPKAD dan Bappeda Kota Banda Aceh 2016

Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai :

a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (dedicate) kepala daerah seperti penguatan struktur ekonomi berbasis perdesaan, pembangunan infrastruktur perdesaan dan penanganan kemiskinan serta implementasi amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, seperti prioritas bidang pendidikan 20 (dunpuluh persen) dan kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen). Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, kegiatan yang memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan. Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pendanaan alokasi kapasitas riil keuangan Daerah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12
Kerangka Pendanaan
Alokasi Kapasitas Riil Kenangan Daerah Kota Banda Aceh

No	Jenis Dana	Alokasi									
		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	Prioritas I	31,03%	335.407.892.597	40,64%	485.421.823.491	39,81%	459.516.258.686	40,48%	533.671.533.029	40,48%	585.938.686.032
2	Prioritas II	3,01%	29.656.957.521	2,82%	33.631.359.143	2,88%	33.430.778.898	9,90%	130.224.257.029	9,90%	143.356.682.952
3	Prioritas III	62,96%	620.809.335.301	55,55%	575.428.555.686	57,83%	676.008.268.987	49,61%	652.857.248.310	49,61%	718.142.973.141
	Total	**100%**	**986.976.686.419**	**100%**	**1.194.481.738.323**	**100%**	**1.168.955.301.261**	**100%**	**1.315.853.038.568**	**100%**	**1.447.438.342.425**

Prioritas III
- Tambahan penghasilan PNS
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial
- Belanja Bantuan keuangan
- Belanja Tidak terduga
- Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

**) : Angka Realisasi Anggaran*
***) : Pagu Anggaran*
Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2015

BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis dalam RPJM Kota Banda Aceh 2013-2017 dirumuskanterlebih dahulu dengan menggali dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan di Kota Banda Aceh, lalu dikaitkan dengan isu global, nasional,regional, dan lokal. Isu strategis RPJMD tersebut akan menjadi salah satu dasar penentuan prioritas pembangunan pada akhir periode RPJMD.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Semakin membaiknya berbagai indicator pembangunan merupakan hasil yang menggembirakan bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Banda Aceh.Namun demikian, sebagai Ibukota Provinsi, Kota Banda Aceh tetap menyandang banyak permasalahan dan tantangan, baik dari eksternal maupun internal.Permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Banda Aceh merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunanKota Banda Aceh pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

1. Urusan Pendidikan

Secara umum, pendidikan di Kota Banda Aceh telah baik, dimana angka rata-rata lama sekolah adalah 12,07% (Tahun 2013), Angka Melek Huruf pada tahun 2013, 99,64%, dan sejak tahun 2008 tidak ada anak yang putus sekolah (0). Akan tetapi peningkatan pendidikan di Kota Banda Aceh masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya:

- Masih rendahnya akses dan pemerataan pelayanan pendidikan

- Masih rendahnya mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan
- Masih rendahnya tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan.
- Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP)

2. Urusan Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat kota Banda Aceh secara umum semakin membaik, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya AHH (Angka Harapan Hidup) Kota Banda Aceh, untuk Tahun 2013 adalah 71,72 tahun melebihi AHH Nasional (70,74 tahun). Hasil analisis dari RISKESDAS (riset kesehatan dasar) tahun 2007 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI menggambarkan bahwa kota Banda Aceh merupakan salah satu dari 8 kabupaten/kota di Aceh yang tidak termasuk dalam Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), sementara Aceh termasuk dalam 10 propinsi DBK di Indonesia. Meskipun demikian, masih ditemukannya berbagai macam permasalahan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Banda Aceh, diantaranya adalah :

- Masih ditemukannya penyakit menular dan penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif tertentu di masyarakat
- Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih endemis
- Meningkatnya penderita TBC/TB paru di masyarakat
- Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap penerapan Perwal No.47/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
- Kurangnya beberapa tenaga ahli kesehatan (dr,drg, apoteker, fisioterapi)

3. Urusan Pekerjaan Umum

Kualitas dan kapasitas pembangunan infrastruktur menjadi salah satu Indikator keberhasilan pembangunan, beberapa Indikator Infrastruktur dasar di Kota Banda Aceh telah menunjukkan peningkatan, seperti panjang jalan dalam kondisi baik 77,81 % (Tahun 2014), drainase dalam kondisi baik 61% (Tahun 2014) dan rumah tangga pengguna air bersih 81,9 % (Tahun 2014),namun demikian masih ada berbagai permasalahan yang dihadapi, yakni :

- Jalan sering dilewati kendaraan bertonase tinggi melebihi dari kemampuan konstruksi
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan sehingga menyebabkan banyak drainase tersumbat oleh sampah.
- Banyak terjadi penyempitan badan jalan karena belum idealnya manajemen traffic, sehingga ruas jalan banyak dipakai untuk parkir yang mengakibatkan timbulnya kemacetan.
- Banyaknya usulan program pembangunan infrastruktur melalui musrenbang dengan alokasi dana APBK untuk pembangunan infrastruktur yang terbatas
- Besarnya kebutuhan dana untuk pembebasan tanah.
- Masih adanya kawasan yang rawan genangan dan banjir
- Jalan arteri dan sekunder yang ada mulai mendekati titik puncak dan untuk mengatasinya perlu penambahan jaringan jalan baru dan fly over.
- Ketersediaan lahan yang kurang bagi pengadaan drainase makro
- Masih adanya masalah bidang sanitasi
- Masih banyak septictank penduduk yang tidak kedap air sehingga merusak air tanah. Selain itu dengan perkembangan penduduk yang terus bertambah dan jumlah bangunan yang padat sistem septictank skala setempat sudah tidak memadai lagi sehingga dibutuhkan septictank skala kawasan/komunal.
- Masih adanya masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air bersih
- Masih perlunya normalisasi dan optimalisasi jaringan pipa air bersih pada kawasan tertentu
- Penghuni tidak tertampung di Rusunawa
- Masih adanya penduduk yang menempati rumah tidak layak huni, dan memiliki rumah
- Masih adanya kawasan kumuh yang perlu ditangani

4. Urusan Perhubungan

Transportasi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan, membangun, dan membentuk perekonomian suatu daerah. Untuk itu sangat diperlukan suatu sistem transportasi yang baik, yang dapat menghubungkan

antarwilayah dan menjadi prasarana pergerakan manusia dan proses pembangunan.

Meskipun Pemerintah Kota Banda Aceh telah meningkatkan berbagai macam fasilitas transportasi, tetapi masih ditemukan berbagai permasalahan yang muncul, yakni :

- Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Banda Aceh terus menurun dari tahun ke tahun, menyebabkan angka kecelakaan lalu lintas (laka lantas) semakin meningkat
- Pembangunan sarana penunjang dan fasilitas perhubungan belum memadai.
- Masih rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas angkutan Jalan.
- Keterbatasan ruang parkir dan pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi

5. Urusan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan bagian dari kehidupan manusia dan menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup.Salah satu tolak ukur keberhasilan Pemerintah dan masyarakat Kota Banda Aceh dalam urusan lingkungan hidup adalah perolehan Anugerah Adipura yang ke-7 kalinya pada tahun 2014, yang merupakan penghargaan paling bergengsi pada bidang lingkungan hidup di Indonesia, namun demikian masih ditemukan berbagai permasalahan lingkungan hidup, diantaranya adalah :

- Timbulan sampah yang semakin meningkat setiap tahunnya.
- Potensi masyarakat dalam pengelolaan sampah relatif belum berhasil dikembangkan secara sistematis yang terintegrasi dengan pola pelayanan Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.
- Perilaku warga masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan sehingga munculnya TPS-TPS liar di banyak tempat, sedangkan pewadahannya masih sangat terbatas.
- Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau
- Kesadaran dan partisipasi pedagang kaki lima masih sangat rendah untuk mengelola sampah yang dihasilkan dari kegiatan mereka.
- Biaya pengelolaan sampah masih didominasi oleh APBK, sedangkan pembayaran retribusi dari warga masyarakat masih sangat rendah.

- Masih dirasakan sulit mendapatkan lahan untuk lokasi-lokasi TPS, karena penolakan oleh warga masyarakat.
- Belum berfungsinya penegakan hukum, yaitu Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Kebersihan dan Keindahan.
- Masih belum adanya fasilitas pemanfaatan gas dan pengolahan gas menjadi energi di TPA Gampong Jawa
- Belum adanya qanun yang mengatur tentang lingkungan hidup dalam wilayah Kota Banda Aceh
- Belum memiliki tenaga laboran yang diperuntukan khusus untuk menganalisa/sampling data dari lapangan. Sehingga tidak bisa dilakukan analisa data secara rutin/berkala, begitu pula bila ada permasalahan berupa kasus pencemaran baik air, udara maupun limbah yang muncul dalam masyarakat tim tidak dapat langsung action ke lapangan untuk melakukan sampling/analisa data dari sumber pencemaran.

6. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

- Masih adanya masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-el
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akte kelahiran dan kematian
- Belum terkelolanya arsip kependudukan secara baik

7. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif
- Belum maksimalnya perlindungan anak dan pemberian kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya
- Belum terwujudnya kota layak anak
- Pelaksanaan Kota Ramah Gender belum terlaksana secara optimal
- Belum maksimalnya pelaksanaan program keluarga berkualitas

8. Urusan Sosial

- Masih banyak masyarakat yang menganggur
- Belum sinergisnya penggunaan Data Base kemiskinan kota banda aceh dalam program pengentasan kemiskinan

- Masih adanya gelandangan dan pengemis

9. Urusan Kebudayaan

- Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan sarana objek wisata wisata yang telah ada.
- Rendahnya partisipasi para pelaku seni dalam kegiatan kebudayaan
- Masih belum adanya sarana gedung kesenian yang memadai
- Kurangnya kesadaran dalam menyelamatkan nilai sejarah budaya, mulai dari kawasan bertipologi sosial budaya seperti Kawasan Gampong Jawa dan Gampong Pande yang merupakan kawasan pelestarian utama situs-situs cagar, dan Kawasan Peunayong yang masih memiliki arsitektur bangunan bercirikan arsitektur Cina/Tionghoa serta masih bertahanya sistem dan nilai-nilai budaya masyarakat Cina/Tionghoa.
- Kurangnya fasilitas pendukung pada objek wisata
- Kurangnya pemanfaatan IT bagi sumber daya manusia bidang seni dan pariwisata
- Kurangnya event-event wisata, atraksi seni budaya dan optimalisasi pemasaran.
- Belum adanya dokumen Rencana pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan seni budaya daerah yang didukung dan disinergikan dengan hasil pemetaan kondisi Seni Budaya daerah dan target segmen pasar dan kebutuhan wisatawan hasil analisis pemasaran agar optimalisasi pariwisata seni budaya dapat berkembang.
- Kurangnya Sosialisasi informasi mengenai kegiatan kepariwisataan

10. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

- Belum optimalnya transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
- Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM SKPD/Unit Kerja pada bidang tertentu (pengelola barang, petugas pajak daerah dan pengawas)
- Masih rendahnya fungsionalisasi Aset daerah
- Penerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD) belum optimal
- Kurangnya kompetensi PNS dalam menduduki Jabatan Struktural yang bersifat Teknis

- Kuantitas dan Kualitas SDM Aparatur belum optimal
- Rendahnya penataan dan pengelolaan kearsipan
- Belum optimalnya disiplin PNS
- Sarana dan prasarana Diklat belum optimal
- Belum responsifnya SKPD menindaklanjuti penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
- Belum seluruh SKPD mendapat predikat Wilayah bebas Korupsi (WBK)
- Belum seluruh SKPD mengimplementasikan SPIP secara optimal
- Belum tersedianya aplikasi pengelolaan resume rapat secara elektronik pada SKPD
- Pemanfaatan email dan social media untuk kebutuhan dinas belum optimal
- Masih adanya gampong yang belum terbuka dalam melaporkan rincian penggunaan PAG
- Masih adanya beberapa gampong yang belum menyusun RPJMG
- Masih adanya beberapa gampong yang belum menyusun Qanun Gampong tentang penggunaan PAG

11. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Belum berdayanya Ekonomi Industri Kreatif
- Masih lemahnya penguatan kelembagaan gampong
- Masih lemahnya SDM sebagai pelaksana program/kegiatan pemberdayaan ekonomi Masyarakat gampong
- Masih sederhananya alat produksi usaha

12. Urusan Kelautan

- Masih rendahnya terapan teknologi dalam usaha penangkapan ikan
- Rendahnya kualitas kemasan produk hasil pertanian di Kota Banda Aceh

13. Urusan Perindustrian

- Belum tertatanya Pasar dan Toko Modern
- Belum optimalnya fungsi Pasar dan Penataan PKL
- Belum optimalnya pegawasan produk makanan dan minuman

- Masih banyak usaha yang belum memiliki izin
- Masih banyak pedagang yang berjualan di tempat terlarang
- Masih ditemukan makanan dan minuman yang mengandung bahan kimia berbahaya

14. Penegakan Syariat Islam

Penegakan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh menghadapi berbagai kendala.Selain dari kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama Islam dalam masyarakat, juga gencarnya pengaruh dari luar Islam untuk menodai aqidah masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh adalah sejak Tahun 2011 telah diterapkan Program Pendidikan Diniyah yang bertujuan untuk membangun karakter pelajar agar lebih giat mendekatkan diri dengan agama, 9 SD dan 4 SMP telah ditetapkan sebagai pilot project, mendapat sambutan yang positif maka mulai tahun 2013 pendidikan diniyah di terapkan secara bertahap kepada seluruh sekolah umum dan swasta tingkat SD, SMP dan SMA/K. Berikut adalah beberapa kendala dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh :

- Tingginya upaya pendangkalan aqidah dan pemurthadan
- Masih adanya tempat usaha yang melanggar Syariat Islam
- Masih kurangnya SDM guru diniyah/agama di sekolah
- Masih adanya pengolahan makanan yang tidak halal
- Besarnya potensi zakat yang disalurkan keluar Kota Banda Aceh
- Belum optimalnya pelayanan kesehatan yang Islami
- Belum optimalnya pengembangan pariwisata bernuansa islami

4.2 Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan untuk dijadikan prioritas penanganan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di dalam kurun waktu beberapa tahun mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam RPJM Kota Banda Aceh ini ini ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini,

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang sigiifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

4.2.1 Penelaahan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Internasional

Dalam menentukan isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan Kota Banda Aceh, terlebih dahulu dilakukan review terhadap kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan internasional.

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

RPJMN 2015-2019 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Kota Banda Aceh mendapat perhatian khusus dalam Agenda Pembangunan yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019, yakni:

- Termasuk salah satu dari 21 kabupaten/kota di Sumatera sebagai sasaran pengurangan bencana dengan mengurangi indeks risiko bencana (Buku III Agenda Pembangunan Wilayah)
- Kota Banda Aceh diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) serta pusat pemerintahan Provinsi NAD sekaligus sebagai pusat koleksi dan distribusi skala regional untuk produksi pertanian, pariwisata, perikanan laut (Buku III Tabel 8.5 Lokasi prioritas kota sedang yang berfokus pada upaya pemerataan di Wilayah Sumatera)
- Kota Banda Aceh termasuk dalam Prioritas Program Pembangunan, yaitu Percepatan pembangunan infrastruktur Pembangunan Jalur Kereta Api Banda Aceh- Lhokseumawe, Revitalisasi Kawasan Terminal di Banda Aceh (Keudah dan Peunayong) dan Science Park berbasis kebencanaan di Kota Banda Aceh (Buku III Tabel 8.13 Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Aceh)

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2012-2017

Visi pembangunan Aceh tahun 2012-2017 adalah: "ACEH YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI"

Misi

a. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi
b. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat
c. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia
d. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan
e. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA

Sasaran dari Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJM Aceh menjadi tanggung jawab bersama seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh termasuk Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi.

3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM, termasuk Pemerintah Kota Banda Aceh.

SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga tersebut selanjutnya menjadi acuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban di daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

Sampai dengan pertengahan tahun 2011 Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah ditetapkan oleh 13 Kementerian/Lembaga, yaitu :

1. SPM Bidang Perumahan Rakyat
2. SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
3. SPM Bidang Sosial
4. SPM Bidang Kesehatan
5. SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. SPM Bidang Lingkungan Hidup
7. SPM Bidang Keluarga Berencana dan Sejahtera
8. SPM Bidang Ketenagakerjaan
9. SPM Bidang Pendidikan
10. SPM Bidang Pekerjaan Umum
11. SPM Bidang Ketahanan Pangan
12. SPM Bidang Kesenian
13. SPM Bidang Komunikasi dan Informasi

4. Millenium Development Goals (MDG's)

MDG's merupakan kesepakatan para kepala negara dan perwakilan dari 189 negara dalam sidang PBB di New York di bulan September tahun 2000 menegaskan kepedulian utama masyarakat dunia untuk bersinergi dalam mencapai tujuan MDG's di tahun 2015.

Tujuan MDG'S menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan yang mencakup semua komponen kegiatan yang targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015.Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam **Millenium Declaration (Deklarasi Milenium)**, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium /Millenium Summit di New York pada bulan September 2000. Deklarasi berisi Suatu kesepakatan dan kemitraan global untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan

8 tujuan dari MDG'S, yaitu :

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

4. Menurunkan kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Mengendalikan HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya (TB)
7. Menjamin kelestarian lingkungan hidup
8. Mengembangkan kemitraan pembangunan di tingkat global.

Kota Banda Aceh mendukung terwujudnya tujuan MDGs pada Tahun 2015 dan berbagai program/kegiatan telah dilaksanakan.Pada tahun 2010 Kota Banda Aceh berhasil meraih MDGs Metro TV Award.

5. Post 2015 Development

Agenda pembangunan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat ini berpusat pada pencapaian MDGs diseluruh dunia yang akan dievaluasi pada Bulan Oktober 2015. Untuk mendukung mempersiapkan agenda setelah Tahun 2015 (Post-2015 Development Agenda), pada tanggal 31 Juli2012,SekretarisJenderalBanKi-moon menunjuk27masyarakat sipil, sektor swasta, danpemimpin pemerintahandari seluruhwilayah di duniauntukhadir dalam High Level Panel (HLP) untuk memberikan masukan bagi Post-2015 Development Agenda, salah seorang anggotapanel adalah Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

PadaHigh Level Panel on the Post-2015 Development Agendadirilissebuah laporan "A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development,"sebuah laporanyang menetapkanagendayang universaluntuk memberantaskemiskinandarimukabumipada tahun 2030, danmemenuhi janjipembangunan berkelanjutan.

Berikut adalah limapergeseranstransformasibesar yang diusulkan :

1. Tidak meninggalkan siapapun di belakang.
   Setelah tahun 2015 dunia harus bergerak dari mengurangi kemiskinan ke mengakhiri kemiskinan ekstrim, dalam segala bentuknya.Dunia perlu memastikan bahwa tidak ada satu orangpun apapun etnis, gender, geografi, disabilitas, ras dan status lainnya yang tidak mendapatkan kesemparan ekonomi dasar dan hak asasi.

2. Menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai inti

   Dunia harus mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dari keberlanjutan.Dunia harus bertindak sekarang untuk mengurangi laju perubahan iklim dan degradasi lingkungan, yang menimbulkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi manusia.

3. Transformasi ekonomi untuk penyediaan pekerjaan dan pembangunan yang inklusif

   Transformasi ekonomi yang mendalam dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim dan meningkatkan mata pencaharian, dengan memanfaatkan inovasi, teknologi dan potensi bisnis. Semakin beragam kegiatan ekonomi, dan dengan kesempatan yang sama bagi semua orang, akan mewujudkan iklusi sosial, terutama bagi generasi muda, dan mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

4. Membangun perdamaian dan kelembagaan yang efektif, terbuka dan akuntabel bagi semua

   Kebebasan dari konflik dan kekerasan adalah hak manusia yang paling mendasar, dan merupakan fondasi paling penting dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera.Pada waktu yang bersamaan, masyarakat di seluruh dunia berharap pemerintah bersikap jujur, akuntabel dan responsif terhadap permintaan mereka.Dunia mendesak sebuah pergeseran fundamental-yang menempatkan perdamaian dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai elemen inti kesejahteraan, bukan sebuah pilihan ekstra.

5. Membina kemitraan global baru

   Semangat kebersamaan, kerjasama dan akuntabilitas antar pihak harus menyokong agenda pembangunan pasca 2015. Kemitraan baru harus dilandaskan pada pemahaman bersama akan perikemanusiaan, berbasis pada pengertian dan manfaat antar pihak. Hal tersebut harus berada di tengah tengah masyarakat, termasuk mereka yang terdampak oleh kemiskinan dan terpinggirkan, perempuan, remaja, lansia, penyandang cacat dan penduduk lokal/indigenous.Kemitraan tersebut harus melibatkan organisasi masyarakat, institusi multilateral, pemerintah daerah dan pusat, komunitas sains dan akademis, pelaku bisnis dan filantropi.

6. Penelaahan RPJMD Kabupaten/Kota lainnya

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan jangka menengah antaraKota Banda Aceh dan daerah sekitarnya, maka perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh juga meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD Kabupaten Aceh Besar 2012-2017 dan RPJM Kota Sabang 2013-3017.

Tabel 4.1

Identifikasi Isu Strategis Kabupaten/Kota lainnya

Kota Sabang (2013-2017)	Keterkaitan	Kabupaten Aceh Besar (2012-2017)	Keterkaitan
Kota Sabang sebagai daerah destinasi pariwisata internasional akan memberi pengaruh terhadap kehidupan budaya local dan nilai-nilai kenganaan.		Nilai-nilai islami belum sepenuhnya diadopsi dan dilaksanakan sesuai tuntunan syariat,baik karena faktor internal maupun eksternal.	Sebagai daerah syariat Kota Banda Aceh masih menghadapi masalah dalam penegakan syariat, diantaranya masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mengamalkan syariat islam
Belum terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan padat karya (pro-growth&pro-job), khususnya pertumbuhan sektor-sektor usaha yang melibatkan orang miskin (pro-poor) sehingga belum berkontribusi secara ekonomis terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan		Persentase penduduk miskin di Aceh Besar masih relatif tinggi	Tingginya tingkat pengangguran Kota Banda Aceh lebih disebabkan karena tingginya arus migrasi dari daerah lain mengingat Kota Banda Aceh adalah pusat ekonomi dan pemerintahan Propinsi Aceh.,

Kota Sabang (2013-2017)	Keterkaitan	Kabupaten Aceh Besar (2012-2017)	Keterkaitan
dan pengangguran			
UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menetapkan Pelabuhan Sabang sebagai Hubport (pelabuhan ekspor/impor internasional dan pelabuhan transit sebagai peluang percepatan pembangunan ekonomi		Letak geografis Kabupaten Aceh Besar disebelah utara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan disebelah barat dengan Samudera Indonesia memberi peluang yang strategis untuk tumbuh dan berkembang.	Strategi kerjasama daerah yang telah dilakukan sejak tahun 2008 adalah kerjasama Regional Basajan (Banda Aceh-Sabang-Jantho Aceh Besar). Kerjasama ini dimaksudkan untuk terwujudnya suatu kekuatan ekonomi baru wilayah barat Sumatera, di bidang pariwisata, sumber daya manusia, dan integrasi infrastruktur ekonomi
		Rendahnya kualitas dan daya saing pendidikan sehingga banyak siswa/I dari Aceh Besar lebih memilih bersekolah di Banda Aceh	Tingginya jumlah siswa/i yang datang ke Banda Aceh jika tidak disertai dengan fasilitas yang memadai dapat menurunkan kenyamanan belajar. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah kota sejak 2010 adalah dengan pembatasan penerimaan jumlah siswa dari luar Banda Aceh
		Belum terkendalinya dengan baik aktivitas masyarakat dalam usaha pertambangan, terutama bahan	Sungai Krueng Aceh yang mengalir dari Aceh Besar (di Hulu) - Banda Aceh (di Hilir)

Kota Sabang (2013-2017)	Keterkaitan	Kabupaten Aceh Besar (2012-2017)	Keterkaitan
		pertambangan galian C, menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang mengimbh semakin buruknya kualitas air dan kerusakan lingkungan permukiman.	merupakan sumber utama air bersih bagi masyarakat di kedua wilayah, lambat laun akan terkena dampak dari pengrusakan lingkungan, yang akan mempengaruhi kualitas air bersih di Kota Banda Aceh
		Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk pemekaran wilayah di Aceh Besar	Terbukanya peluang bagi perluasan Kota Banda Aceh pada wilayah Aceh Besar

7. Penelaahan RPJPD Kota Banda Aceh

RPJP Kota Banda Aceh tahun 2007 – 2027 merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk setiap jangka waktu 5 tahunan. Visi Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2007 – 2027 adalah :"TERWUJUDNYA BANDA ACEH SEBAGAI KOTA TAMADDUN, MODERN DAN ISLAMI".

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Banda Aceh tersebut ditempuh melalui 7 misi pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah disertai dengan penegakan hukum.
3. Mewujudkan pembangunan Kota Banda Aceh yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota pendidikan yang berkualitas.

5. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, industri dan perikanan.
6. Mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang sehat, cerdas dan berkualitas.
7. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota wisata berbasis masyarakat dan budaya Islami.

4.2.2 Penetapan Isu Strategis

Berdasarkan perkembangan yang mengemuka, maka diperoleh beberapa isu strategis sebagai hasil dari penilaian, yang diperkirakan dapat memberi manfaat dan pengaruh dalam kurun waktu 2012-2017 adalah sebagai berikut:

1. Masih terjadinya pendangkalan aqidah.

Pendangkalan aqidah menjadi isu strategis di Kota Banda Aceh, disebabkan oleh Kota Banda Aceh sebagai sebuah kota yang terbuka dengan penduduk yang heterogen, sangat mudah untuk masuk berbagai aliran keagamaan, apalagi dengan peran ekonomi global yang tiada batas. Pendangkalan aqidah pernah merebak di Kota Banda Aceh beberapa waktu lalu yang melibatkan banyak generasi muda Kota Banda Aceh, yaitu terjadinya pergeseran nilai-nilai agama pada aliran tertentu. Isu ini telah menjadi ranah publik.

2. Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam melayani masyarakat

Kapasitas aparatur yang belum optimal tercermin dari belum maksimalnya pelayanan yang diberikan, sehingga memberikan kulitas yang rendah bagi masyarakat. Seperti telah dikemukakan di bagian terdahulu, masih banyaknya penduduk yang belum dapat melanjutkan pendidikan dan kesehatan bayi yang masih rendah. Rendahnya kapasitas ini dapat mendorong pada menurunnya kesejahteraan masyarakat.

3. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran

Tingginya angka kemiskinan dan pengguran telah menjadi fenomena umum di negera sedang berkembang. Untuk Kota Banda Aceh, indikasi ini ditunjukkan

oleh hampir 10 persen penduduk Kota Banda Aceh miskin dan hampir 9 persen penduduk di dalam kelompok pengangguran terbuka.

4. Sarana dan prasarana perkotaan belum memadai

Indikasi ini juga ditunjukkan seringnya terjadi kemacetan karena panjang jalan per kendaraan yang semakin pendek. Indikasi lain adalah keluhan masyarakat yang terus menerus terjadi karena kekurangan lokasi parkir.

5. Belum optimalnya kualitas pendidikan

Indikasi ini dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di dalam melanjutkan pendidikan, serta rendahnya tingkat rata-rata lama bersekolah penduduk. Belum lagi adanya indikasi keluhan masyarakat dengan masih banyaknya lulusan pendidikan menengah atas yang belum dapat diterima di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang ternama.

6. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan

Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan dapat dilihat pada masih tingginya AKB bayi, serta masih tingginya rasio penduduk terhadap dokter, dan tingginya rasio posyandu terhadap bayi. Tingginya rasio tersebut akan berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan.

7. Belum optimalnya pemanfaatan fungsi pasar

Ini merupakan indikasi yang ditunjukkan oleh belum tertibnya pedagang di dalam memanfaatkan pasar sebagai tempat melakukan transaksi dagangannya. Masih banyak penduduk yang lebih suka berjualan di badan jalan pasar atau di emperan-emperan toko.

8. Kurangnya kesiapan dalam menghadapi bencana

Kurangnya kesiapan menghadapi bencana dapat diindikasikan oleh banyaknya penduduk yang panik ketika terjadi suatu bencana, seperti adanya gempa. Bahkan, tanpa ada informasi apapun, masyarakat langsung mengambil sikap menurut yang mereka perkirakan, tanpa mempersiapkan apapun yang harus dipenuhi bila bencana itu benar adanya.

9. Partisipasi perempuan dalam pembangunan belum proporsional

Partisipasi perempuan di dalam lembaga politik, baik eksekuti maupun legislatif masih tergolong rendah. Rendahnya partisipasi perempuan ini hanya bila ditinjau dari keterlibatan mereka secara aktif di dalam berbagai kegiatan pembangunan. Indikasi ini dapat terjadi karena para perempuan terikat dengan keluarga atau indikasi-indikasi lain.

BAB V

PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 adalah : **Banda Aceh Model Kota Madani.** Kota Madani adalah sebuah kota yang penduduknya beriman dan berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat hukum, dan memiliki ruang publik yang luas. Disamping itu masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan, inklusif, mampu bekerjasama untuk menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Keadaan ini diharapkan melahirkan warga Kota Banda Aceh yang memiliki jati diri yang ramah, taat aturan, damai, sejahtera, harga diri tinggi, berbudaya, dan beradab.

5.2 Misi

Upaya untuk mencapai visi dapat ditempuh dengan beberapa misi berikut :

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Banda Aceh

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Pengamalan Syariat Islam Secara Kaffah	
TUJUAN	SASARAN
1 Menata kembali kehidupan masyarakat sesuai dengan Al-Quran dan Hadits	1 Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat.
2 Menciptakan masyarakat intelektual islami	2 Terciptanya masyarakat cerdas dalam menghadapi era globalisasi 3 Terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel

Misi 2. Memperkuat Tata KelolaPemerintahan Yang Baik	
TUJUAN	SASARAN
1 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam pelayanan public dan pengawasan	1 Terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, kompetitif, amanah, professional dan bertanggungjawab
2 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik	2 Terciptanya pemerintahan yang berbasis e-government 3 Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif 4 Tersedianya paying hukum yang menjadi pedoman untuk mengoptimalkan birokrasi pelayanan 5 Meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat 6 Terbangunnya kehidupan berdemokrasi di gampong
Misi 3. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan	
TUJUAN	SASARAN
1 Membangun Perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan social masyarakat	1 Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian
2 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik	2 Tersedianya akses permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) 3 Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi 4 Terwujudnya pengembangan sektor perikanan, peternakan dan pertanian 5 Meningkatnya penanggulangan PMKS

Misi 4. MenumbuhkanMasyarakat Yang Berintelektualitas, Sehat Dan Sejahtera, Yang Menguasai Berbagai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni Dan Budaya.	
TUJUAN	SASARAN
1 Mewujudkan pelayanan kesehatan prima	1 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas.
2 Meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)	2 Tercapainya mutu dan keunggulan pendidikan
Misi 5. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang Islami	
TUJUAN	SASARAN
1 Meningkatkan Infrastruktur Kota Banda Aceh yang mendukung pariwisata Islami	1 Tersedianya Infrastrukur Kota Banda Aceh yang lebih berkualitas dan merata
	2 Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa
	3 Terwujudnya pengelolaan lingkungan kota secara berkelanjutan
Misi 6. Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Ranah Publik dan Perlindungan Anak	
TUJUAN	SASARAN
1 Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	1 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat
Misi 7. Meningkatkan Peran Generasi Muda sebagai Kekuatan Pembangunan Kota	
TUJUAN	SASARAN
1 Mewujudkan generasi muda yang kreatif dalam membangun Kota	1 Terciptanya generasi muda yang berperan dalam pembangunan kota

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan jangka menengah Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 bertujuan untuk mewujudkan **Banda Aceh Model Kota Madani**. Untuk tercapainya tujuan tersebut ditempuh melalui penetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Strategi berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, selanjutnya diperjelas dengan bagaimana tujuan dan sasaran RPJMD akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan.

Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan Kota Banda Aceh tahun 2012 2017 disajikan dalam Tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1

Strategi dan Arah Kebijakan Kota Banda Aceh

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Pengamalan Syariat Islam SecaraKaffah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1 Menata kembali kehidupan masyarakat sesuai dengan Al-Quran dan Hadits	1.1 Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat	Mengoptimalkan peran masyarakat, ulama dan umara untuk melaksanakan Syariat Islam secara kaffah	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap munculnya aliran sesat dan pelanggaran Syariat Islam
2 Menciptakan masyarakat intelektual Islami	2.1 Terciptanya masyarakat cerdas dalam menghadapi era globalisasi	Meminimalisir pengaruh buruk globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta aliran atau faham tersembunyi/ sesat	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dari orang tua, pendidik, ulama, dan masyarakat, kepada anak-anak dan remaja.
		Meningkatkan Syiar Islam	Meningkatkan pemahaman tentang Syariat Islam

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Pengamalan Syariat Islam Secara Kaffah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan sarana dan prasarana mesjid
	2.2 Terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel	Menyampaikan informasi dan data pengumpulan ZIS kepada publik	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengumpulan dan penyaluran dana ZIS

Misi 2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam pelayanan public dan pengawasan	1.1 Terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, kompetitif, amanah, professional dan bertanggung jawab	Meningkatkan SDM aparatur pemerintah yang profesional	Meningkatkan fungsi BAPERJAKAT
				Meningkatkan frekuensi pembinaan kepada pejabat pelaksana kegiatan SKPD
			Penerapan PP Nomor 53 tahun 2010 tentangDisiplin PNS	Melaksanakan PP Nomor 53 tahun 2010 tentangDisiplin PNS
2	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik	2.1 Terciptanya pemerintahan yang berbasis e-government	Menerapkan system pelayanan publik yang berbasis TIK	Seluruh SKPD menerapkan pelayanan berbasis TIK
		2.2 Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang berkualitas dan bertanggungjawab	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang berkualitas dan bertanggung jawab

Misi 2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat sesuai dengan Perwal No.38 Tahun 2010
		Seluruh SKPD memiliki dokumen perencanaan	Menyusun dokumen perencanaan yang terintegrasi
	2.3 Tersedianya paying hukum yang menjadi pedoman untuk mengoptimalkan birokrasi pelayanan	Membuat produk hukum	Menyusun regulasi yang efektif dan efisien
	2.4 Meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat	Meningkatkan petugas dan sarana prasarana Linmas	Merekrut petugas sesuai kualifikasi dan menyediakan sarana dan prasarana Linmas
	2.5 Terbangunnya kehidupan berdemokrasi di gampong	Meningkatkan pemahaman demokrasi di tingkat gampong	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya berdemokrasi

Misi 3. MemperkuatEkonomiKerakyatan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1 Membangun Perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan social masyarakat	1.1 Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian	Mengoptimalkan fungsi pasar yang sudah ada dan membangun pusat perekonomian baru	Membangun sarana dan prasarana perekonomian
	1.2 Tersedianya akses permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM)	Meningkatkan Kerjasama Pemerintah Kota dengan Perbankan	Memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan kredit lunak perbankan

Misi 3. MemperkuatEkonomiKerakyatan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	1.3 Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi	Peningkatan kerjasama dengan investor	Mempromosikan peluang dan potensi investasi daerah
		Optimalisasi kinerja pelayanan perizinan	Penyederhanaan prosedur perizinan serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayanan perijinan
	1.4 Terwujudnya pengembangan sektor perikanan, peternakan dan pertanian	Peningkatan produksi perikanan, peternakan dan pertanian	Pembinaan terhadap sector perikanan, peternakan dan pertanian
		Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan komptensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tenaga kerja
	1.5 Meningkatnya penanggulangan PMKS	Mengurangi permasalahan masalah social dan memberikan pelayanan social kepada PMKS	Meningkatkan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial

Misi 4. Menumbuhkan Masyarakat Yang Berintelektualitas, Sehat Dan Sejahtera, Yang Menguasai Berbagai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni Dan Budaya.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1 Mewujudkan pelayanan kesehatan prima	1.1 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas.	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan dalam rangka	Penerapan E-Health (pelayanan dasar dan rujukan) secara berjenjang di semua sarana

Misi 4. Menumbuhkan Masyarakat Yang Berintelektualitas, Sehat Dan Sejahtera, Yang Menguasai Berbagai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni Dan Budaya.				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			peningkatan mutu pelayanan kesehatan.	pelayanan kesehatan pemerintah.
				Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan sesuai standar dan JCI (Joint Community International)
				Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan.
2	Meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)	2.1 Tercapainya mutu dan keunggulan pendidikan	Meningkatkan standar pelayanan pendidikan yang mengacu pada standar pendidikan Nasional	Meningkatkan kualitas pendidikan sesuai SNP
				Menyiapkan lulusan yang bermutu di Tingkat Nasional
				Meningkatkan prestasi olahraga pelajar
				Meningkatkan fasilitas perpustakaan yang memadai

Misi 5. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang Islami				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan infrastruktur Kota Banda Aceh yang mendukung pariwisata Islami	1.1 Tersedianya Infrastrukur Kota Banda Aceh yang lebih berkualitas dan merata	Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas	Membangun dan mengembangkan kapasitas infrastruktur

	1.2 Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa	Peningkatan sarana, prasarana transportasi dan keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa	Penyediaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai
	1.3 Terwujudnya pengelolaan lingkungan kota secara berkelanjutan	Pengendalian pencemaran lingkungan melalui pengelolaan persampahan	Meningkatkan pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan
			Mendorong peningkatan pengelolaan persampahan untuk mempertahankan prestasi Adipura
		Peningkatan sarana dan prasarana mitigasi bencana	Meningkatkan cakupan pelayanan wilayah bencana
			Meningkatkan promosi pariwisata dan penataan situs kota

Misi 6. Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Ranah Publik dan Perlindungan Anak

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1 Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	1.1 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya program-program pemberdayaan perempuan dan anak	Mendorong terwujudnya Kota LayakAnak

Misi 7. Meningkatkan Peran Generasi Muda sebagai Kekuatan Pembangunan Kota

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1 Mewujudkan generasi muda yang kreatif dalam membangun Kota	1.1 Terciptanya generasi muda yang berperan dalam pembangunan kota	Peningkatan kapasitas pemuda dalam pembangunan	Membina generasi muda yang terampil dan cakap

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

7.1 Kebijakan Umum Kota Banda Aceh

Kebijakan Umum Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengamalan syariat Islam melalui penegakan hukum dan partisipasi masyarakat.
   - Meningkatkan wawasan keilmuan agama Islam dan amal kebajikan melalui pendidikan, kajian dan dakwah untuk masyarakat terutama kepada anak-anak dan para remaja.
   - Meningkatkan pembinaan dan pengawasan melalui peran orang tua, tokoh-tokoh ulama, pendidik dan masyarakat, terutama kepada para remaja dan generasi muda
   - Meningkatkan intensifikasi penegakan dan penindakan terhadap pelanggaran perda/qanun dalam rangka peningkatan ketertiban dan penegakan syariat islam
   - Meningkatkan penyebaran informasi keagamaan yang jelas dalam rangka menghambat penyebaran aliran sesat dan pengaruh globalisasi

- Meningkatkan adat istiadat yang menunjang pelaksanaan syariat Islam
- Meningkatkan kegiatan pengajaran Al-Qur'an dalam keluarga dan masyarakat
- Meningkatkan pemahaman tentang norma hukum, syariat Islam, tata tertib, hubungan sosial melalui sosialisasi hukum, norma adat dan norma sosial
- Tersedianya legal drafting qanun dan peraturan perundangan sebagai dasar pelaksanaan pembinaan masyarakat
- Membina serta mengarahkan dan mendidik masyarakat untuk menggunakan/ mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban
- Meningkatkan manajemen pendidikan Islami dan diniyah

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
   - Peningkatan kualifikasi, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan formal dan pelatihan
   - Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas, terampil, Islami dan mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional
   - Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
   - Intensifikasi sumber daya kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
   - Penerapan e-health (pelayanan dasar dan rujukan) secara berjenjang di semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah
   - Pelayanan kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
   - Mutu pelayanan kesehatan yang terstandarisasi/ISO, JCI

3. Mempromosikan peluang dan potensi investasi daerah.
   - Seluruh potensi sosial budaya, wisata, peninggalan sejarah dan tsunami dikelola dan dipromosikan secara profesional

serta dijadikan referensi untuk kreasi inovatif tanpa menghilangkan ciri-ciri keaceban

- Seluruh pengelolaan SDA dilaksanakan dengan sistem yang menjamin keberlanjutan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar
- Seluruh potensi investasi dan informasi pasar dapat diakses secara online dan terintegrasi antar SKPD
- Memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan kredit lunak perbankan
- Memberlakukan standard pelayanan minimal dalam pengurusan perizinan
- Pengesahan Qanun, Perwal dan RUPM penanaman modal dipercepat

4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
   - Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan dan sentra pelatihan produksinya serta pendampingan kewirausahaan dan lembaga keuangan mikro yang mampu menjamin pembiayaan komoditas unggulannya,
   - Setiap komoditas unggulan menerapkan standar mutu, desain dan kemasan yang kompetitif serta pasar dimanca negara
   - Setiap kecamatan/gampong memiliki industri rumah tangga dan pasar yang mampu menjamin pemasaran produk unggulan wilayahnya serta ketersediaan sembako (bahan pokok) dan input produksi dengan harga terjangkau;
   - Mengadakan pelatihan ketrampilan dan mengoptimalkan fungsi BLK
   - Penyaluran kredit usaha melalui sistem gramein bank
   - Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan
   - Meningkatkan pelatihan manajemen kewirausahaan
   - Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana perikanan
   - Pengoptimalan fungsi pasar

- Meningkatkan peran instansi terkait dalam pembinaan dan pendampingan

5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang sesuai standar.
   - Meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai akses pengembangan ekonomi dan wisata
   - Seluruh lokasi objek wisata, kawasan komersial memiliki sarana ibadah, pusat informasi, air bersih, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, fasilitas umum dan transportasi;
   - Pembangunan prasarana transportasi dan drainase kota;
   - Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan sampah di Kota Banda Aceh
   - Tersedianya sistem mitigasi bencana yang efektif
   - Tersedianya sarana pengolahan limbah cair medis di puskesmas dalam Kota Banda Aceh
   - Peningkatan penataan RTH yang dapat mendorong tercapainya penyediaan kawasan RTH seluas 20% dari wilayah Kota Banda Aceh
   - Meningkatnya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa

6. Mengoptimalkan kapasitas perempuan dalam berbagai bidang.
   - Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang mendukung program pemberdayaan perempuan
   - Meningkatkan akses perempuan dan anak terhadap arus informasi
   - Meningkatkan kualitas perempuan melalui sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif
   - Kaderisasi perempuan potensial di parpol
   - Menyediakan sarana dan prasarana yang responsive gender

- Peningkatan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi perempuan dan remaja
- Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- Peningkatan kapasitas perempuan diperdesaan dan menciptakan kemandirian perekonomian perdesaan
- Percepatan dan perluasan pendidikan tentang keadilan gender pada pendidikan formal dan non formal
- Menurunnya tingkat pengguna narkoba di kalangan pelajar, mahasiswa dan remaja
- Tersedianya fasilitas rehabilitasi yang memadai

7.2 Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh 2012 – 2017

Prioritas PembangunanKota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017, adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam
2. Tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi
3. Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan
4. Pendidikan, pemuda dan olahraga
5. Kesehatan
6. Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup
7. Pariwisata, seni dan budaya
8. Pengarusutamaan gender (PUG)

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Banda Aceh

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013-2016	Tahun 2017
1	Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat.	Mengoptimalkan peran masyarakat, ulama dan umara untuk melaksanakan Syariat Islam secara kaffah.	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap munculnya aliran sesat dan pelanggaran Syariat Islam	Menurunnya Jumlah Kelompok Aliran Sesat dan Sempalan	4	1	Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam	Program Penelitian Aliran Sempalan Dan Pembinaan; Program Usaha Dakwah Generasi Muda dan Kader Dakwah; Pembinaan Aqidah Ummat	Dinas Syariat Islam dan Sek. MPU	Dinas Syariat Islam dan Sek. MPU
				Menurunnya jumlah Pelanggaran Qanun Syariat Islam	386	100	Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Satpol PP & WH	Satpol PP & WH

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013-2016	Tahun 2017
2	Terciptanya masyarakat cerdas dalam menghadapi era globalisasi.	Meminimalisir pengaruh buruk globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta aliran atau faham terselubung/ sesat	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dari orang tua, pendidik, ulama, dan masyarakat, kepada anak-anak dan remaja.	Meningkatnya kemampuan baca Al quran siswa tingkat sekolah menengah	31.20%	98%	Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam	Program Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Meningkatnya Prestasi MTQ di Tingkat Propinsi	-	Peringkat 2 Besar	Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Dinas Syari'at Islam	Dinas Syari'at Islam
				Meningkatnya kemampuan baca Tulis Arab Jawi siswa sekolah	10%	100%	Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Meningkatkan Syiar Islam	Meningkatkan pemahaman tentang Syariat Islam	Meningkatnya Frekwensi kegiatan Syiar dan Dakwah di Masyarakat	-	281	Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam	Program Usaha Dakwah Generasi Muda dan Kader Dakwah; Program Peningkatan	Dinas Syariat Islam dan Sek. MPU	Dinas Syariat Islam dan Sek. MPU

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013-2016	Tahun 2017
								Sumber Daya dan Peran Ulama		
			Meningkatkan sarana dan prasarana mesjid	Meningkatnya jumlah masjid yang memenuhi standar Kebersihan dan ketertiban	45	93	Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam	Program Pemberdayaan Sarana Ibadah	Dinas Syari'at Islam	Dinas Syari'at Islam
3	Terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel	Menyampaikan informasi dan data pengumpulan ZIS kepada publik	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengumpulan dan penyaluran dana ZIS	Meningkatnya penerimaan ZIS	8,8 M	21,3 M	Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam	Program Usaha Dakwah Generasi Muda dan Kader Dakwah	Sekretariat Baitul Mal	Sekretariat Baitul Mal
				Meningkatnya Jumlah Muzakki	8.166 org	9.497 org	Pemahaman dan pengamalan Syariat Islam	Program Usaha Dakwah Generasi Muda dan Kader Dakwah	Sekretariat Baitul Mal	Sekretariat Baitul Mal

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013-2016	Tahun 2017
Misi 2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik										
1	Terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi kompetitif, amanah, profesional dan bertanggung jawab	Meningkatkan SDM aparatur pemerintah yang profesional	Meningkatkan fungsi BAPERJAKAT	Persentase Penempatan Pejabat yang sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan(The right man on the right place)	60%	85%	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
				Persentase Penempatan Pejabat yang sesuai dengan Latar Belakang Diklat Penjenjangan	32%	66%	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
			Meningkatkan frekuensi pembinaan kepada pejabat pelaksana kegiatan SKPD	Jumlah APIP yang bersertifikasi	10 org	27 org	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Inspektorat	Inspektorat

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013-2016	Tahun 2017
Misi 2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik										
				Menurunnya jumlah temuan hasil Pemeriksaan dan Pengawasan internal dan eksternal	2106	600	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Inspektorat	Inspektorat
		Penerapan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Melaksanakan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Menurunnya Jumlah PNS yang Indisipliner	57 org	30 org	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
2	Terciptanya pemerintahan yang berbasis e-government	Menerapkan sistem pelayanan publik yang berbasis TIK	Seluruh SKPD menerapkan pelayanan berbasis TIK	Meningkatnya jumlah pembangunan aplikasi berbasis e-government	23 aplikasi	83 aplikasi	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Diskominfo & Statistik

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013-2016	Tahun 2017
Misi 2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik										
3	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang berkualitas dan bertanggungjawab	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang berkualitas dan bertanggungjawab	Perolehan Opini dari BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan
				Meningkatnya persentase target PAD Kota	14%	20%	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan
				Meningkatnya pemberitaan positif mengenai program pembangunan Kota Banda Aceh dimedia lokal dan nasional (cetak dan online)	7200 berita	14400 berita	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Bagian Humas	Bagian Humas

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013-2016	Tahun 2017
Misi 2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik										
				Persentase Penyelesaian Pilar Tanda Tapal Batas	20%	100%	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan
			Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat sesuai dengan Perwal No.38 Tahun 2010	Menurunnya jumlah pelanggaran Qanun No 4 Tahun 2009 Tentang RTRW Kota Banda Aceh	46,43%	42%	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan; Program Peningkatan Susunan Tata Ruang dan Tata Bangunan ; Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar	Kecamatan, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda	Kecamatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013-2016	Tahun 2017
Misi 2 Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik										
				Meningkatnya jumlah bangunan ber IMB	66%	73%	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan; Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Kecamatan, Dinas Pekerjaan Umum	Kecamatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Prestasi gampong ditingkat Propinsi	21,11%	39,6%	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan
		Seluruh SKPD memiliki dokumen perencanaan	Menyusun dokumen perencanaan yang terintegrasi	Meningkatnya Jumlah Program RPJMD yang tertuang dalam RKPD	75%	96%	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	Bappeda

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013-2016	Tahun 2017
Misi 2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik										
4	Tersedianya payung hukum yang menjadi pedoman untuk mengoptimalkan birokrasi pelayanan	Membuat produk hukum	Menyusun regulasi yang efektif dan efisien	Jumlah regulasi yang ditetapkan	19	43	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Bagian Hukum	Bagian Hukum
				Jumlah Rancangan Qanun yang disahkan menjadi Qanun	12,9%	75%	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRK	Sekretariat DPRK
5	Meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat	Meningkatkan petugas dan sarana prasarana Linmas	Merekrut petugas sesuai kualifikasi dan menyediakan sarana dan prasarana Linmas	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	1300	1400	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol
				Rasio Pos Siskamling per jumlah gampong	220	250	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013-2016	Tahun 2017
Misi 2. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik										
5	Terbangunnya kehidupan berdemokrasi di gampong	Meningkatkan pemahaman demokrasi di tingkat gampong	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya berdemokrasi	Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchikaung)	68.07%	75%	Tata kelola pemerintahan yg baik dan reformasi birokrasi	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013-2016	Tahun 2017
Misi 3. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan										
1	Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pereknomian	Mengoptimalkan fungsi pasar yang sudah ada dan membangun pusat perekonomian baru	Membangun sarana dan prasarana perekonomian	Jumlah Pasar yang sudah berfungsi secara optimal	91.67%	100%	Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
				Jumlah Pasar yang dibangun	0	1	Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013 2016	Tahun 2017
Misi 2. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan										
2	Tersedianya akses permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM)	Meningkatkan Kerjasama Pemerintah Kota dengan Perbankan	Memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan kredit lunak perbankan	Jumlah usaha kecil menengah yang mendapatkan bantuan perbankan	14	60	Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah ; Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
				Jumlah IKM yang mampu melakukan pemasaran komoditi	120	180	Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah ; Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Tenaga Kerja; Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013-2016	Tahun 2017
Misi 3. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan										
								Menengah		
				Jumlah produk yang menunjang program one village one product	7	10	Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah ;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Tenaga Kerja
3	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan investasi	Peningkatan kerjasama dengan investor	Mempromosikan peluang dan potensi investasi daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)		Rp 25,655 M	Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Satu Pintu
		Optimalisasi kinerja pelayanan perizinan	Penyederhanaan prosedur perizinan serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayanan perijinan	Jumlah jenis pelayanan yang diimplementasikan dalam SPIPISE	8	8	Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Satu Pintu KPPTSP

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013-2016	Tahun 2017
Misi 3. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan										
				Jumlah Qanun yang mendukung iklim usaha	17	20	Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Satu Pintu
4	Terwujudnya pengembangan sektor perikanan, peternakan dan pertanian	Peningkatan produksi perikanan, peternakan dan pertanian	Pembinaan terhadap sektor perikanan, peternakan dan pertanian	Cakupan bina kelompok perikanan	17%	93%	Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
				Produksi perikanan	68%	76%	Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
				Cakupan bina kelompok petani/ternak	15%	97%	Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013-2016	Tahun 2017
Misi 3. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan										
				Ketersediaan pangan utama	158,41 kg	744,67 kg	Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
		Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi ,kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja	peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka	7.17%	7.06%	Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja; Peningkatan Kesempatan Kerja	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan aktif	51%	72%	Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013-2016	Tahun 2017
Misi 3. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan										
5	Meningkatnya penanggulangan PMKS	Mengurangi permasalahan masalah sosial dan memberikan pelayanan sosial kepada PMKS	Meningkatkan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	24%	45%	Ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013-2016	Tahun 2017
Misi 4. Menumbuhkan Masyarakat Yang Berintelektualitas, Sehat Dan Sejahtera, Yang Menguasai Berbagai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni Dan Budaya.										
1	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas.	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan.	Penerapan E-Health (pelayanan dasar dan rujukan) secara berjenjang di semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah	Jumlah Puskesmas yang sudah menerapkan e-health	0	11	Kesehatan	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013-2016	Tahun 2017
Misi 4. Menumbuhkan Masyarakat Yang Berintelektualitas, Sehat Dan Sejahtera, Yang Menguasai Berbagai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni Dan Budaya.										
			Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Puskesmas yang sudah bersertifikasi ISO/ akreditasi	1	6	Kesehatan	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan.	Jumlah model gampong sehat	0	5	Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	Tercapainya mutu dan keunggulan pendidikan	Meningkatkan standar pelayanan pendidikan yang mengacu pada standar pendidikan Nasional	Meningkatkan kualitas pendidikan sesuai SNP	Jumlah SNP yang tercapai	25%	62.5%	Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Menengah; Program Pendidikan Non Formal, Program	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013-2016	Tahun 2017
Misi 4. Menumbuhkan Masyarakat Yang Berintelektualitas, Sehat Dan Sejahtera, Yang Menguasai Berbagai Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni Dan Budaya.										
								Pendidikan Luar Biasa; Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		
			Menyiapkan lulusan yg bermutu di Tingkat Nasional	Peringkat Kelulusan Tk. Nasional	-	10 besar	Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Program Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Meningkatkan prestasi olahraga pelajar	Prestasi di ajang Pekan Olah raga Pelajar Daerah	Juara Umum	Juara Umum	Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Program Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan
			Meningkatkan fasilitas perpustakaan yang memadai	Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Perpustakaan Keliling Per Tahun	6.061 org	11.500 org	Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pmbinaan Perpustakaan	Kantor Pustaka dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013-2016	Tahun 2017
Misi 5. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang Islami										
1	Tersedianya Infrastruktur Kota Banda Aceh yang lebih berkualitas dan merata	Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas	Membangun dan mengembangkan kapasitas infrastruktur	Proporsi Panjang jalan dalam Kondisi baik	85.66%	95%	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				Persentase penduduk berakses air minum	79.9%	86.88%	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				Ketaatan terhadap RTRW	53.57%	57.70%	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup	Program Peningkatan Susunan Tata Ruang dan Tata Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	66%	72.52%	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013-2016	Tahun 2017
Misi 5 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang Islami										
				Rasio Rumah Tinggal berakses sanitasi	90.39%	87%	Infraastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Terpeliharanya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa	Peningkatan sarana, prasarana transportasi dan keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa	Penyediaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	0.01%	1%	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Dinas Perhubungan
				Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%	100%	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013-2016	Tahun 2017
Misi 5 Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang Islami										
				Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penye-berangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	100%	100%	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Dinas Perhubungan
3	Terwujudnya pengelolaan lingkungan kota secara berkelanjutan	Pengendalian pencemaran lingkungan melalui pengelolaan persampahan	Meningkatkan pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan	Penegakan hukum lingkungan	10%	100%	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013-2016	Tahun 2017
Misi 5 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang Islami										
			Mendorong peningkatan pengelolaan persampahan untuk mempertahankan prestasi Adipura	Meraih Adipura	Berhasil	Berhasil	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
				Cakupan pelayanan persampahan (persentase penduduk terlayani)	82%	93%	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
		Peningkatan sarana dan prasarana mitigasi bencana	Meningkatkan cakupan pelayanan wilayah bencana	Meningkatnya gampong siaga bencana	-	5	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemadam kebakaran dan Penyelamatan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013-2016	Tahun 2017
Visi 3: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang Islami										
				Cakupan pelayanan bencana kebakaran	12.22%	73.34%	Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemadam kebakaran dan Penyelamatan
			Meningkatkan promosi pariwisata dan penataan situs kota	Meningkatnya Jumlah wisatawan domestik dan manacanegara	176.230 org	969.776 org	Pariwisata, seni dan budaya	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Pariwisata
				Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	17.6%	23.5%	Pariwisata, seni dan budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013-2016	Tahun 2017
Misi 6. Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Ranah Publik dan Perlindungan Anak										
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya program-program pemberdayaan perempuan dan anak	Mendorong terwujudnya Kota Layak Anak	Tercapainya 31 indikator Kota layak Anak	29.03%	100%	Pengarusutamaan gender (PUG)	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			Tahun 2013-2016	Tahun 2017
Misi 7. Meningkatkan Peran Generasi Muda sebagai Kekuatan Pembangunan Kota										
1	Terciptanya generasi muda yang berperan dalam pembangunan kota	Peningkatan kapasitas pemuda dalam pembangunan	Membina generasi muda yang terampil dan cakap	Meningkatnya potensi pemuda melalui pembinaan dan pelatihan pembangunan kota Banda Aceh	30%	60%	Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Meningkatnya pembinaan kepemudaan sebagai modal utama dalam pencapaian peningkatan pembangunan	25 Organisasi Kepemudaan	85 Organisasi Kepemudaan	Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pada Bab ini, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010, diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Dari program prioritas Kota Banda Aceh diterjemahkan menjadi program dan kegiatan untuk seluruh SKPD yang disertai dengan pagu indikatif.

Pada Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Banda Aceh berikut ini disajikan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk Tahun 2013-2015 yang merupakan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh (APBK Banda Aceh), sementara untuk Tahun 2016 merupakan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBK Banda Aceh dan Tahun 2017 merupakan proyeksi kebutuhan terhadap masa akhir pelaksanaan RPJM Kota Banda Aceh periode 2012-2017 ini.

Khusus untuk proyeksi kebutuhan pendanaan pada Tahun 2017 telah dilakukan penyesuaian sesuai dengan struktur kelembagaan perangkat Kota Banda Aceh berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 8.1a Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Banda Aceh Tahun 2017.

Tabel B.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan
Kota Banda Aceh

Kode				Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi kinerja pada Awal RPJMD (2013)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
								2013*		2014*		2015*		2016*		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (2013-2018)		
						(%)	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	
(1)				(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1				URUSAN WAJIB				161.196.631.354		5[illegible].687.887.708		57[illegible].514.864		569.813.625.152		1.392.471.658.728	
1	01			PENDIDIKAN				51.983.641.631		74.546.151.733		78.132.273.497		57.797.300.395		262.458.847.243	
1	01	1.01.01		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga		88,68		51.983.641.631	99,99	74.546.151.733	99,99	78.132.273.497	100	57.797.300.395	100	262.458.847.243	Disdikpora
1	01	1.01.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	66,62	97,75	4.829.196.000	01,55	3.500.016.500	80,79	3.343.014.800	100	3.167.867.400	100	14.841.094.700	Disdikpora
1	01	1.01.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	99,03	97,70	8.738.640.875	86,12	7.683.670.150	91,32 Rp	6.519.747.000	100	506.438.300	100	5.997.545.975	Disdikpora
1	01	1.01.01	08	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	99,55	100,00	2.196.088.300	99,70	1.386.046.300	97,98	1.663.360.300	100	1.486.433.000	100	6.731.928.700	Disdikpora
1	01	1.01.01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya angka partisipasi kasar PK	99,70	100,00	181.020.000	99,19	3.016.020.000	94,32	2.711.036.400	100	2.484.828.502	100	8.715.904.902	Disdikpora
1	01	1.01.01	16	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Adanya perubahan tentang Qanun Aceh No 5 tahun 2008 tentang penyelenggaran pendidikan	86,97	96,52	18.549.978.986	92,39	24.969.016.636	91,13	20.392.261.846	100	20.414.413.500	100	84.325.669.415	Disdikpora
1	01	1.01.01	17	Program Pendidikan Menengah	Lulusan Meningkat daya serap PT akan meningkat dari 70 % menjadi 80 %	91,05	96,11	15.614.331.116		23.858.881.223	90,61	18.804.901.998	100	12.582.813.500	100	89.772.667.741	Disdikpora
1	01	1.01.01	18	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah angka melanjutkan pendidikan produktif meningkat	94,31	100,30	407.166.000	98,32	761.587.500	98,71	77.447.500	100	632.573.000	100	1.978.774.000	Disdikpora
1	01	1.01.01	19	Program Pendidikan Luar Biasa	Menimalisir sdya daya tampung anak berkebutuhan khusus	96,78	100,30	1.788.000	98,60	1.221.500	98,85	51.850.500	100	80.532.900	100	95.700.400	Disdikpora

(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	01	1.01.01	10	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100% (3259) tenaga pendidik sudah qualified academik minimal dan sudah tersertifikasi pendidik	62,47	86,59	834.433.700	91,80	152.768.200	30,17	229.822.600	100	267.288.100	100	1.484.428.600	Disdikpora
1	01	1.01.01	11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	3.359 tenaga pendidik mengikuti diklat comatond lainnya sebelumnya	75,57	95,83	4.385.425.976	99,05	6.095.024.855	38,83	7.556.412.663	100	7.425.267.373	100	25.462.143.074	Disdikpora
1	18	1.31.01	16	Program Peningkatan Peran Serta Generasi Muda	Jumlah generasi muda yang ikut serta dalam proses pemasyarakatan, sosialisasi dan pengawasan pemanfaatan Kota Banda Aceh	86,10	100,00	673.750.000	99,89	959.110.000	99,97	1.154.633.000	100	893.903.000	100	4.796.196.000	Disdikpora
1	19	1.31.01	17	Program Peningkatan Jiwa Kewirausahaan Generasi Muda Melalui Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan	Jumlah generasi muda yang menjadi enterpreneur meningkat 1 orang 50%	61,39	100,00	56.859.000								56.859.000	Disdikpora
1	19	1.31.01	20	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Olahraga	Jumlah club olahraga cabang meningkat	88,88		1.568.169.000	98,75	665.151.638	78,41	878.508.900	100	885.586.000	100	4.997.494.178	Disdikpora
1	21	1.31.01	15	Program Pembinaan Seni dan Budaya	Meningkatnya seniman dan peserta cabang	-	-	-			99,00	1.[illegible].000	100	919.529.000	100	761.775.000	Disdikpora
1	25	1.31.01	14	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah peserta dan meningkat nya	64,39		74.085.000	99,71	68.[illegible].300	95,48	67.[illegible].900	100	69.999.500	100	729.414.000	Disdikpora
1	02			KESEHATAN				47.782.301.694		94.205.787.532		121.259.266.108	100	127.713.201.447	100	490.150.057.979	
1	02	1.02.01		Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh		67,86		13.214.890.884		28.448.214.732	85,46	24.584.206.690	100	32.124.117.132	100	130.331.628.638	Dinkes
1	02	1.02.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	65,84	68,79	1.606.420.060	26,62	2.170.360.382	80,81	2.624.055.270	100	1.350.511.977	100	8.535.523.610	Dinkes
1	02	1.02.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelaksanaan tugas pada kantor	93,36	96,98	1.272.150.200	95,12	1.695.363.507	79,84	1.330.795.100	100	350.833.250	100	5.443.142.057	Dinkes
1	02	1.02.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya pelaksanaan tugas disiplin	93,96	100	358.200.000	97,07	191.200.300	100	165.806.300	100	150.400.000	100	738.148.080	Dinkes

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	02	1.02.01	17		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang masyarakat yang membutuhkan	65,34	100	417.547.700	90,91	376.120.000	99,27	290.357.100	100	161.619.100	100	1.080.244.600	Dinkes
1	02	1.02.01	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	86,56	98,78	1.650.674.608	96,54	31.875.495.228	83,58	35.566.810.271	00		100	38.787.924.382	Dinkes
1	02	1.02.01	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat di dalam program kesehatan	96,95	100	408.090.000	94,14	926.276.000	99,16	173.276.000	00	385.811.500	100	1.905.478.100	Dinkes
1	02	1.02.01	20		Program Perilaku Gizi Masyarakat	Terpenuhinya standar Rasio Tenaga Gizi dan Ibu Balita	63,03	100	307.790.000	98,81	270.610.000	99,85	152.774.700	100	135.743.625	100	861.819.825	Dinkes
1	02	1.02.01	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Optimalnya penerapan KIR di Kota Banda Aceh	90,24	100	1.85 557.900	96,61	197.548.980	88,44	1.838.809.937	00	113.000.000	100	2.330.450.270	Dinkes
1	02	1.02.01	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Menurunnya angka kejadian/kasus penyakit menular	98,87	95,38	774.886.500	99,74	965.570.430	96,10	890.809.970	00	411.775.900	100	2.164.485.100	Dinkes
1	02	1.02.01	23		Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya sistem informasi pelayanan kesehatan secara online	99,00	100	247.730.000	95,60	305.306.330	97,51	327.570.150	100	376.689.660	100	1.261.071.100	Dinkes
1	02	1.02.01	25		Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Terpenuhinya standar pelayanan minimal	66,00	100	9.229.411.073		10.015.250.750	90,16	11.361.302.255	100	16.401.736.900	100	56.991.900.977	Dinkes
1	02	1.02.01	28		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita							98,08	86.565.700	00	39.565.700	100	98.131.400	Dinkes
					Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia							75,11	129.199.579		73.897.400		197.030.778	
1	02	1.02.01	32		Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak	Menurunnya angka kematian ibu dan bayi	58,07	100	854.848.000	97,26	827.388.250	98,28	76.849.150	00	29.778.800	100	784.249.200	Dinkes
1	02	1.02.02			Rumah Sakit Umum Meuraxa		60,99		14.497.410.890	99,34	66.093.462.165	92,54	57.875.000.050	100	35.297.334.345	100	293.977.218.442	RSU Meuraxa
1	02	1.02.02	31		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	81,93	100	3.130.457.026	91,65	3.130.000						4.241.601.456	RSU Meuraxa
1	02	1.02.01	28		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	500	100	166.000.000	97,07	-						166.000.000	RSU Meuraxa

(1)				(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)
1	02	1.02.02	20	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kesehatan	89,89	100	3.716.049.437		37.187.724.815		89,99		36.901.317.650		100		1.337.284.275		100		46.815.895.486		RSU Meuraxa						
1	09	1.02.07	98	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit	Tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai standar	91,08		26.424.684.027		N/A		48.886.388.574		91,41		84.384.542.923		100		84.000.000.000		100		243.045.615.000		RSU Meuraxa				
1	05			PERTUMBUHAN WILAYAH				73.287.210.126				126.886.317.306				143.146.302.150				169.813.581.415				536.107.408.702						
1	03	01.03.01		Dinas Pekerjaan Umum		96,80		73.287.210.126		99,50		126.886.317.306		97,27		143.146.302.150		100		169.813.581.415		100		536.107.408.702		Dinas PU				
1	03	1.03.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	96,68	100	1.810.500.750		91,65		3.791.660.923		91,66		3.791.035.105		100		2.827.084.272		100		11.160.285.289		Dinas PU				
1	04	1.04.01	03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas ke dll	98,25	100	12.037.238.100		85,11		10.038.648.091		99,29		98.179.131.979		100		91.115.946.300		100		211.370.724.469		Dinas PU				
1	03	1.03.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas dll	98,37	99,39	58.800.000		97,67		76.350.000		94,68		82.100.000		100		79.600.000		100		297.300.000		Dinas PU				
1	03	1.03.01	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		99,73	98,34	35.091.929.496		99,85		39.355.451.000		39,19		41.331.795.295		100		5.000.000.000		100		120.943.871.088		Dinas PU				
1	03	1.03.01	16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Meningkatnya fungsi saluran drainase/gorong-gorong yang dirangun/dipelihara	98,83	94,63	4.801.785.500				19.049.830.600		68,29		9.415.790.356		100		8.466.960.500		100		41.866.741.556		Dinas PU				
1	04	1.03.01	18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pemberdayaan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Sport Hall	98,94	98,44	26.300.374.091		99,97		17.949.896.669		99,19		7.710.750.000		100		30.048.299.960		100		88.894.960.720		Dinas PU				
1	03	1.03.03	24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Kondisi Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan yang baik									98,71		1.897.600.000		100		4.045.400.000		100		5.943.000.000		Dinas PU				
1	03	1.03.03	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Tersedianya jaringan air bersih	91,26	100	8.340.430.000		99,00		10.120.706.000		96,23		10.653.207.275		100		16.966.374.950		100		47.789.118.225		Dinas PU				
1	03	1.03.03	28	Program Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Meningkatnya kualitas sanitasi masyarakat							1.505.978.600		98,14		1.192.710.900		100		1.944.180.907		100		4.642.870.407		Dinas PU				
1	04	1.03.01	22	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya kualitas sanitasi masyarakat							3.208.635.850		47,12		10.164.366.600		100		8.886.880.500		100		16.488.642.850		Dinas PU				
1	04	1.03.01	21	Program Pengelolaan Sumber Daya Tata Ruang Dan Tata Bangunan	Pembangunan yang sesuai dengan izin/Aturan yang	99,60	100	7.992.198.300				11.559.130.000		96,81		16.855.267.800		100		15.615.000.000		100		52.019.700		Dinas PU				
1	04	1.03.01	17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksanya Ruang yang sesuai RTRW	98,42	100	341.252.560		99,72		527.400.300		97,56		1.070.400.000		100		338.925.600		100		2.335.793.700		Dinas PU				

(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	08	1.03.01	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau						607.900.000								867.300.000	Dinas PU
1	06	1.03.01	16	Program Kerjasama Pembangunan	Terfasilitasinya kerjasama Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan	100	100	62.707.000	96,91	64.707.000	46,20	175.196.400	100	39.746.000	100	841.699.170			Dinas PU
1	03	1.03.01	23	Program Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang meningkat								100	6.868.975	100	876.868.770			Dinas PU
1	06			PERENCANAAN PEMBANGUNAN				3.351.645.405		4.021.366.034		3.930.793.928		3.287.944.785		14.590.578.852			
1	06	01.06.01		Bappeda		96,35		3.351.645.405		4.021.366.034	96,35	4.081.793.928	100	3.287.944.785	100	14.590.578.852			Bappeda
1	06	01.06.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	93,39	100	710.032.125	91,05	1.013.366.350	100	1.131.836.110	100	843.366.460	100	3.697.601.034			Bappeda
1	06	01.06.01	02	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	88,70	100	1.728.000.000	86,12	1.035.995.000	68,81	356.813.000	100	368.443.000	100	3.128.247.480			Bappeda
1	06	01.06.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	95,59	100	20.800.000	94,07	19.200.000	99,81	31.075.000	100	20.000.000	100	96.875.000			Bappeda
1	06	01.06.01	15	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data/informasi Pembangunan	99,58	100	768.171.850	97,23	482.285.000	98,51	101.750.950	100	630.818.250	100	2.164.876.850			Bappeda
1	06	01.06.01	17	Program Kerjasama Pembangunan	Terfasilitasinya Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan	48,19	48,19	243.025.000	96,91	429.852.175	93,90	299.398.972	100	483.774.025	100	1.456.248.322			Bappeda
1	06	01.06.01	19	Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah Dan Besar	Perencanaan pembangunan yang sesuai rencana tata ruang	95,50	100	63.025.400		82.326.700	87,69	106.681.150	100	131.295.380	100	647.058.550			Bappeda
1	06	01.06.01	21	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kerjasama dalam Pelayanan Pelayanan Publik	90,29	100	453.077.430	97,54	780.171.943	85,19	364.372.391	100	842.699.640	100	2.922.580.705			Bappeda
1	06	01.06.01	22	Program Pengendalian Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Tingkat Sosial Ekonomi Masyarakat	51,29		103.076.300	99,54	199.188.600	96,03	240.342.225	100	82.748.600	100	621.963.125			Bappeda
1	07			PERHUBUNGAN				7.841.693.976		13.963.999.713		17.030.493.863		23.342.232.902		62.177.035.448			
1	07	1.07.01		Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		68,00		7.841.693.976		13.963.999.713	66,87	17.030.493.863	100	23.342.232.902	100	62.177.035.448			Perhubungan
1	07	1.07.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	57,66	100	1.736.077.200	91,69	2.506.534.200	96,83	1.841.286.920	100	2.615.619.164	100	9.771.151.186			Perhubungan

(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	07	1.07.C1	07		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan atas tugas kantor	96,29	100	537.028.640	86,12	3.089.610.200	80,54	480.658.400	100	258.386.000	100	4.264.683.440	Dishubkominfo
1	07	1.07.C1	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya pelaksanaan tugas aparatur	96,15	100	129.100.000	97,07	223.600.000	98,98	156.270.000	100	141.400.000	100	544.670.000	Dishubkominfo
1	07	1.07.C1	15		Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya fasilitas pembangunan transportasi yang memadai	97,77		559.000.000		782.672.000	99,74	572.666.800	100	3.700.000.000	100	8.514.338.260	Dishubkominfo
1	07	C1	16		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ	99,54		287.000.000		266.424.000	93,93	215.000.000	100	282.523.000	100	930.911.000	Dishubkominfo
1	07	C1	17		Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terlaksanya pelayanan angkutan yang nyaman	97,84		971.500.000		1.027.210.000	99,72	1.370.527.000	100	5.078.150.000	100	11.452.127.000	Dishubkominfo
1	07	1.07.C1	19		Pengembangan pengelolaan lalulintas	Terlaksanya kelancaran lalulintas	98,77	100	3.478.243.530		4.053.329.393	99,60	2.364.303.861	100	8.432.528.738	100	11.338.100.862	Dishubkominfo
1	07	1.07.C1	14		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		96,87	100	791.253.000		927.865.500	96,40	6.509.007.200	100	3.184.153.000	100	11.271.103.700	Dishubkominfo
1	07	1.07.C1	13		Program Pengkajian Dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informasi					100,00	50.000.000	100	9.514.000	100	210.000.000	100	273.111.000	Dishubkominfo
1	07	1.07.C1	18		Kerjasama Informasi dan Media Massa		100	100	427.272.000		720.450.000	98,06	491.200.000	100	395.022.000	100	2.034.012.000	Dishubkominfo
1	08				LINGKUNGAN HIDUP				40.078.587.039		49.399.614.555	100	56.553.877.510		50.428.782.932	100	196.353.031.685	
1	08	1.08.01			KANTOR LINGKUNGAN HIDUP		91,10		2.179.564.918	99,23	2.812.437.264	99,33	2.681.435.154	100	1.298.102.357	100	8.911.975.273	KLH
1	08	1.08.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	90,29	100	366.025.000	91,63	409.225.300	94,53	130.251.300	100	100.301.000	100	605.401.000	KLH
1	08	1.08.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	96,71	100	49.189.800	86,12	51.225.300	94,20	55.353.831	100	39.927.200	100	317.316.000	KLH
1	08	1.08.01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	100	100	22.160.000	97,07	33.625.200	100	32.826.200	100	10.600.000	100	545.700.000	KLH
1	08	1.08.01	16		Program Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	30,33	30,33		93,48	504.480.000	99,62	523.504.000	100	48.594.000	100	1.266.857.000	KLH
1	08	1.08.01	17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya jumlah luasan cagar alam yang ditetapkan status kawasannya		98,33				99,17	198.360.000	100	-	100	166.560.000	KLH

(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	03	1.03.01	13	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup		100	134.777.000	66,48	202.680.000	98,42	239.001.000	100	226.385.557	100	952.717.557	Kilt
1	03	1.03.01	23	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tersedianya kontainer sampah, Mobil pengangkut sampah, Motor trasportasi, dan kendaraan roda kota.		99,16	1.815.574.3..8	100,00	1.491.5..8.964	99,67	1.733.668.934	100	540.991.900	100	5.579.911.715	Kilt
1	08	1.08.02		Dinas Kesehatan dan Kebersihan Kota			97,35		97,35	37.976.923.121	95,52	46.386.407.171	99,47	53.672.251.576	100	49.380.575.585	100	187.589.096.819	DKS
1	08	1.08.02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	95,07	98,77	22.913.463.937	91,55	24.977.203.426	99,70	30.428.008.267	100	21.750.297.000	100	102.070.143.531	DKS
1	08	1.08.02	02	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	94,56	100	3.914.798.184	96,12	6.975.[illegible]	98,82	6.201.679.269	100	6.147.161.064	100	25.375.739.617	DKS
1	08	1.08.02	28	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	98,76	100	220.538.000	97,37	206.610.000	96,92	148.150.000	100	186.441.000	100	715.[illegible]	DKS
1	08	1.08.02	15	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat	97,71	98,7	3.668.440.000		5.995.[illegible]	99,40	8.754.283.900	100	6.599.518.903	100	23.494.438.503	DKS
1	08	1.08.02	24	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tersedianya kontainer sampah, Kontainer udara, Mobil pengangkut sampah, Motor trasportasi, dan kendaraan roda kota.	99,87	100	1.233.835.000		2.143.382.578	99,99	6.203.392.000	100	13.434.750.000	100	25.054.359.578	DKS
1	03	1.03.02	25	Pengelolaan Areal Pemakaman			100	147.000.000		210.000.000	93,74	462.150.000	100	315.000.000	100	1.134.150.000	DKS
1	08	1.08.02	39	Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Hasil ini Pada ESK yang sarana diadakan	94,25	100	3.651.397.000		5.[illegible]	98,75	1.[illegible]	100	4.[illegible]	100	18.[illegible]	DKS
1	10			KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				3.[illegible]		1.[illegible]	100	1.883.416.200		1.380.548.800		7.454.378.140	
1	10	1.10.01		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		80,82		3.[illegible]		1.[illegible]	98,33	1.883.416.200	100	1.380.548.800	100	7.454.378.140	Disahkan

(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	10	1.10.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	70,45	98,69	872.006.970	93,86	591.506.670	99,91	781.382.600	100	861.488.400	100	4.236.803.640	Disdukcapil
1	10	1.10.01	02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		77,15	100	334.150.000		634.453.700	90,49	581.881.400	100	399.485.200	100	1.513.988.900	Disdukcapil
1	10	1.10.01	03	Program peningkatan disiplin aparatur		99,26	100	17.600.000		17.200.000	91,32	18.400.000	100	10.400.000	100	73.600.000	Disdukcapil
1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		67,60	95,76	973.025.150	96,27	928.407.850	87,65	501.722.200	100	559.908.400	100	3.663.464.400	Disdukcapil
1	11			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2.699.430.648		2.477.105.456	100	2.879.009.157		1.527.772.412		9.583.407.262	
1	11	1.11.01		Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		93,79		2.699.430.648	98,22	2.477.105.456	94,01	2.879.009.157	100	1.527.772.412	100	9.583.407.262	Kantor PPKB
1	11	1.11.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	90,15	100	288.013.981	93,26	297.089.763	76,57	378.287.283	100	276.356.670	100	1.239.787.046	Kantor PPKB
1	11	1.11.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas rutin	75,93	98,79	246.540.000	89,12	304.859.000	91,99	350.858.200	100	228.536.000	100	1.011.193.200	Kantor PPKB
1	11	1.11.01	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	99,90		65.000.000	97,07	16.800.000	100	17.610.000	100	16.020.000	100	95.430.000	Kantor PPKB
1	11	1.11.01	15	Program Kesesuaian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Meningkatnya Kesesuaian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	99,73	99,89	29.277.500		-						29.277.500	Kantor PPKB
1	11	1.11.01	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Meningkatnya peran gender	99,93		657.856.500	99,85	569.026.919	97,76	891.291.800	100	992.998.996	100	2.190.438.165	Kantor PPKB
1	11	1.11.01	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kualitas hidup perempuan		100	54.625.000	97,03	11.850.500		-		73.473.631		140.164.131	Kantor PPKB
1	11	1.11.01	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Perempuan dan pasangan laki-laki aktif dan terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil pembangunan	99,38	100	204.070.500		182.900.300	99,03	77.240.350	100	61.769.452	100	525.980.108	Kantor PPKB
1	11	1.11.01	19	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Meningkatnya peran gender	99,20	100	18.035.400	99,86		100					18.035.400	Kantor PPKB
1	12	1.11.01	15	Program Keluarga Berencana	Meningkatnya PUS yang menjadi peserta KB aktif	99,37	100	362.981.162	98,16	1.119.320.130	99,73	1.304.598.120	00	590.190.000	100	3.377.071.312	Kantor PPKB
1	12	1.11.01	17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Meningkatnya kerjasa kesehatan PUS		100	92.160.000		-		-				92.160.000	Kantor PPKB

(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	13			SOSIAL				5.297.381.935		13.194.308.253	100	14.382.745.568		7.170.777.108			44.045.914.000	
1	13	1.13.01		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja		95,12		5.258.896.000	96,59	4.752.416.225	94,17	4.312.593.000	100	4.287.642.699	100		18.611.649.224		Dinsosnaker
1	13	1.13.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	93,89	100	374.150.400	91,65	355.512.800	90,00	429.153.500	100	425.631.919	100		1.587.452.619		Dinsosnaker
1	13	1.13.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan tugas-tugas kantor	96,81	100	158.758.400	85,12	151.500.400	91,97	165.051.200	100	59.249.280	100		651.807.280		Dinsosnaker
1	13	1.13.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya pelayanan tugas aparatur	100	100	23.100.000	97,41	23.400.000	100	23.100.000	100	23.850.000	100		94.350.000		Dinsosnaker
1	13	1.13.01	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	-		-	70,00		96,70	511.015.800					511.015.800		Dinsosnaker
1	13	1.13.01	05	Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS		88,89	90,5	3.250.533.000		603.314.000	100	430.600.000	100	370.731.500	100		3.611.766.625		Dinsosnaker
1	13	1.13.01	06	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi sosial	Menurunnya angka rumah tangga dan keluarga miskin yang mengalami permasalahan sosial	96,70	98,45	661.153.000		717.108.700	94,86	397.423.600	90,0	453.861.850	100		2.229.695.550		Dinsosnaker
1	13	1.13.01	07	Program Perlindungan Anak Terlantar	Terlaksananya pemberian bagi anak terlantar		100	170.500.000									170.500.000		Dinsosnaker
1	13	1.13.01	10	Program Pemberdayaan Fakir Miskin yang Cacat dan Trauma	Terlaksananya pemberian bagi penyandang cacat dan trauma	98,55	100	212.593.600	100,00	43.657.500	97,50	132.351.600	100		100		388.602.800		Dinsosnaker
1	13	1.13.01	15	Pemberdayaan Fakir Miskin / Fakir Kumpo	Pemberdayaan yang mendapat bantuan	98,50	100	1.598.130.000		1.450.095.000	99,33	1.518.043.100	100	1.509.018.000	100		6.075.186.100		Dinsosnaker
1	13	1.13.01	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan Orsos terhadap masyarakat gampong	98,49	100	204.851.800	100,00	17.501.000	98,10	72.900.200	100	52.385.100	100		348.138.100		Dinsosnaker
1	13	1.13.01	15	Program Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas dan kemampuan pencari kerja	96,22	100	593.150.600	65,24	1.181.255.025	96,67	386.674.600	100	1.132.536.100	100		3.293.616.325		Dinsosnaker
1	13	1.13.01	16	Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mengisahkan kartu kerja yang kerja						96,33	115.880.800	100	86.754.000	100		202.634.800		Dinsosnaker

(1)				(3)	(4)		(6)		(8)		(10)		(12)		(14)		(16)
1	13	1.13.01	17	Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	90,03	100	78.604.000		87.286.800	85,97	72.604.300	100	94.094.300	100	335.470.200	Disnakerkop
1	13	1.13.01	17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Terlaksananya pembinaan bagi anak terlantar						44,89	190.410.000	100	-	00	990.910.000	Disnakerkop
1	13	1.13.01		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		89,44		8.258.497.939	86,52	9.547.392.028	88,67	8.470.083.468	100	8.891.154.238	100	26.232.075.646	BPBD
1	13	1.13.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	93,09	100	1.575.010.963	90,00	1.750.245.700	90,10	1.701.618.035	100	1.527.137.103	100	5.749.511.035	BPBD
1	13	1.13.01	02	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur		84,55	100	1.613.547.280		1.908.867.360	86,40	1.648.866.800	100	971.666.900	100	5.991.049.965	BPBD
1	13	1.13.01	05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kedisiplinan tugas aparatur	58,69	100	69.000.000	97,07	106.400.000	99,69	109.760.000	100	130.330.000	100	315.610.000	BPBD
1	13	1.13.01	13	Program peningkatan keamanan dan pencegahan bahaya kebakaran	Meningkatnya penanganan bencana	50,00	100	640.015.000	78,13	4.011.206.820	85,18	7.871.658.280	100	464.161.000	100	13.786.051.070	BPBD
1	13	1.13.01	22	Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Bencana Alam		66,33		287.224.776		309.088.000						596.312.776	BPBD
1	13	02	23	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga Keuangan (BSPE)				150.000.000		376.800.000				-		526.800.000	BPBD
1	17			KEBUDAYAAN				10.140.290.741		9.795.550.091	100	8.694.998.098		6.275.993.327		34.926.732.719	
1	17	1.17.01		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		93,26		10.140.290.741	98,47	9.795.550.091	88,43	8.694.998.098	100	6.326.861.624	100	34.926.732.749	Disnakpar
1	17	1.17.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	94,27	100	1.361.004.364	91,03	1.496.015.851	87,71	1.431.714.485	100	781.018.132	100	5.223.492.834	Disnakpar
1	17	1.17.01	02	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur		92,32	100	85.654.025		104.654.250	75,91	260.521.000	100	134.046.747	100	784.817.135	Disnakpar
1	17	1.17.01	05	Peningkatan Disiplin Aparatur		97,19	100	21.600.000		16.800.000	100	15.510.000	100	15.210.000	100	68.710.000	Disnakpar
1	17	1.17.01	15	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemeliharaan kekayaan budaya daerah berbasis media lokal		26,56	468.100.000	98,75	566.826.000	44,48	465.810.000	100	148.354.000	100	1.448.470.000	Disnakpar

(2)				(3)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	17	1.17.01	17	Program Pengembangan Kerjasama Budaya	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tradisi pengembangan pengelolaan kesenian budaya daerah berbasis media dalam dan LUAR NEGERI	94,42	100	3.340.000.000	98,38	2.989.009.000	95,02	2.001.005.000	100	2.221.555.000	102	10.773.169.000	Disbudpar
2	34	1.17.01	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan terhadap Pencapaian Daerah	89,31	100	3.414.131.960	99,53	3.476.062.470	90,05	3.753.375.000	100	1.729.431.000	102	15.475.049.400	Disbudpar
2	34	1.17.01	10	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		97,44	100	1.302.000.000	95,30	1.138.213.000	94,41	1.093.167.635	100	577.508.919	102	4.111.175.554	Disbudpar
				Program Pengelolaan Kebudayaan Budaya								401.375.000		254.000.000		755.625.000	Disbudpar
1	10			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				6.908.407.091		11.475.662.892	100	8.544.048.547		8.366.265.991		54.577.434.223	
																-	
1	13	1.13.01		Dinas Perhubungan Bintan		91,42		940.143.400		1.077.682.580	92,73	1.178.963.956	100	934.282.400	102	3.120.178.156	Kesbanglinmas
1	13	1.13.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	69,21	100	235.646.200	93,55	344.870.000	85,14	318.553.756	100	270.321.600	102	1.168.971.556	Kesbanglinmas
1	13	1.13.01	02	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	99,56	100	142.414.200	95,12	105.240.000	97,63	108.844.200	100	87.298.600	102	543.338.000	Kesbanglinmas
1	13	1.13.01	08	Peningkatan Disiplin Aparatur		99,28	100	22.900.000		14.200.000	100	14.600.000	100	13.400.000	102	99.873.000	Kesbanglinmas
1	13	1.13.01	15	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan masyarakat	97,30	98,95	74.064.000		59.938.900	95,19	57.011.400	100	34.991.900	102	225.135.400	Kesbanglinmas
1	13	1.13.01	16	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Penanganan Tindak Kriminal	Peningkatan ketaatan di dalam kehidupan bermasyarakat dalam memelihara ketertiban lingkungan	66,38	100	134.500.000		103.780.000	97,22	126.086.000	100	118.771.400	102	483.136.400	Kesbanglinmas
1	13	1.13.01	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan	96,82	100	188.150.000		153.755.800	92,11	117.574.900	100	113.342.000	102	523.231.700	Kesbanglinmas
1	13	1.13.01	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Ketentram	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentram	-					93,70	25.000.000	100	24.743.000	102	74.074.000	Kesbanglinmas
1	13	1.13.01	20	Program Peningkatan Pemberdayaan Potensi masyarakat	Meningkatnya tingkat penyerapan masyarakat	100	100	162.525.000		104.201.800	98,23	162.457.000	100	134.760.400	102	563.943.800	Kesbanglinmas

(1)				(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	18	1.18.01	01	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Terbinanya masyarakat dalam berpolitik	93,67		-	52,58	3.213.471.870,0	69,15					7.219.420.400	Seluruh Unsur
1	19	1.19.01	03	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam (Perconve di BPBD)	Meningkatnya kewaspadaan masyarakat dalam penanggulangan korban Bencana Alam						97,81	158.482.000	100	80.096.800	100	258.551.800	Seluruh Unsur
1	19	1.19.02		Satpol PP dan WH		87,28		3.813.263.691		7.287.979.191	39,50	7.265.084.591	100	3.474.302.591	100	37.257.232.048	Satpol PP & WH
1	19	1.19.02	02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	88,06	100	1.135.477.453	93,50	5.643.572.251	97,60	5.782.072.251	100	5.796.766.191	100	19.779.515.986	Satpol PP & WH
1	19	1.19.03	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas kantor	93,03	100	379.661.278	85,12	1.004.250.000	95,53	552.032.400	100	764.450.400	100	2.923.744.078	Satpol PP & WH
1	19	1.19.02	08	Program Meningkatkan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	86,11	100	202.440.000	93,07	21.650.000	98,19	980.850.000	100	-	100	795.740.000	Satpol PP & WH
1	19	02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas SDM aparatur	-	100	153.000.000	70,00	200.000.000	98,04	-		278.150.000		931.150.000	Satpol PP & WH
1	19	1.19.03	15	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan ecosystem	77,36	100	948.685.000		858.887.000		782.250.000	100	834.648.000	100	2.918.182.000	Satpol PP & WH
1	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			100	109.178.403.860		101.168.199.201		98.836.159.194		84.646.987.680		648.359.733.917	
1	20	1.20.01		DPRK Kota Banda Aceh													
1	20	1.20.02		KDK & Wakil Kota Banda Aceh													
1	20	1.20.03		Sekretariat Kota		89,70		10.917.341.877		68.881.455.362	95,10	65.307.468.358	100	52.325.397.398	100	154.525.883.903	Set. Kota
1	20	1.20.03	01	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	89,57	100	4.010.845.425	91,65	16.900.668.790	97,87	18.458.891.290	100	19.189.831.550	100	58.455.239.475	Bag. Umum
1	20	1.20.03	03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas kantor	91,82	100	1.705.332.836,0	89,13	5.321.882.200	96,08	4.870.274.200	100	2.762.795.000	100	15.487.908.800	Bag. Umum
1	20	1.20.03	08	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	97,22	100	77.600.000	97,07	416.850.000	96,41	410.850.000	100	511.100.000	100	1.594.350.000	Bag. Umum
1	20	1.20.03	05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur	20,52	100	60.000.000		90.000.000	97,50	60.000.000	100	33.000.000	100	300.000.000	Bagian Umum

(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	20	1.20.08	16	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/WKDH		89,53	100	1.026.100.000		1.017.800.000	99,19	990.800.000	100	3.454.450.000	100	6.488.950.000	Bag. Umum
1	20	1.20.08	22	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang dapat diakses melalui website Biro Hukum Aceh	74,05	100	149.696.350		356.478.275	92,32	101.400.000	100	905.090.700	100	1.999.971.975	Bag. Adm. Perbangunan
1	20	1.20.08	20	Program Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pemanfaatan SIMI dan sistem aplikasi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	93,10	100	100.602.500	52,02	80.024.025	97,10	50.950.900	100	60.421.400	100	836.333.135	Bag. Adm Perbangunan
1	20	1.20.08	21	Pengembangan & Penerapan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelaksanaan nilai daerah yang mandiri dalam pemerintahan pemerintah	96,20	100	387.871.475		167.619.150	95,87	565.795.400	100	361.080.520	100	1.478.310.035	Bag. Adm Perbangunan
1	20	1.20.08	15	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa		91,42	100	908.163.000		1.463.807.400	97,84	4.630.049.500	100	1.017.000.300	100	8.020.085.850	Bag. Adm Perbangunan
1	20	1.20.08	29	Peningkatan Pelayanan Kehormatan Daerah	Naskah Indeks KDH yang harus dibuat	98,60		10.931.427.295		11.187.068.258	98,50	5.687.177.929	100	3.445.900.529	100	26.450.103.112	Bag. Umum
1	20	1.20.03	28	Kerjasama Informasi dan Media Massa	Terjalin kerjasama dengan media massa dalam rangka penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah aceh	96,12	100	1.918.517.400		2.872.235.600	100	1.006.842.629	100	2.467.565.640	100	11.904.180.469	Bag. Humas
1	20	1.20.04	20	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Terciptanya pelaksanaan kebijakan kepala daerah	69,19	100	565.412.401		974.629.184	79,17	808.037.500	100	891.893.970	100	4.001.941.135	Bag. Hukum
1	20	1.20.04	23	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terwujudnya APIP yang berkualitas dan memenuhi standar profesi	98,78	88.940.300	80,67	86.940.300	29,01	748.334.000	100	427.164.700	100	1.296.378.930	Bag. Hukum
1	20	1.20.04	26	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang dihasilkan	88,24	100	873.290.600		3.000.000.950	99,99	666.973.600	100	2.955.600.000	100	1.485.571.350	Bag. Hukum
1	20	1.20.03	19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Qanun yang dihasilkan Kota Banda Aceh		98,60	40.000.000	50,30	34.293.600		63.278.700	100		100	387.671.610	Bag. Ekonomi
1	20	1.20.01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			100			8.753.300	100					8.753.300	Bag. Ekonomi
1	20	1.20.03	30	Program Peningkatan Implementasi Hukum Bagi Aparatur dan Publik					63,50	247.362.500	100					107.197.400	Bag. Hukum

(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	20	1.20.01	03	Program Pendidikan Pendidikan	Terciptanya tata masyarakat dinas	92,85	100	81.398.500	81,55	99.992.900	95,72	45.711.700	100	16.968.377	100	126.847.800	Bag. Organisasi
1	20	1.20.01	04	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terwujudnya analisis jabatan PNS	79,59	100	352.399.000		332.230.800	94,94	153.951.600	100	183.931.900	100	1.169.203.000	Bag. Organisasi
1	20	1.20.01	06	Pengembangan Sistem Pemerintah Kota	Meningkatnya kapasitas pemerintah kota dalam pelayanan publik	79,00	100	232.051.503		201.767.530	74,87	159.628.850	100	160.821.200	100	844.204.500	Bag. Organisasi
1	20	1.20.01	15	Program Peningkatan Ekonomi Dan Kerjasama Investasi	Terlaksananya koordinasi dan pemberian fasilitasi terhadap data bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						68,75	98.181.600	100	69.200.900	100	1.125.881.800	Bag. Ekonomi
1	20	1.20.01	15	Program Pengembangan Data/Informasi	Terpublikasinya data/informasi Pembangunan	95,56	100	30.679.175	97,33	-				-		34.079.275	Bag. Ekonomi
1	20	1.06.01	15	Pengembangan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Tingkat Nilai Ekonomi Masyarakat	91,24	100	146.588.405		-						146.588.405	Bag. Ekonomi
2	24	1.21.01	15	Program Kemitraan dan Pengembangan Syariat Islam	Terlaksana pengawasan syariat Islam dikalangan masyarakat serta pengawasan transaksi di kota Banda Aceh		100	430.809.000		675.014.000	76,50	687.544.500	100	407.990.700	100	2.130.760.500	Dep. Ekonomawan
2	29	1.20.01	17	Pengembangan Kecamatan	Meningkatnya pola hidup yang sesuai dengan syariat Islam	53,68	100	79.000.000		101.900.000	99,99	87.240.000	100	52.494.000	100	320.134.000	Dep. Ekonomawan
2	20	1.21.01	20	Program Pengembangan Syariat Islam	Terselenggara pengawasan syariat		100	1.125.500.000		1.336.966.000	74,41	1.357.938.100	100	769.800.500	100	4.590.204.600	Dep. Ekonomawan
2	24	1.21.01	21	Program Usaha Ekonomi Gender dan Anak Pada Badan Ekonomi	- Penelitian Mikro Tekno		99,5	146.950.000	54,57	-						189.950.000	Dep. Ekonomawan
2	28	1.21.01	22	Program Pengembangan Sistem Ekonomi	Terselenggaranya kegiatan Badan pengawasan di masjid pengawasan di Masjid Agung Al Makmur		100	154.000.000	68,80	377.600.000	86,22	624.000.000	100	434.300.000	100	1.570.000.000	Dep. Ekonomawan
1	20	1.23.01	28	Program Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur								300.000.000				420.000.000	Bag. Ekonomawan

(1)				(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	A.	1.22.04	16	Peningkatan Pengendalian Sistem Pelaporan Capaian Gubernur dan Keuangan	Persentase informasi pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan	89,22		47.031.000	89,63	58.218.900		63.218.700	100	58.011.700		375.557.900	Biro Perekonomian
1	20	1.22.00		Sekretariat DPRK		87,40		33.546.678.200	93,63	21.307.354.269	91,40	17.601.114.709	100	16.304.500.835	100	85.527.730.894	Set. DPRK
1	20	1.22.01	01	Program Penunjang Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	91,31	100	5.917.879.000	91,65	8.194.895.200	99,98	8.546.901.709	100	7.932.900.709	100	33.593.750.038	Set. DPRK
1	20	1.22.04	22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan kepada tugas kantor	93,82	100	15.117.450.400	85,12	5.565.933.269	99,96	2.565.877.200	100		100	24.649.937.669	Set. DPRK
1	20	1.22.04	23	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya pelayanan kepada aparatur	97,07	100	293.200.000	97,07	474.100.200	99,22	210.035.200	100	252.675.000	100	1.230.910.000	Set. DPRK
1	20	1.22.04	79	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	60,66	99,65	870.000.000		1.074.200.200	84,66	415.200.200	100	1.132.400.000	100	3.610.400.000	Set. DPRK
1	20	1.22.04	19	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat	89,47	100	3.949.600.000		5.943.899.200	87,40	5.645.998.200	100	4.097.032.000	100	23.435.729.000	Set. DPRK
1	20	1.22.05		Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota		87,39		13.815.819.013		10.371.454.840	87,78	13.487.005.607	100	6.401.355.994	100	40.903.315.351	DPKAD
1	20	1.22.05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	83,44	100	1.538.287.900	91,65	2.837.396.120	93,25	2.265.621.957	100	2.056.868.122	100	8.501.852.317	DPKAD
1	20	1.22.05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan kepada tugas kantor	90,93	100	3.767.193.700	99,12	1.987.390.000	91,42	6.038.205.200	100	303.270.000	100	13.113.613.000	DPKAD
1	20	1.22.05	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya pelayanan kepada aparatur	71,90	100	62.800.000	97,07	67.700.700	99,79	38.900.700	100	45.300.000	100	340.260.000	DPKAD
1	20	1.22.05	05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	41,18	100	46.200.000		35.700.000	0	17.700.700	100	8.200.000	100	91.200.000	DPKAD
1	20	1.22.05	06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedia data Realisasi SKPD Dalam LAKIP Skala	85,17	100	80.182.000		93.144.200	99,60	64.300.200	100	126.750.000	100	401.849.500	DPKAD
1	20	1.22.05	17	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedia laporan keuangan daerah yang lebih tertib, akurat dan transparan	70,13	100	3.246.512.810		4.852.386.710	85,73	4.852.301.710	100	2.821.229.872	100	19.663.960.104	DPKAD

(1)				(2)	(3)		(4)		(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)		(13)	(14)
1	20	1.20.00		Badan Kesbangpolinmas, Pendidikan & Pelatihan		93,04			3.595.302.172			4.103.163.977	85,88		4.122.175.565	100		3.359.369.669	100		15.327.830.181	BKPP
1	20	1.20.00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	93,29	100		307.005.143	91,02		922.830.640	84,94		1.419.513.094	100		1.225.995.200	100		4.875.266.742	BKPP
1	20	1.20.00	03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas kantor	94,64	100		133.105.02	85,13		665.153.107	98,16		917.535.619	100		195.505.358	100		1.206.302.732	BKPP
1	20	1.20.00	04	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya pelaksanaan tugas aparatur	93,18	100		24.600.000	97,07		12.000.000	93,37		34.350.000	100		39.200.000	100		90.132.000	BKPP
1	20	1.20.00	05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	84,11	100		79.335.000			50.000.000	36,23		50.000.000	100		20.300.000	100		194.199.000	BKPP
1	20	1.20.00	04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya aparatur	93,85	100		1.168.905.103			1.339.930.080	99,12		674.069.050	100			100		2.574.205.233	BKPP
1	20	1.20.00	05	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tersedianya fasilitas kesatuan KNS	84,18	100		1.016.434.619			1.308.238.955			1.469.708.500	100		1.335.967.537	100		5.111.594.374	BKPP
1	20	1.20.07		Inspektorat		97,17			1.462.881.630	92,92		1.405.791.003	90,38		1.549.907.302	100		1.332.830.400	100		5.662.987.300	Inspektorat
1	20	1.20.07	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	99,98	100		597.709.001	91,89		359.582.500	98,08		447.721.000	100		329.823.400	100		1.470.793.930	Inspektorat
1	20	1.20.07	02	Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		94,50	100		132.153.600			176.724.008	90,13		224.241.800	100		81.870.000	100		647.340.430	Inspektorat
1	20	1.20.07	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan tugas aparatur	100	100		24.600.000	97,07		17.200.000	92,12		21.070.000	100		16.400.000	100		81.270.000	Inspektorat
1	20	1.20.07	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terselenggara pelaksanaan evaluasi capaian daerah	99,84	100		877.941.000	85,29		811.636.000	98,19		805.524.000	100		787.044.200	100		3.282.745.000	Inspektorat
1		1.20.07	21	Pelatihan Pemeriksaan Teknis Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			100		93.001.000	100,00		30.000.000	100		35.000.000	100		25.300.000	100		140.300.000	Inspektorat
1	1	1.20.07	22	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan			100		40.460.000			16.008.000	93		16.429.500	100			100		72.838.000	Inspektorat
1	23	1.23.08		Kecamatan Kuta Alam		95,55			2.015.711.819	96,17		2.536.758.630	98,48		1.956.151.775	100		852.800.000	100		7.361.427.500	Kec. Kuta Alam
1	23	1.23.08	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Menerapkannya pelayanan administrasi perkantoran	99,61	100		1.856.287.600	91,99		1.687.557.600	98,47		1.718.125.600	100		289.044.000	100		5.340.330.720	Kec. Kuta Alam
1	23	1.23.08	20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Menerapkannya kelancaran tugas-tugas kantor	95,29	100		158.924.219	88,32		169.894.000	88,31		94.123.175	100		31.500.000	100		581.381.443	Kec. Kuta Alam

(1)				(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)	(16)
1	20	1.20.08	02	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kecerdasan tugas aparatur	100		100		23.400.000		97,37		25.200.000		1,00		25.620.000		1,00		18.000.000		1,00		73.500.000		Kec. Batu Mas
1	20	1.20.08	28	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya pelayanan pemerintahan kecamatan	98,50		100		127.605.000				1.068.822.020		34,50		127.650.000		1,00		152.634.700		1,00		1.349.134.540		Kec. Batu Mas
1	20	1.20.09		Kecamatan Baktirahman		97,15				1.852.480.103		97,15		1.838.479.425		99,00		1.714.059.475		1,00		491.753.475		1,00		6.896.678.676		Kec. Baktirahman
1	20	1.20.09	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	96,37		100		1.457.128.000		93,66		1.471.715.360		47,79		1.478.842.575		1,00		239.094.375		1,01		6.647.091.850		Kec. Baktirahman
1	20	1.20.09	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kecerdasan tugas-tugas kantor	99,60		100		118.897.500		89,13		74.549.035		37,00		56.541.000		1,00		34.035.000		1,03		352.513.375		Kec. Baktirahman
1	20	1.20.09	04	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kecerdasan tugas aparatur	100		100		21.000.000		97,37		23.850.000		1,00		24.600.000		1,00		16.000.000		1,00		98.500.000		Kec. Baktirahman
1	20	1.20.09	28	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya pelayanan pemerintahan kecamatan	99,78		100		257.466.000				238.667.860		44,39		364.865.900		1,00		222.923.900		1,00		970.927.660		Kec. Baktirahman
1	20	1.20.10		Kecamatan Meurasa		96,30				1.959.239.101		99,58		1.291.679.028		99,88		1.375.125.925		1,00		410.376.425		1,03		7.437.611.897		Kec. Meurasa
1	20	1.20.10	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	96,08		100		2.047.689.600		93,56		1.588.319.877		34,37		2.124.845.721		1,00		221.416.725		1,03		6.348.671.910		Kec. Meurasa
1	20	1.20.10	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kecerdasan tugas-tugas kantor	97,06		100		156.128.600		89,13		176.078.111		19,35		109.630.500		1,00		23.928.500		1,03		425.001.511		Kec. Meurasa
1	20	1.20.10	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kecerdasan tugas aparatur	100		100		6.000.000		97,37		9.000.000		1,00		10.350.000		1,00		11.220.000		1,03		45.555.000		Kec. Meurasa
1	20	1.20.10	28	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya pelayanan pemerintahan kecamatan	98,85		100		240.915.301				317.690.040		0,00		129.396.700		1,00		149.812.200		1,03		781.284.051		Kec. Meurasa
1	20	1.20.11		Kecamatan Syiah Kuala		96,21				1.984.167.200		90,45		1.508.674.540		95,76		1.835.403.440		1,00		358.398.930		1,00		8.240.635.453		Kec. Syiah Kuala
1	20	1.20.11	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	96,21		100		1.680.167.200		91,45		1.468.729.200		35,21		1.509.305.200		1,00		282.758.000		1,00		6.650.529.000		Kec. Syiah Kuala
1	20	1.20.11	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	97,50		100		159.233.200		85,13		161.257.040		33,15		178.620.640		1,00		51.671.800		1,00		652.480.480		Kec. Syiah Kuala
1	20	1.20.11	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	99,50		100		32.250.000		97,37		31.000.300		1,00		32.400.300		1,00		24.030.000		1,00		77.750.000		Kec. Syiah Kuala

	(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	20	1.20.11	28		Peningkatan Pelayanan Perangkat Internal Kecamatan	Terselenggaranya pelayanan pemerintahan kecamatan	98,46	100	151.937.000		262.591.500	97,89	193.977.500	100	209.370.000	100	817.370.000	Kec. Sylvia Rosela
1	20	1.20.12			Kecamatan Bandar Raya		98,63		1.722.399.450	55,80	1.799.403.843	98,58	1.733.803.112	100	406.134.300	100	5.715.334.705	Kec. Bandar Raya
1	20	1.20.12	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	99,12	100	1.317.417.050	91,89	1.330.991.050	99,27	1.399.673.999	100	207.728.300	100	4.255.310.399	Kec. Bandar Raya
1	20	1.20.12	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas kantor	97,71	100	172.535.400	65,12	202.743.490	95,18	180.785.680	100	86.681.000	100	672.165.573	Kec. Bandar Raya
1	20	1.20.12	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya pelaksanaan tugas aparatur	100	100	13.200.000	97,07	10.400.000	100	10.410.000	100	11.200.200	100	45.210.000	Kec. Bandar Raya
1	20	1.20.12	28		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Terselenggaranya pelayanan pemerintahan kecamatan	95,70	100	213.750.000		259.271.203	85,00	167.930.443	100		100	535.352.743	Kec. Bandar Raya
1	20	1.20.13			Kecamatan Kuta Raja		98,40		1.241.832.400	57,85	1.275.870.503	98,00	1.217.471.400	100	271.150.400	100	4.106.790.700	Kec. Kuta Raja
1	20	1.20.13	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	98,16	100	948.711.000	91,95	968.807.000	98,72	965.268.000	100	167.000.000	100	3.040.104.000	Kec. Kuta Raja
1	20	1.20.13	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas kantor	97,72	100	91.749.400	65,12	95.445.000	96,78	97.141.000	100	58.578.000	100	381.012.400	Kec. Kuta Raja
1	20	1.20.13	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya pelaksanaan tugas aparatur	99,86	100	10.200.000	97,37	11.600.000	98,13	10.470.000	100	9.800.200	100	41.070.000	Kec. Kuta Raja
1	20	1.20.13	28		Peningkatan Pengelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Terselenggaranya pelayanan pemerintahan kecamatan	99,56	100	190.196.000		149.078.500	100	141.690.400	100	156.110.400	100	794.314.900	Kec. Kuta Raja
1	20	1.20.14			Kecamatan Jaya Baru		96,81		1.569.766.226	99,68	1.631.884.500	98,11	1.551.959.200	100	426.863.300	100	5.190.152.926	Kec. Jaya Baru
1	20	1.20.14	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	96,06	100	1.378.965.026	91,86	1.101.494.000	97,96	1.175.624.000	100	188.067.700	100	3.844.652.703	Kec. Jaya Baru
1	20	1.20.14	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedia jasa surat menyurat			-	100,00			90.316.000		29.909.000		80.032.000	
1	20	1.20.14	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas kantor	50,20	100	42.059.225	65,12	105.400.000	90,13	99.279.700	100	44.480.700	100	371.386.625	Kec. Jaya Baru
1	20	1.20.14	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya pelaksanaan tugas aparatur	100	100	13.200.000	97,37	10.000.000	90,91	11.360.000	100	9.600.300	100	68.960.000	Kec. Jaya Baru

(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	20	1.20.14	08		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Terselenggaranya pelayanan pemerintahan kecamatan	100	100	235.552.000		355.972.900	39,17	365.979.900	100	189.506.600	100	947.384.600	Kec. Ujoh Bilang
1	20	1.20.15			Kecamatan Long Bata		95,58		1.588.183.900	98,68	1.538.125.500	95,39	1.610.785.600	100	450.457.900	100	5.698.073.107	Kec. Long Bata
1	20	1.20.15	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	95,79	100	1.210.400.500	91,85	1.184.424.900	93,85	1.250.886.600	100	221.139.807	100	4.871.877.602	Kec. Long Bata
1	20	1.20.15	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur kecamatan	98,16	100	145.570.400	95,12	107.300.300	93,74	202.581.500	100	27.855.700	100	511.411.600	Kec. Long Bata
1	20	1.20.15	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kedisiplinan tugas aparatur	91,10	100	12.200.000	97,07	10.800.300	100	11.100.000	100	10.800.000	100	45.000.000	Kec. Long Bata
1	20	1.20.15	28		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Terselenggaranya pelayanan pemerintahan kecamatan	91,66	100	170.556.000		301.805.300	98,12	166.087.100	100	330.022.400	100	1.123.250.980	Kec. Long Bata
1	20	1.20.16			Kecamatan Ujoh Bilang		97,68		1.744.455.303	96,01	1.559.449.500	96,17	1.626.455.500	100	530.957.903	100	5.377.817.603	Kec. Ujoh Bilang
1	20	1.20.17	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	97,45	100	1.270.013.000	90,63	1.265.774.300	95,69	1.309.300.000	100	268.528.000	100	4.134.010.000	Kec. Ujoh Bilang
1	20	1.20.17	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	92,02	100	215.240.400	85,18	91.920.300	98,11	47.224.000	100	23.603.000	100	192.050.500	Kec. Ujoh Bilang
1	20	1.20.17	28		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	100	100	18.600.000	97,07	15.900.300	97,18	14.190.000	100	13.600.000	100	59.990.000	Kec. Ujoh Bilang
1	20	1.20.18	28		Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya pelayanan pemerintahan kecamatan	94,92	100	278.795.200		304.299.000	100	154.961.900	100	141.169.900	100	831.256.300	Kec. Ujoh Bilang
1	20	1.20.17			Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu		96,88		675.480.600	97,87	772.500.300	97,45	761.290.750	100	611.835.403	100	3.821.116.750	KPPTSP
1	20	1.20.17	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	97,00	100	425.464.700	91,65	414.330.000	97,40	417.029.750	100	453.323.096	100	1.810.124.400	KPPTSP
1	20	1.20.17	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	95,88	100	55.615.900	95,12	73.970.300	95,74	85.336.000	100	52.866.000	100	268.159.400	KPPTSP
1	20	1.20.17	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	91,87	100	21.000.000	97,01	22.900.300	98,0	22.900.300	100	12.800.000	100	59.160.000	KPPTSP

(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	06	1.20.01	19	Program Peningkatan Sistem Pembangunan Aparatur Negara	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	44,94	98,6	61.231.425		331.734.000	39,11	84.736.000	100	60.076.000	100	117.800.350	BPPTSP
1	20	1.20.17	21	Program Penerapan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama Pelayanan Publik		-		90,46	50.100.000	67,87	60.900.000	100	86.757.450	100	147.797.450	BPPTSP
1	21	1.20.17	22	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya ketersediaan SDM dalam Bidang Pengadaan dan Pengelolaan Pemerintah dalam laporan Pemerintah Kota Banda Aceh dan Masyarakat serta Lain-lain dalam aplikasi kinerja dalam menunjang pelaksanaan tugas unit/organisasi		30,0	54.083.000	82,71		-	-			100	54.083.000	BPPTSP
1	22			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				4.881.289.800				4.280.046.880		3.196.000.250		12.477.286.430	
1	22	1.22.01		BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		97,42		4.881.289.800		4.660.621.980	95,88	4.280.046.880	100	3.196.000.250	100	12.037.907.830	BPM
1	22	1.22.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	97,25	100	339.505.500	91,65	436.832.300	99,88	525.831.200	107	800.198.000	100	1.891.548.860	BPM
1	22	1.22.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	98,10	95,85	154.938.200	85,12	139.223.000	97,74	194.293.000	100	339.852.000	100	897.286.400	BPM
1	22	1.22.01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	100	100	23.400.000	97,07	15.400.000	99,64	18.000.000	100	15.400.000	100	74.200.000	BPM
1	22	1.22.01	15	Program Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	99,08	100	338.750.000	95,23	334.237.200	96,27	347.682.200	100	303.960.000	100	919.620.100	BPM
1	22	1.22.01	16	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Pedesaan	Terlaksananya kemandirian pemberdayaan pedesaan	96,92	98,92	199.203.100		258.206.950	99,98	490.516.450	100	369.737.000	100	1.148.216.100	BPM
1	22	1.22.01	17	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan	100	99,99	431.580.000		258.206.950	99,98	506.441.850	100	699.971.670	100	2.335.760.670	BPM

(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	22	1.22.01	20	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam menjalankan roda pemerintahan	97,09	100	2.825.404.600		2.825.404.600	94,01	2.641.915.600	100	2.641.915.600	100	8.249.741.200	BPM
1	22	1.22.01	20	Program Pengembangan sarana dan Prasarana Aparatur Kampung			100	300.990.000	100,00	297.210.000	99,40	59.064.000	100	615.420.000	100	1.079.663.000	BPM
1	22	1.22.01	21	Program Pengelolaan kelembagaan kemukiman dan Aparatur	Terlaksananya penguatan kelembagaan kemukiman dan Aparatur		100	112.826.000		29.146.800	100	53.566.200	100	15.999.100	100	229.073.600	BPM
1	22	1.22.01	22	Program Sinkronisasi Pengawasan kemukiman	Tersedianya Laporan kebijakan penanggulangan kemiskinan	99,13	100	40.834.000		21.669.700		18.606.150		10.222.250		111.331.100	BPM
1	22	1.22.01	23	Program Fasilitasi Pemberdayaan dan Kelembagaan Gampong	Terwujudnya pemberdayaan dan kelembagaan gampong			-	98,09	20.112.400	100	34.239.000	100	20.412.400	100	74.764.400	BPM
1	26			PERPUSTAKAAN				538.425.700			82,89	697.955.400		447.258.500		1.974.645.600	
1	26	1.26.01		Kantor Perpustakaan dan Arsip		91,75		538.425.700		577.669.600	93,61	697.955.400	100	447.258.500	100	2.157.035.600	Kantor Pustaka & Arsip
1	26	1.26.01	21	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	89,68	100	145.954.000	91,03	166.448.500	100	281.747.300	100	200.324.300	100	716.072.700	Kantor Pustaka & Arsip
1	26	1.26.01	22	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	90,59	100	119.078.600	88,12	157.090.000	100	281.747.300	100	122.971.900	100	671.887.900	Kantor Pustaka & Arsip
1	26	01	23	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	100	100	15.000.000	97,07	8.000.000	100	90.000.000	100	9.200.000	100	31.200.000	Kantor Pustaka & Arsip
1	26	1.26.01	26	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur	-	100	11.003.000		100.000.000		-		-		20.000.000	Kantor Pustaka & Arsip
1	26	1.26.01	19	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan		94,50	94,8	106.000.000		192.400.000	100	184.588.800	100	88.778.800	100	649.568.600	Kantor Pustaka & Arsip
1	26	1.26.01	15	Program Penyelamatan Dokumentasi Arsip Daerah		86,05	100	21.468.100		28.831.800	100	41.269.800	100	16.468.900	100	108.738.600	Kantor Pustaka & Arsip
2				UTUSAN PELIHAN				58.031.333.025		60.365.706.657		68.746.939.591		56.835.017.181		213.089.891.134	
2	05			KELAUTAN DAN PERIKANAN				6.449.886.906		11.338.280.262		17.072.220.013		8.868.116.079		45.409.541.359	
2	05	2.05.01		Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian		77,78		6.449.886.906	92,50	11.338.280.262	100	17.072.220.013	100	8.868.116.079	100	45.409.541.359	DKPP

(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	05	2.05.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	85,13	100	584.638.575	91,55	578.361.000	93,13	779.919.920	100	500.158.920	100	3.448.984.630	DKPP
2	05	2.05.01	03		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas teknis	99,33	93,5	266.100.700	85,12	822.547.625	97,18	380.776.900	100	778.857.600	100	2.144.132.115	DKPP
2	05	2.05.01	07		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya pelaksanaan tugas aparatur	99,09	100	58.230.000	92,69	36.400.000	87,49	18.400.000	100	82.470.000	100	195.800.000	DKPP
2	05	2.05.01	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		53,85	100	30.000.000	12,79							33.000.000	DKPP
2	01	2.01.01	17		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan		94,69		100,00	2.899.485.400						3.899.486.400	DKPP
2	01	2.01.01	20		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Menurunnya penularan Penyakit Ternak/Hewan		100	322.304.000		173.546.200						195.450.289	DKPP
2	01	2.01.01	21		Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian	Meningkatnya produktifitas pertanian		100	250.000.000	39,89	600.000.000				1.000.000.000		2.545.500.000	DKPP
4	01	2.01.01	23		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya pelayanan di pasar hewan	95,67			100,00	686.980.000	92,55	1.074.787.500	100		100	1.761.467.500	DKPP
2	05	2.05.01	25		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Tersedianya sarana pendukung untuk pembudidaya ikan	90,13	100	581.125.600	79,33	1.467.740.000	88,36	1.874.866.000	100	2.022.329.800	100	6.346.775.600	DKPP
2	05	2.05.01	31		Program Pengembangan Perikanan Tangkap		71,22	58,65	2.147.730.623	20,42	3.616.694.702	83,86	5.489.408.679	100	805.111.500	100	11.972.012.969	DKPP
1	01	1.01.01	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkebunan	Meningkatnya kesejahteraan petani masyarakat	99,77	100	1.761.016.000	44,62	1.514.969.650	91,83	1.417.082.550	100	815.951.000	100	990.451.200	DKPP
1	01	1.01.01	16		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Adanya informasi teknis bercocok tanam yang baik dan benar						93,32	16.612.500	100	17.903.000	100	34.720.000	DKPP
1	01	1.01.01	18		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan				100,00		91,58	3.006.540.455	100	2.375.803.250	100	5.382.609.705	DKPP
1	01	1.01.01	19		Program Pemberdayaan Kelembagaan Pertanian/Perkebunan Lainnya	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengelola						99,44	14.455.000	100	36.724.200	100	51.179.200	DKPP
1	01	1.01.01	20		Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Tanaman		82,84			57,21		98,68	381.635.150	100	86.158.759	100	380.758.849	DKPP
1	01	1.01.01	21		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan				93,89		94,52	3.383.800.000	100		100	3.383.800.000	DKPP
1	02	1.02.01	12		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan					93,88		91,22	1.467.285.038	100	310.336.750	100	2.677.951.768	DKPP

(1)					(2)	(3)		(6)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	05	1.21.09	15		Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Terlaksananya pemberdayaan kelompok Masyarakat Pesisir		100	382.500.400	98,05	420.297.300		-		-				802.797.700	DKPP
2	05	1.21.09	16		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Pesisir			100	1.966.493.300	99,88	385.304.725								2.351.798.025	DKPP
2	01	2.05.01	18		Program Peningkatan Produksi Perkebunan/Perkebunan										173.207.500				173.207.500	DKPP
2	07				INDUSTRI				15.392.352.316		38.330.036.200		37.526.537.025		15.440.031.681				66.389.400.006	
2	07	2.07.01			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		105,18		15.392.352.316		38.330.036.200	93,39	37.526.537.025	100	15.440.031.681	100		100	66.389.400.006	Dinas Perdagangan
2	07	2.07.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	98,57	100	495.844.000	91,66	577.294.000	66,06	751.977.150	100	379.023.880	100		100	2.203.249.136	Dinas Perdagangan
2	07	2.07.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas pokok	98,57	98,57	625.351.400	86,12	851.269.500	59,26	851.169.900	100	120.718.800	100		100	1.315.919.500	Dinas Perdagangan
2	07	2.07.01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	100	100	37.800.000	97,07	24.300.000	59,81	46.670.000	100	26.400.000	100		100	134.870.000	Dinas Perdagangan
2	07	2.07.01	15		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Adanya kenyamanan dari konsumen dalam pemakaian produk yang beredar	99,09	100	6.868.897.776	98,69	1.210.989.000	81,79	3.996.329.819	100	1.511.911.200	100		100	13.174.356.995	Dinas Perdagangan
2	07	2.07.01	16		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Terpromosikannya UMKM pada pameran dan factory outlet serta terbentuknya pelaku perdagangan yang tangguh	99,82	100	514.025.300		180.700.000	59,48	346.410.000	100	209.204.250	100		100	1.383.340.250	Dinas Perdagangan
2	07	2.07.01	19		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	Terbinanya pedagang kaki lima dan pedagang asongan	99,66	99,9	3.067.660.400	99,81	6.986.149.819		-						10.053.810.219	Dinas Perdagangan
2	07	2.07.01	20		Program Peningkatan Pelayanan Pasar	Adanya pelayanan pasar yang optimal	128,81	100	6.999.999.000	99,16	6.799.059.319	96,71	5.546.454.420	100	5.575.299.309	100		100	27.586.425.814	Dinas Perdagangan
2	07	2.07.01	15		Program Peningkatan Kapasitas Ipteks bagi Sentra Produksi	Tersedianya IKM yg mampu menjamin pemasaran domestik	99,51	100	110.982.500	100,00	76.321.400	68,79	65.519.650	100	-	100		100	361.823.550	Dinperindagkop
2	07	2.07.01	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya unit usaha industri kecil dan menengah yang menunjang one village one product	99,58	100	810.771.057	99,34	1.189.673.750	99,51	1.150.993.850	100	1.363.789.507	100		100	6.484.882.132	Dinperindagkop

(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	07	2.07.01	17		Program Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya Pengelolaan yang menggunakan Teknologi modern dalam kegiatan perindustrian	99,81	100	200.000.000			100	53.061.360	100		100	253.061.360	Dispenindagkop
2	07	2.07.01	18		Program Pembinaan Sentra Industri Kecil	Tersedianya profil serta terbinanya industri kecil (Packing & labeling	99,18		95.663.000	96,06	94.361.000		-	100	-	100	190.958.000	Dispenindagkop
2	07	2.07.01	19		Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Tersedianya profil IKM		100	22.670.000		-	100	109.641.000				132.617.000	Dispenindagkop
1	05	2.07.01	15		Program Pendidikan Bidang Usaha Kecil Menengah yang Kurikuler	Berkembangnya usaha kecil menengah yang difasilitasi dibidang permodalan	100	120	96.901.300	94,86	569.581.800	98,42	3.218.861.300	100	13.336.100	100	3.809.180.800	Dispenindagkop
1	05	2.07.01	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Berkembangnya usaha kecil dan menengah yang unggul dan kompetit	99,83	99,6	37.169.600	93,54	318.768.250	93,88	484.427.200	100	4.840.791.900	100	5.836.156.950	Dispenindagkop
1	05	2.07.01	15		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi		120	86.901.050	67,51	51.676.200	99,46	64.279.800	100	219.642.700	100	462.669.550	Dispenindagkop
3	09				SYARIAT ISLAM				32.343.291.993		50.896.788.687	100	53.478.383.541		31.601.679.499		138.290.943.070	
3	09	3.09.01			Dinas Syariat Islam			91,21	7.103.597.970	93,40	8.410.610.500	96,00	10.007.698.575	100	5.603.071.575	100	35.384.191.620	Dinas Syariat Islam
3	09	3.09.01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	91,83	120	481.549.900	91,65	360.135.900	98,24	612.693.875		500.991.675	100	1.835.351.350	Dinas Syariat Islam
3	09	3.09.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelaksanaan tugas SKPD	90,44	88,37	307.984.000	83,12	214.011.300			100	169.443.000	100	891.440.000	Dinas Syariat Islam
3	09	3.09.01	05		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya pelaksanaan tugas operasional	89,19	120	27.600.000	97,07	16.300.200	100	31.100.300	100	18.400.000	100	75.300.000	Dinas Syariat Islam
3	20	3.09.01	29		Program Peningkatan Pelayanan Penerimaan Daerah	Meningkatnya pelayanan pemerintah daerah				96,68	1.779.440.100					100	1.779.440.000	Dinas Syariat Islam
3	09	3.09.01	15		Program Pembinaan & Pengembangan Syariat Islam	Terlaksananya pembinaan Syariat Islam secara maksimal	96,58	89,10	3.455.049.600	90,00	2.528.173.700	100		100	2.917.036.900	100	8.900.260.000	Dinas Syariat Islam
3	09	22	16		Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peran Ulama dalam Pelaksanaan Syariat Islam	-	100	220.000.000		-	100		100			220.000.000	Dinas Syariat Islam

(1)				(2)	(3)	(4)		(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)
2	20	2.09.01	16	Program Penelitian Dan Pengembangan Syariat Islam	Tersebarnya Informasi Syariat Islam Kepada Masyarakat	96,17		525.333.000	30,33	517.035.000		708.378.450	100	821.537.450	100	3.571.168.800	Dinas Syariat Islam
2	09	2.09.01	19	Program Pemberdayaan Syariat Islam	Terlaksananya Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Keislaman	100		-	72,19		100			784.500.000		784.500.000	Dinas Syariat Islam
2	09	2.09.01	20	Program Lisensi Dakwah Generasi Muda dan Nadar Dakwah	- Pembinaan Majelis Taklim	-	100	1.049.093.400	92,57	1.048.993.800		941.921.700	100	1.100.460.750	100	5.574.568.850	Dinas Syariat Islam
2	09	2.09.01	22	Program Pembangunan Sarana Ibadah	Terselenggaranya kegiatan ibadah yang nyaman di musholla pemerintah dan di Masjid Agung Al-Mukhlisin	74,60	100	75.735.570	88,96	866.790.200	100	261.936.200	100	109.599.000	100	2.548.093.270	Dinas Syariat Islam
2	09	2.09.01	23	Program Pembinaan Ibadah	Terlaksananya pembinaan ibadah serta maknanya	67,75	100	445.713.000		-	100					445.713.000	Dinas syariat islam
2	09	2.09.01	24	Program Pemberdayaan Aparatur Umroh	Terlaksanya Aparatur Mesjid/Musholla	92,76	100	256.513.000		309.881.700		-		54.031.000		620.640.000	Dinas Syariat Islam
2	09	2.09.01	25	Program Pemberdayaan Aparatur Non Pemerintah Operasional	Terlaksananya Pengelolaan Hukum Islam	93,21	100	89.494.000		459.047.500		347.121.500	100	327.727.500	100	1.223.391.000	Dinas Syariat Islam
2	09	2.09.01	27	Program Kajian dan Kebijakan Pelaksanaan Syariat Islam	Terwujudnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan Syariat Islam	59,87	100	23.768.500		-		-				23.768.500	Dinas Syariat Islam
2	09	2.09.01	28	Program Pemeliharaan Tanah Kilayah	Terpeliharanya Pemeliharaan Tentang Tanah Kilayah	59,00	100	403.891.500		220.768.800		136.141.900	100	637.521.500	100	1.661.023.900	Dinas Syariat Islam
2	09	2.09.01	29	Program Peningkatan Pemerintah Daerah								1.369.513.700		1.232.041.300		7.621.358.600	Dinas Syariat Islam
2	09	2.09.02		Sekretariat (MPU)		85,91		681.513.275		847.843.700	98,18	1.031.227.935	100	884.573.975	100	3.406.007.625	Sek. MPU
2	09	2.09.02	01	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	91,97		544.917.990	91,65	721.795.900	97,65	695.641.000	100	590.575.416	100	3.575.152.337	Sek. MPU
2	09	2.09.02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelaksanaan tugas tugas kantor	88,67		86.598.030	85,12	87.760.000	98,83	85.286.156	100	37.850.000	100	295.494.186	Sek. MPU
2	09	2.09.02	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya pelaksanaan tugas aparatur	96,44		7.800.000	97,07	6.750.000	92,86	6.300.000	100	5.200.000	100	25.750.000	Sek. MPU

(4)					(2)	(3)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	(14)
2	09	2.09.02	10		Program Pemanfaatan Sumber Daya dan Pelayanan Ulama	Terlaksananya Peran Ulama dalam Pelaksanaan Syariat Islam	91.03		42.012.375		184.431.512	99.80	226.007.512	100	221.573.459	100	674.139.050	Set. MPU
2	09	2.09.02	18		Program Penelitian dan Pengembangan Syariat Islam	Terlaksananya Informasi Syariat Islam Kepada Masyarakat	-			44,44	22.37.0.15	99.91	46.264.100	100	36.518.100	100	107.019.015	Set. MPU
2	09	2.09.09			Sekretariat Majelis Adat Aceh		43,83		1.290.900.500		2.6.806.585	99.87	1016937800	100	1.088.998.800	100	3.550.641.185	Set. MAA
2	09	2.09.01	01		Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	85,58		421.821.600	41,65	4.3.106.000	99.24	4670665000	100	412.099.800	100	1.697.696.000	Set. MAA
2	09	2.09.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya terlaksananya tugas tugas kantor	99.04		337.215.100	85.12	277.264.000	99.74	2066030000	100	136.103.500	100	903.897.700	Set. MAA
2	09	2.09.01	79		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya terlaksananya tugas aparatur	99,47		47.800.000	80,07	8.300.000	99.85	30[illegible]0000	100	6.400.000	100	710[illegible]0.000	Set. MAA
2	09	03	19		Program Pembinaan Syariat Islam	Terlaksananya Pembinaan Pembi ha i Desa Islam	98.81		144.937.237	72.19	139.236.720	98.70	119686020	100	119.683.020	100	517.696.987	Set. MAA
2	09	03	23		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Aceh	Meningkatnya peranan Gampong dalam penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat dan adat istiadat	99,00		332.933.505	99.98	258.716.055	99.73	1610830[illegible]	100		100	773.036.240	Set. MAA
2	09	03	30		Program Pelestarian Adat Istiadat Sosial Syariat Islam	[illegible]ncapainya Pelestarian adat istiadat yang ada dalam masyarakat sesuai dengan Syariat Islam	-		[illegible]3467.758	91.84	[illegible]4.563.350	96.50	2[illegible]1.700	100	31.991.100	100	214.[illegible]3.358	Set. MAA
2	09	2.09.04			Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah		52,48		559.485.505		450.035.308	98.11	805434145	100	431.673.149	100	1.950.587.971	Set. MPD
2	09	2.09.04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	91,39		262.974.102	91.65	260.062.752	87,87	2[illegible]0829[illegible]	100	267.010.694	100	1.096.[illegible]0.[illegible]	Set. MPD
2	09	2.09.04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya terlaksananya tugas tugas kantor	98.12		137.179.700	85.12	117.770.380	93,60	90054481	100	83.001.650	100	437.604.510	Set. MPD
2	09	C1.09.04	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya terlaksananya tugas aparatur	100		8.800.000	97.00	8.300.000	93,89	6450000	100	6.000.000	100	29.550.000	Set. MPD

(2)					(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(13)	(14)		(15)	(16)
2	09	02.09.04	17		Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Adanya pemahaman tentang Qanun Aceh No 5 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan	100		33.993.141	97,69	33.676.161	97,57	34.508.141	100	43.233.761	100	161.835.902	Set. MPD
2	09	02.09.04	17		Program Pendidikan Menengah	Proses pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan untuk pembelajaran mutu pendidikan menengah	99,50		63.203.232	94,36	20.048.222	87,50	32213232	100	39.277.264	100	164.842.960	Set. MPD
2	09	02.09.04	20		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Adm. Aud.	Meningkatnya pemahaman Gampong dalam penyelenggaraan adat istiadat dan kearifan lokal serta pemajuan seni budaya			33.321.330	99,98	-						38.321.330	Set. MPD
2	09	2.09.05			SEKRETARIAT BRITLE MNI		87,22		22.589.094.743	85,77	39.935.441.084	91,81	20.8994.3342	100	19.039.572.000	100	83.015.514.265	Set. Baitul Mal
2	09	2.09.05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	99,29		454.984.700	91,65	291.840.300	95,47	10080 9500	100	809.600.900	100	3.004.668.800	Set. Baitul Mal
2	09	2.09.05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas bagi aparatur	99,46		261.769.100	85,12	121.372.400	98,00	9811500	100	50.045.500	100	521.000.000	Set. Baitul Mal
2	09	2.09.05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	99,99		10.500.000	97,07	34.700.300	97,50	2100000	100	19.000.000	100	65.570.000	Set. Baitul Mal
2	09	2.09.05	19		Program Penyelenggaraan Syariat Islam	Tetap Terjaganya Peningkatan Kehidupan Beragama	98,16		2.387.466.700	73,19	1.407.826.826.61	97,85	19716812542	100	28.762.635.000	100	79.580.312.965	Set. Baitul Mal
2	09	2.09.05	20		Program Dakwah Islamiah Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar	- Pembinaan Majelis Taklim			10.160.400	92,57	12.000.000		0				22.260.400	Set. Baitul Mal
					TOTAL				427.477.761.583		572.048.200.045		640.328.445.406		602.708.542.375		2.232.563.343.359	

Tabel 8.1.a
Indikasi Rencana Program Prioritas yang akan dilaksanakan
Kebutuhan Pendanaan
Kota Banda Aceh Tahun 2017

Kode		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2012) (%)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka				SKPD Penanggung Jawab
					2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		UrUSAN WAJIB				573.179.277.616			
1.03		PENDIDIKAN				43.542.068.520		67.582.068.520	
1.03	01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				43.542.068.520		67.582.068.520	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	85,60	100	2.861.018.800	100	2.861.018.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	43,08	100	179.182.200	100	179.182.200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	85,45	100	954.800.000	100	954.800.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	15	Perjalanan Kepala Dinas Biasa	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama	85,78	100	619.675.500	100	619.675.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	16	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Adanya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional	85,40	100	26.204.749.000	100	26.204.749.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	18	Pembinaan Pendidikan Menengah	Jumlah angka melek huruf usia produktif meningkat	99,92	100	79.567.500	100	79.567.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	19	Pembinaan Pendidikan Khusus	Meningkatnya upaya pemerintah untuk memberikan pendidikan khusus	86,69	100	99.150.000	100	99.150.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	20	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100% (3.895) tenaga pendidik sudah kualifikasi akademik sarjana (S1) dan sudah bersertifikasi pendidik	92,61	100	1.994.397.600	100	1.994.397.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	22	Manajemen Pelayanan Pendidikan	3.895 tenaga pendidik yang sudah diberdayakan sesuai standarnya	79,87	100	594.317.500	100	595.214.738	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	27	Pengelolaan Kebudayaan Daerah			100	1.569.750.000	100	1.424.750.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	28	Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Budaya	Jumlah lembaga budaya yang dibina meningkat	64,44	100	275.671.500	100	1.275.671.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	29	Pengembangan Nilai Budaya Bahasa dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah	Jumlah peserta dalam mengikuti lomba	99,46	100	868.111.500	100	868.111.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02		KESEHATAN				174.338.974.000		174.908.974.000	
1.02	1	Dinas Kesehatan				43.333.414.000		43.903.414.000	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	85,85	100	3.326.029.848	100	3.326.029.848	Dinas Kesehatan
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	53,88	100	2.300.143	100	2.300.143	Dinas Kesehatan
	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas	57,58	100	230.000.000	100	230.000.000	Dinas Kesehatan
	15	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	85,34	100	173.122.007	100	173.122.007	Dinas Kesehatan
	30	Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya cakupan kesehatan masyarakat	85,93	100	37.382.592.400	100	37.382.592.400	Dinas Kesehatan
	32	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya perilaku sehat masyarakat di dalam lingkungan sekolah	56,20	100	177.116.800	100	177.116.800	Dinas Kesehatan
	33	Pembinaan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Bulan Balita Sehat Gizi Anak Balita	63,03	100	176.362.876	100	176.362.876	Dinas Kesehatan
	34	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Optimalnya pemanfaatan KTR di Kota Banda Aceh	90,38	100	4.116.080.571	100	4.116.080.571	Dinas Kesehatan
	35	Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi Rumah Sakit	Meningkatnya angka kepuasan pelayanan rumah sakit	93,68	100	466.645.100	100	466.645.100	Dinas Kesehatan
	37	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya sistem informasi kesehatan berbasis teknologi online	99,36	100	555.654.249	100	665.654.249	Dinas Kesehatan

Kode		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD [2012] (%)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka				SKPD Penanggung Jawab
					2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	15	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Daerah, dan Jaringannya	Terpeliharanya Sumber Jaringan terbaik	8666	100	10.517.651.700	100	10.517.651.700	Dinas Kesehatan
	16	Peningkatan Pelayanan kesehatan Anak Balita			100	5.127.500	100	5.127.500	Dinas Kesehatan
	17	Peningkatan Layanan Administrasi dan Anak	Meningkatnya cegah kematian ibu dan bayi	98,1	100	846.714.839	100	846.714.839	Dinas Kesehatan
		Pembangunan Pelayanan Perkantoran Daerah			100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	
1.01	2	BLUD Rumah Sakit Umum Meuraxa				129.032.560.000		129.032.560.000	
	26	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUM	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang pelayanan kesehatan	8667	100	21.375.000.000	100	21.375.000.000	BLUD RSU Meuraxa
	25	Pengadaan Pembangunan Pemeliharaan Perkantoran Daerah	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran Daerah		100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	BLUD RSU Meuraxa
	14	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai standar	5716	100	107.298.560.000	100	107.298.560.000	BLUD RSU Meuraxa
1.03		PERUMAHAN LIMUM				128.157.455.375		128.157.455.375	
1.02	32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				128.157.455.375		128.157.455.375	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	92,62	100	2.376.197.472	100	2.376.197.472	Dinas PUPR
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	96,25	100	46.061.616.500	100	46.061.616.500	Dinas PUPR
	4	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	99,62	100	94.500.000	100	94.500.000	Dinas PUPR
	5	Perencanaan Laporan dan Evaluasi		99,24	100	48.826.240.500	100	48.826.240.500	Dinas PUPR
	16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Irigasi	Meningkatnya kelancaran dan terlaksananya program-program yang direncanakan Dinas	99,85	100	2.091.168.155	100	2.091.168.155	Dinas PUPR
	18	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Jalan sesuai standarnya	96,01	100	4.296.558.263	100	4.296.558.263	Dinas PUPR
	19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Sarana dan Prasarana Perkantoran yang memadai		100	20.000.000	100	20.000.000	Dinas PUPR
	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (P3A)	kondisi jaringan irigasi, rawa dan jaringan Pengairan yang baik		100	6.000.000.000	100	6.000.000.000	Dinas PUPR
	27	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Terpeliharanya jaringan air bersih	30,20	100	10.411.622.100	100	10.411.622.100	Dinas PUPR
	28	Pengendalian Banjir/Drainase	Menanggulangi rumah banjir		100	3.461.660.500	100	3.461.660.500	Dinas PUPR
	35	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat		100	369.063.800	100	369.063.800	Dinas PUPR
	36	Peningkatan Sosialisasi Tata Ruang dan Tata Bangunan	Terlaksananya/terjaganya ketersediaan pemanfaatan ruang	99,80	100	5.481.155.200	100	5.481.155.200	Dinas PUPR
	37	Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Terlaksanya Ruang sesuai dengan RTRW	96,05	100	686.305.800	100	686.305.800	Dinas PUPR
	39	Program Kerjasama Pemerintah	Terjalinnya kerjasama Pembangunan Masyarakat Provinsi	100	100	126.933.000	100	126.933.000	Dinas PUPR
1.04		PERUMAHAN				7.967.887.500		7.967.887.500	
1.04	02	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				6.788.854.500		6.788.854.500	Dinas PR & KP
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	97,96	100	281.968.000	100	281.968.000	Dinas PR & KP
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	99,25	100	262.782.000	100	262.782.000	Dinas PR & KP
	10	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya kualitas rumah tidak layak		100	5.478.054.500	100	5.478.054.500	Dinas PR & KP

Kode		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2012) (%)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka				SKPD Penanggung Jawab
					2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	17	Program Kerjasama Pembangunan	Terfasilitasinya Kerjasama Pembangunan Masyarakat Perbatasan	100	100	[illegible]	100	42.000.000	Dinas PMA KP
1.04		Pemuda Kebudayaan dan Pariwisata				1.925.255.000		1.925.255.000	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	99,65	100	1.520.453.000	100	1.520.453.000	Pemuda Kebudayaan dan Pariwisata
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	84,93	100	43.954.000	100	43.954.000	Pemuda Kebudayaan dan Pariwisata
	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	99,68	100	10.320.000	100	10.320.000	Pemuda Kebudayaan dan Pariwisata
	19	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Bahwa Kebudayaan	Meningkatnya pemerataan bencana	93,80	100	326.961.000	100	326.961.000	Pemuda Kebudayaan dan Pariwisata
1.08		PERENCANAAN PEMBANGUNAN				4.398.314.498		4.398.314.498	
1.08	01	Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah				4.398.314.498		4.398.314.498	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	99,53	100	908.083.176	100	908.083.176	Sekretaris
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	98,74	100	481.712.018	100	481.712.018	Sekretaris
	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	99,53	100	23.200.000	100	23.200.000	Sekretaris
	6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100	35.000.000	100	35.000.000	Sekretaris
	5	Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data/informasi Pembangunan	98,48	100	907.376.830	100	907.376.830	Sekretaris
	6	Koordinasi Pembangunan	Terfasilitasinya kerjasama Kemitraan dengan Masyarakat Perbatasan	98,49	100	519.444.972	100	519.444.972	Sekretaris
	18	Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Perencanaan pembangunan yang sesuai kerjasama kabupaten	98,80	100	337.677.362	100	337.677.362	Sekretaris
	21	Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Sekretariat Dewan dalam Pelayanan Publik	93,15	100	1.210.691.450	100	1.210.691.450	Sekretaris
	22	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Tingkat Sosial Ekonomi Masyarakat	93,29	100	84.240.000	100	84.240.000	Sekretaris
1.03		PERHUBUNGAN				10.366.771.050		10.366.771.050	
1.03	1	Dinas Perhubungan				10.366.771.050		10.366.771.050	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	97,66	100	2.860.535.300	100	2.860.535.300	Dishub
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	95,21	100	502.760.850	100	502.760.850	Dishub
	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	99,25	100	104.070.000	100	104.070.000	Dishub
	15	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya fasilitas pendukung transportasi sesuai standar	97,03	100	252.000.000	100	252.000.000	Dishub
	16	Terselenggaranya Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terselenggaranya prasarana dan Fasilitas LLAJ	93,04	100	282.520.000	100	282.520.000	Dishub
	17	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terpenuhinya pelayanan angkutan yang nyaman	97,84	100	1.838.400.000	100	1.838.400.000	Dishub
	19	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Terpenuhinya kelancaran lalu lintas	98,77	100	3.982.464.900	100	3.982.464.900	Dishub
1.09		LINGKUNGAN HIDUP				58.472.959.634		58.472.959.634	
1.09	1	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Kehutanan				58.472.959.634		58.472.959.634	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	99,85	100	21.245.889.470	100	21.245.889.470	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Kehutanan
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas tugas kantor	98,78	100	6.313.170.000	100	6.313.170.000	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Kehutanan

Kode		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	4	Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur	Meningkatnya pelayanan aparatur	100	100	189.570.000	100	189.570.000	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
	15	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksana pengelolaan yang bersih dan baik		100	3.598.693.856	100	3.598.693.856	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
	18	Program Perlindungan Pengelolaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup	80.93	100	348.654.000	100	348.654.000	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
	19	Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		100	235.593.557	100	235.593.557	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
	20	Kerjasama dan Kliring Lingkungan Hidup	Terselenggaranya kerjasama, Advokasi, Mediasi Lingkungan Hidup, Audit Lingkungan Hidup dan penilaian Peringkat Kinerja	20.16	100	344.476.163	100	344.476.163	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
	23	Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelayanan publik		100	865.615.500	100	865.615.500	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
1.10		PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				2.378.110.000		2.378.110.000	
1.10	1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil				2.378.110.000		2.378.110.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	1	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	77.55	100	662.340.700	100	662.340.700	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik	77.12	100	118.811.300	100	118.811.300	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	85.38	100	17.200.000	100	17.200.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	13	Penataan Administrasi Kependudukan	Administrasi kependudukan yang tertata rapi	87.60	100	1.274.558.000	100	1.274.558.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.11		KEBUDAYAAN, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				2.137.857.258		2.137.857.258	
1	1	Dinas Perpustakaan, Kearsipan dan Pendokumentasian				2.137.857.258		2.137.857.258	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	32.68	100	344.471.334	100	344.471.334	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas aparatur	79.57	100	171.858.300	100	171.858.300	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas aparatur	84.50	100	22.400.000	100	22.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	16	Pengarusutamaan Kesetaragaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya peran gender	93.55	100	757.400.000	100	757.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	17	Pemberdayaan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kualitas hidup perempuan		100	40.236.000	100	40.236.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	5	Keluarga Berencana	Meningkatnya PUS yang menjadi peserta KB aktif	99.27	100	801.50.000	100	801.50.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.12		SOSIAL				2.471.914.294		2.471.914.294	
1.12	2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				2.155.993.855		2.155.993.855	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	85.65	100	1.000.670.000	100	1.000.670.000	SKPD
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		69.50	100	1.120.607.000	100	1.120.607.000	SKPD
	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kedisiplinan tugas aparatur	98.66	100	52.700.000	100	52.700.000	SKPD

Kode		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2012) (%)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka				SKPD Penanggung Jawab
					2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	22	Peningkatan Disiplin Penanggungan Korban Bencana Alam	Meningkatnya Pelaksanaan	[illegible]	100	150.000.000	100	150.000.000	BPBD
1.13	3	Dinas Sosial				4.332.948.000		4.332.948.000	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	90,89	100	468.733.000	100	468.733.000	Dinsos
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan sarana kegiatan kantor	90,83	100	197.633.000	100	197.633.000	Dinsos
	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya pelayanan kegiatan aparatur	100	100	22.000.000	100	22.000.000	Dinsos
	16	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	95,10	100	298.918.000	100	298.918.000	Dinsos
	17	Pemberdayaan Sosial Terpadu	Meningkatnya pemberdayaan sosial terpadu		100	1.803.100.000	100	1.803.100.000	Dinsos
	18	Pemberdayaan Potensi Keluarga, Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya pemberdayaan potensi keluarga, pemuda dan olahraga	98,13	100	1.505.565.000	100	1.505.565.000	Dinsos
1.14		BINA MARGA				1.898.307.035		1.898.307.035	
1.14	1	DINAS TENAGA KERJA				3.850.287.000		3.850.287.000	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	90,89	100	306.096.300	100	306.096.300	Dinas Tenaga Kerja
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan sarana kegiatan kantor	90,83	100	243.551.000	100	243.551.000	Dinas Tenaga Kerja
	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya pelayanan kegiatan aparatur	100	100	10.800.000	100	10.800.000	Dinas Tenaga Kerja
	15	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	95,22	100	166.961.600	100	166.961.600	Dinas Tenaga Kerja
	16	Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya pusat pelayanan kerja yang menyediakan informasi kerja yang terpercaya		100	76.615.600	100	76.615.600	Dinas Tenaga Kerja
	17	Pelaksanaan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya pelayanan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	90,47	100	64.979.200	100	64.979.200	Dinas Tenaga Kerja
	19	Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi hasil dan monitoring	Terlaksananya kualitas pelayanan publik di Kota Banda Aceh		100	854.830.800	100	854.830.800	Dinas Tenaga Kerja
	10	Pelaksanaan pelayanan ekonomi rakyat	Terlaksana struktur ekonomi		100	100.335.000	100	100.335.000	Dinas Tenaga Kerja
1.15		KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				5.662.284.903		5.662.284.903	
1.15	1	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan				5.662.284.903		5.662.284.903	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	90,57	100	616.130.380	100	616.130.380	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan sarana kegiatan kantor	98,27	100	105.032.000	100	105.032.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya pelayanan kegiatan aparatur	100	100	23.600.000	100	23.600.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
	15	Pemberdayaan Koperasi dan Pengawasan Perkoperasian	Adanya kemudahan bagi koperasi dalam pelayanan proses pembukuan	90,83	100	1.021.316.000	100	1.021.316.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
	18	Peningkatan Disiplin Pelayanan dalam Negara	Terlaksananya UU/Perda/Qanun/Perwal dan Keputusan/Instruksi/Surat Edaran tentang pelayanan publik yang baik	98,92	100	288.418.000	100	288.418.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
	20	Pengembangan Pelayanan Pasar	Adanya pelayanan dalam pengelolaan	118,89	100	3.375.253.023	100	3.375.253.023	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
	21	Pengembangan Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Berkembangnya usaha kecil menengah yang efisien dan cepat kompetisi	100	100	150.350.000	100	150.350.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
	16	Pengembangan Kemitraan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Berkembangnya usaha kecil dan menengah yang unggul dan kompetitif	90,87	100	96.237.900	100	96.237.900	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Kode		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2012) (%)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka				SKPD Penanggung Jawab
					2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	06	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100	139.606.300	100	139.606.300	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
1.16		PENANAMAN MODAL				322.218.000		322.218.000	
1.16	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu				322.218.000		322.218.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	97.66	100	305.682.000	100	305.682.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	95.36	100	00.140.000	100	00.140.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
	5	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya kelancaran tugas kantor	97.17	100	10.600.000	100	10.600.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
	15	Peningkatan Ekspor Pendapatan Jasa Lainnya	Meningkatnya realisasi pelayanan perizinan dan non perizinan	93,46	100	50.570.000	100	50.570.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
	21	Pemeliharaan Perlengkapan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		100	43.383.658	100	43.383.658	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
		Program peningkatan Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terlaksananya pemeliharaan daerah melalui media elektronik		100	55.550.250	100	55.550.250	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
		Pengembangan dan Pemberdayaan Pelayanan Publik Daerah	Terlaksananya pemeliharaan daerah yang memberikan pelayanan publik		100	72.160.000	100	72.160.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
1.18		PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH				3.343.665.014		3.343.665.014	
1.18	3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				3.343.665.014		3.343.665.014	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	95.62	100	227.210.264	100	227.210.264	Dispusip
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	91.08	100	241.011.111	100	241.011.111	Dispusip
	4	Peningkatan mutu aparatur	Meningkatnya kapasitas staf aparatur	44.44	100	19.600.000	100	19.600.000	Dispusip
	13	Pengembangan dan Pemeliharaan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan bangunan kantor		100	52.094.250	100	52.094.250	Dispusip
	16	Pemeliharaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung muda yang ikut serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kota Sabang meningkat 75%	80.30	100	180.148.500	100	180.148.500	Dispusip
	21	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Gedung	Meningkatnya sarana dan prasarana gedung	-	100	501.797.500	100	501.797.500	
	17	Pendidikan Menengah	Lulusan Menengah dapat terus PT Dalam memperoleh dan di Provinsi Aceh	91.50	100	94.943.500	100	94.943.500	Dispusip
1.35		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				8.449.156.941		8.449.156.941	
1.35	1	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan WH				7.676.542.891		7.676.542.891	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	99.23	100	6.240.140.891	100	6.240.140.891	Kantor Satpol PP dan WH
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	99,60	100	347.722.400	100	347.722.400	Kantor Satpol PP dan WH
	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas operasi	99,38	100	288.530.000	100	288.530.000	Kantor Satpol PP dan WH
	15	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Meningkatnya keamanan masyarakat	97,30	100	599.150.000	100	599.150.000	Kantor Satpol PP dan WH
1.36	2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				1.118.113.940		1.118.113.940	

Kode		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka				SKPD Penanggung Jawab
					2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				(%)	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1	Pelayanan administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	96,11	100	295.600.000	100	295.600.000	Sekretariat Dewan/Sekretariat DPRD
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	69,96	100	61.374.100	100	61.374.100	Sekretariat Dewan/Sekretariat DPRD
	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	99,58	100	12.800.000	100	12.800.000	Sekretariat Dewan/Sekretariat DPRD
	13	Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Perpustakaan	Meningkatnya kunjungan masyarakat	97,20	100	31.675.000	100	31.675.000	Sekretariat Dewan/Sekretariat DPRD
	15	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Perda dan Perkada	Penegakan berbagai tindakan kriminalitas dan meningkatnya kesadaran masyarakat	99,58	100	111.388.400	100	111.388.400	Sekretariat Dewan/Sekretariat DPRD
	17	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan	97,40	100	123.947.000	100	123.947.000	Sekretariat Dewan/Sekretariat DPRD
	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan		100	47.378.000	100	47.378.000	Sekretariat Dewan/Sekretariat DPRD
	20	Peningkatan Pemberdayaan Penyakit Masyarakat	Menurunnya angka penyakit masyarakat	100	100	178.471.500	100	178.471.500	Sekretariat Dewan/Sekretariat DPRD
	21	Pendidikan Politik Masyarakat	Terbinanya masyarakat dalam berpolitik	98,54	100	300.458.000	100	300.458.000	Sekretariat Dewan/Sekretariat DPRD
	22	Program Pengelolaan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam		100	41.218.963	100	41.218.963	Sekretariat Dewan/Sekretariat DPRD
1.20		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN				104.930.233.467		104.930.233.467	
1.20	3	Sekretariat Daerah				66.788.613.033		66.788.613.033	
	1	Program [illegible]				[illegible]		[illegible]	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	99,91	100	36.417.269.550	100	36.417.269.550	Bagian Umum
	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	81,60	100	3.018.250.000	100	3.018.250.000	Bagian Umum
	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya pelaksanaan upacara rutin	97,22	100	332.700.000	100	332.700.000	Bagian Umum
	5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	80,00	100	80.000.000	100	80.000.000	Bagian Umum
	14	Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan kedinasan KDH dan WKDH	99,00	100	1.186.350.000	100	1.186.350.000	Bagian Umum
	2	Bagian Administrasi Pembangunan			100	3.737.799.000	100	3.737.799.000	
	24	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang didokumentasikan melalui website Hukum Bagian Adm	98,01	100	444.181.500	100	444.181.500	Bagian Administrasi Pembangunan
	10	Program Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kemampuan SDM aparatur pemerintah di bidang Pengadaan barang/jasa Pemerintah	93,30	100	57.000.000	100	57.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan
	11	Pengembangan & Pemberdayaan Perekonomian Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan untuk menjadi acuan calon penanaman modal pemerintah daerah	96,30	100	354.450.000	100	354.450.000	Bagian Administrasi Pembangunan
	15	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Berkembangnya penggunaan ICT di lingkup pemda	81,40	100	2.167.000.000	100	2.167.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan
	3	Bagian Hukum				4.870.119.824		4.870.119.824	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	99,57	100	169.850.200	100	169.850.200	Bagian Humas
	25	Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Rapat Paripurna yang telah dilaksanakan	98,40	100	107.700.000	100	107.700.000	Bagian Humas
	18	Penyelenggaraan Informasi dan Media Massa	Terselenggaranya dengan media massa dalam rangka penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah	99,22	100	3.597.555.929	100	3.597.555.929	Bagian Humas

Kode		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka				SKPD Penanggung Jawab
					2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				(%)	Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	0	Bagian Hukum				711.243.000		711.243.000	
	23	Pemantauan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Terlaksananya pelaksanaan kebijakan kepala daerah	80,5	100	505.703.000	100	505.703.000	Bagian Hukum
	25	Pembinaan Perkembangan Teknologi	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang dapat dijadikan rujukan oleh Hukum Perdata Aceh	70,65	100	95.175.500	100	95.175.500	Bagian Hukum
	26	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	88,14	100	252.353.500	100	252.353.500	Bagian Hukum
	0	Bagian Tata Pemerintahan				38.186.783.867		38.186.783.867	
	19	Pengkajian Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Terlaksananya Bantuan Rumah Gampong di Seluruh Gampong Dalam Wilayah Kota Banda Aceh		100	22.551.400	100	22.551.400	Bagian Tata Pemerintahan
	20	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Terlaksananya pelaksanaan kebijakan kepala daerah	80,5	100	205.034.662	100	205.034.662	Bagian Tata Pemerintahan
	35	Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Produk Hukum yang Telah Ditetapkan	88,14	100	37.866.337.805	100	37.866.337.805	Bagian Tata Pemerintahan
	0	Badan Kesbangpol				525.799.500		525.799.500	
	8	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya informasi mengenai kinerja dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	80,22	100	68.014.300	100	68.014.300	Bagian Organisasi
	36	Fasilitasi Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	88,14	100	67.021.100	100	67.021.100	Bagian Organisasi
	43	Pembinaan Kesenian	Terlaksananya pembinaan kesenian	42,65	100	47.444.100	100	47.444.100	Bagian Organisasi
	44	Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	Terlaksanya sistem pembinaan dan pengembangan kearsipan		100	187.517.700	100	187.517.700	Bagian Organisasi
	56	Pengembangan Kawasan Pemerintah Kota	Meningkatnya kawasan pemerintah kota yang aman dan nyaman		100	180.850.600	100	180.850.600	Badan Kesbangpol
	7	Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat				1.340.399.200		1.340.399.200	
	28	Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelayanan pemerintah daerah		100	488.199.700	100	488.199.700	Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
	45	Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam	Tumbuh dan berkembangnya syariat Islam di lingkungan masyarakat serta terlaksananya pelayanan di Kota Banda Aceh		100	257.353.600	100	257.353.600	Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
	49	Program Pelayanan Sosial Islam	Terwujudnya upaya pelayanan Islami		100	728.455.400	100	728.455.400	Bagian Administrasi dan Kemasyarakatan Rakyat
	52	Pemberdayaan Sumber Daya Ulama	- Terlaksanya program kegiatan Ulama yang tersebar di mukim-mukim dan di Masjid Agung Al-Makmur		100	433.200.000	100	433.200.000	Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
	57	Pengembangan Wakaf Produktif	Meningkatnya pelayanan yang semakin berkualitas	54,65	100	96.132.500	100	96.132.500	Bagian Administrasi dan Kemasyarakatan Rakyat
	3	Bagian Ekonomi				220.426.070		220.426.070	
	31	Pengembangan & Pembangunan Perekonomian Daerah	Terciptanya perekonomian daerah yang mandiri, maju, berdaya saing dan berkeadilan	60,00	100	220.426.070	100	220.426.070	Bagian Ekonomi
	2	Bagian Layanan Pengadaan			100	888.800.800	100	888.800.800	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik internal		100 100	999.600.800	100 100	999.600.800	Bagian Umum
1.20	1	Sekretariat DPRK				18.971.516.000		18.971.516.000	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	53,22	100	30.133.992.000	100	30.133.992.000	Sekretariat DPRK

Kode		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2012) (%)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka				SKPD Penanggung Jawab
					2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan bagian-bagian kantor	82.82	100	1,963,661,000	100	1,963,661,000	Sekretariat DPRK
	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya pelayanan bagian aparatur	87.87	100	260,975,000	100	260,975,000	Sekretariat DPRK
	5	Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur	9.166	100	995,000,000	100	1,855,000,000	Sekretariat DPRK
	15	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Tingkat Daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat	94.47	100	5,858,337,000	100	5,858,337,000	Sekretariat DPRK
1.10	6	Badan Kesbangpol, Pendidikan & Pelatihan				1,402,755,569		3,402,755,569	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	80.29	100	1,244,755,027	100	1,244,755,027	BKPP
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan bagian-bagian kantor	84.43	100	104,613,569	100	104,613,569	BKPP
	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya pelayanan bagian aparatur	86.78	100	34,000,000	100	34,000,000	BKPP
	5,0	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur	58.11	100	30,000,000	100	80,000,000	BKPP
	24	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur	35.85	100	628,991,973	100	978,991,973	BKPP
	25	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tersedianya Analisis Jabatan PNS	88.72	100	1,495,157,000	100	1,845,157,000	BKPP
1.16	1	Inspektorat				1,395,351,400		3,395,351,400	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	32.50	100	368,716,400	100	368,716,400	Inspektorat
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	34.50	100	70,013,000	100	70,013,000	Inspektorat
	23	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	100	100	18,000,000	100	18,000,000	Inspektorat
	27	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya pelaksanaan kebijakan kepala daerah	33.64	100	938,622,000	100	2,938,622,000	Inspektorat
	31	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tersedianya APIP yang berkualitas dan memperoleh sertifikasi JFA		100	12,581,000	100	12,581,000	Inspektorat
1.20	8	Kecamatan Kota Pinang				815,713,400		815,713,400	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	95.61	100	310,641,000	100	310,641,000	Kec. Kota Pinang
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	93.25	100	50,182,400	100	50,182,400	Kec. Kota Pinang
	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	100	100	15,600,000	100	15,600,000	Kec. Kota Pinang
	35	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya pelayanan pemerintahan kecamatan	92.50	100	327,290,000	100	427,290,000	Kec. Kota Pinang
1.21	9	Kecamatan Kotapinang				493,563,075		493,563,075	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	90.34	100	269,226,825	100	269,226,825	Kec. Kotapinang
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	93.60	100	97,320,400	100	97,320,400	Kec. Kotapinang
	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	100	100	14,600,000	100	14,600,000	Kec. Kotapinang
	35	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya pelayanan pemerintahan kecamatan	90.00	100	109,415,850	100	109,415,850	Kec. Kotapinang

Kode		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2012) (%)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka				SKPD Penanggung Jawab
					2017		Kondisi Kinerja pada akhir per ode RPJMD		
					Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.10	10	**Kecamatan Mesuji**				421.264.535		421.264.535	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	96,00	100	261.430.848	100	261.430.848	Kec. Mesuji
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	97,50	100	99.833.400	100	99.833.400	Kec. Mesuji
	5	Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	100	100	11.200.000	100	11.200.000	Kec. Mesuji
	28	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya pelayanan pemerintahan kecamatan		100	128.602.130	100	128.602.130	Kec. Mesuji
1.20	11	**Kecamatan Sidak Kuala**				563.512.200		563.512.200	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	96,00	100	309.104.000	100	309.104.000	Kec. Sidak Kuala
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	97,50	100	99.833.800	100	99.833.800	Kec. Sidak Kuala
	5	Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	95,00	100	11.600.000	100	11.600.000	Kec. Sidak Kuala
	28	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya pelayanan pemerintahan kecamatan	98,00	100	133.465.000	100	133.465.000	Kec. Sidak Kuala
1.30	12	**Kecamatan Banda Raya**				453.260.774		453.260.774	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	95,00	100	305.118.974	100	305.118.974	Kec. Banda Raya
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	97,50	100	99.833.800	100	99.833.800	Kec. Banda Raya
	5	Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	100	100	11.600.000	100	11.600.000	Kec. Banda Raya
	28	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya pelayanan pemerintahan kecamatan	95,00	100	143.005.000	100	143.005.000	Kec. Banda Raya
1.40	13	**Kecamatan Kota Raja**				386.420.700		386.420.700	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	96,00	100	191.743.500	100	191.743.500	Kec. Kota Raja
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	97,50	100	83.056.200	100	83.056.200	Kec. Kota Raja
	5	Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	95,00	100	11.200.000	100	11.200.000	Kec. Kota Raja
	28	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Pelaksanaan pelayanan pemerintahan kecamatan	95,00	100	100.270.100	100	100.270.100	Kec. Kota Raja
1.50	14	**Kecamatan Jaya Baru**				416.324.650		416.324.650	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	96,00	100	199.005.450	100	199.005.450	Kec. Jaya Baru
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	98,00	100	91.033.750	100	91.033.750	Kec. Jaya Baru
	5	Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	100	100	11.000.000	100	11.000.000	Kec. Jaya Baru
	28	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Pelaksanaan pelayanan pemerintahan kecamatan	100	100	165.285.450	100	165.285.450	Kec. Jaya Baru
1.60	15	**Kecamatan Lubuk Raja**				438.253.850		438.253.850	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	95,00	100	147.819.250	100	147.819.250	Kec. Lubuk Raja
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	98,00	100	99.925.400	100	99.925.400	Kec. Lubuk Raja
	5	Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	95,00	100	9.200.000	100	9.200.000	Kec. Lubuk Raja

Kode		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2012) (%)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka				SKPD Penanggung Jawab
					2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	.06	Peningkatan Kerjasama Pemerintah Desa/Lurah	Terlaksananya pelayanan pemerintahan kewilayahan	92,86	100	[illegible]	100	[illegible]	Kec. Ulee Kareng
1.03	18	Kecamatan Ulee Kareng				5.148.683.633		5.148.683.633	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	97,55	100	329.825.033	100	329.825.033	Kec. Ulee Kareng
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	92,28	100	33.000.033	100	33.000.033	Kec. Ulee Kareng
	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas operasional	100	100	13.000.033	100	13.000.033	Kec. Ulee Kareng
	28	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan	99,05	100	160.870.533	100	160.870.533	Kec. Ulee Kareng
1.03		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN				13.062.083.733		13.062.083.733	
		Pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	93,69	100	[illegible]	100	[illegible]	Badan Pengelolaan Keuangan
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	90,42	100	2.854.126.033	100	2.854.126.033	Badan Pengelolaan Keuangan
	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas operasional	71,00	100	47.700.033	100	47.700.033	Badan Pengelolaan Keuangan
	5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	27,15	100	10.000.033	100	10.000.033	Badan Pengelolaan Keuangan
	6	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksana Evaluasi LAKIP Pemda dan LAKIP SKPD	55,37	100	165.000.033	100	165.000.033	Badan Pengelolaan Keuangan
	17	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tertib dalam keuangan daerah yang lebih tertib, efisien dan ekonomis	70,33	100	4.764.402.533	100	4.764.402.533	Badan Pengelolaan Keuangan
1.21		PELAYARAN DAN PERIKANAN				1.655.185.734		1.655.185.734	
1.21	3	Dinas Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan				1.655.185.734		1.655.185.734	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	95,02	100	650.005.473	100	650.005.473	DPPKP
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	90,58	100	115.795.167	100	115.795.167	DPPKP
	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	99,98	100	31.800.000	100	31.800.000	DPPKP
	22	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Meningkatnya pelayanan Penyakit Ternak/Hewan	92,82	100	97.266.459	100	97.266.459	DPPKP
	23	Pengembangan Kerjasama Usaha	Terlaksananya kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah	50,16	100	[illegible]	100	[illegible]	DPPKP
	12	Peningkatan Kesehatan Hewan Produksi Peternakan	Meningkatnya pelayanan di pasar hewan	99,47	100	60.802.500	100	60.802.500	DPPKP
	15	Pembangunan Celeburan Pangan Peternak/Perkebunan	Meningkatnya celeburan tanaman monyonik	99,55	100	178.282.400	100	178.282.400	DPPKP
	19	Pembinaan Pemuda Pelajar Pelajaran (Perkebunan Lapangan)	Meningkatnya kompetensi dan bakat angkatan pemuda		100	45.475.200	100	45.475.200	DPPKP
	10	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternak/Perkebunan	Adanya informasi pasar dan pemasaran hasil produksi		100	16.000.000	100	16.000.000	DPPKP
	18	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternak / Perkebunan	Meningkatnya penerapan teknologi perkebunan/peternakan		100	175.525.400	100	175.525.400	DPPKP
1.22		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				1.522.519.969		1.522.519.969	
1.22	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong				533.464.801		533.464.801	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	93,28	100	546.750.664	100	546.750.664	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	99,12	100	67.481.700	100	67.481.700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Kode		Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2012) (%)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka				SKPD Penanggung Jawab
					2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	9	Pemeliharaan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas operasional	100	100	17.200.000	100	17.200.000	Dinas Kependudukan, Masyarakat dan Kemitraan
	14	Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	44,19	20	220.295.500	100	220.295.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gotong
	16	Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Terciptanya kemandirian perekonomian perdesaan	66,32	100	169.182.200	100	169.182.200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gotong
	17	Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa/kelurahan	100	100	649.507.519	100	649.507.519	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gotong
	18	Pemberdayaan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa	97,05	100	142.500.000	100	142.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gotong
	21	Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kependudukan		100	13.737.110	100	13.737.110	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gotong
	22	Program Sinkronisasi Pengelolaan Kependudukan	Tersedianya Rancangan Kebijakan penanggulangan pengungsi	99,12	100	19.250.910	100	19.250.910	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gotong
	23	Fasilitasi Pemekaran dan Penataan Gotong	Terfasilitasinya pemekaran dan penataan gotong		100	26.884.050	100	26.884.050	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gotong
1.24		KEARSIPAN				464.170.000		464.170.000	
1.24	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				464.170.000		464.170.000	
	1	Pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	99,99	80	258.929.809	100	258.929.809	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas pegawai kantor	90,58	100	116.851.900	100	116.851.900	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas operasional	100	100	13.200.000	100	13.200.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	18	Penyelenggaraan Budaya Baca dan Pengelolaan Perpustakaan	Meningkatnya budaya baca	94,00	100	67.972.400	100	67.972.400	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	30	Pengelolaan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	Terselamatkannya arsip dan dokumen daerah	86,00	100	15.215.900	100	15.215.900	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.25		KOMUNIKASI DAN INFORMASI				3.305.938.000		3.305.938.000	
1.25	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				3.305.938.000		3.305.938.000	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	41,59	100	304.994.000	100	304.994.000	Diskominfo & Statistik
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas pegawai kantor	65,55	100	209.084.000	100	209.084.000	Diskominfo & Statistik
	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas disiplin	56,19	100	20.805.000	100	20.805.000	Diskominfo & Statistik
	12	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Berkembangnya penggunaan ICT di lingkungan pemko	95,37	100	2.104.200.000	100	2.104.200.000	
	28	Kerja Sama Informasi Dengan Media Massa	Terlaksananya penyiaran informasi kepada masyarakat melalui media	100	100	400.485.000	100	400.485.000	Diskominfo & Statistik
2		URUSAN PILIHAN				15.312.134.382		15.312.134.382	
2.26		PARIWISATA				6.883.637.272		6.883.637.272	
2.26	1	Dinas Pariwisata				6.883.637.272		6.883.637.272	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	94,97	100	1.041.215.611	100	1.041.215.611	Dinas Pariwisata
	2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas pegawai kantor	94,77	100	310.782.750	100	310.782.750	Dinas Pariwisata
	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas operasional	97,19	100	34.500.000	100	34.500.000	Dinas Pariwisata
	15	Pelatihan Pengembangan Kreativitas	Berkembangnya kreativitas		100	500.000.000	100	500.000.000	Dinas Pariwisata

Kode		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awa RPJMD (2012) (%)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka				SKPD Penanggung - awab
					2017		Kondisi K nerja pada akhir periode RPJM D		
					Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitasi pengembangan pengelolaan kesenian di kabupaten daerah berbasis media dan/dan dan ITEK	96,42	100	1.086.655.000	100	1.086.655.000	Dinas Pariwisata
	18	Pengembangan Kemitraan Kepariwisata	Meningkatnya kerja sama kemitraan pariwisata Pemerintah Daerah	84,1	100	1.817.825.000	100	1.817.825.000	Dinas Pariwisata
	16	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Terbentuk dan berkembangnya destinasi-destinasi pariwisata	97,66	100	2.105.308.945	100	2.105.308.945	Dinas Pariwisata
2.05		SYARIAT ISLAM				35.423.467.450		35.423.467.450	
2.00	1	Dinas Syariat Islam				8.336.171.626		8.336.171.626	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	93,37	100	358.141.845	100	358.141.845	Dinas Syariat Islam
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	99,44	100	89.661.133	100	89.661.133	Dinas Syariat Islam
	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	95,13	100	17.200.000	100	17.200.000	Dinas Syariat Islam
	15	Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam	Terlaksananya pembinaan Syariat Islam secara maksimal	95,43	100	2.191.064.100	100	2.191.064.100	Dinas Syariat Islam
	16	Penelitian dan Pengembangan Syariat Islam	Terlaksananya Informasi Syariat Islam Kepada Masyarakat	95,17	100	463.171.650	100	463.171.650	Dinas Syariat Islam
	20	Operasional Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	- Pembinaan Majelis Ulama	-	100	968.934.750	100	968.934.750	Dinas Syariat Islam
	21	Pembinaan Sarana Ibadah	- Terselenggaranya kegiatan ibadah yang memenuhi standar pelayanan di Mesjid Agung Al-Mukarrar	97,69	100	60.419.100	100	60.419.100	Dinas Syariat Islam
	26	Penyuluhan Agama Islam Dan Sosialisasi Qanun	Terlaksananya Penyuluhan Hukum Islam	93,37	100	153.596.900	100	153.596.900	Dinas Syariat Islam
	28	Pembinaan Kasih Sayang	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Kasih Sayang	95,00	100	166.092.400	100	166.092.400	Dinas Syariat Islam
	29	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Daerah	Meningkatnya pelayanan pemerintah daerah		100	97.865.200	100	97.865.200	Dinas Syariat Islam
2.06	2	Sekretariat MPU				1.086.358.411		1.086.358.411	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi kantor sekretariat	93,50	100	715.358.536	100	715.358.536	Sekretaris MPU
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	98,67	100	48.484.000	100	48.484.000	Sekretaris MPU
	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	93,33	100	5.600.000	100	5.600.000	Sekretaris MPU
	25	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	Terlaksananya Peran Ulama dalam Pembinaan Syariat Islam	91,83	100	288.345.765	100	288.345.765	Sekretaris MPU
	30	Penelitian Aliran Sempalan Dan Pembinaan	Menurunnya aliran sesat		100	28.570.110	100	28.570.110	Sekretaris MPU
2.07	4	Sekretariat Majelis Adat Aceh				71.638.000		71.638.000	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	95,38	100	428.345.500	100	428.345.500	Sekretaris MAA
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	99,84	100	86.247.500	100	86.247.500	Sekretaris MAA
	3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	99,43	100	5.870.000	100	5.870.000	Sekretaris MAA
	29	Pembinaan dan Syiar Adat	Terlaksananya Pembinaan Kehidupan Beradat	98,81	100	113.676.000	100	113.676.000	Sekretaris MAA
	31	Peningkatan kerjasama lembaga adat Aceh	Meningkatnya pemberdayaan yang terkait pelestarian adat, budaya dan pembinaan Syariat Islam	99,68	100	99.003.000	100	99.003.000	Sekretaris MAA
2.08	5	Sekretariat WH				369.047.000		369.047.000	

Kode		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2012) (%)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka				SKPD Penanggung Jawab
					2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target (%)	Rp	Target (%)	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	87,64	100	200.177.548	100	200.177.548	Sekretaris SKPD
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	95,12	100	32.569.600	100	32.569.600	Sekretaris SKPD
	4	Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	100	100	6.400.000	100	6.400.000	Sekretaris SKPD
	16	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Adanya pemahaman terhadap Qanun Aceh No 5 tahun 2008 tentang penyelenggaran pendidikan	100	100	98.222.748	100	98.222.748	Sekretaris SKPD
	17	Pendidikan Menengah	Proses penerjemahan informasi yang dibutuhkan untuk perbaikan mutu pendidikan menengah	99,59	100	32.377.704	100	32.377.704	Sekretaris SKPD
2.09	6	Baitul Mal				15.299.615.900		38.599.615.900	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	99,16	100	966.911.000	100	966.911.000	Sekretariat Baitul Mal
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	99,49	100	58.849.600	100	58.849.600	Sekretariat Baitul Mal
	4	Peningkatan disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	99,99	100	12.400.000	100	12.400.000	Sekretariat Baitul Mal
	4	Penyelenggaraan Syariat Islam	Terlaksananya Peningkatan Nilai-nilai Syariat Islam	99,99	100	14.452.475.000	100	14.452.475.000	Sekretariat Baitul Mal
1.10	1	DINAS PENDIDIKAN DAYAH				699.548.000		699.548.000	
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	99,97	100	221.016.000	100	221.016.000	Dinas Pendidikan Dayah
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	99,44	100	221.032.000	100	221.032.000	Dinas Pendidikan Dayah
	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	99,92	100	5.400.000	100	5.400.000	Dinas Pendidikan Dayah
	15	Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam	Terlaksananya pembinaan Syariat Islam secara maksimal	99,62	100	149.008.000	100	149.008.000	Dinas Pendidikan Dayah
	24	Penyelenggaraan Pendidikan Dayah	Terlaksananya Penyelenggaraan dayah	99,21	100	113.091.000	100	113.091.000	Dinas Pendidikan Dayah
			TOTAL			698.691.382.778		698.691.382.778	

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran tentang prestasi daerah yang diharapkan pada masa yang akan datang.

Kinerja daerah pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran pembangunan daerah dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud.Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapatmenggambarkan tingkat pencapaian kinerja daerah, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja daerah secara riil.
Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Banda Aceh

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		2012	2013*	2014*	2015	2016	2017	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**							
1.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6.17	6.12	5,10*	5.15	5.17	5.2	5.2
1.2.	Laju inflasi (%) y-o-y	0.06	6.39	7,83*	7.5	6.9	6.5	6.5
1.3.	PDRB ADHK per kapita (Juta Rp)	47,22*	48,66*	49,37*	50	51	52	52
1.4.	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	8.65	8.03	-	7.9	7.6	7.5	7.5
1.5.	Indeks Pembangunan Manusia	78.5	79	82,47*	83	83.5	84	84
1.6.	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rp)	1.297	1.443		1.555	1.6	1.65	1.65
1.7.	Tingkat Pengangguran Terbuka	7.17	-	7.10	7.08	7.07	7.06	7
*Angka berdasarkan formulasi baru menggunakan perhitungan berbasis Sistem Statistik Nasional yang mengubah tahun dasar penghitungan dari tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010 sesuai rekomendasi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). BPS Kota Banda Aceh, Agustus 2015								
Fokus Kesejahteraan Masyarakat								
1.	**Pendidikan**							
1.1.	Angka melek huruf (%)	99,06	99,20	99,30	99,40	99,60	99,80	100.00
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah (%)	6,14	6,10	6,08	6,05	6,01	6,02	6,00
1.3.	Angka partisipasi kasar :							
1.3.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	106,48	106,48	106,48	106,48	106,48	106,48	100.00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		2012	2013*	2014*	2015	2016	2017	
1.3.2	Angka Partisipasi KAsar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	117,77	117,77	117,77	117,77	117,77	117,77	100.00
1.3.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C(%)	107,65	107,65	107,65	107,65	107,65	107,65	100.00
1.4.	Angka pendidikan yang ditamatkan :							
1.4.1	Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) SD (%)	100	100	100	100	100	100	100.00
1.4.2	Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) SMP (%)	99,40	99,60	99,70	99,80	99,10	100	100.00
1.4.3	Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) SMA (%)	99,63	99,70	99,75	99,8	99,9	100	100.00
1.5.	Angka Partisipasi Murni :							
1.5.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	114,99	114,99	114,99	114,99	114,99	114,99	95.00
1.5.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	84,29	84,35	84,40	84,50	84,80	90.00	90.00
1.5.3	Angka Partisipasi Murni (APM)] SMA/SMK/MA/Paket C (%)	72,17	74,30	76,80	78,90	80,20	83,90	85.00
2.	**Kesehatan**							
2.1.	Angka Kematian Bayi	4 /1000	3 /1000	3 /1000	2 /1000	2 /1000	1 /1000	1 /1000
2.2.	Rasio Status Gizi buruk Balita	0.02	0.011	0.01	0.008	0.006	0.005	0.005
2.3.	Rasio Jumlah Tenaga Medis per penduduk	01:03.3	01:03.2	01:03.C	01:02.8	01:02.5	1.78	1.78
2.4.	Angka kejadian kasus Penyakit menular (DBD)	0.10%	0.10%	0.09%	0.08%	0.07%	0.06%	0.06%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		2012	2013*	2014*	2015	2016	2017	
2.5.	Rasio pencatatan dan pelaporan data kesehatan yang sudah terkoneksi melalui internet.	0	14%	47%	64%	77%	100%	100%
Fokus Seni Budaya dan Olahraga								
1.	**Kebudayaan**							
1.1.	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	45	45	50	52	54	55	56
1.2.	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	1	2	2	2	2	2	2
2.	**Pemuda dan Olahraga**							
2.1.	Jumlah klub olahraga	46	46	46	46	46	46	46
2.2.	Jumlah gedung olahraga	1	1	1	1	1	1	1
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Fokus Layanan Urusan Wajib								
1.	**Pendidikan**							
1.1.	Pendidikan dasar dan Menengah :							
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah :							
1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah SD/MI(%)	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48
1.1.1.2	Angka partisipasi sekolah SMP/MTs(%)	117,77	117,77	117,77	117,77	117,77	117,77	117,77
1.1.1.3	Angka partisipasi sekolah SMA/SMK/MA(%)	107,65	107,65	107,65	107,65	107,65	107,65	107,65
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah :							
1.1.2.1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI(%)	52.17	48.47	38.58	50.91	56.56	56.56	56.56
1.1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs(%)	40.83	38.71	34.35	36.13	40.14	40.14	40.14

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		2012	2013*	2014*	2015	2016	2017	
1.1.2.3	Rasio Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah SMA/SMK	35.11	33.93	32.04	32.74	36.37	36.37	36.37
1.1.3	Rasio guru/murid							
1.1.3.1	Rasio guru/murid jenjang pendidikan dasar (SD/MI)	16	15	17	17	18	18	18
1.1.3.1	Rasio guru/murid jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs)	11	11	11	10	10	11	11
1.1.3.2	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)	10	9	9	9	10	10	10
1.1.4	Jumlah SNP yang tercapai	25%	37,50 %	37,50 %	50,00 %	50,00 %	62,50 %	62,50%
1.1.5	Peringkat Kelulusan Tk. Nasional	-	Peringkat 8	Peringkat 13	10 besar	10 besar	10 besar	10 besar
1.1.7	Prestasi di ajang Pekan Olah raga Pelajar Daerah	Juara Umum	Tidak dilaksanakan	Peringkat 2	Tidak dilaksanakan	Juara Umum	Tidak dilaksanakan	Juara Umum
2.	**Kesehatan**							
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita (%)	0.187	0.18	0.167	0.152	0.138	0.125	0.125
2.2	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	1.21 7	1.22.6	1.22.2	1.22.2	1.22.2	1.22.2	1.22.2
2.3.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	01:03 3	01:03. 2	01:03. 0	01:02. 8	01:02. 6	1.7777 8	1.77778
2.4	Jumlah Puskesmas yang sudah menerapkan e-health	0	perintisan jaringan	3	5	7	11	11
2.5	Puskesmas yang sudah bersertifikasi ISO/ akreditasi	1	2	3	4	5	6	6
2.6	Jumlah model gampong sehat	0	0	penyusunan regulasi	1	2	2	5

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		2012	2013*	2014*	2015	2016	2017	
3.	**Pekerjaan Umum**							
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	85.66	82.05	77.81	80.00	87.00	93.00	95.00
3.2.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	31.15	31.18	31.18	32.01	32.32	32.50	32.50
3.3.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (%)	1.90	1.78	1.74	1.67	1.59	1.50	1.50
3.4.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.021	0.021
3.5.	Draincase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	1.91	0.05	0.05	0.10	0.17	0.17	16.60
3.6.	Lingkungan Permukiman (%)	-	-	-	1.17	0.75	0.72	0.72
3.7.	Persentase penduduk berakses air minum (%)	79,90	83,37	83,39	84,41	85,67	86,88	86,88
3.8.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	53,67	54,76	55,84	56,04	56,87	57,70	57,70
4.	**Perumahan**							
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	-	54.29	63.29	67.01	67.94	68.25	68.25
1.2.	Rasio Rumah Tinggal berakses sanitasi	90,89 %	84,59 %	84,69 %	88%	88%	87%	87%
1.3.	Rumah layak huni (%)			84.89	85.06	85.15	85.28	85.28
5.	**Penataan Ruang**							
5.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)	11.88	12.54	13.11	13.19	13.72	14.24	14.76

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		2012	2013*	2014*	2015	2016	2017	
	wilayah yang memiliki alur pelayaran (%)							
7.9.	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (%)	100	100	100	100	100	100	100
7.10.	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (%)	100	100	100	100	100	100	100
7.11.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) pada jalan Kabupaten/Kota (%)	91	92	94	96	98	100	100
7.12.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. (%)	100	100	100	100	100	100	100
7.13.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal (%)	78	80	85	90	95	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		2012	2013*	2014*	2015	2016	2017	
5.2.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%)	66	70,75	72,03	72,07	72,29	72,52	72,52
6.	**Perencanaan Pembangunan**							
6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.4	Persentase Program RPJMD yang tertuang dalam RKPD(%)	75	78	96	86	92	96	96
7.	**Perhubungan**							
7.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum							
7.2.	Rasio ijin trayek (%)	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09
7.3.	Jumlah uji kir Mobil penumpang umum (%)	90	90	90	90	90	90	90
7.4.	Jumlah uji kir Mobil Bus (%)	80	80	80	80	80	80	80
7.5.	Jumlah uji kir Mobil Barang (%)	80	80	80	80	80	80	80
7.6.	Jumlah Pelabuhan Laut	1	-	-	-	-	-	1
7.7.	Jumlah Terminal Bis	2	-	-	-	-	-	2
7.8.	Teraedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penye berangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		2012	2013*	2014*	2015	2016	2017	
7.14.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor (%)	80	100	100	100	100	100	100
7.15.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Rambu-rambu Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	100	100	100	100
7.16.	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	100	100	100	100
7.17.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	0,01	0,01	0,01	0,6	0,8	1	1
7.18.	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota. (%)	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
7.19.	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubung-kan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota (%)	100	100	100	100	100	100	100
7.20.	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan (%)	100	100	100	100	100	100	100
7.21.	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	100	100	100	100
8.	**Lingkungan Hidup**							
8.1.	Cakupan pelayanan persampahan (persentase penduduk terlayani)	82	84	87	89	91	93	93
8.2.	Pencemaran status mutu air (%)	0	20	20	20	20	20	20
8.3.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)	3	18	34	57	74	81	81

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		2012	2013*	2014*	2015	2016	2017	
8.4.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	46.88	46.89	46.90	46.91	46.92	46.93	46.93
8.5.	Persentase pemanfaatan RTH terhadap lahan yang tersedia	11.88	12.54	13.11	13.20	13.72	14.24	14.24
8.6.	Penegakan hukum lingkungan (%)	10	10	20	20	20	20	100
8.7.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran (%)	20	4	8	12	16	20	20
8.8.	Penentuan kondisi dan status kerusakan lahan dan/atau tanah (%)	0	0	0	20	20	20	20
8.9.	Pencegahan Pencemaran udara sumber tidak bergerak (%)	50	8.33	8	33	8	33	33
8.10.	Pencemaran Tingkat Kebisingan (%)	0	17	18	21	18	18	18
8.11.	Meraih Adipura	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil
8.12.	Persentase Tempat Pemakaman Umum yang terpelihara	6.67	8.00	11.33	11.33	9.33	10.00	10.00
8.13.	Persentase penerangan jalan umum	60.43	61.74	63.05	64.35	65.66	66.96	66.96
	Pertanahan							
9.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	35.789,541	36,284,880	38,099,124	40,004,080	42.004,284	44,104,498	45,809,793
9.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	0	0	80	80	100	0	0
9.3.	Persentase penyelesaian tapal batas (pilar)	80	20	40	50	80	100	100
10.	**Kependudukan dan Catatan Sipil**							
10.1.	Rasio Cakupan Kepemilikan KTP (%)	90.00	95.00	95.00	98.00	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		2012	2013*	2014*	2015	2016	2017	
10.2.	Rasio Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (%)	80.00	82.30	84.00	87.00	89.00	90.00	90.00
11.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
11.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	4064	4029	3936	3859	3759	3659	19242
11.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	29	29.86	29.86	31	33	35	35
11.3.	Rasio KDRT (%)	9	9.15	12.14	5	5	5	9
11.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)	0.18	0.45	0.4	0.35	0.33	0.3	0.3
11.5.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	11.63	100	100	100	100	100	100
11.6.	Tercapainya 31 indikator Kota layak Anak (%)	29,03	19,35	48,39	80	100	100	100
11.7.	Persentase penanganan kasus KDRT (%)			100	100	100	100	100
11.8.	rata-rata jumlah jiwa per keluarga (%)	3.91	3.81	3.83	3.8	3.75	3.7	3.68
12.	**Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**							
12.1.	Rata rata jumlah anak per keluarga (anak/kel)	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.6	2.6
12.2.	Rasio akseptor KB (%)	65.57	67.74	68.37	59.02	69.4	69.7	69.75
12.3.	Cakupan peserta KB aktif (%)	70.41	70.41	72.31	74.41	76.51	80.41	80.41
12.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	16.65	12.3	16.34	15.75	15.3	15.01	14.8
13.	**Sosial**							
13.1.	PMKS yg memperoleh bantuan social (%)	0.83	1.33	1.91	2.21	2.32	2.5	2.5
13.2.	Penanganan penyendang masalah	24	27	30	35	40	45	45

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		2012	2013*	2014*	2015	2016	2017	
	kesejahteraan sosial							
13.3.	Meningkatnya gampong siaga bencana	-	3	0	0	4	5	5
13.4.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	12,22	24,45	48,89	61,11	73,34	73,34	73,34
20.6.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	89,47	93,02	78,65	10	10	10	10
20.7.	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Mitigasi Bencana	0	25	30	35	40	45	45
14.	**Ketenagakerjaan**							
14.1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	90	95	95	95	95	95	95
14.2.	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	22	25	30	35	40	40	40
14.3.	Keselamatan dan perlindungan (kasus)	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Jumlah Penyelesaian perselisihan buruh dengan pengusaha (%)	100	100	100	100	100	100	100
14.5.	Persentase Perusahaan yang telah menerapkan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) (%)	82	83	86	88	89	90	90
15.	**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**							
15.1.	Persentase koperasi aktif (%)	56,27	56,39	54,52	57,46	61,12	61,12	61,12
15.2.	Jumlah BPR/LKM	27	30	33	36	39	42	42
15.3.	Usaha Mikro dan Kecil	5801	250	300	400	450	500	500
15.4.	Jumlah KSP/USP	130	135	156	160	462	462	462
15.5.	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan UMKM	70	70	100	100	100	100	100
16.	**Penanaman Modal**							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		2012	2013*	2014*	2015	2016	2017	
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		7	10	17	27	42	42
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (milyar rupiah)	-	16.175	18.305	20.555	23.055	25.655	25.655
16.3.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) (%)	-	-	13.17	12.29	12.16	11.28	11.28
16.4.	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan aktif (%)	51	57	61	65	68	72	72
16.5.	Rasio daya serap tenaga kerja	-	4:01	29:01:00	29:01:00	28:01:00	25:01:00	25:01:00
17.	**Kebudayaan**							
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	10	26	23	20	25	30	30
17.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	7	8	8	8	9	10	10
17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (situs)	56	56	56	56	58	60	60
18.	**Kepemudaan dan Olahraga**							
18.1.	Jumlah organisasi pemuda	81	13	85	85	85	85	85
18.2.	Jumlah kegiatan kepemudaan	6	2	3	4	4	6	19
18.3.	Jumlah kegiatan olahraga	4	4	4	6	6	7	7
18.4.	Lapangan olahraga	12	6	5	12	12	14	50
18.5.	Peningkatan potensi pemuda melalui Pembinaan dan pelatihan pembangunan kota	30%	35%	48%	50%	50%	60%	60%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		2012	2013[4]	2014[4]	2015	2016	2017	
	Banda Aceh							
18.6.	Pembinaan kepemudaan sebagai modal utama dalam pencapaian peningkatan pembangunan	25	28	35	45	60	85	85
19.	**Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri**							
19.1.	LSM,Ormas dan OKP terdaftar	55	174	219	259	299	339	339
19.2.	Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan Ikatan Sosial	220	440	660	880	1100	1100	1100
19.3.	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman keras dan narkoba	10	20	30	45	60	60	60
19.4.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	1300	1320	1360	1380	1400	1400	1400
19.5.	Rasio Pos Siskamling per jumlah gampong	220	225	220	225	235	250	250
20.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**							
20.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6.06	6.06	7	8	9	10	10
20.2.	Penegakan PERDA (%)	71.77	75	78	80	85	90	90
20.3.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kota	953	1,087	1,212	1,335	1,500	1,750	1,750

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		2012	2013*	2014*	2015	2016	2017	
20.4.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	68.07	59.03	57.55	55	70	75	75
20.5.	Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)	23	30	54	72	83	92	92
21	**Ketahanan Pangan**							
21.1	Ketersediaan pangan utama (kg)	158.41	274.50	392,04	509,58	627,13	744.67	744.67
23.	**Statistik**							
23.1.	Buku "BANDA ACEH DALAM ANGKA"	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
23.2.	Buku "PDRB KOTA"	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
24.	**Kearsipan**							
24.1.	Pengelolaan arsip secara baku	7	10	14	18	22	26	7
24.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	0	0	10	20	30	40	10
25.	**Komunikasi dan Informatika**							
25.1.	Web site milik pemerintah daerah	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
25.2.	Pameran/expo	5	7	9	6	7	8	8
25.3.	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional :							
25.3.1	Media massa	39 kali/th	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali/thn
25.3.2	Media online (Website)	80 hari/th	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari
25.3.3	Media tradisional pertunjukan rakyat	1 kali/th	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali/thn
25.3.4	Media interpersonal	2 kali/th	12kl/thn/kec.	12kl/thn/kec.	12kl/thn/kec.	12kl/thn/kec.	12kl/thn/kec.	12kl/thn/kec.
25.3.5	Media luar ruang	12 kali/th	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali /thn	12kali/thn
25.4.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di tingkat kecamatan (%)	33	50	50	50	50	50	50

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		2012	2013*	2014*	2015	2016	2017	
25.5.	Layanan koneksi jaringan Internet dan Intranet di lingkungan Pemerintah Kota	365	365	365	365	365	365	365
25.6.	Pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan TIK	1	1	1	1	1	1	1
26.	**Perpustakaan**							
26.1.	Jumlah perpustakaan	37	38	40	44	47	52	52
26.2.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Perpustakaan Keliling Per Tahun (org)	5.061	7,311	8,562	9,811	10,100	11,500	11,500
26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	19,416	21,946	24,746	30,846	30,346	33,146	33,361
26.4.	Mengotimalkan Fungsi Perpustakaan Gamong dan Daerah	37	40	45	56	60	65	65
Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1.	**Pertanian**							
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4.4	4.6	4.8	4.9	4.9	5	5
1.2.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	2,03	2,00	1,95	1,90	1,87	1,85	1,85
1.3.	Cakupan bina kelompok petani/ternak	15	34	62	68	72	97	97
2.	**Pariwisata**							
2.1	Jumlah wisatawan domestik dan manacanegara (org)	476.233	531.708	837.729	879.615	923.596	969.776	969.776
3	**Kelautan dan Perikanan**							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		2012	2013*	2014*	2015	2016	2017	
3.1.	Produksi perikanan (%)	68	71	73	74	75	76	76
3.2.	Konsumsi ikan (ribu)	8.892	8.912	8.931	8.950	8.970	9.165	9.165
3.3.	Cakupan bina kelompok perikanan	17%	25	39	58	73	93,33	93
4.	**Perdagangan**							
4.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	22.73	23.41	24.35	25.57	27.1	28.86	28.86
4.2	Jumlah Pasar yang sudah berfungsi secara optimal (%)	91,67	91,67	84,62	84,62	100	100	100
4.3	Jumlah Pasar yang dibangun	0	0	0	0	1	0	1
5.	**Perindustrian**							
5.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	1.95	2.01	2.09	2.21	2.36	2.55	2.55
5.2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	25.62	25.62	25.62	25.62	25.62	25.62	25.62
5.3.	Pertumbuhan Industri (%)	2.2	9.3	6.5	12.1	4.1	10	10
5.4.	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	1.1	1.28	1.54	1.9	2.2	2.2	2.2
5.5	Jumlah usaha kecil menengah yang mendapatkan bantuan perbankan	14	15	16	20	50	60	60
5.6.	Jumlah IKM yang mampu melakukan pemasaran komoditi	120	125	130	150	170	180	180
5.7.	Jumlah produk yang menunjang program one village one product	7	7	7	7	9	10	10

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		2012	2013*	2014*	2015	2016	2017	
6.	**Syariat Islam**							
6.1.	Jumlah Kelompok Aliran Sesat dan Sempalan (Kelompok)	1	3	4	3	2	1	1
6.2.	Jumlah Pelanggaran Qanun Syariat Islam	386	393	195	150	125	100	100
6.3.	Kemampuan baca Al-quran siswa tingkat sekolah menengah (%)	31,20	69,92	82,99	97	97	98	98
6.4.	Prestasi MTQ di Tingkat Propinsi	-	6	-	8	-	2	Peringkat 2 Besar
6.5.	Kemampuan baca Tulis Arab Jawi siswa sekolah (%)	10,00	62,99	75,99	100	100	100	100
6.6.	Frekwensi kegiatan Syiar dan Dakwah di Masyarakat	-	270	330	305	281	281	281
6.7.	Jumlah masjid yang memenuhi standar Kebersihan dan ketertiban	45	54	63	72	81	93	93
6.8.	Penerimaan ZIS (M)	8,8	14,5	14,6	17,3	19,2	21,3	21,3
6.9.	Jumlah Muzakki (org)	8.166	8705	8851	8947	9195	9497	9497
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur								
1.	**Perhubungan**							
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (%)	4.7	4.69	4.49	4.4	4.32	4.25	4.25
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum							
1.2.1	Orang (%)	100	100	100	100	100	100	100
1.2.2	Barang (ton) (%)	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		2012	2013*	2014*	2015	2016	2017	
1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun							
1.3.1	Orang (%)	100	100	100	100	100	100	100
1.3.2	Barang (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**							
2.1	Jenis, kelas, dan jumlah restoran							
2.1.1	Restoran (%)	5	6	6	5	5	6	6
2.1.2	Rumah Makan (%)	38	37	29	29	31	31	31
2.1.3	Café (%)	57	51	65	55	64	63	63
2.2	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel							
2.2.1	Bintang 4 (%)	2	2	2	2	2	2	2
2.2.2	Bintang 3 (%)	7	6	6	6	6	6	6
2.2.3	Bintang 2 (%)	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Bintang 1 (%)	17	19	18	17	19	19	19
2.2.5	Melati 3 (%)	17	15	14	13	13	13	13
2.2.6	Melati 2 (%)	12	10	10	10	11	11	11
2.2.7	Melati 1 (%)	10	8	8	10	7	7	7
2.2.8	Penginapan (%)	36	42	41	42	43	43	43
Fokus Iklim Berinvestasi								
1.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**							
1.1.	Lama proses perijinan (hari kerja)	1 s/d 14	1 s/d 10	1 s/d 10	1 s/d 10	1 s/d 10	1 s/d 10	1 s/d 10
1.2.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah							
1.2.1	Pajak	7	8	8	8	8	8	8
1.2.2	Retribusi	18	19	19	19	19	19	19
1.3.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	17	17	17	18	19	20	20

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		2012	2013*	2014*	2015	2016	2017	
I.4.	Jumlah pelayanan perizinan	52	52	57	60	62	62	62
I.5	Jumlah jenis pelayanan yang diimplementasikan dalam SPIPISE	8	8	8	8	8	8	8
I.6.	Persentase gampong yang memiliki pendapatan asli gampong	71.2	79.1	83.6	89.8	96.6	97.9	97.9
I.7.	Persentase Penempatan Pejabat yang sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan(The right man on the right place)	60%	60	70	74	80	85	85%
I.8.	Persentase Penempatan Pejabat yang sesuai dengan Latar Belakang Diklat Penjenjangan	32%	38	49	54	59	66	66%
I.9.	Jumlah APIP yang bersertifikasi (org)	10	13	16	19	23	27	27
I.10.	Jumlah temuan hasil Pemeriksaan dan Pengawasan internal dan eksternal	2106	1268	948	652	631	600	600
I.11.	Jumlah PNS yang Indisipliner (org)	57	59	60	50	40	30	30
I.12.	Jumlah pembangunan aplikasi berbasis e-government (aplikasi)	33	29	45	73	78	83	83
I.13.	Perolehan Opini dari BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
I.14.	Persentase target PAD Kota	14	18	35	8	17	20	20

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
		2012	2013*	2014*	2015	2016	2017	
1.15.	Pemberitaan positif mengenai program pembangunan Kota Banda Aceh dimedia lokal dan nasional (cetak dan online) (berita)	7200	8640	10800	12240	12960	14400	14400
1.16.	Persentase Penyelesaian Pilar Tanda Tapal Batas	20	30	40	60	80	100	100
1.17.	Prestasi gampong ditingkat Propinsi (%)	21,11	18,27	15,25	33,82	36,05	39,66	39,6
1.18.	Jumlah regulasi yang ditetapkan	19	25	30	37	40	43	43
1.19.	Jumlah Rancangan Qanun yang disahkan menjadi Qanun (%)	12,9	21,43	75	50	66,67	75	75
1.20.	Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)	68,07	55,03	57,55	65	70	75	75

* *Angka Capaian*

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan kota yang memuat visi, misi, dan program Walikota Banda Aceh serta merupakan kesinambungan dari RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2007–2012. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah, swasta dan seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan menuju **"Banda Aceh Model Kota Madani".**

Pada dasarnya, RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 ini menjabarkan rencana strategis yang berkaitan erat dengan penetapan arah perkembangan kota lima tahun mendatang sebagai landasan untuk menentukan apa yang hendak dicapai, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang diperlukan agar tujuan tercapai sesuai dengan visi dan misi walikota terpilih.

10.1 Pedoman Transisi

Mengingat masa jabatan Walikota Banda Aceh akan berakhir pada tahun 2017 maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengantisipasi kekosongan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah diperlukan pedoman untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahun pertama di bawah kepemimpinan Walikota periode berikutnya. Oleh karena itu, RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 juga menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Kota Banda Aceh sampai dengan Tahun 2018. Dengan demikian, maka RKPK tahun 2018 merupakan RKPK masa transisi dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program walikota merupakan acuan bagi setiap kepala SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, pedoman untuk menyusun RKPD dan perencanaan penganggaran Kota Banda Aceh setiap tahunnya yang hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab.

Dalam rangka memperjelas pelaksanaan RPJMD Kota Banda Aceh, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Kota Banda Aceh 2012-2017 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Walikota Banda Aceh;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan kota, Walikota Banda Aceh dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Banda Aceh;
3. Lembaga eksekutif dan legislatif Kota Banda Aceh serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban dan diharapkan berperan serta dalam melaksanakan program-program dalam RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012–2017 dengan sebaik-baiknya;
4. Walikota Banda Aceh dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah;
5. Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017;
6. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, oleh karena itu seluruh SKPD di dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok, dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun, dengan berpedoman pada RPJMD untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta

pendanaan dan ditetapkan oleh kepala SKPD serta di sahkan oleh walikota;

7. Bagi SKPD yang baru terbentuk setelah dilakukan pembahasan dan ditetapkannya Qanun RPJMD ini, akan dilakukan penyesuaian dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
8. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam penyusunan Renstra SKPD Kota Banda Aceh;
9. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
   - Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPK oleh Bappeda, yang diikuti secara bersamaan dengan penyusunan Renja SKPD yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD;
   - Proses partisipatif perlu dilakukan untuk mendapatkan masukan terhadap penyempurnaan Rancangan Awal RKPK melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Gampong (desa), Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kota serta penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRK sesuai pembagian daerah pemilihan;
   - Rancangan Akhir RKPK disempurnakan setelah dilaksanakan Musrenbang Kota dengan mengacu kepada hasil forum SKPD;
   - Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPK Banda Aceh merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK), utamanya sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
   - Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) harus berpedoman kepada Renja SKPD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja;
10. Untuk menjamin konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Dalam hal ini, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Banda Aceh;

11. Penyusunan organisasi perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD 2012-2017 dan membagi atau memisahkan secara jelas tanggung jawab perangkat daerah antara sebagai regulator dengan sebagai operator, artinya tidak diperkenankan saat perangkat daerah mempunyai peran ganda sebagai regulator sekaligus operator karena fungsi evaluasi dan pengawasannya menjadi tumpang tindih serta dijalankan oleh SDM yang mempunyai kompetensi;
12. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berada diluar kendali Pemerintah Kota Banda Aceh dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017, maka strategi, arah kebijakan dan program yang telah dirumuskan dapat ditinjau kembali. Kemudian, hasilnya dikonsultasikan kepada DPRK Banda Aceh untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

BAB XI

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017 merupakan arahan dan pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan Aceh selama lima tahun mendatang. RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 diharapkan memberikandorongan kepada pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk merealisasikan Banda Aceh Model Kota Madani.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang RPJMD sebagai perwujudan visi dan misi walikota sangat ditentukan oleh adanya dukungan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, kerjasama yang baik antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kota Banda Aceh, komitmen dan dukungan DPRK Banda Aceh, kemitraan dengan pihak swasta, serta terjalinnya kerjasama dengan perguruan tinggi, serta dukungan seluruh masyarakat.

WALIKOTA BANDA ACEH

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL